

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH **RPJMD**

KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2014 - 2019



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BAPPEDA
Tahun 2014

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH **RPJMD**

KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2014 - 2019



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
BAPPEDA
Tahun 2014



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG :

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014 -2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lebak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lebak.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lebak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upay yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Tahun 2005–2025 dan memperhatikan RPJM Nasional.
- (2) RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

Uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari :

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB	III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB	IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB	V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB	VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB	VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB	VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB	IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB	X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB	XI	PENUTUP

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagaimana pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.

Pasal 5

- (1) RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6

Dalam menjaga konsistensi RPJMD, SKPD harus melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan Renstra-SKPD dan Renja-SKPD.

Pasal 7

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses permusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 10

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat RPJMD Tahun 2014-2019 yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini telah habis masa periodenya dan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2019-2025 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada RPJPD,RPJMD Tahun 2014-2019 serta berpedoman pada RPJMN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Juli 2014

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



DIAN EDWIN, S.H.
NIP. 19580205 198603 1013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN :
(5/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014 -2019

I. UMUM

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratif, partisipatif, politik atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), dan perencanaan tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Seiring dengan berakhirnya masa bhakti Bupati dan Wakil Bupati Lebak pada tahun 2013 dan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lebak yang baru, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berikut perubahan dan aturan pelaksanaannya, maka pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Pemerintah Kabupaten Lebak berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019.

Perda RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi dan program-program Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi. Selain itu, penyusunan Perda RPJMD tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, perumusan permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta penetapan indikator daerah.

Untuk selanjutnya, Perda RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama tahun 2014 sampai dengan 2019.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20145



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 5 TAHUN 2014
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2014-2019

DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xi
Daftar Grafik	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.2
1.3 Hubungan RPJMD Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I.7
1.4 Sistematika Penulisan	I.12
1.5 Maksud dan Tujuan	I.14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II.1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II.1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II.20
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II.52
2.1.4 Demografi	II.53
2.1.5 Pembangunan Wilayah Terpadu	II-58



2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.59
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II.59
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II.78
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II.86
A.	Fokus Layanan Urusan Wajib	II.86
B.	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II.146
2.4	Aspek Daya Saing	II.164
A.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II.164
B.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II.166
C.	Fokus Iklim Berinvestasi	II.168
D.	Fokus Sumberdaya Manusia	II.169
2.5	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II.171
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III.1
3.1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	III.1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Lebak	III.2
3.1.2	Neraca Daerah	III.9
3.1.3	Kemampuan Keuangan Daerah	III.13
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	III.15
3.2.1	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III.16
3.2.2	Proporsi Penggunaan Anggaran	III.20
3.2.3	Analisis Pembiayaan	III.21
3.3	Kerangka Pendanaan	III.24
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV.1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV.1
4.2	Isu Strategis	IV.11



BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V.1
	5.1 Visi	V.1
	5.2 Misi	V.3
	5.3 Tujuan dan Sasaran	V.6
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI.1
	6.1 Strategi	VI.2
	6.2 Arah Kebijakan	VI.3
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII.1
	7.1 Kebijakan Umum	VII.1
	7.2 Program Pembangunan	VII.12
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII.1
	8.1 Program Prioritas	VIII.1
	8.2 Kebijakan Pendanaan	VIII.8
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX.1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X.1
	10.1 Pedoman Transisi	X.1
	10.2 Kaidah Pelaksanaan	X.2
BAB XI	PENUTUP	XI.1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2013	II.2
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II.5
Tabel 2.3	Kelerengan Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II.6
Tabel 2.4	Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II.8
Tabel 2.5	Hidrogeologi Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II.12
Tabel 2.6	Curah Hujan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II.14
Tabel 2.7	Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034	II.15
Tabel 2.8	Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II.19
Tabel 2.9	Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan Di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034	II.29
Tabel 2.10	Rencana Kawasan Pertambangan di Kabupaten Lebak	II.33
Tabel 2.11	Rencana Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034	II.35
Tabel 2.12	Sebaran Obyek Wisata di Kabupaten Lebak	II.36
Tabel 2.13	Rencana Peruntukan Permukiman di Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034	II.38
Tabel 2.14	Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034	II.40
Tabel 2.15	Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan	II.52



Tabel 2.16	Disribusi Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II.55
Tabel 2.17	Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013	II.56
Tabel 2.18	Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lebak Tahun 2008-2013	II.62
Tabel 2.19	Nilai PDRB Tahun 2008-2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Lebak Berdasarkan Sektor Ekonomi	II.64
Tabel 2.20	Nilai PDRB Tahun 2008-2013 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lebak	II.65
Tabel 2.21	Perkembangan Kontribusi Sektor pada PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2008-2013	II.66
Tabel 2.22	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 dan ADHB Kabupaten Lebak Tahun 2008-2013	II.67
Tabel 2.23	Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Lebak Tahun 2008-2011	II.74
Tabel 2.24	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Provinsi Banten Tahun 2011-2013	II.76
Tabel 2.25	Estimasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per-Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2013	II.77
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lebak Tahun 2008-2013	II.79
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Lebak Tahun 2010-2012	II.82
Tabel 2.28	Perbandingan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi Banten Tahun 2012	II.83
Tabel 2.29	Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II.85



Tabel 2.30	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II.86
Tabel 2.31	Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar ...	II.87
Tabel 2.32	Distribusi Kondisi Ruang Kelas Menurut Jenis Pendidikan	II.87
Tabel 2.33	Ketersediaan Ruang Perpustakaan	II.88
Tabel 2.34	Jumlah Sekolah SMP, SMA/SMK di Kabupaten Lebak Sampai Dengan Tahun 2013	II.89
Tabel 2.35	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II.93
Tabel 2.36	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2013 di Kabupaten Lebak	II.96
Tabel 2.37	Jumlah dan Lokasi Daerah Irigasi di Kabupaten Lebak Sampai Dengan Tahun 2013	II.98
Tabel 2.38	Persentase Volume Sampah per Tahun yang Tertangani di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014.....	II.105
Tabel 2.39	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014	II.105
Tabel 2.40	Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Berdasarkan Wajib KTP Tahun 2013	II.107
Tabel 2.41	Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Berdasarkan Kepala Keluarga (KK) Tahun 2013	II.108
Tabel 2.42	Data Pekayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2009-2013	II.109
Tabel 2.43	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK-P) Kabupaten Lebak Tahun 2010-2013	II.111
Tabel 2.44	Rata-rata Jumlah Anak dan Rata-rata Jumlah Jiwa Per Keluarga Tahun 2009-2013	II.112
Tabel 2.45	Rasio Akseptor KB Tahun 2009-2014	II.112



Tabel 2.46	Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Lebak Tahun 2010-2014	II.113
Tabel 2.47	Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lebak s/d Tahun 2013	II.114
Tabel 2.48	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013	II.115
Tabel 2.49	Jumlah Penduduk Usia Kerja 15 Tahun Keatas Berdasarkan Jenis Kegiatan di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II.116
Tabel 2.50	Perkembangan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013	II.120
Tabel 2.51	Persentase Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2011-2013	II.121
Tabel 2.52	Perkembangan Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II.122
Tabel 2.53	Jumlah Upah Minimum Kabupaten Lebak	II.123
Tabel 2.54	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Peserta Jamsostek	II.124
Tabel 2.55	Jumlah Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) di Kabupaten Lebak	II.124
Tabel 2.56	Kasus Perselisihan Industrial (PHI) di Kabupaten Lebak	II.125
Tabel 2.57	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014	II.126
Tabel 2.58	Data Usaha Mikro dan Menengah Berdasarkan Kriteria Usaha Tahun 2011-2014	II.126
Tabel 2.59	Data UMKM per-Kecamatan di Kabupaten Lebak Sampai Dengan Tahun 2014 Berdasarkan Klasifikasi	II.127



Tabel 2.60	Perkembangan Investasi PMA-PMDN di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II.128
Tabel 2.61	Jenis Kesenian di Kabupaten Lebak	II.130
Tabel 2.62	Komunitas Adat di Kabupaten Lebak	II.131
Tabel 2.63	Pelaku Seni di Kabupaten Lebak	II.132
Tabel 2.64	Perkembangan Angka Kriminalitas Paling Tinggi di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2012	II.134
Tabel 2.65	Rasio Ketersediaan Beras Kabupaten Lebak Tahun 2010-2012	II.140
Tabel 2.66	Perkembangan Produksi Komoditas Buah-buahan di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013 (dalam kwintal)	II.147
Tabel 2.67	Perkembangan Produksi Komoditas Sayuran di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013 (dalam kwintal)	II.148
Tabel 2.68	Perkembangan Produksi Komoditas Biofarmaka di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013 (dalam kwintal)	II.149
Tabel 2.69	Luas Hutan/Tutupan Hutan di Kabupaten Lebak...	II.152
Tabel 2.70	Luas Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2009-2014...	II.155
Tabel 2.71	Luas Lahan Kritis Tahun 2013 Berdasarkan Klasifikasinya	II.155
Tabel 2.72	Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat Tahun 2014	II.157
Tabel 2.73	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014	II.158
Tabel 2.74	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014	II.161
Tabel 2.75	Jenis dan Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014	II.162



Tabel 2.76	Komposisi Penempatan Transmigrasi Lokal Asal Kabupaten Lebak Sampai Dengan Tahun 2013	II.164
Tabel 2.77	Kondisi Jalan di Kabupaten Lebak Tahun 2014	II.166
Tabel 2.78	Jumlah Penduduk dan Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Rasio</i>) Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lebak Tahun 2013	II.171
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	III.4
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	III.5
Tabel 3.3	Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	III.14
Tabel 3.4	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	III.21
Tabel 3.5	Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	III.22
Tabel 3.6	Proporsi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	III.23
Tabel 3.7	Proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019	III.25
Tabel 3.8	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019	III.28
Tabel 3.9	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019	III.30
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019	V.9
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI.8



Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan	VII.22
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 Untuk Dana Prioritas I (Program Pembangunan Daerah)	VIII.10
Tabel 8.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 Untuk Dana Prioritas II (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Lainnya)	VIII.18
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019	VIII.2
Tabel 9.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019	VIII.4





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah	I.9
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD Kabupaten Lebak dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I.9
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Lebak	II.3
Gambar 2.2	Peta Kondisi Topografi Kabupaten Lebak	II.5
Gambar 2.3	Peta Kondisi Kelerengan di Kabupaten Lebak	II.7
Gambar 2.4	Peta Morfologi Kabupaten Lebak	II.9
Gambar 2.5	Peta DAS Kabupaten Lebak	II.11
Gambar 2.6	Peta Hidrogeologi Kabupaten Lebak	II.13
Gambar 2.7	Peta Curah Hujan di Kabupaten Lebak	II.15
Gambar 2.8	Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034	II.17
Gambar 2.9	Peta Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034	II.18
Gambar 2.10	Peta Rencana Kawasan Hutan Lindung	II.20
Gambar 2.11	Peta Rencana Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya	II.22
Gambar 2.12	Peta Rencana Perlindungan Setempat	II.23
Gambar 2.13	Peta Rencana Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	II.24
Gambar 2.14	Peta Rencana Kawasan Lindung Rawan Bencana Alam	II.25
Gambar 2.15	Peta Rencana Lindung Geologi	II.26
Gambar 2.16	Peta Kawasan Hutan Produksi	II.27
Gambar 2.17	Peta Kawasan Perkebunan	II.28
Gambar 2.18	Peta Rencana Kawasan Pertanian Pangan	II.30
Gambar 2.19	Peta Rencana Kawasan Perikanan	II.31
Gambar 2.20	Peta Rencana Kawasan Pertambangan	II.33



Gambar 2.21	Peta Rencana Kawasan Pariwisata	II.37
Gambar 2.22	Peta Rencana Kawasan Pariwisata	II.38
Gambar 2.23	Peta Rawan Bencana Kabupaten Lebak	II.53
Gambar 2.24	Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak	II.57
Gambar 3.1	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	III.6
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	III.7
Gambar 6.1	Relasi Hierarkis antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Program dan Kegiatan	VI.1
Gambar 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2018	VI.7





DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 untuk Kawasan Lindung	II.16
Grafik 2.2	Persentase Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 untuk Kawasan Budidaya	II.17
Grafik 2.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II.54
Grafik 2.4	Pirmida Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2013.	II.58
Grafik 2.5	Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2008-2013	II.60
Grafik 2.6	Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2000 Tahun 2008-2013	II.61
Grafik 2.7	Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Konstan Tahun 2000 Tahun 2008-2013 (Dalam Jutaan Rupiah)	II.63
Grafik 2.8	Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2013(Dalam Jutaan Rupiah)	II.65
Grafik 2.9	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013 (Dalam Ribuan Rupiah)	II.68
Grafik 2.10	PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2008-2013	II.69
Grafik 2.11	Perbandingan Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Kabupaten Tahun 2011-2013	II.70
Grafik 2.12	Persentase Penduduk yang Berada Di Bawah Garis Kemiskinan (<i>Head Count Index</i>) Tahun 2013	II-71
Grafik 2.13	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II-72
Grafik 2.14	Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Tahun 2009-2013	II.72



Grafik 2.15	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2013	II.73
Grafik 2.16	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2013	II.74
Grafik 2.17	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II.76
Grafik 2.18	Perkembangan APK dan APM SD/MI Kabupaten Lebak Tahun 2008-2013	II.80
Grafik 2.19	Perkembangan APK dan APM SMP/MTs Kabupaten Lebak Tahun 2008-2013	II.81
Grafik 2.20	Perkembangan APK dan APM SMA/MA Kabupaten Lebak Tahun 2008-2013	II.81
Grafik 2.21	Perkembangan APK PAUD Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013	II.82
Grafik 2.22	Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II.84
Grafik 2.23	Jumlah Balita Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2012	II.85
Grafik 2.24	Rasio Guru dan Murid Kabupaten Lebak Tahun 2012-2013	II.90
Grafik 2.25	Jumlah Guru per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lebak Tahun 2013	II.91
Grafik 2.26	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Lebak Tahun 2013	II.92
Grafik 2.27	Angka Mengulang di Kabupaten Lebak Tahun 2013	II.92
Grafik 2.28	Angka Kelulusan di Kabupaten Lebak Tahun 2013	II.93
Grafik 2.29	Cakupan UCI di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II.94



Grafik 2.30	Perbandingan Persentase Rumahtangga yang Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2010-2012	II.100
Grafik 2.31	Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Lebak Tahun 2010-2012	II.101
Grafik 2.32	Perkembangan Jumlah Ijin Trayek Angkutan Umum Tahun 2009-2014	II.103
Grafik 2.33	Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang Telah Diawasi Tahun 2009-2014	II.104
Grafik 2.34	Persentase Rumah Tangga Menempati Rumah dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2010-2012	II.106
Grafik 2.35	Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Lebak Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Agustus 2013	II.117
Grafik 2.36	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lebak Periode Agustus 2009-Agustus 2013	II.118
Grafik 2.37	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lebak Periode Agustus 2009-Agustus 2013	II.118
Grafik 2.38	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lebak Periode Agustus 2009-Agustus 2013	II.119
Grafik 2.39	Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2012 ...	II.129
Grafik 2.40	Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Utama Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013 (dalam ton)...	II.139
Grafik 2.41	Produksi Pangan Hewani di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013 (dalam kilogram)	II.141



Grafik 2.42	Produksi Daging Ayam dan Produksi Telur Tahun 2009-2013	II.141
Grafik 2.43	Kondisi Kantor Desa Sampai Dengan Tahun 2013	II.143
Grafik 2.44	Jumlah Posyandu di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014	II.144
Grafik 2.45	Jumlah Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Lebak Tahun 2010-2013	II.145
Grafik 2.46	Perkembangan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013 (dalam ton/ha)	II.146
Grafik 2.47	Perkembangan Produksi Sub Sektor Pertanian Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	II.149
Grafik 2.48	Populasi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013 (dalam ekor)	II.151
Grafik 2.49	Perkembangan Produksi Kayu di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (dalam m ³)	II.153
Grafik 2.50	Produksi Komoditas Hasil Hutan Non Kayu di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (dalam kg).....	II.156
Grafik 2.51	Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Tahun 2009-2014	II.159
Grafik 2.52	Produksi Ikan Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (dalam kilogram)	II.160
Grafik 2.53	Perkembangan Konsumsi Ikan di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (dalam kg/kapita/tahun)	II.161
Grafik 2.54	Kondisi Sarana Jembatan di Kabupaten Lebak Tahun 2012	II.168
Grafik 2.55	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten Lebak Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2013	II.169



Grafik 2.56	Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Menurut Kelompok Umur Tahun 2013	II.170
Grafik 3.3	Perkembangan Nilai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	III.10
Grafik 3.4	Perkembangan Nilai Kewajiban Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	III.11
Grafik 3.5	Perkembangan Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013	III.12





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah (RPJM), dan perencanaan tahunan (RKP). Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Seiring dengan berakhirnya masa bakti Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2013, dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan dan aturan pelaksanaannya, maka pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Pemerintah Kabupaten Lebak berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019.



RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi dan program-program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi. Selain itu, penyusunan RPJMD tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, perumusan permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta penetapan indikator kinerja daerah.

Untuk selanjutnya, RPJMD Kabupaten Lebak tahun 2014-2019 ini akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama tahun 2014 sampai dengan 2019.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
26. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
27. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;



28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025;
29. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak;
33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
36. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017;



37. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak.

1.3. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Lebak dalam menjalankan agenda pembangunan yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maka RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Selain memperhatikan dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 juga memperhatikan : (1) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (2) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI); (3) Rencana Aksi Daerah (RAD) *Millenium Development Goals* (MDGs) Tahun 2011-2015; (4) RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya; dan (5) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap terhadap dokumen perencanaan

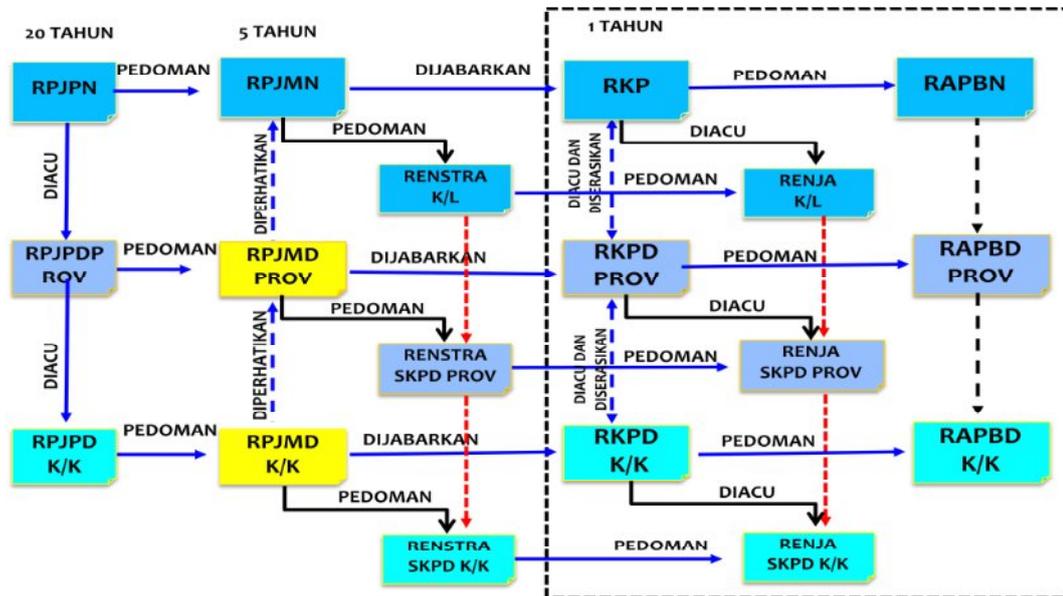


lainnya sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Adapun hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

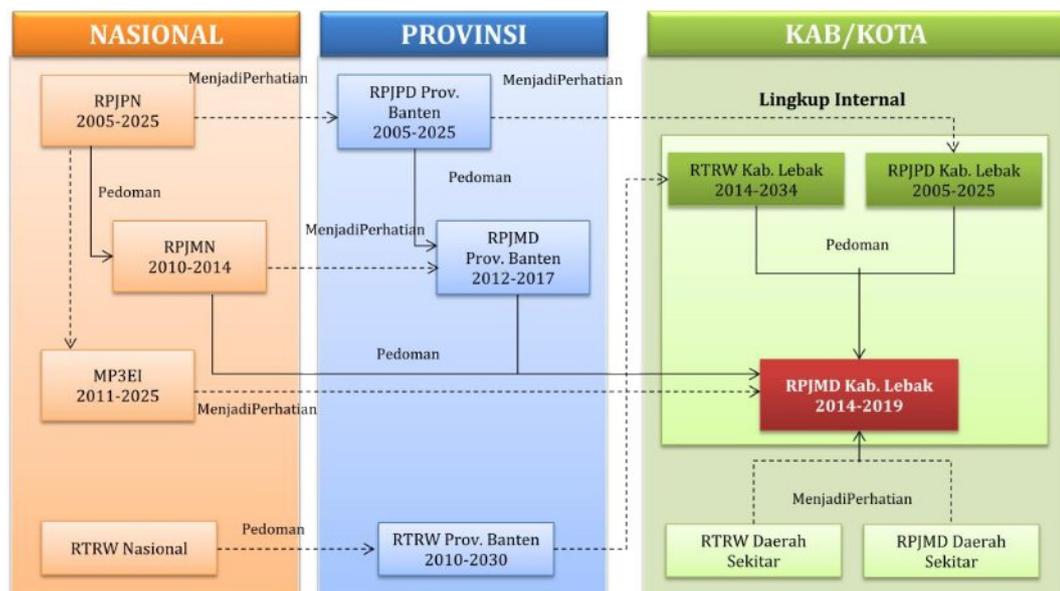


Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



Skema hubungan antara RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 dengan dokumen lainnya dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD Kabupaten Lebak dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1) RPJMD dan RPJPD Kabupaten Lebak

RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019, merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Oleh karenanya, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2014-2019, harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lebak.

Visi RPJPD Kabupaten Lebak 2005-2025 adalah **LEBAK MENJADI DAERAH YANG MAJU DAN RELIGIUS BERBASIS PERDESAAN**. Visi ini ditempuh melalui Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Lebak yang Beriman, Bertakwa, dan Berbudaya;
2. Mewujudkan Daya Saing Investasi Berbasis Sumber Daya;
3. Memajukan Tingkat Kemakmuran dan Produktivitas Masyarakat Secara Merata;
4. Mewujudkan Lebak Sebagai Daerah Konservasi Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup;
5. Mengembangkan potensi sumberdaya daerah untuk mengurangi disparitas.

Pada tahap ketiga RPJMD Kabupaten Lebak yang dimuat dalam RPJPD Kabupaten Lebak, fokus pembangunan diarahkan pada tahap pertumbuhan investasi berbasis sumberdaya alam dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (*growth through human development*). Hal tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan di Kabupaten



Lebak yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Lebak 2005-2025.

2) RPJMD dan RTRW Kabupaten Lebak

Selain berpedoman pada RPJPD, Penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan pada rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 sesuai amanat Permendagri Nomor 54 tahun 2010 (pasal 54).

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan diperlukan perencanaan daerah yang dapat menyelaraskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Oleh karenanya, keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan tata ruang mutlak diperlukan.

3) RPJMD dan Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap bidang urusan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik



4) RPJMD dan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Lebak serta potensi pengembangan wilayah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.



BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang menggambarkan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasaran.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi pembangunan Kabupaten Lebak.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta program pembangunan daerah yang akan direncanakan dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Lebak.



BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD, serta pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah Kabupaten Lebak dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini memuat pedoman transisi dan implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta kaidah pelaksanaannya.

BAB XI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2019 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025. Selain itu dokumen RPJMD Kabupaten Lebak merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah



yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang secara berjenjang.

1.5.2. Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 adalah :

1. RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2. RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
4. RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD).
5. RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 merupakan instrument pengendalian bagi pengawasan dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan.
6. RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 merupakan instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) Tahun.
7. RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi.
8. RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Lebak terletak di antara 6°18' - 7°00' Lintang Selatan dan 105°25' - 106°30' Bujur Timur. Dengan bentang alam yang cukup luas tersebut Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah mencapai 330.507,16 hektar atau sekitar 3.305,07 km². Luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34,20% dari luas Provinsi Banten.

Kabupaten Lebak terletak di bagian Selatan Provinsi Banten, yang bersebelahan dengan Kabupaten Pandeglang di batas bagian Baratnya. Bentuk wilayah yang membujur dari Utara ke Selatan, menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan sebagian dengan Kabupaten Tangerang di batas bagian Utaranya. Di bagian Timurnya berbatasan dengan dua kabupaten paling barat Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sementara pada bagian Selatannya, Kabupaten Lebak terkoneksi langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut sekitar 73,3 km² dengan panjang pantai mencapai 91,42 km.

Secara administratif Kabupaten Lebak dibagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Cibeber merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 40.096,41 Ha atau sekitar 12,13% dari luas wilayah Kabupaten Lebak. Cibeber juga merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 22 desa. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Kalanganyar yang hanya sekitar 0,87% dari luas wilayah



Kabupaten Lebak, atau sekitar 2.859,34 Ha. Kalanganyar juga termasuk kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit (7 desa), setelah Kecamatan Lebakgedong.

Tabel 2.1 memberikan gambaran tentang rincian jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2013

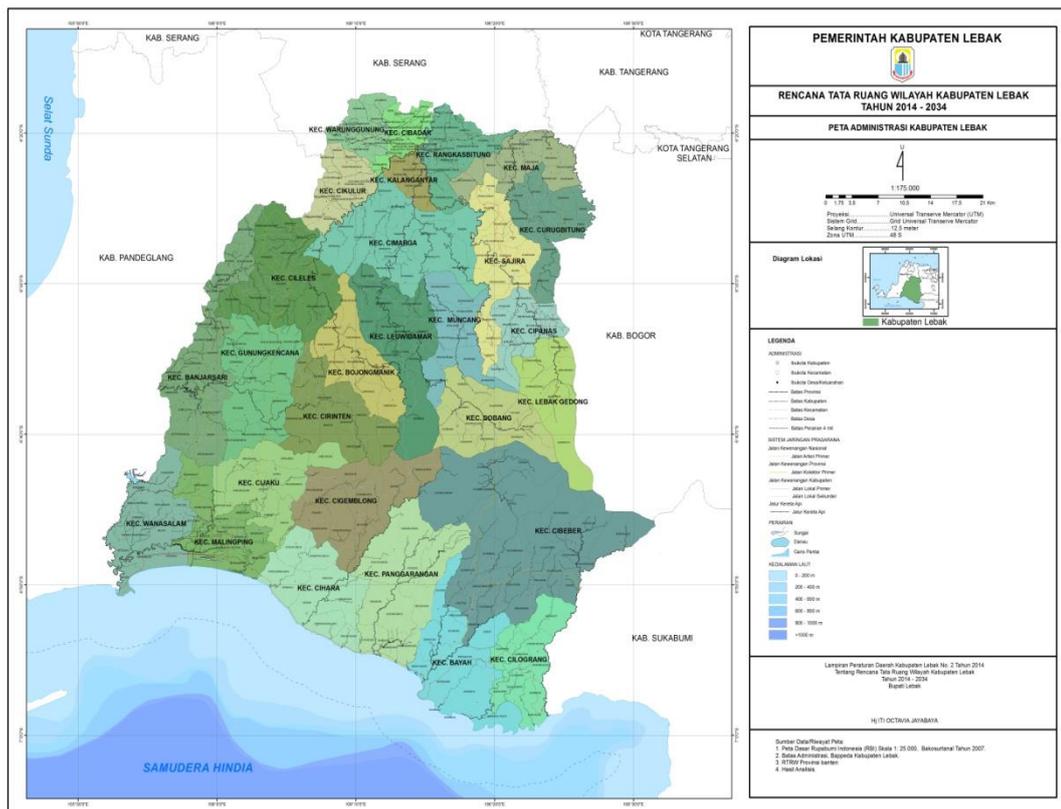
No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Malingping	14	10.201,47	3,09
2	Wanasalam	13	11.419,02	3,45
3	Panggarangan	11	17.715,51	5,36
4	Bayah	11	14.377,21	4,35
5	Cilograng	10	9.601,71	2,91
6	Cibeber	22	40.096,41	12,13
7	Cijaku	10	11.468,42	3,47
8	Banjarsari	20	15.955,50	4,83
9	Cileles	12	15.338,76	4,64
10	Gunungkencana	12	13.801,50	4,18
11	Bojongmanik	9	9.591,83	2,90
12	Leuwidamar	12	14.305,09	4,33
13	Muncang	12	8.695,38	2,63
14	Sobang	10	11.149,34	3,37
15	Cipanas	14	6.525,30	1,97
16	Sajira	15	10.466,64	3,17
17	Cimarga	17	18.752,65	5,67
18	Cikulur	13	6.182,97	1,87
19	Warunggunung	12	4.736,53	1,43
20	Cibadak	15	3.632,71	1,10
21	Rangkasbitung	16	7.309,70	2,21
22	Maja	14	7.817,14	2,37
23	Curugbitung	10	9.317,33	2,82
24	Cihara	9	12.469,86	3,77
25	Cigemblong	9	15.304,93	4,63
26	Cirinten	10	12.254,92	3,71
27	Lebakgedong	6	9.159,98	2,77
28	Kalanganyar	7	2.859,34	0,87



No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
	Kabupaten Lebak	345	330.507,16	100

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

B. Kondisi Topografi

Secara topografi, keadaan Kabupaten Lebak cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan, dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter meliputi 16 % dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter sekitar 4% dari luas keseluruhan Kabupaten Lebak.



Ketinggian wilayah di Kabupaten Lebak dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelas ketinggian, yaitu :

1. Ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan air laut, tersebar di Kecamatan Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibadak, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cikulur, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Curugbitung, Gunungkencana, Kalanganyar, Lebakgedong, Malingping, Muncang, Panggarangan, Rangkasbitung, Maja, Wanasalam, Warunggunung, dan Kalanganyar.
2. Ketinggian antara 500-1.000 meter diatas permukaan air laut, tersebar di sebagian Kecamatan Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cigemblong, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cipanas, Cirinten, Gunungkencana, Lebakgedong, Leuwidamar, Panggarangan, Muncang, Sajira dan Sobang.
3. Ketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan air laut, tersebar di sebagian kecil Kecamatan Cibeber, Cipanas, Lebakgedong, Muncang dan Sobang.

Keadaan topografi Kabupaten Lebak berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

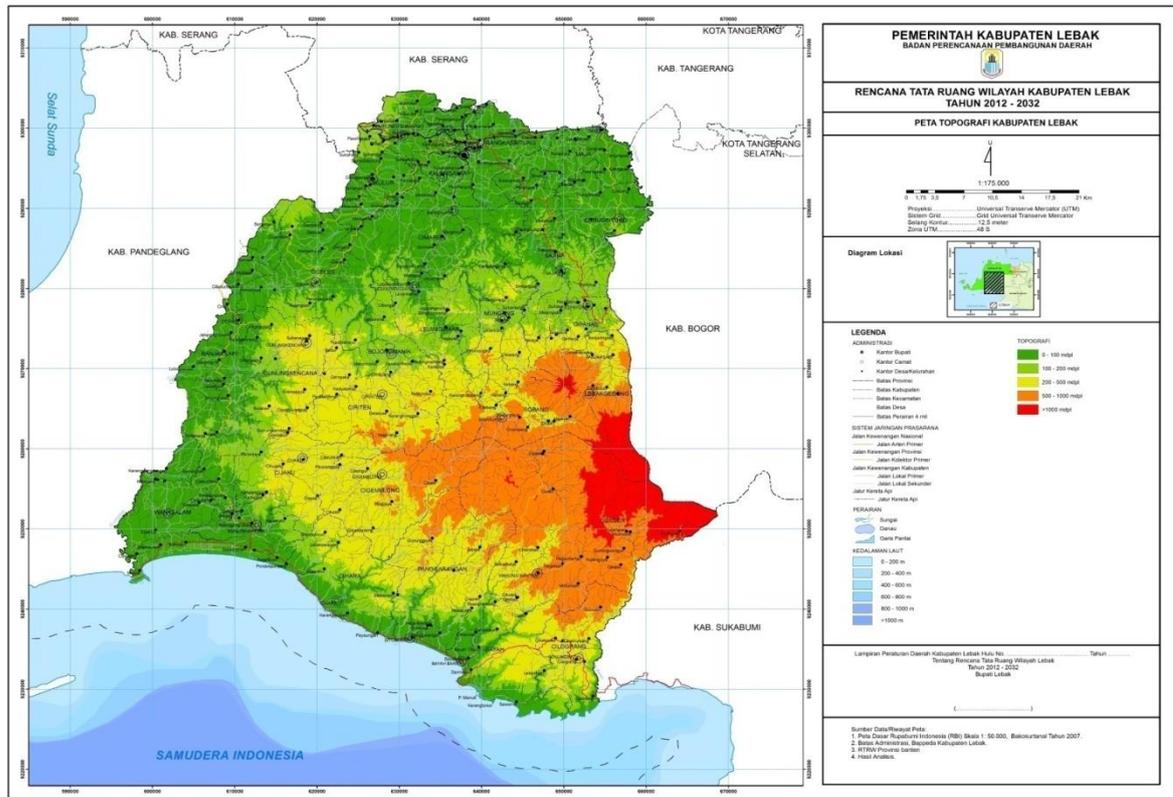
No.	Kecamatan	Topografi (Ketinggian Wilayah) (mdpl)					Luas (Ha)
		0-100	100-200	200-500	500-1000	>1000	
1.	Malingping	8.447,82	1.636,43	117,22			10.201,47
2.	Wanasalam	11.408,40	10,62				11.419,02
3.	Panggarangan	2.934,25	1.780,78	9.833,92	3.166,57		17.715,51
4.	Bayah	5.117,26	3.505,48	5.415,04	339,43		14.377,21
8.	Banjarsari	13.803,26	2.152,24				15.955,50
11.	Bojongmanik	552,81	5.194,13	3.720,09	124,81		9.591,83
20.	Cibadak	3.632,71					3.632,71
6.	Cibeber	16,30	249,71	4.926,78	26.021,80	8.881,82	40.096,41
25.	Cigemblong		87,54	9.973,54	5.243,85		15.304,93
24.	Cihara	4.319,76	3.941,22	4.208,88			12.469,86
7.	Cijaku	406,48	2.776,55	8.178,88	106,50		11.468,42



No.	Kecamatan	Topografi (Ketinggian Wilayah) (mdpl)					Luas (Ha)
		0-100	100-200	200-500	500-1000	>1000	
18.	Cikulus	5.575,09	607,88				6.182,97
9.	Cileles	10.701,09	4.531,52	105,83	0,32		15.338,76
5.	Cilograng	701,11	1.498,86	5.156,48	2.245,27		9.601,72
17.	Cimarga	15.794,41	2.786,21	172,03			18.752,65
15.	Cipanas	41,18	3.827,86	1.691,63	909,00	55,64	6.525,30
26.	Cirinten		403,06	10.512,94	1.338,96		12.254,96
23.	Curugbitung	7.141,83	2.167,20	8,30			9.317,33
10.	Gunungkencana	1.810,40	4.980,38	7.008,88	1,85		13.801,50
28.	Kalanganyar	2.859,34					2.859,34
27.	Lebakgedong		126,46	2.761,35	3.579,16	2.693,02	9.159,98
12.	Leuwidamar	2.199,13	6.384,99	4.165,87	1.555,10		14.305,09
22.	Maja	7.817,14					7.817,14
13.	Muncang	384,54	3.664,69	4.078,26	509,87	58,02	8.695,38
21.	Rangkasbitung	7.309,67	0,004				7.309,71
16.	Sajira	5.379,68	4.049,49	1.020,92	16,55		10.466,64
14.	Sobang			3.730,04	6.731,65	687,65	11.149,34
19.	Warunggunung	3.048,09	1.688,44				4.736,53
	Jumlah	121.401,73	58.051,76	86.786,85	51.890,69	12.376,14	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.2
Peta Kondisi Topografi Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



Kabupaten Lebak berdasarkan lerengnya terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu :

1. 0 - 2%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara Kabupaten Lebak,
2. 2 - 5%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara Kabupaten Lebak,
3. 5 - 15%, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur kabupaten Lebak,
4. 15 - 25%, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur kabupaten Lebak,
5. 25 - 40%, terletak di bagian timur kabupaten Lebak,
6. >40%, terletak di bagian timur kabupaten Lebak.

Tabel 2.3
Kelerengn Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

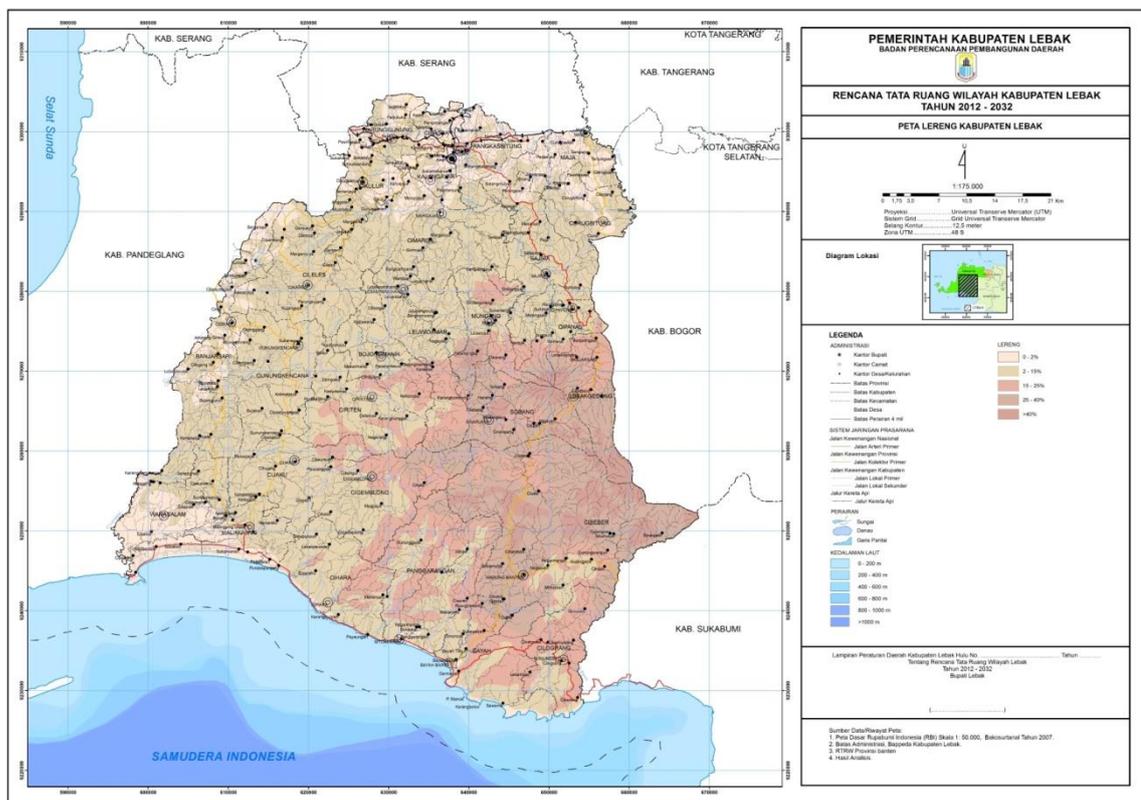
No.	Kecamatan	Lereng (Kemiringan Lahan)					Total
		0-2%	2-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1	Malingping	3.501,62	6.699,84				10.201,47
2	Wanasalam	7.933,32	3.485,70				11.419,02
3	Panggarangan	604,33	7.677,02	8.320,45	1.075,05	38,67	17.715,51
4	Bayah	996,36	5.453,14	6.415,99	1.511,72		14.377,21
5	Cilograng	177,61	2.693,58	6.034,87	695,66		9.601,72
6	Cibeber		2.672,42	6.235,67	23.887,95	7.300,37	40.096,41
7	Cijaku		10.382,92	1.085,49			11.468,42
8	Banjarsari	5.625,57	10.329,93				15.955,50
9	Cileles	1.168,34	14.170,41				15.338,76
10	Gunungkencana	144,93	13.656,57				13.801,50
11	Bojongmanik		7.464,43	2.127,41			9.591,83
12	Leuwidamar		9.989,00	3.378,52	921,99	15,59	14.305,09
13	Muncang		3.709,38	2.795,32	1.453,04	737,64	8.695,38
14	Sobang			1.852,88	7.452,98	1.843,48	11.149,34
15	Cipanas		4.703,95	1.065,33	509,94	246,08	6.525,30
16	Sajira	637,24	9.229,80	599,60			10.466,64
17	Cimarga	1.686,40	16.663,10	403,15			18.752,65
18	Cikulur	2.351,74	3.831,23				6.182,97
19	Warunggunung	2.994,66	1.741,87				4.736,53
20	Cibadak	3.134,19	498,53				3.632,71
21	Rangkasbitung	4.573,24	2.736,47				7.309,71
22	Maja	5.199,86	2.617,28				7.817,14
23	Curugbitung	1.892,77	7.424,56				9.317,33



No.	Kecamatan	Lereng (Kemiringan Lahan)					Total
		0-2%	2-15%	15-25%	25-40%	>40%	
24	Cihara	689,76	9.256,39	2.523,71			12.469,86
25	Cigemblong		7.416,31	5.511,57	2.377,06		15.304,93
26	Cirinten		9.237,10	2.907,03	110,83		12.254,96
27	Lebakgedong		56,69	3.510,67	3.614,18	1.978,43	9.159,98
28	Kalanganyar	1.817,11	1.042,23				2.859,34
	Jumlah	45.129,04	174.839,83	54.767,64	43.610,41	12.160,25	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.3
Peta Kondisi Kelerengan di Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

C. Kondisi Morfologi

Morfologi Kabupaten Lebak dapat dibagi menjadi dataran, perbukitan (landai, bergelombang, terjal) dan gunung/pegunungan.



1. Dataran, tersebar di bagian, utara, barat dan selatan Kabupaten Lebak,
2. Perbukitan landai, tersebar di bagian selatan dan utara kearah timur Kabupaten Lebak,
3. Perbukitan bergelombang, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur Kabupaten Lebak,
4. Perbukitan terjal, terletak di bagian tengah kearah timur Kabupaten Lebak
5. Gunung/Pegunungan, 40%, terletak di bagian timur kabupaten Lebak.

Tabel 2.4
Morfologi Wilayah Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

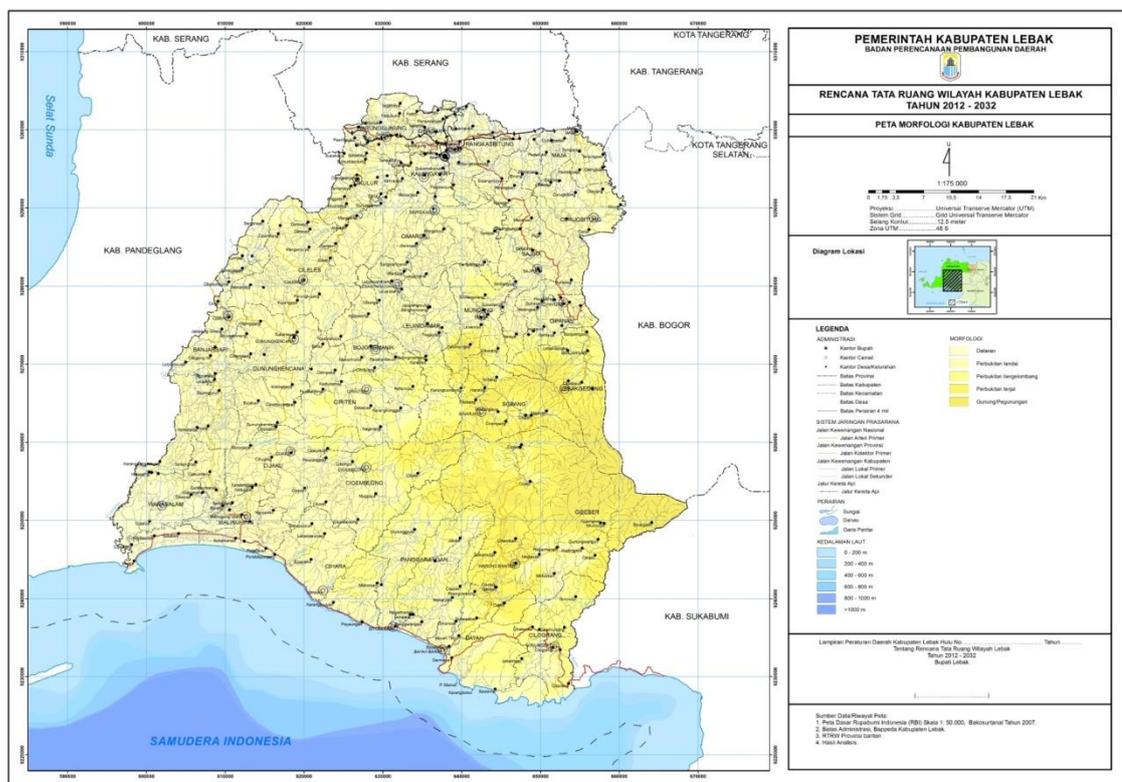
No.	Kecamatan	Morfologi					Total
		Dataran	Perbukitan Landai	Perbukitan Bergelombang	Perbukitan Terjal	Gunung / Pegunungan	
1	Malingping	8.701,25	1.500,22				10.201,47
2	Wanasalam	11.419,02					11.419,02
3	Panggarangan	1.679,7	6.603,64	8.676,97	685,80	69,40	17.715,51
4	Bayah	2.476,88	4.080,35	6.327,09	1.492,89		14.377,21
5	Cilograng	287,05	2.491,95	6.115,35	554,53	152,83	9.601,71
6	Cibeber		6.672,81	6.937,13	23.146,62	3.339,85	40.096,41
7	Cijaku	6.529	3.864,06	1.075,36			11.468,42
8	Banjarsari	12.991,70	2.963,80				15.955,50
9	Cileles	9.654,26	5.684,50				15.338,76
10	Gunungkencana	5.959,78	7.711,72	130,00			13.801,50
11	Bojongmanik	919,7	8.672,13	2.129,68			9.591,83
12	Leuwidamar	2.191,89	7.808,94	4.113,38	141,60	49,28	14.305,09
13	Muncang	1.443,60	3.001,81	1.965,70	1.484,24	800,03	8.695,38
14	Sobang		533,74	2.559,46	6.749,82	1.306,32	11.149,34
15	Cipanas	1.958,40	3.171,84	1.316,37	78,69		6.525,30
16	Sajira	6.661,87	3.252,66	547,99	4,12		10.466,64
17	Cimarga	12.204,30	6.303,76	144,55	100,04		18.752,65
18	Cikukur	5.348,01	834,96				6.182,97
19	Warunggunung	4.548,36	188,17				4.736,53
20	Cibadak	3.632,71					3.632,71
21	Rangkasbitung	6.870,18	439,53				7.309,70
22	Maja	7.806,53	10,61				7.817,14
23	Curugbitung	8.501,69	815,64				9.317,33
24	Cihara	4.109,21	6.139,71	2.220,94			12.469,86
25	Cigemblong	1.402,49	6.135,77	7.405,49	361,18		15.304,93
26	Cirinten	1.873,62	7.331,17	3.050,16			12.254,95



No.	Kecamatan	Morfologi					Total
		Dataran	Perbukitan Landai	Perbukitan Bergelombang	Perbukitan Terjal	Gunung / Pegunungan	
27	Lebakgedong		755,61	3.565,86	4.494,47	344,04	9.159,98
28	Kalanganyar	2.838,78	20,56				2.859,34
	Jumlah	132.009,98	96.989,65	56.151,80	39.294,00	6.061,75	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.4
Peta Morfologi Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

D. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi, Kabupaten Lebak memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut; serta DAS Ciliman - Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur,

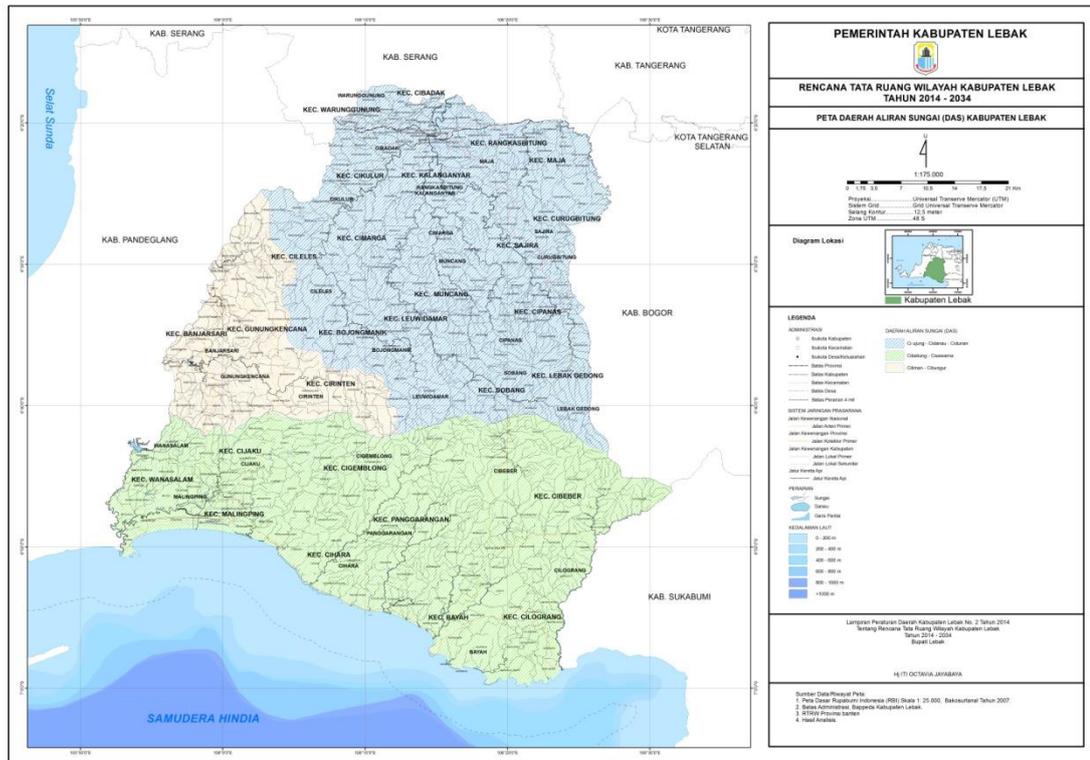


Sungai Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung.

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di Provinsi Banten, yang melewati 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Mata air Sungai Ciujung sangat dilindungi oleh Masyarakat Adat Kanekes karena berada di kawasan hutan Sasaka Buana atau Pada Ageung di bagian selatan kampung Cikeusik dan hutan sakral Sasaka Domas di kawasan hulu Sungai Ciparahiang anak Sungai Ciujung, bagian selatan Kampung Cibeo, Baduy dalam. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Ciujung mencapai kurang lebih 1850 km² dan panjang mencapai 142 km hingga bermuara di Teluk Pontang Kabupaten Serang, Pantai Utara Laut Jawa. DAS Ciujung terdiri dari tiga anak sungai utama yaitu: Sungai Cisimeut dengan luas Sub DAS mencapai 458 km², Sungai Ciberang dengan luas Sub DAS 304 km², Sungai Ciujung Hulu dengan luas Sub DAS 594 km² dan anak sungai lainnya yang lebih kecil berada disebelah hilir kota Rangkasbitung yaitu Sungai Cikambuy, Sungai Cisangu, Sungai Ciasem, Sungai Cibongor dan Sungai Ciyapah.



Gambar 2.5
Peta DAS Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Secara hidrogeologi, Kabupaten Lebak terbagi menjadi :

1. Air tanah dangkal yang berada di bagian barat daya dan timur Kabupaten Lebak;
2. Air tanah terletak di seluruh wilayah Kabupaten Lebak;
3. Air tanah yang memancar terletak di bagian timur Kabupaten Lebak;
4. Wilayah air bendungan karian yang terletak di utara Kabupaten Lebak (Kecamatan Cimarga, Maja, Rangkasbitung dan Sajira).



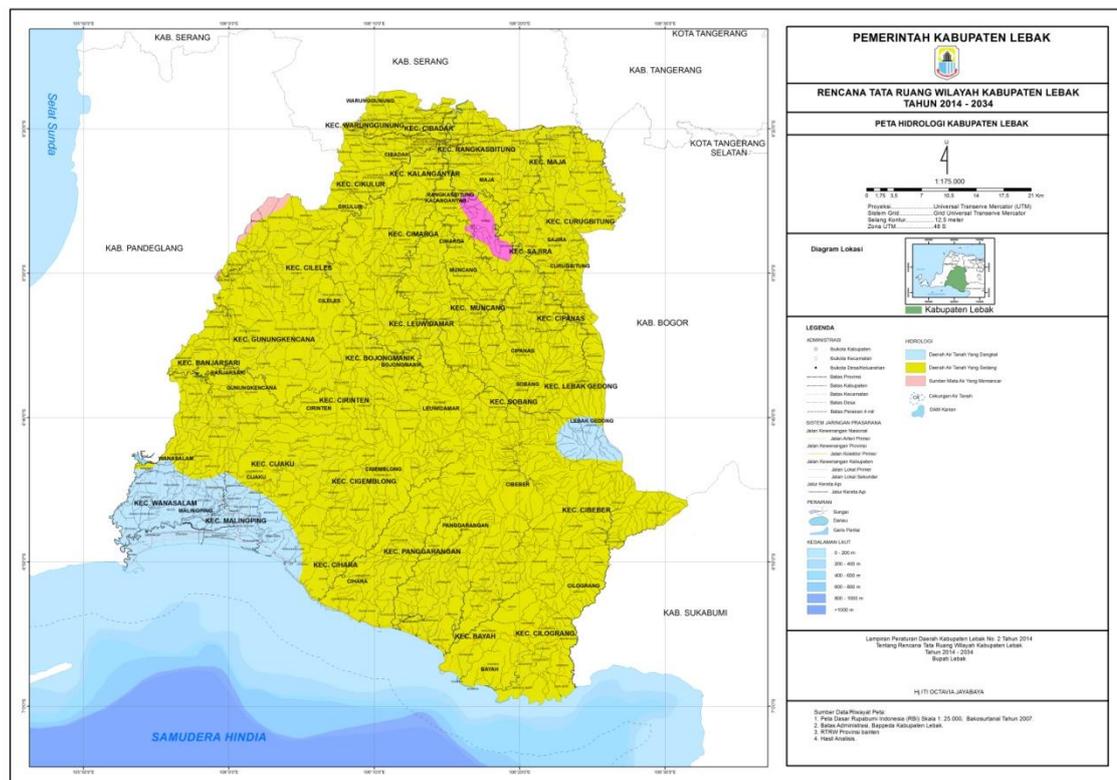
Tabel 2.5
Hidrogeologi Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Daerah Air Tanah yang Dangkal	Daerah Air Tanah yang Sedang	Rencana DAM Karian	Sumber Mata Air yang Memancar	Total (Ha)
1	Malingping	7.949,77	2.251,70			10.201,47
2	Wanasalam	9.899,71	1.519,31			11.419,02
3	Panggarangan		17.715,51			17.715,51
4	Bayah		14.377,21			14.377,21
5	Cilograng		9.601,72			9.601,72
6	Cibeber	1.495,63	39.026,58			40.096,41
7	Cijaku	710,96	10.757,46			11.468,42
8	Banjarsari		15.175,77		779,73	15.955,50
9	Cileles		15.114,13		223,63	15.338,76
10	Gunungkencana		13.801,50			13.801,50
11	Bojongmanik		9.591,83			9.591,83
12	Leuwidamar		14.305,09			14.305,09
13	Muncang		8.695,38			8.695,38
14	Sobang	684,52	10.464,82			11.149,34
15	Cipanas		6.525,30			6.525,30
16	Sajira		10.067,03	399,61		10.466,64
17	Cimarga		16.958,55	1.794,10		18.752,65
18	Cikurur		6.182,97			6.182,97
19	Warunggunung		4.736,53			4.736,53
20	Cibadak		3.632,71			3.632,71
21	Rangkasbitung		6.994,54	315,16		7.309,71
22	Maja		7.806,53	10,61		7.817,14
23	Curugbitung		9.317,33			9.317,33
24	Cihara	1.495,63	10.974,23			12.469,86
25	Cigemblong		15.304,93			15.304,93
26	Cirinten		12.254,96			12.254,96
27	Lebakgedong	1.575,29	7.584,69			9.159,98
28	Kalanganyar		2.859,34			2.859,34
	Kab. Lebak	23.385,70	303.598,63	2.519,48	1.003,35	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



Gambar 2.6
Peta Hidrogeologi Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

E. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan klimatologi, Kabupaten Lebak memiliki curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2000 - >5000 mm/tahun. Curah hujan terbesar berada di bagian timur sedangkan terkecil berada di bagian utara Kabupaten Lebak. Komposisi luasan curah hujan per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut.



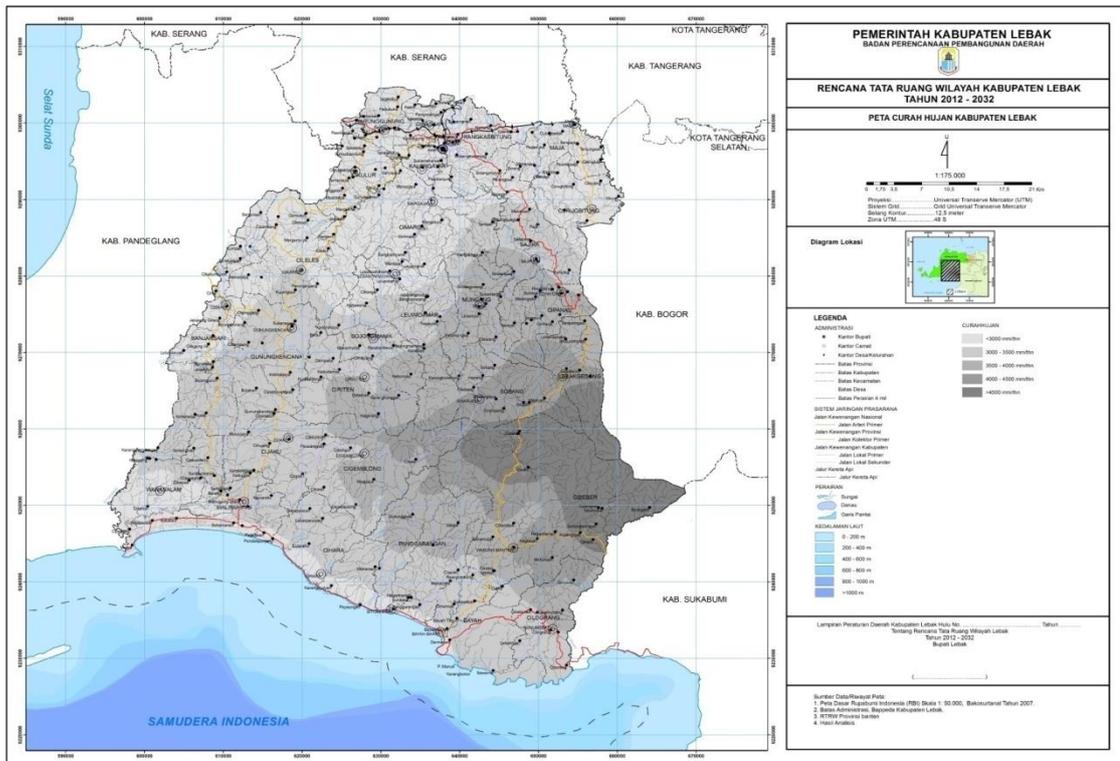
Tabel 2.6
Curah Hujan Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Curah Hujan					Total
		<3000 mm/thn	3000-3500 mm/thn	3500-4000 mm/thn	4000- 4500 mm/thn	>4500 mm/thn	
1	Malingping	3.441,11	6.760,36				10.201,47
2	Wanasalam	7.894,92	3.524,10				11.419,02
3	Panggarangan	1.234,87	6.452,89	8.794,67	1.233,09		17.715,51
4	Bayah	785,13	12.225,23	1.356,53	10,32		14.377,21
5	Cilograng		4.826,32	3.372,11	1.403,28		9.601,71
6	Cibeber		805,91	5.205,61	11.685,72	22.399,17	40.096,41
7	Cijaku		10.373,16	1.095,25			11.468,42
8	Banjarsari	8.865,94	7.089,57				15.955,50
9	Cileles	12.531,75	2.807,01				15.338,76
10	Gunungkencana	770,79	13.030,71				13.801,50
11	Bojongmanik	1.845,33	5.293,18	2.453,32			9.591,83
12	Leuwidamar	3.375,11	5.454,19	4.424,08	1.051,71		14.305,09
13	Muncang	23,33	1.147,15	7.126,99	397,91		8.695,38
14	Sobang			2.368,49	7.192,33	1.588,53	11.149,34
15	Cipanas		346,96	5.384,33	794,01		6.525,30
16	Sajira	2.095,56	4.884,02	3.487,06			10.466,64
17	Cimarga	15.344,13	2.539,06	869,47			18.752,65
18	Cikulur	6.182,97					6.182,97
19	Warunggunung	4.736,53					4.736,53
20	Cibadak	3.632,71					3.632,71
21	Rangkasbitung	7.309,70					7.309,70
22	Maja	7.817,14					7.817,14
23	Curugbitung	7.773,78	1.543,55				9.317,33
24	Cihara	3.606,75	8.859,12	3,99			12.469,86
25	Cigemblong		5.050,35	6.644,39	3.610,20		15.304,93
26	Cirinten		6.145,69	5.830,76	278,51		12.254,95
27	Lebakgedong			2.997,51	2.735,16	3.427,31	9.159,98
28	Kalanganyar	2.859,34					2.859,34
	Jumlah	102.126,88	109.158,50	61.414,54	30.392,23	27.415,00	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



Gambar 2.7
Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

F. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Penggunaan lahan, pola pemanfaatan ruangnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak yaitu meliputi kawasan budidaya sebesar 229,478,05 Ha atau 69,43% dan kawasan lindung sebesar 100.938,13 Hektar atau 30,54%. Secara lengkap, rencana pola ruang Kabupaten Lebak pada tahun 2034 dapat dilihat pada tabel 2.7 dan grafik 2.1 dan grafik 2.2 berikut ini.

Tabel 2.7
Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034

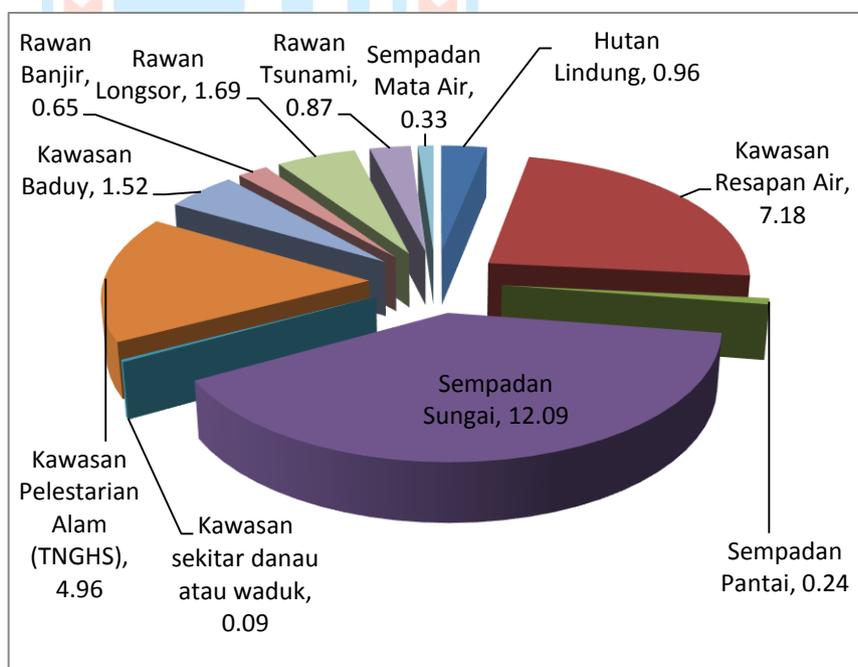
No.	Rencana Pola Ruang	Luas (ha)	%	
1	Kawasan Lindung	Hutan Lindung	3.179,46	0,96
		Kawasan Resapan Air	23.731,13	7,18
		Sempadan Pantai	801,20	0,24



No.	Rencana Pola Ruang	Luas (ha)	%	
	Sempadan Sungai	39.965,17	12,09	
	Kawasan sekitar danau atau waduk	304,14	0,09	
	Kawasan Pelestarian Alam (TNGHS)	16.380,00	4,96	
	Kawasan Baduy	5.101,00	1,52	
	Rawan Banjir	2.133,35	0,65	
	Rawan Longsor	5.581,81	1,69	
	Rawan Tsunami	2.871,03	0,87	
	Sempadan Mata Air	1.076,84	0,33	
Luas Kawasan Lindung		101.029,13	30,57	
2.	Kawasan Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	40.220,07	12,17
		Hutan Produksi Tetap	12.650,37	3,83
		Perkebunan	56.586,00	17,12
		Pertanian Pangan Lahan Basah	40.170,11	12,15
		Pertanian Pangan Lahan Kering	44.083,83	13,34
		Peternakan	644,71	0,20
		Pertambangan	2.732,97	0,83
		Industri	1.395,18	0,42
		Permukiman Perdesaan	16.269,59	4,92
		Minopolitan	288,41	0,09
		Permukiman Perkotaan	14.436,81	4,40
Luas Kawasan Budidaya		229.478,05	69,43	
Luas Total		330.507,18	100,00	

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

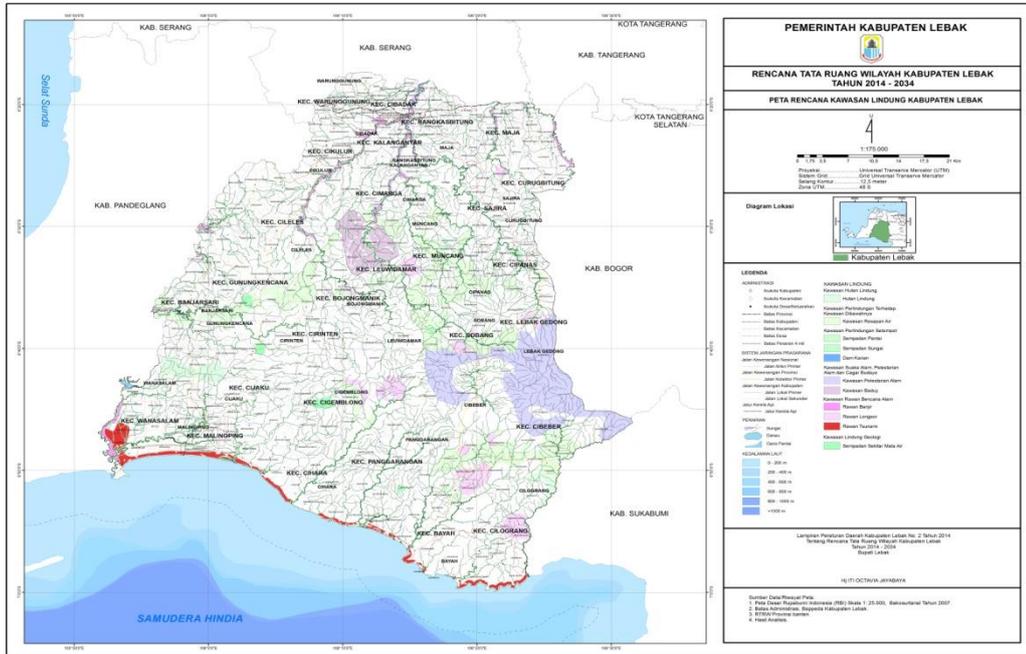
Grafik 2.1
Persentase
Rencana
Pola Ruang
Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034
untuk Kawasan
Lindung



Sumber : Diolah dari RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034

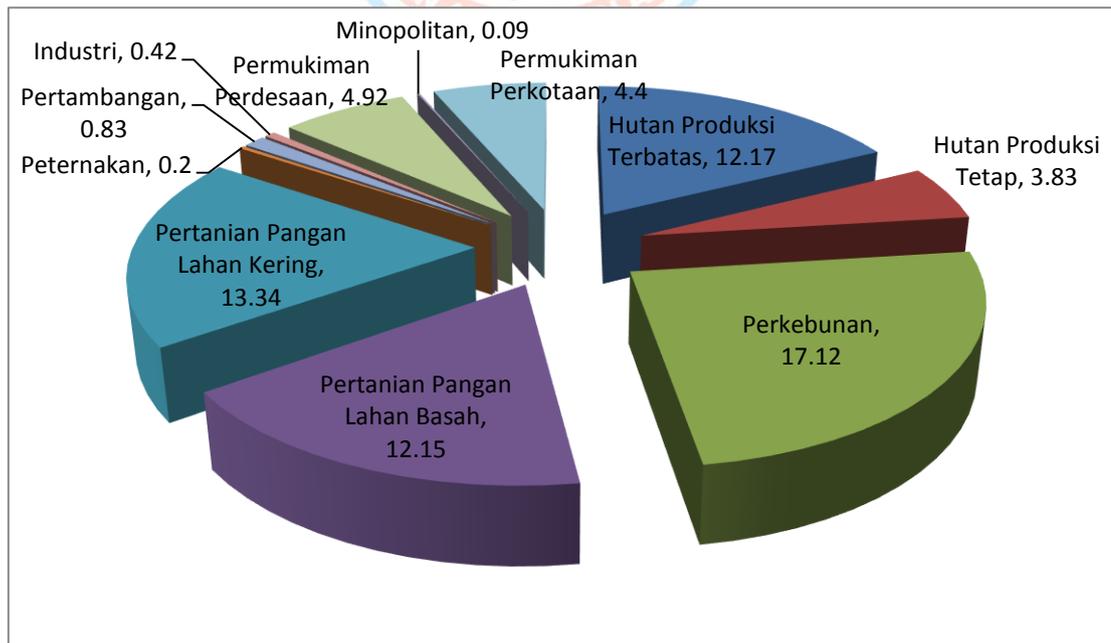


Gambar 2.8
Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

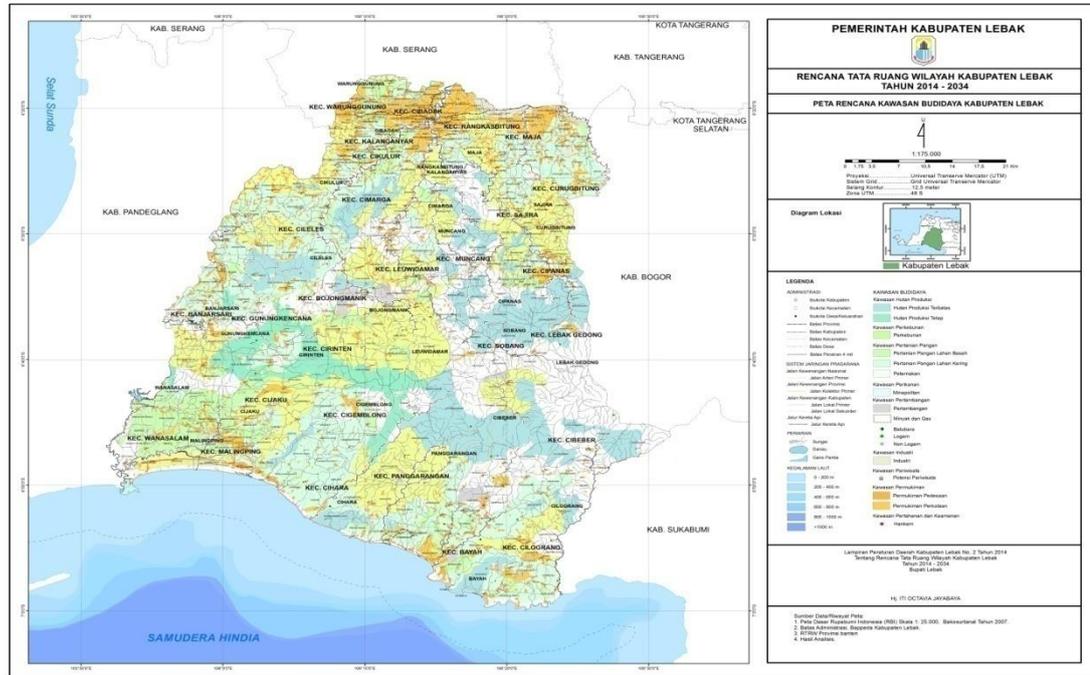
Grafik 2.2
Persentase Rencana Pola Ruang Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034 untuk Kawasan Budidaya



Sumber : Diolah dari RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034

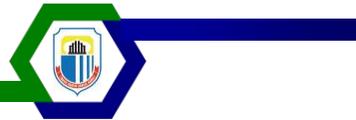


Gambar 2.9
Peta Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Selain penggunaan lahan menurut rencana pola ruang, pemanfaatan lahan di Kabupaten Lebak di secara umum didominasi oleh kebun campuran, perkebunan (rakyat dan swasta), persawahan (irigasi dan tadah hujan) dengan rincian pada tabel 2.8 berikut.



Tabel 2.8
Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

Kecamatan	Penggunaan Lahan															Total (Ha)	
	Hutan Belukar	Hutan Lebat	Kampung	Kebun Campuran	Padang Rumput/Saiana	Perkebunan Besar	Perkebunan Rakyat	Perumahan	Rawa	Sawah Irigasi 1xpadi/th	Sawah Irigasi 2xpadi/th	Sawah Tadah Hujan	Semak	Sungai/Danau	Tanah Rusak		Tegalan/Ladang
Banjarsari	2,575.40		713.90	7,895.27	136.89	231.86	1,238.76		1.91	944.81	1,457.96	0.00	421.64	132.64		204.46	15,955.50
Bayah	2,876.13		770.39	7,155.95	0.52	494.35	1,542.38			1,004.82	123.72			141.43	0.30	267.23	14,377.21
Bojongmanik	644.03		192.11	1,762.14	0.69		5,457.05			1,119.09	228.94			72.97		114.82	9,591.83
Cibadak			389.97	1,456.38	18.30		203.55		5.81	5.63	1,493.74			59.35			3,632.71
Cibeber	14,771.86	702.33	374.00	20,171.70	6.65		2,033.63			1,588.96	19.88	0.01		93.25	1.34	332.81	40,096.41
Cigemblong	2,883.52	294.42	146.69	9,191.74	9.26	373.93				1,590.64	652.63			36.53		125.59	15,304.93
Cihara	1,334.25		190.09	9,228.02						1,194.37	80.17		70.61	59.57		312.78	12,469.86
Cijaku	766.99		213.69	7,854.70	1.96		835.56			1,062.28	718.45		0.41	6.26		8.12	11,468.42
Cikukur			493.66	533.40	12.64		2,868.29			411.85	1,828.45			34.70			6,182.97
Cileles	1,728.06		476.76	8,165.05	7.39	1,448.59	1,669.07			1,244.27	425.93			39.55		134.09	15,338.76
Ciligrang	4,332.57		255.23	3,990.42			213.92			457.89	80.49			43.39		227.81	9,601.72
Cimarga	3,936.36		572.10	3,264.82	24.41	2,603.51	4,489.63			2,038.27	1,430.38			232.42		160.74	18,752.65
Cipanas	97.80	126.42	290.35	3,856.88	3.67	0.09	81.08			1,356.23	625.59	0.15	0.03	81.07	5.96		6,525.30
Cirinten	411.22	87.77	155.94	8,543.38	0.44		675.58			996.88	1,132.24			14.22		237.29	12,254.96
Curugbitung			481.86	5,587.48		0.07	1,223.19			164.82	1,732.64	51.84	0.08	46.72		28.62	9,317.33
Gunungkencana	4,414.29		377.33	5,581.55	1.38		1,067.00			1,217.44	700.39		107.86	40.30		293.95	13,801.50
Kalanganyar			229.96	998.95		489.96				128.42	794.88			75.41		141.77	2,859.34
Lebakgedong		291.38	104.56	6,491.70		0.03	390.10			725.40	80.45	0.00	0.03	32.43		1,043.90	9,159.98
Leuwidamar	1,618.42	201.52	451.01	2,500.83	10.60		7,724.19			947.63	386.20			129.18		335.50	14,305.09
Maja			645.53	2,676.29	15.06	1,203.90	663.72			314.80	2,147.90			76.61		73.32	7,817.14
Malingping	685.85		557.15	5,405.13	9.13		620.29		95.78	1,480.47	572.08		630.86	64.36	61.55	18.82	10,201.47
Muncang	168.46	122.47	159.05	2,711.22		258.32	2,166.30			2,106.14	699.85			80.20		223.35	8,695.38
Panggarangan	5,937.06		263.55	7,098.42	1.17		2,848.43			975.39	409.23			181.74		0.53	17,715.51
Rangkasbitung			933.24	2,016.75	67.55	2,526.79		84.38		240.73	1,314.24			104.47		21.55	7,309.71
Sajira	29.62		395.31	6,434.43	35.86	231.87	1,151.50			552.16	1,495.37			140.51			10,466.64
Sobang	1,106.89	1,308.57	131.79	4,946.75			716.92			2,813.84				68.31		56.27	11,149.34
Wanasalam	57.29		358.82	4,562.66	10.16		1,498.33		16.89	233.24	3,687.34		710.93	118.04	165.31	0.03	11,419.02
Warunggunung			460.08	1,201.46	4.01		959.64			9.52	2,101.82						4,736.53

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

a. Kawasan Lindung

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Lebak, rencana kawasan lindung tahun 2014-2034 seluas 101.029,13 Ha (30,57% dari luas wilayah Kabupaten Lebak). Pemanfaatan ruang paling besar diperuntukkan untuk kawasan sempadan sungai dan pemanfaatan ruang paling kecil untuk kawasan sekitar danau atau waduk.

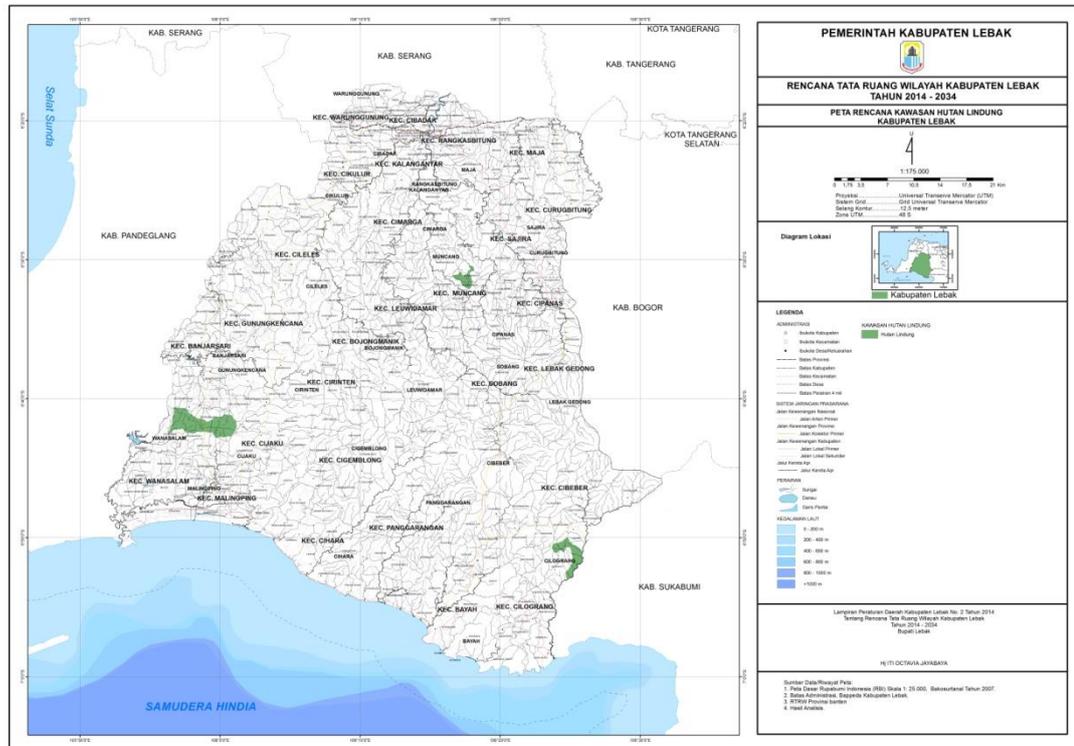
1) Kawasan Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kondisi kualitas dan kuantitas air di Kabupaten Lebak semakin berkurang. Hal ini akan berdampak pada degradasi lingkungan, dimana merupakan ancaman bagi mahluk hidup dan lingkungannya. Salah satu penyebab penurunan kualitas dan kuantitas air adalah terjadinya pengurangan luas hutan lindung.

Luas kawasan hutan lindung seluas 3.179,46 Ha (0,96% dari luas Kabupaten Lebak). Kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung di Kabupaten Lebak tersebar di Kecamatan Banjarsari (638,88 Ha atau 21,51%), Cibeber (396,43 Ha atau 12,47%), Cijaku (402,26 Ha atau 12,65%), Cilograng (387,71 Ha atau 12,19%), Cimarga (17,01 Ha atau 0,53%), Gunungkencana (86,74 Ha atau 2,73%), Malingping (479,47 Ha atau 15,08%), Muncang (340,95 Ha atau 10,72%), dan Wanasalam (385,01 Ha atau 12,11%).



Gambar 2.10
Peta Rencana Kawasan Hutan Lindung



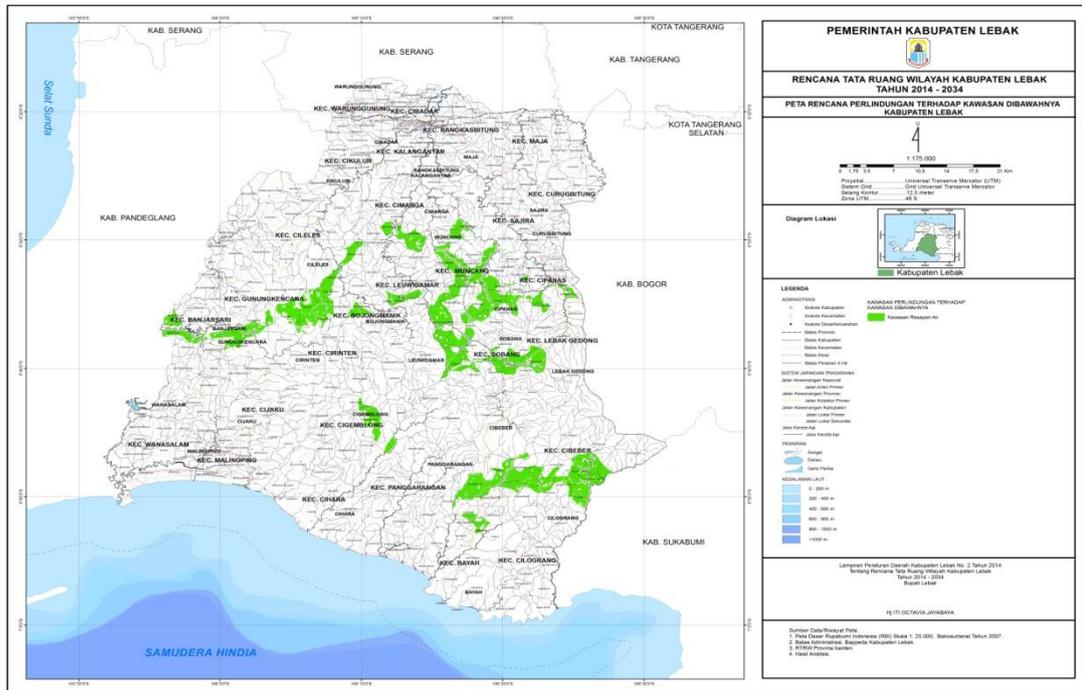
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya berbentuk kawasan resapan air. Kawasan resapan air di Kabupaten Lebak tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarsari (920,44 Ha atau 3,88%), Bojongmanik (1.301,60 Ha atau 5,48%), Cibeber (5.767,47 Ha atau 24,30%), Cigemblong (868,45 Ha atau 3,66%), Cileles (4,92 Ha atau 0,02%), Cimarga (2.662,85 Ha atau 11,22%), Cipanas (574,70 Ha atau 2,42%), Cirinten (1.201,54 Ha atau 5,06%), Gunungkencana (1.548,57 Ha atau 6,53%), Lebakgedong (294,15 Ha atau 1,24%), Leuwidamar (590,38 Ha atau 2,49%), Muncang (3.611,88 Ha atau 15,22%), Sajira (1.096,31 Ha atau 4,62%) dan Sobang (3.041,60 Ha atau 12,82%) dengan luas 21.529,85 Ha atau sekitar 6,51 % dari luas Kabupaten Lebak.



Gambar 2.11
Peta Rencana Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

3) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Lebak terdiri dari kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Luas rencana kawasan perlindungan setempat adalah 40.974,51 Ha atau 12,40% dari luas Kabupaten Lebak.

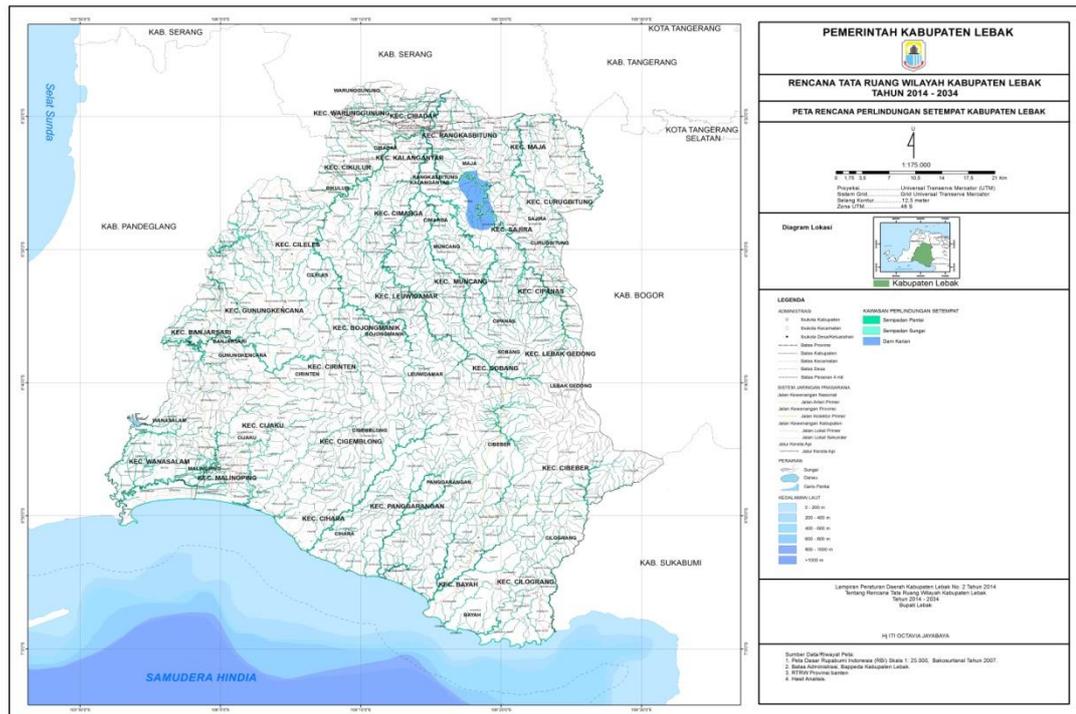
Adapun luas kawasan sempadan sungai kurang lebih 39.869,17 Ha atau 12,06 % dari luas Kabupaten Lebak. Kawasan sempadan sungai ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Kawasan sempadan sungai terbesar terdapat di Kecamatan Cibeber, yaitu mencapai 3.585,38 Ha atau 1,08 % dari luas Kabupaten Lebak. Sempadan pantai di Kabupaten Lebak yaitu kawasan sempadan pantai dengan lebar 100 meter sepanjang garis pantai di sepanjang pantai, dengan luas 801,20 Ha atau 0,24 % dari luas Kabupaten



Lebak. Sebaran kawasan sempadan pantai terluas terdapat di Kecamatan Bayah dan Kecamatan Cihara.

Luas kawasan sekitar danau atau waduk sebesar kurang lebih 304,14 Ha atau 0,09 % dari luas Kabupaten Lebak. Kawasan sekitar danau atau waduk ini tersebar di seluruh Kecamatan.

Gambar 2.12
Peta Rencana Perlindungan Setempat



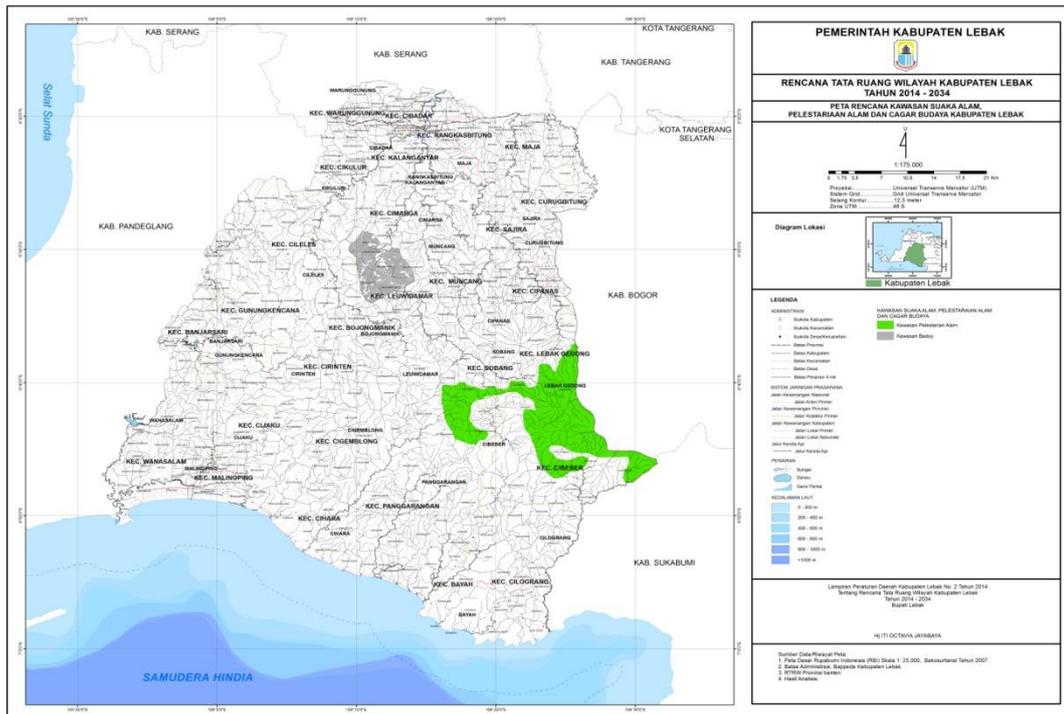
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

4) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya ini meliputi kawasan taman suaka alam berupa Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berupa Kawasan Baduy. Luas wilayah kawasan TNGHS di Kabupaten Lebak adalah 16.380 Ha atau 4,96 % dari luas Kabupaten Lebak. Sedangkan luas kawasan Baduy adalah 5.101 Ha atau 1,54 % dari luas Kabupaten Lebak.



Gambar 2.13
Peta Rencana Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

5) Kawasan Rawan Bencana Alam

Rencana perlindungan terhadap Kawasan Rawan Bencana Alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana longsor dan kawasan rawan banjir. Penentuan kawasan rawan bencana berdasarkan pada kriteria wilayah dengan kerentanan tinggi untuk terkena longsor, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

Kawasan-kawasan yang memiliki potensi rawan longsor di Kabupaten Lebak sebesar 5.581,81Ha (1,69% dari luas Kabupaten Lebak). Menurut karakteristik bencananya, maka kawasan rawan longsor di Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Bojongmanik,

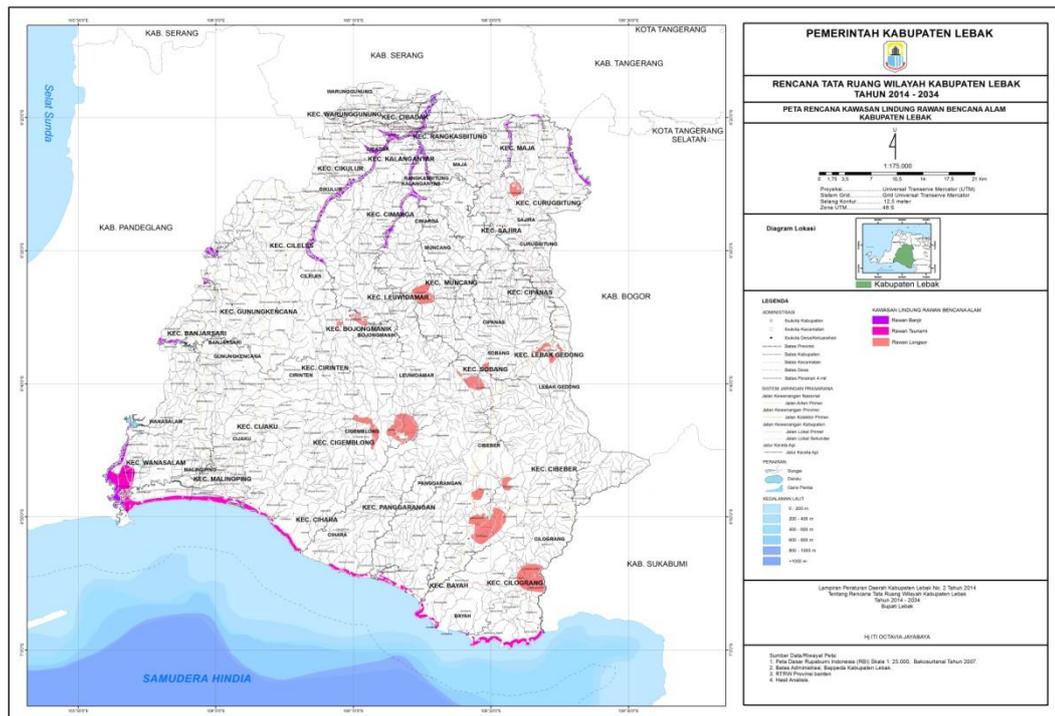


Cibeber, Cigemblong, Ciligrang, Curugbitung, Lebakgedong, Leuwidamar, Panggarangan, dan Sobang.

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lebak sebesar 2.133,35 Ha tersebar di Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, Cikukur, Cileles, Cimarga, Banjarsari, dan Wanasalam.

Kawasan rawan bencana tsunami merupakan termasuk dalam kawasan bencana alam di Kabupaten Lebak. Kawasan ini tersebar di 6 kecamatan, meliputi Kecamatan Bayah, Cihara, Ciligrang, Malingping, Panggarangan, dan Wanasalam. Luas kawasa rawan bencana tsunami di Kabupaten Lebak ini seluas 2.871,03(0,87%ha) dari luas Kabupaten Lebak.

Gambar 2.14
Peta Rencana Kawasan Lindung Rawan Bencana Alam



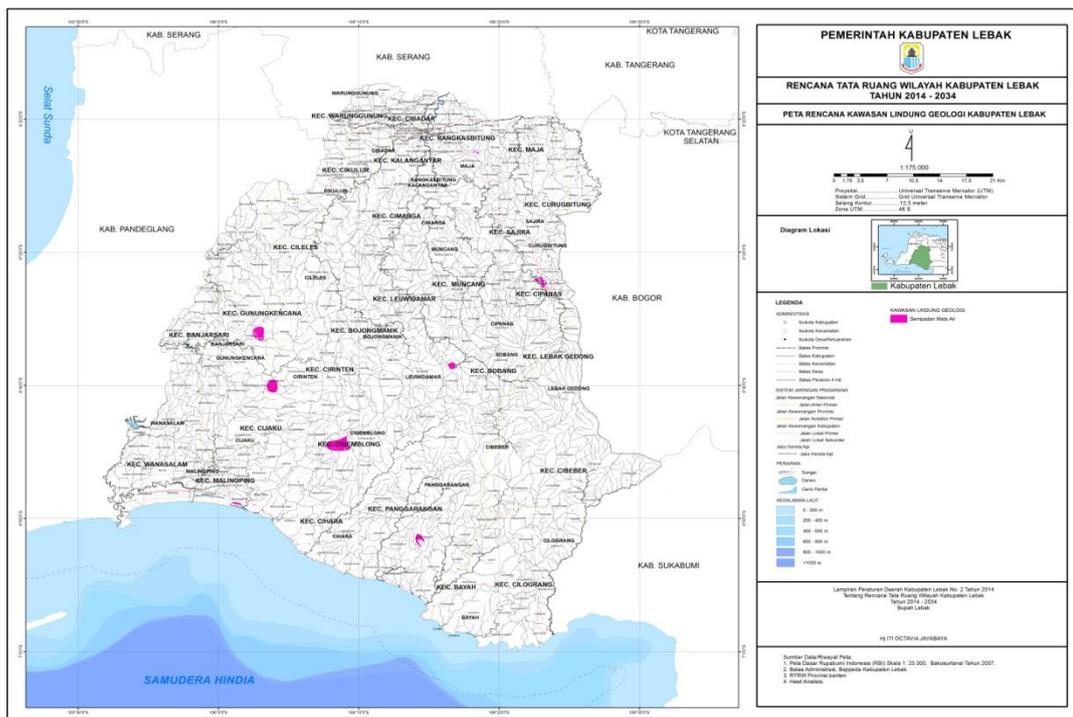
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



6) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan sekitar mata air. Kawasan sekitar mata air di Kabupaten Lebak memiliki luas 1076,84 Ha atau 0,33 % dari luas Kabupaten Lebak. Sebaran sempadan mata air terbesar terdapat di Kecamatan Gunungkencana dan Cigemblong, sisanya menyebar di Kecamatan Cijaku, Cipanas, Maja, Malingping, Panggarangan dan Sobang.

Gambar 2.15
Peta Rencana Lindung Geologi



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

b. Kawasan Budidaya

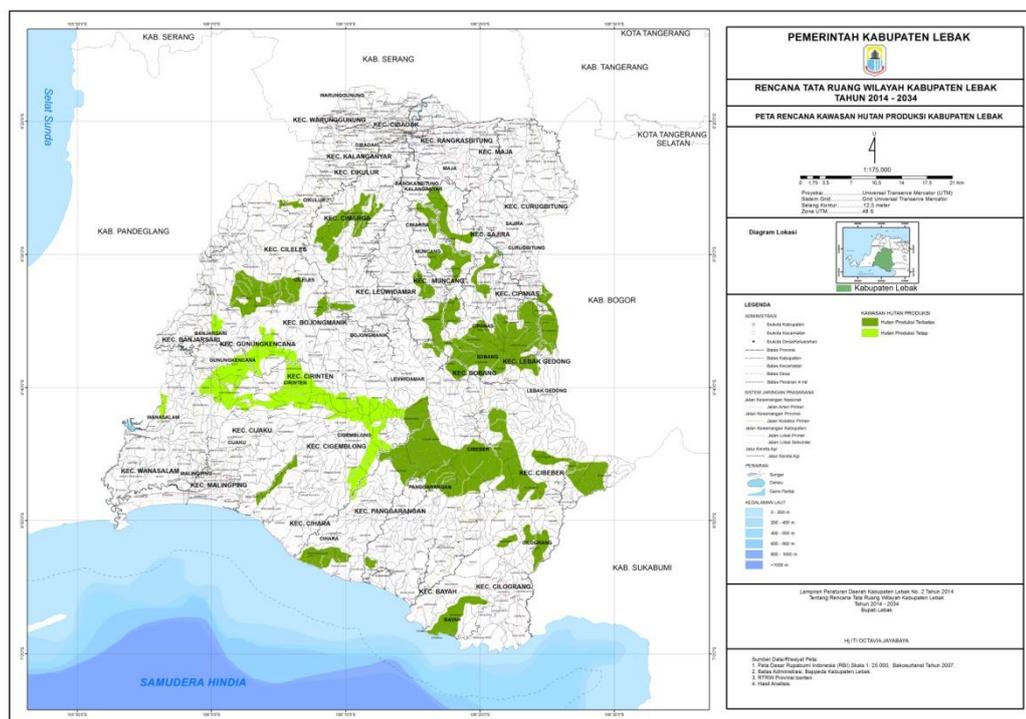
Kawasan budidaya di Kabupaten Lebak terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, perkebunan, pertanian pangan, peternakan, pertambangan, industri, permukiman dan minapolitan.



1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Lebak seluas 52.870,44 Ha dengan fungsi sebagai hutan produksi terbatas seluas 40.220,07 Ha dan hutan produksi tetap seluas 12.650,37 Ha. Hutan produksi terbatas berada di 18 kecamatan dan hutan produksi tetap berada di 8 kecamatan.

Gambar 2.16
Peta Kawasan Hutan Produksi



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

2) Kawasan Peruntukan Perkebunan

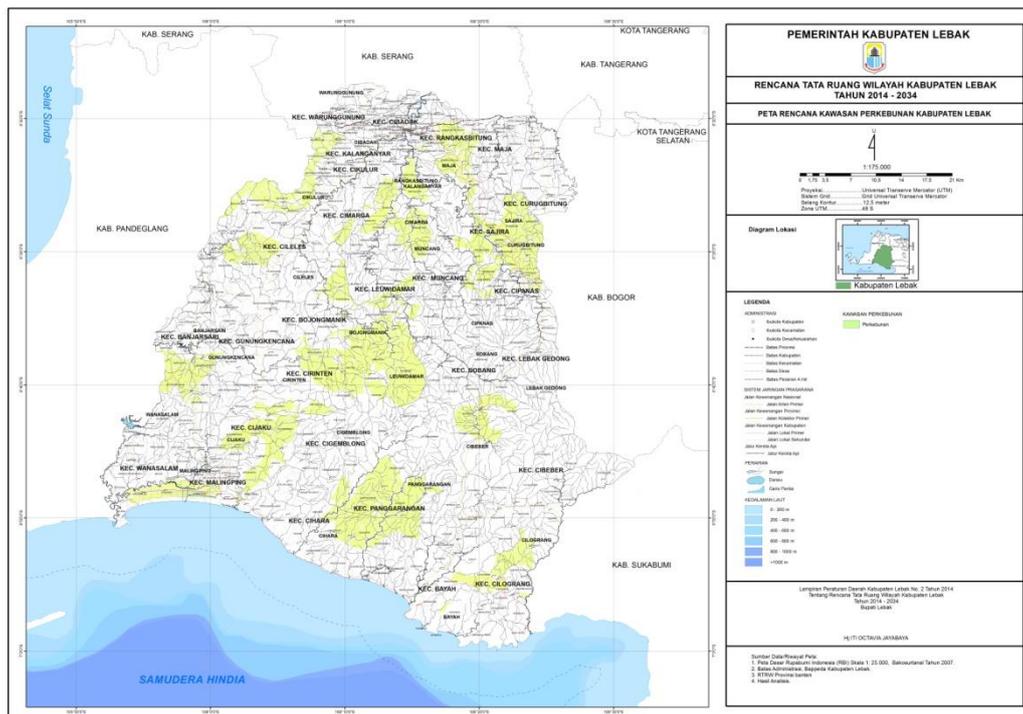
Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Lebak sejumlah 22 jenis, dimana dari 22 jenis komoditas tersebut terdapat beberapa komoditas yang memenuhi potensi cukup baik dan banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kabupaten Lebak yaitu karet, kelapa sawit, kakao, kopi, aren, melinjo, cengkeh, dan kelapa dalam.

Rencana luas kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Lebak adalah 56.586,00 Ha (17,12 %) dari luas Kabupaten Lebak yang



terdistribusi di Kecamatan Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Kalanganyar, Leuwidamar, Malingping, Muncang, Panggarangan, dan Sobang.

Gambar 2.17
Peta Kawasan Perkebunan



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

3) Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan

Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Lebak diarahkan untuk dipertahankan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan dengan luas sebesar 40.170 Ha berupa pertanian pangan lahan basah.

Berdasarkan rencana pola ruang kawasan budidaya yang diperuntukan pertanian pangan meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering dan kawasan peternakan dengan rincian pada tabel 2.9 berikut.



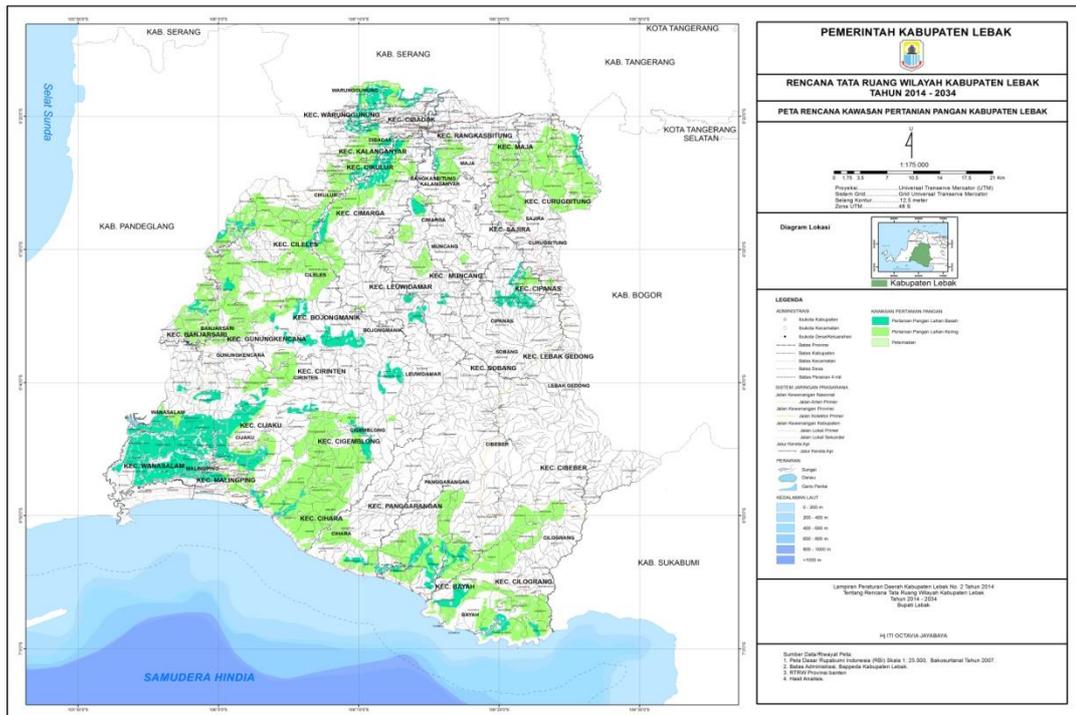
Tabel 2.9
Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian Pangan di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034

No.	Kecamatan	Kawasan Pertanian Pangan			Total (Ha)	%
		Pertanian Pangan Lahan Basah	Pertanian Pangan Lahan Kering	Peternakan		
1	Banjarsari	1,705.81	3,256.72	124.59	5,087.12	5.99
2	Bayah	835.12	7,131.54	-	7,966.66	9.38
3	Bojongmanik	984.83	64.23	-	1,049.06	1.24
4	Cibadak	415.51	339.96	45.50	800.97	0.94
5	Cibeber	1,628.04	1,966.98	-	3,595.02	4.23
6	Cigemlong	1,933.50	3,798.53	78.70	5,810.73	6.84
7	Cihara	1,170.74	4,862.25	-	6,032.99	7.11
8	Cijaku	1,426.68	1,960.77	-	3,387.45	3.99
9	Cikukur	1,956.76	290.28	57.69	2,304.73	2.71
10	Cileles	1,547.26	5,706.45	-	7,253.71	8.54
11	Cilograng	690.50	1,686.17	-	2,376.67	2.80
12	Cimarga	1,945.21	1,695.80	85.60	3,726.61	4.39
13	Cipanas	1,393.55	80.27	-	1,473.82	1.74
14	Cirinten	1,415.44	323.02	-	1,738.46	2.05
15	Curugbitung	1,032.96	3,389.41	-	4,422.37	5.21
16	Gunungkencana	1,295.72	2,234.02	-	3,529.74	4.16
17	Kalanganyar	717.52	386.31	-	1,103.83	1.30
18	Lebakgedong	525.45	-	-	525.45	0.62
19	Leuwidamar	1,173.89	748.85	-	1,922.74	2.26
20	Maja	1,225.79	1,129.73	-	2,355.52	2.77
21	Malingping	2,340.25	858.61	78.40	3,277.26	3.86
22	Muncang	1,087.35	115.79	-	1,203.14	1.42
23	Panggarangan	2,577.55	974.76	-	3,552.31	4.18
24	Rangkasbitung	981.77	439.33	-	1,421.10	1.67
25	Sajira	2,159.64	99.09	95.87	2,354.60	2.77
26	Sobang	581.76	-	-	581.76	0.69
27	Wanasalam	3,768.86	311.13	-	4,079.99	4.81
28	Warunggunung	1,652.65	233.24	77.86	1,963.75	2.31
	Luas Total	40,170.11	44,083.24	644.21	84,897,56	100.00

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



Gambar 2.18
Peta Rencana Kawasan Pertanian Pangan



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

4) Kawasan peruntukan Peternakan

Luas kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Lebak adalah 644,21Ha (0,19 %) dari luas Kabupaten Lebak yang terdistribusi di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Malingping, Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga dan Kecamatan Curugbitung

5) Kawasan Peruntukan Perikanan

Potensi sumber daya ikan laut di Kabupaten Lebak cukup besar, mengingat Kabupaten Lebak mempunyai panjang pantai sekitar 91,42 km dengan potensi lestari untuk perairan pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 10.557,24 ton/tahun yang terdiri



6) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Lebak terdiri atas :

a) Pertambangan mineral dan batubara

Pertambangan mineral logam berupa emas, pasir besi, titanium, galena, mangan dan batubara seluas kurang lebih 144.474 Ha dan tersebar di 16 Kecamatan.

Pertambangan mineral bukan logam berupa batu gunung, pasir, kalsit, lempung, batu gamping, tras, kaolin, zeolite, bentonit, feldspar, batu kuarsa seluas kurang lebih 146.498,3 ha dan tersebar di 25 Kecamatan.

Pertambangan batu bara di Kabupaten Lebak seluas 18.729 Ha yang tersebar di 6 kecamatan.

b) Pertambangan panas bumi

Kawasan pertambangan panas bumi seluas 25.770 Ha, meliputi :

1. Pertambangan Gunung Endut (speculative 100 MW possible 40 MW), yaitu kecamatan Sobang, Leuwidamar, Muncang, Sajira, Cipanas dan Lebakgedong.
2. Wilayah Pamancalan (speculative 255 MW) di Kecamatan Cibeber.

c) Pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi Bok Rangkasbitung (11 Kecamatan) dan Blok Wanasalam-Cilograng (8 Kecamatan).

Berdasarkan potensi pertambangan diatas, maka rencana kawasan pertambangan dirinci sebagai berikut.

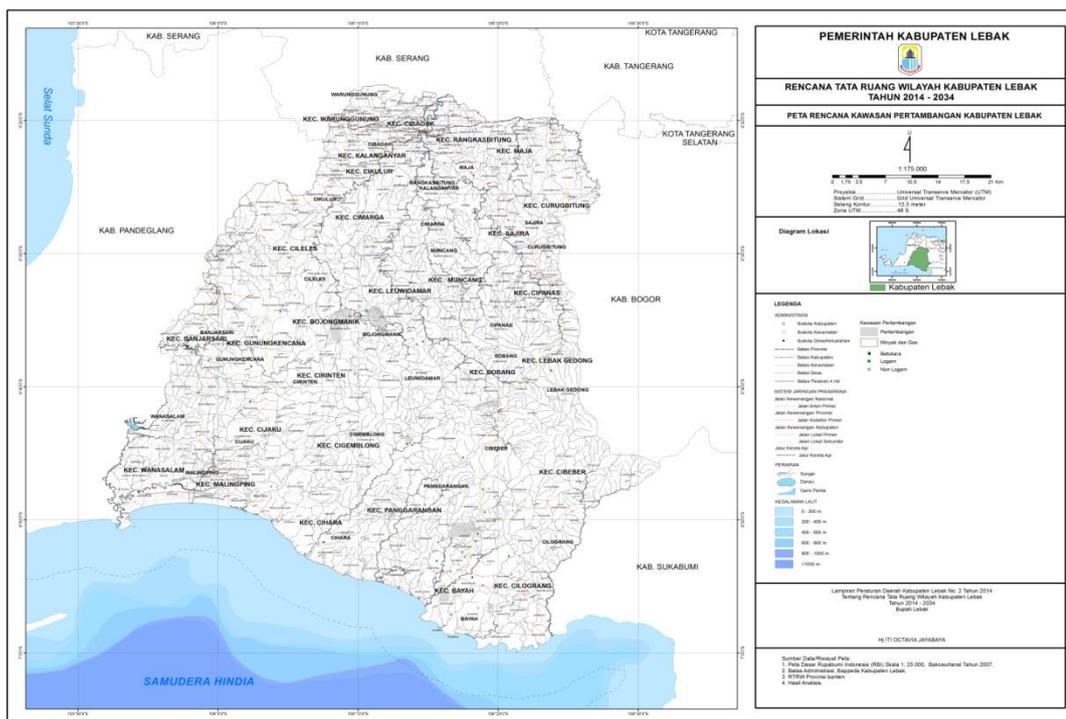


Tabel 2.10
Rencana Kawasan Pertambangan di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034

No.	Kecamatan	Potensi luas Pertambangan (Ha)	%
1.	Bayah	289,67	10,60
2.	Bojongmanik	1.174,85	42,99
3.	Cibeber	859,82	31,46
4.	Cigemblong	73,03	2,67
5.	Cihara	47,80	1,75
6.	Cirinten	5,17	0,19
7.	Leuwidamar	62,98	2,30
8.	Panggarangan	142,83	5,23
9.	Sobang	76,82	2,81
Jumlah		2.732,97	

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Gambar 2.20
Peta Rencana Kawasan Pertambangan



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



7) Kawasan Peruntukan Industri

Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang memiliki potensi agroindustri yang cukup tinggi, dengan dukungan penyediaan bahan baku yang memadai. Dalam rangka menciptakan kondisi yang sinergis antara ketersediaan bahan baku dengan industri, maka perlu dikembangkan lahan dengan peruntukan industri di Kabupaten Lebak. Industri yang sesuai dikembangkan di Kabupaten Lebak adalah industri sedang dan industri kecil/rumah tangga yang memanfaatkan bahan bakunya dari kegiatan pertanian wilayah sendiri.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kabupaten Lebak pada tahun 2010 mencapai 2,16 %. Pertumbuhan sektor industri tersebut merupakan pertumbuhan sektor terendah dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak.

Dalam rangka menunjang perekonomian wilayah dan kaitannya dengan potensi pertanian, maka prioritas pengembangan industri di Kabupaten Lebak adalah industri pengolahan (dan atau agroindustri) pada komoditas bukan konsumsi langsung (perlu pengolahan terlebih dahulu untuk dikonsumsi). Lokasi industri pengolahan (dan atau agroindustri) tersebut memperhatikan jarak bahan baku dan pasar, minimasi biaya transportasi.

Pengembangan industri kecil di Kabupaten Lebak meliputi :

1. Industri gula merah aren, tersebar di Kecamatan Muncang, Sobang, Leuwidamar, Bojongmanik, Sajira, Cijaku, Panggarangan, Malingping, Cibeber, Gunung Kencana, Bayah dan Cipanas.
2. Industri bata, tersebar di Kecamatan Cimarga, Rangkasbitung, Sajira, Malingping dan Warunggunung
3. Industri tenun Baduy, tersebar di Kecamatan Leuwidamar
4. Industri tempurung kelapa, tersebar di Kecamatan Leuwidamar
5. Industri pandai besi, tersebar di Kecamatan Bojongmanik, Cibeber dan Rangkasbitung



6. Industri konveksi, tersebar di Kecamatan Rangkasbitung dan Cimarga
7. Industri anyaman pandan, tersebar di Kecamatan Cikulur, Cileles, Banjarsari, Cijaku, Malingping dan Bojongmanik
8. Industri anyaman bambu, tersebar di Kecamatan Sajira, Cibeber, Rangkasbitung dan Cibadak
9. Industri emping melinjo, tersebar di Kecamatan Warunggunung, Cikulur dan Gunungkencana
10. Industri sale/keripik pisang, tersebar di Kecamatan Bayah

Adanya rencana pengembangan Kota Kekerabatan Maja merupakan salah satu terobosan dan menjadi alternative counter magnet bagi Kota Metropolitan Jabodetabek. Beberapa rencana besar telah dialokasi di Kawasan Maja, diantaranya adalah jalan tol Serpong – Balaraja, peningkatan beberapa ruas jalan eksisting, pembangunan terminal tipe A, pembangunan double track. Disamping itu tidak jauh dari Maja, tepatnya sebelah utara terdapat kawasan atau Zona Industri Banten (Tangerang), dengan pusat kota di daerah Balaraja dan zona industri Serang Timur (Kabupaten Serang). Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan industri besar Kabupaten Lebak diarahkan untuk dikembangkan di sekitar Kecamatan Rangkasbitung dan Maja. Serta rencana pengembangan industri di wilayah selatan di sekitar Kecamatan Bayah dan Ciligrang.

Tabel 2.11
Rencana Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034

No.	Kecamatan	Industri (Ha)	%
1.	Bayah	66,59	4,77
2.	Ciligrang	43,79	3,14
3.	Curugbitung	23,99	1,72



No.	Kecamatan	Industri (Ha)	%
4.	Maja	473,36	33,93
5.	Rangkasbitung	787,45	56,44
	Jumlah	1.395,18	

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

8) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Lebak memiliki potensidaya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara karenakeragaman jenis obyek wisatanya, antara lain wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan. Berikut sebaran obyek wisata di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.12
Sebaran Obyek Wisata di Kabupaten Lebak

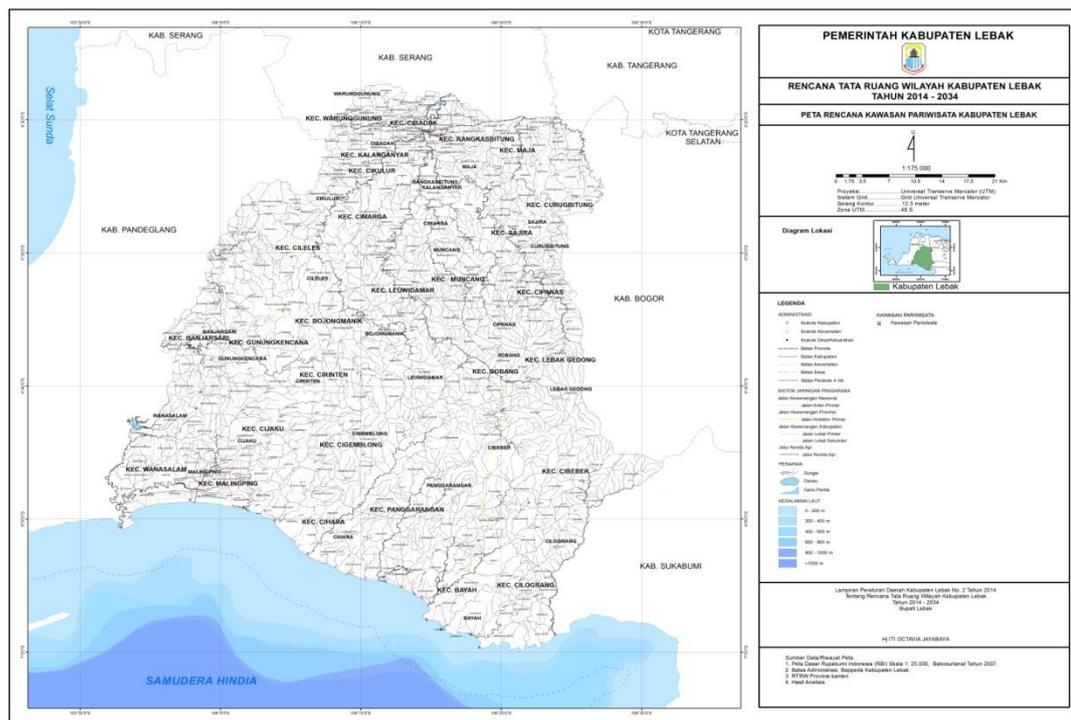
No.	Obyek Wisata	Lokasi
1.	Pariwisata Budaya	
	Budaya Kaolotan Baduy	Leuwidamar
	Budaya Kaolotan/Seren Taun	Cibeber
	Situs Cibedug	Cikotok
	Situs Kosala	Cipanas
2.	Pariwisata Alam	
	Pantai Cihara	Cihara
	Pantai Talanca	Malingping
	Pantai Cimandiri	Panggarangan
	Pantai Cibobos	Panggarangan
	Pantai Tanjung Panto	Wanasalam
	Pantai Karangseke	Wanasalam
	Pantai Binuangeun	Wanasalam
	Pantai Sawah Sikabayan	Wanasalam
	Pantai Karangmalang	Wanasalam
	Pantai Bagedur	Malingping
	Pantai Sawarna	Bayah
	Pantai Laguna	Bayah
	Pantai Pulau Manuk	Bayah
	Pantai Ciantir	Bayah
	Pantai Tanjung Layar	Bayah
	Pantai Tanjung Karang	Bayah
	Goa Sangkir	Bojongmanik



No.	Obyek Wisata	Lokasi
	Goa Lalay	Bayah
	Air Terjun Curug Halimun	Cipanas
	Air Terjun Curugrame	Cijaku
	Curug Indihiyang	Warunggunung
	Curug Kanteh	Cilograng
	Kawah Cipanas	Sobang
3.	Pariwisata Buatan	
	Arung Jeram	Lebakgedong
	Permandian Air Panas	Cipanas
	Air Panas Senanghati	Malingping

Sumber : Profil Investasi, BPMPPT Kab. Lebak

Gambar 2.21
Peta Rencana Kawasan Pariwisata



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

9) Kawasan Peruntukan Permukiman

Rencana pola ruang kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Lebak adalah 30.798,49Ha (9,32% dari luas Kabupaten Lebak) yang



terdistribusi di seluruh kecamatan. Rencana pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan untuk penampung kebutuhan perkembangan wilayah adalah 14.529,49 Ha (4,40% dari luas Kabupaten Lebak), sedangkan rencana pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah 16.269 Ha (4,92 %) dari luas Kabupaten Lebak.

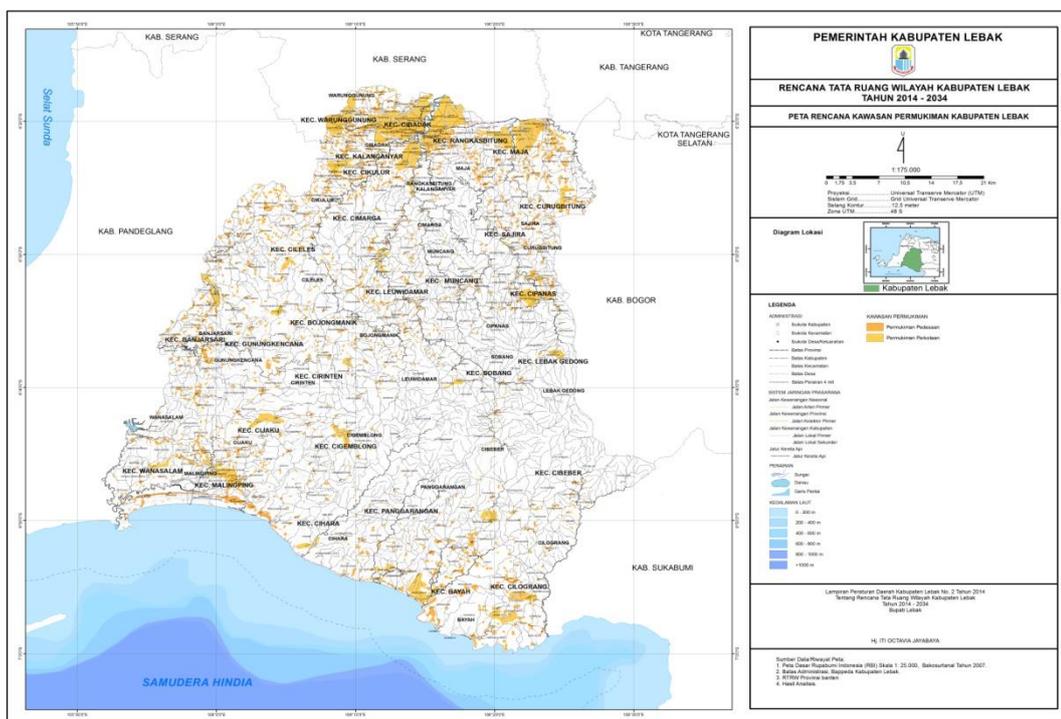
Tabel 2.13
Rencana Peruntukan Permukiman di Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034

No.	Kecamatan	Kawasan Permukiman		Total (Ha)	%
		Permukiman Perdesaan	Permukiman Perkotaan		
1.	Banjarsari	1.614,75	338,60	1.953,35	6,34
2.	Bayah	1.237,96	528,12	1.766,08	5,73
3.	Bojongmanik	384,39	28,89	413,28	1,34
4.	Cidadak	169,80	1.909,77	2.079,57	6,75
5.	Cibeber	324,88	235,65	560,53	1,82
6.	Cigemblong	190,49	350,45	540,94	1,76
7.	Cihara	645,25	165,46	810,71	2,63
8.	Cijaku	487,29	350,45	540,94	1,76
9.	Cikulur	883,74	500,84	1.384,58	4,50
10.	Cileles	1.028,02	151,87	1.179,89	3,83
11.	Cilograng	542,58	702,96	1.245,54	4,04
12.	Cimarga	766,47	81,18	847,65	2,75
13.	Cipanas	271,23	731,05	1.002,28	3,25
14.	Cirinten	359,45	93,51	452,96	1,47
15.	Curugbitung	864,57	326,06	1.190,63	3,87
16.	Gunungkencana	515,67	138,32	653,99	2,12
17.	Kalanganyar	127,59	798,18	925,77	3,01
18.	Lebakgedong	41,37	146,20	187,57	0,61
19.	Leuwidamar	741,67	212,11	953,78	3,10
20.	Maja	948,74	1.544,27	2.493,01	8,09
21.	Malingping	945,80	689,86	1.635,66	5,31
22.	Muncang	171,07	29,60	200,67	0,65
23.	Panggaraangan	430,85	257,03	687,88	2,23
24.	Rangkasbitung	458,29	2.236,11	2.694,40	8,75
25.	Sajira	691,67	34,26	725,93	2,36
26.	Sobang	110,76	110,94	221,70	0,72
27.	Wanasalam	672,77	180,58	853,35	2,77
28.	Warunggunung	641,88	1.613,96	2.255,84	7,32
	Luas Total	16.269,00	14.529,49	30.798,49	

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

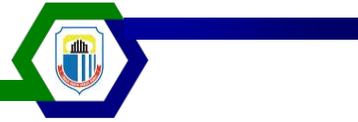


Gambar 2.22
Peta Rencana Kawasan Permukiman



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Untuk lebih ringkasnya, struktur ruang dan pola ruang dapat Kabupaten Lebak tahun 2014-2034 dilihat pada tabel 2.14 berikut.

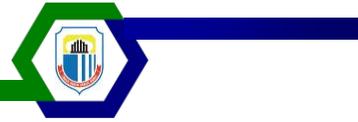


Tabel 2.14
Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2034

No.	Uraian	Rencana Pentahapan Pemanfaatan sesuai RTRW										
		Indikasi Program	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
					Lima tahun ke-I					Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
					2014	2015	2016	2017	2018			
Struktur Ruang Wilayah												
I.	Rencana pengembangan pusat kegiatan	Program perwujudan pengembangan pusat kegiatan	Pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Rangkasbitung								
			Pengembangan dan Penataan PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi)	Bayah dan Maja								
			Pengembangan dan Penataan PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	Malingping								
			Pengembangan PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)	Cipanas dan Panggarangan								
			Pengembangan PPK (Pusat Kegiatan Kawasan)	Ibukota Kecamatan selain PKW, PKWp, PKLp dan PKL								
			Pengembangan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) pada masing-masing pusat Desa/Kelurahan	61 desa								



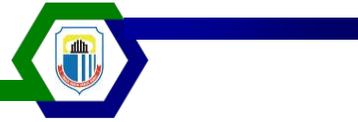
No.	Uraian	Rencana Pentahapan Pemanfaatan sesuai RTRW											
		Indikasi Program	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								
					Lima tahun ke-I					Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV	
2014	2015	2016	2017	2018									
II.	Rencana jaringan transportasi	Program perwujudan sistem jaringan prasarana	Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi										
			Pengembangan jaringan jalan	Batas Pandeglang-Cikulus-Gunungkencana-Cibadak									
				Batas Pandeglang-Kota Rangkasbitung									
				Ruas-ruas jalan Cipanas-Batas Kabupaten Bogor									
				Ruas jalan Simpang-Batas Kabupaten Pandeglang									
				Ruas-ruas jalan Simpang-Kota Rangkasbitung									
				Ruas-ruas jalan Bayah-Batas Sukabumi									
				Ruas-ruas jalan lokal di Kabupaten Lebak									
			Pengembangan Prasarana Terminal Penumpang										
			- Peningkatan Kelas Terminal Penumpang Tipe B menjadi Tipe A	Cibadak									



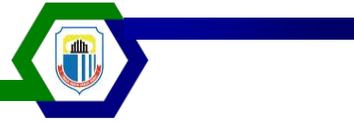
No.	Uraian	Rencana Pentahapan Pemanfaatan sesuai RTRW										
		Indikasi Program	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
					Lima tahun ke-I					Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
2014	2015	2016	2017	2018								
			- Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Tipe B	Malingping, Bayah		■	■					
			- Peningkatan Sub Terminal menjadi Tipe C	Rangkasbitung, Warunggunung, Wanasalam			■	■	■			
			- Pembangunan Terminal Tipe C	Maja, Leuwidamar, Panggarangan			■	■	■			
			Pengembangan Prasarana Terminal Barang :									
			- Pengembangan terminal barang di Kecamatan Maja	Maja					■	■		
			Pengembangan Jaringan Pelayanan Lalu Lintas	Seluruh wilayah Kabupaten Lebak					■	■		
			Perkeretaapian									
			Pengembangan jaringan prasarana kereta api regional yang menghubungkan pada kawasan wisata di wilayah Banten Selatan	Bayah, Panggarangan, Cihara, Malingping, Banjarsari						■	■	
			Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan prasarana kereta api yang padat melayani	Rangkasbitung						■	■	



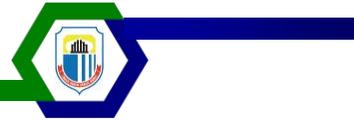
No.	Uraian	Rencana Pentahapan Pemanfaatan sesuai RTRW										
		Indikasi Program	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
					Lima tahun ke-I					Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
2014	2015	2016	2017	2018								
			transportasi perkotaan antara lain pada lintas Rangkasbitung - Serpong - Tanah Abang									
III.	Rencana jaringan energi	Program Perwujudan pengembangan sistem jaringan prasaana energi	Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari PLN Ranting Rangkasbitung secara bertahap hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lebak	PLN Ranting Rangkasbitung								
			Peningkatan kapasitas pembangkit listrik eksisting									
			Pengembangan prasarana pembangkit baru dengan alternatif sumber energi yang belum dimanfaatkan secara optimal (mikrohidro, panasbumi)	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
			Peningkatan kapasitas dan pelayanan Gardu Induk	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								



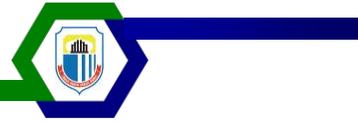
No.	Uraian	Rencana Pentahapan Pemanfaatan sesuai RTRW											
		Indikasi Program	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								
					Lima tahun ke-I					Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV	
2014	2015	2016	2017	2018									
			Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan TINGGI (SUTT)	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak									
			Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak									
			Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak									
IV.	Rencana jaringan telekomunikasi	Program Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	Pembangunan tower BTS bersama	PKW, PKWp, PKL, PKLp dan PPK									
			Pengembangan fasilitas internet gratis pada fasilitas publik	PKW, PKWp, PKL, PKLp dan PPK									
			Pengembangan jaringan serat optik	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak									
			Penyusunan kajian tata letak menara	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak									
			Penyusunan regulasi tentang tata letak menara	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak									



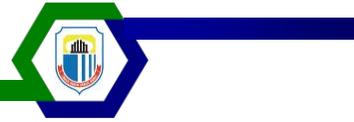
No.	Uraian	Rencana Pentahapan Pemanfaatan sesuai RTRW											
		Indikasi Program	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								
					Lima tahun ke-I					Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV	
					2014	2015	2016	2017	2018				
			Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel terutama untuk layanan kegiatan industri pada Pusat Kegiatan Utama Kabupaten	PKW, PKWp, PKL, PKLp dan PPK									
V.	Rencana sistem jaringan sumber daya air	Program Perwujudan pengembangan Sistem Prasaran Sumber Daya Air	Normalisasi sungai	Seluruh Daerah Irigasi di Kabupaten Lebak									
			Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan kapasitas jaringan irigasi	Wilayah yang terdapat Danau di Kabupaten Lebak									
			Rencana pemeliharaan dan pengelolaan jaringan beririgasi pada daerah irigasi (di) yang ada di kabupaten	Seluruh Daerah Irigasi di Kabupaten Lebak									
			Rencana peningkatan dan pengelolaan irigasi desa yang ada di kabupaten pendayagunaan potensi mata air dan air tanah	Seluruh Daerah Irigasi di Kabupaten Lebak									



No.	Uraian	Rencana Pentahapan Pemanfaatan sesuai RTRW										
		Indikasi Program	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
					Lima tahun ke-I					Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
2014	2015	2016	2017	2018								
VI.	Rencana sistem prasarana wilayah lainnya	Program Perwujudan Pengembangan Prasarana Wilayah Lainnya	Pengembangan sistem penyediaan air minum :									
			- Peningkatan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
			- Peningkatan kapasitas pelayanan/cakupan layanan	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
			- Pembangunan prasarana air bersih bagi masyarakat di pedesaan	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
			- Optimalisasi sumber air dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
			Pengembangan pengelolaan prasarana air limbah :									
			- Pembangunan pengolahan limbah khusus untuk RSUD Rangkasbitung	Rangkasbitung								



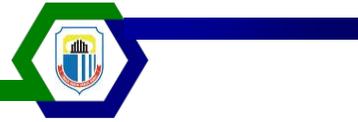
No.	Uraian	Rencana Pentahapan Pemanfaatan sesuai RTRW										
		Indikasi Program	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
					Lima tahun ke-I					Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
					2014	2015	2016	2017	2018			
			- Pembangunan IPAL untuk wilayah ibukota, wilayah utara dan selatan Kabupaten Lebak	PKW, PKWp, PKL, PKLp								
			- Peningkatan sarana pengolahan air limbah setempat bagi masyarakat di pedesaan dan pengolahan air limbah secara komunal untuk daerah perkotaan	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
			- Sosialisasi tentang sanitasi lingkungan yang sehat kepada masyarakat	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
			Pengelolaan prasarana persampahan :									
			- Penambahan jumlah truck sampah	PKW, PKWp, PKL, PKLp								
			- Peningkatan pengelolaan TPA	Kota Rangkasbitung dan Malingping								
			- Pembangunan TPA baru di Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Leuwidamar dan Panggarangan								



No.	Uraian	Rencana Pentahapan Pemanfaatan sesuai RTRW										
		Indikasi Program	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
					Lima tahun ke-I					Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
					2014	2015	2016	2017	2018			
			- Penambahan jumlah truck tinja	PKW, PKWp, PKL, PKLp								
			- Pembangunan TPS terutama pada daerah pemukiman	PKW, PKWp, PKL, PKLp								
			- Pembangunan pabrik pengolahan sampah kompos	PKW, PKWp, PKL, PKLp								
			- Perwujudan pengembangan jalur dam ruang evakuasi bencana	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
			Pengembangan pengelolaan prasarana drainase :									
			- Pengembangan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan wilayah sungai	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
			- Pengembangan sistem jaringan drainase terpadu di kawasan perkotaan yang rawan banjir	Kota Rangkasbitung, Kota Maja dan kawasan Wanasalam								



No.	Uraian	Rencana Pentahapan Pemanfaatan sesuai RTRW										
		Indikasi Program	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
					Lima tahun ke-I					Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
					2014	2015	2016	2017	2018			
			- Pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
Pola Ruang Wilayah												
I.	Rencana Kawasan Lindung	Program perwujudan kawasan lindung	Pemantapan kawasan hutan lindung	Kawasan hutan lindung di Kabupaten Lebak								
			Pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya	Kawasan lindung dan seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
			Pemantapan kawasan perlindungan setempat	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
			Pemantapan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya	TNGHS, Desa Baduy								
			Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana	Kawasan rawan bencana di Kabupaten Lebak								
II.	Rencana Kawasan Budidaya	Program perwujudan kawasan budidaya	Pengembangan kawasan hutan produksi	Kawasan hutan produksi di Kabupaten Lebak								
			Pengembangan kawasan hutan rakyat	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak								
			Pengembangan kawasan pertanian	Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Lebak								



No.	Uraian	Rencana Pentahapan Pemanfaatan sesuai RTRW											
		Indikasi Program	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								
					Lima tahun ke-I					Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV	
2014	2015	2016	2017	2018									
				Kawasan hortikultura di Kabupaten Lebak									
				Kawasan perkebunan di Kabupaten Lebak									
				Kawasan ternak di Kabupaten Lebak									
				Kawasan pertanian di Kabupaten Lebak									
			Pengembangan kawasan perikanan	Seluruh wilayah di Kabupaten Lebak									
			Pengembangan kawasan pariwisata	Kawasan Wisata di Kabupaten Lebak									
			Pengembangan kawasan industri	Kawasan industri di Kabupaten Lebak									
			Pengembangan kawasan pertambangan	Kawasan pertambangan di Kabupaten Lebak									
			Pengembangan kawasan permukiman	Kawasan permukiman di Kabupaten Lebak									
			Pengembangan kawasan lainnya :										
			- Pengembangan budidaya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	Wilayah Kabupaten Lebak									
			- Penyusunan master plan dan detail engineering design kawasan	Wilayah Kabupaten Lebak									



No.	Uraian	Rencana Pentahapan Pemanfaatan sesuai RTRW										
		Indikasi Program	Arah Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
					Lima tahun ke-I					Lima tahun ke-II	Lima tahun ke-III	Lima tahun ke-IV
					2014	2015	2016	2017	2018			
			perdagangan dan jasa									
			- Pengendalian pemanfaatan ruang di dalam kawasan perdagangan dan jasa	Wilayah Kabupaten Lebak								
			- Relokasi kawasan perdagangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya	Wilayah Kabupaten Lebak								
			- Pengembangan prasarana perdagangan regional pada pusat kegiatan PKW, PKL dan PPK	Wilayah Kabupaten Lebak								
			- Pengembangan prasarana perdagangan lingkungan lokal pada pusat kegiatan PPL	Wilayah Kabupaten Lebak								
			- Pengembangan sarana dan prasarana pendukung	Wilayah Kabupaten Lebak								

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034



2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana yang ada di Kabupaten Lebak meliputi :

1. wilayah rawan bencana tsunami, terletak di bagian selatan (berbatasan dengan Samudera Indonesia) Kabupaten Lebak,
2. daerah rawan tergenang (banjir), terletak di bagian barat daya dan utara Kabupaten Lebak,
3. daerah rawan longsor, berada di bagian tengah Kabupaten Lebak, dan
4. wilayah yang relatif aman dari bencana alam berada di bagian barat dan utara Kabupaten Lebak.

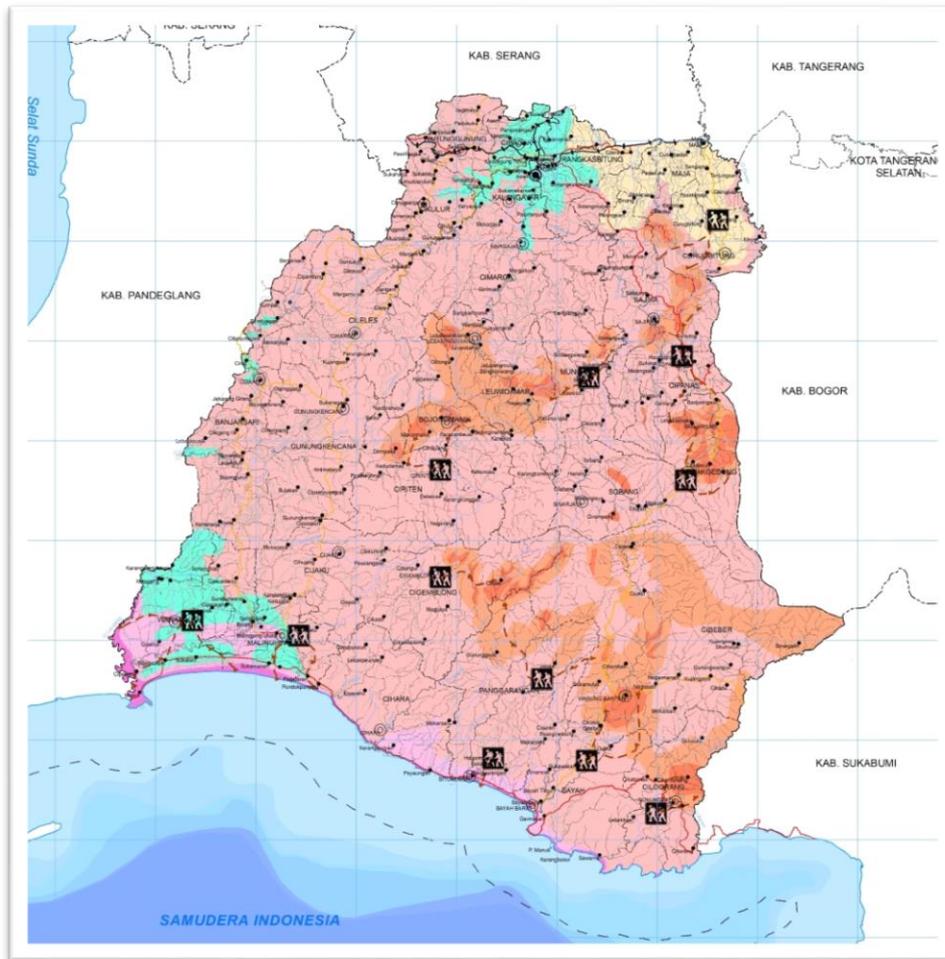
Tabel 2.15
Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Rawan Bencana				Total
		Daerah Aman	Rawan Longsor	Rawan Tergenang	Rawan Tsunami	
1	Malingping	42,41	4.521,89	3.089,22	2.547,95	10.201,47
2	Wanasalam		156,93	6.590,98	4.671,10	11.419,02
3	Panggarangan		16.663,91		1.051,61	17.715,51
4	Bayah		13.004,72		1.372,49	14.377,21
5	Cilograng		9.570,30		31,41	9.601,71
6	Cibeber	1.444,67	38.651,74			40.096,41
7	Cijaku	6.044,74	5.257,37	166,31		11.468,42
8	Banjarsari	3.126,51	12.023,09	805,90		15.955,50
9	Cileles	14.197,27	1.141,49			15.338,76
10	Gunungkencana	11.189,12	2.612,38			13.801,50
11	Bojongmanik	6.874,68	2.717,16			9.591,83
12	Leuwidamar	7.301,23	7.003,86			14.305,09
13	Muncang	2.711,83	5.983,54			8.695,38
14	Sobang	1.533,06	9.616,28			11.149,34
15	Cipanas	3.609,16	2.916,14			6.525,30
16	Sajira	4.228,34	6.238,29			10.466,64
17	Cimarga	5.208,41	13.183,32	360,92		18.752,65
18	Cikulur	5.852,11		330,87		6.182,97
19	Warunggunung	4.667,18		69,35		4.736,53
20	Cibadak	958,00		2.674,72		3.632,71
21	Rangkasbitung	2.573,16	1.497,29	3.239,25		7.309,70
22	Maja	5.951,07	1.862,60	3,46		7.817,14
23	Curugbitung	3.317,93	5.999,40			9.317,33
24	Cihara	3.861,49	6.102,64		2.505,72	12.469,86
25	Cigemblong	5.806,94	9.497,99			15.304,93
26	Cirinten	5.235,19	7.019,77			12.254,95
27	Lebakgedong	122,86	9.037,11			9.159,98
28	Kalanganyar	907,47	504,10	1.447,78		2.859,34
	Jumlah	106.764,83	192.783,31	18.778,74	12.180,28	330.507,16

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2013-2033



Gambar 2.23
Peta Rawan Bencana Kabupaten Lebak



Sumber : RTRW Kab. Lebak 2013-2033

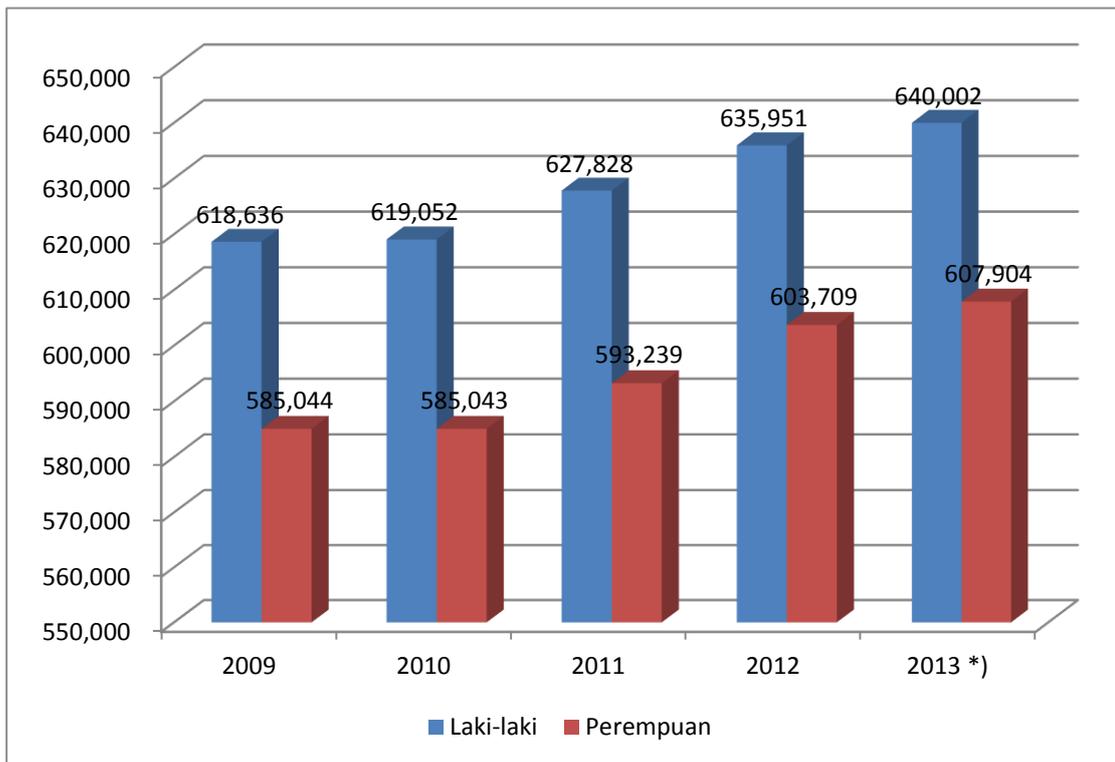
2.1.4 Demografi

Secara demografis, berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Lebak mencapai 1.204.095 jiwa dengan rasio ketergantungan (*sex ratio*) sebesar 105,81%. Angka ini bertambah setiap tahunnya menjadi 1.221.067 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 105,83% pada tahun 2011, pada tahun 2012 menjadi 1.239.660 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 105,34% dan pada tahun 2013 berdasarkan hasil estimasi jumlah penduduk Kabupaten Lebak menjadi 1.247.906 jiwa dengan *sex ratio* 105,28%. Berikut ini digambarkan



fluktuasi perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lebak dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sejak tahun 2009-2013 pada grafik 2.3 berikut ini.

Grafik 2.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Kab. Lebak
*) Hasil estimasi

Pada tahun 2009 terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 3,02% dibandingkan tahun 2008. Hal ini berkaitan dengan faktor urbanisasi yang cukup tinggi menuju wilayah jakarta, maupun banyaknya penduduk Kabupaten Lebak yang menjadi kaum *urban communter* yang sehari-hari bermatapencaharian di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan dari tahun 2010 sampai dengan 2012 rata-rata kenaikan jumlah penduduk sebesar 0,99%.

Dilihat dari distribusi penduduk per kecamatan, dapat dilihat bahwa kecamatan dengan penduduk paling banyak yaitu Kecamatan Rangkasbitung, selanjutnya Kecamatan Malingping dan Kecamatan Cimarga. Perkembangan jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut.



Tabel 2.16
Distribusi Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2009	2010	2011	2012	2013 *)
1.	Malingping	61.470	61.500	62.367	63.300	63.594
2.	Wanasalam	51.161	51.233	51.955	52.727	53.021
3.	Pangarangan	34.913	35.242	35.739	36.312	36.606
4.	Cihara	29.425	29.530	29.946	30.409	30.703
5.	Bayah	40.734	40.716	41.290	41.957	42.251
6.	Cilograng	31.882	31.689	32.136	32.645	32.939
7.	Cibeber	54.053	54.228	54.992	55.891	56.185
8.	Cijaku	26.884	26.876	27.255	27.670	27.964
9.	Cigemblong	19.542	19.527	19.802	20.124	20.418
10.	Banjarsari	57.295	57.384	58.193	59.094	59.388
11.	Cileles	46.627	46.684	47.342	48.076	48.370
12.	Gunungkencana	32.797	32.661	33.121	33.629	33.923
13.	Bojongmanik	21.243	21.206	21.505	21.840	22.134
14.	Cirinten	24.887	24.765	25.114	25.503	25.797
15.	Leuwidamar	50.555	50.430	51.141	51.899	52.193
16.	Muncang	31.475	31.615	32.061	32.535	32.829
17.	Sobang	28.337	28.361	28.761	29.207	29.501
18.	Cipanas	45.435	45.388	46.028	46.733	47.027
19.	Lebakgedong	21.531	21.537	21.841	22.131	22.425
20.	Sajira	46.170	46.366	47.020	47.739	48.033
21.	Cimarga	60.807	60.968	61.827	62.746	63.040
22.	Cikukur	46.632	46.627	47.284	47.984	48.278
23.	Warunggunung	52.335	52.302	53.039	53.834	54.128
24.	Cibadak	58.034	58.057	58.875	59.732	60.026
25.	Rangkasbitung	116.921	116.659	118.303	120.116	120.424
26.	Kalanganyar	31.995	31.982	32.433	32.900	33.194
27.	Maja	50.420	50.526	51.238	52.006	52.300
28.	Curugbitung	30.120	30.036	30.459	30.921	31.215
	Jumlah	1.203.680	1.204.095	1.221.067	1.239.660	1.247.906

Sumber : BPS Kab. Lebak

*) Hasil estimasi

Terkait dengan jumlah penduduk di atas, luasnya wilayah Kabupaten Lebak masih memiliki *carrying capacity* yang sangat tinggi, terutama dilihat dari kepadatan penduduk tiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Lebak secara umum bahkan terbilang masih sangat memadai meski di Kecamatan Rangkasbitung kepadatannya telah cukup tinggi, mencapai 2.426 jiwa/km². Gambaran tentang jumlah dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini.



Tabel 2.17
Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak
Menurut Kecamatan Tahun 2009-2013

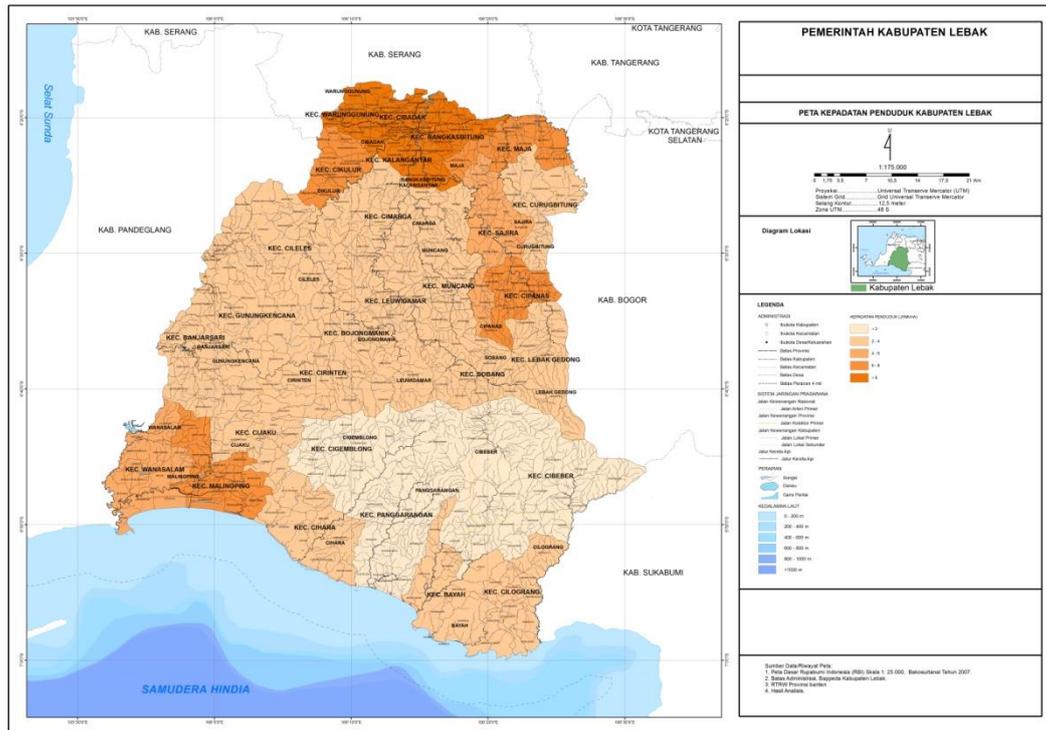
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2009	2010	2011	2012	2013 *)
1.	Malingping	602,56	602,85	611,35	620,50	623,38
2.	Wanasalam	448,03	448,66	454,99	461,75	464,32
3.	Panggarangan	197,08	198,93	201,74	204,97	206,63
4.	Cihara	235,97	236,81	240,15	243,86	246,22
5.	Bayah	283,32	283,20	287,19	291,83	293,87
6.	Cilograng	332,05	330,03	334,69	339,99	343,05
7.	Cibeber	134,81	135,24	137,15	139,39	140,12
8.	Cijaku	234,42	234,35	237,65	241,27	243,83
9.	Cigemblong	127,68	127,59	129,38	131,49	133,41
10.	Banjarsari	359,09	359,65	364,72	370,37	372,21
11.	Cileles	303,98	304,35	308,64	313,43	315,34
12.	Gunungkencana	237,63	236,65	239,98	243,66	245,79
13.	Bojongmanik	221,47	221,08	224,20	227,69	230,76
14.	Cirinten	203,08	202,08	204,93	208,10	210,50
15.	Leuwidamar	353,41	352,53	357,50	362,80	364,86
16.	Muncang	361,97	363,58	368,71	374,16	377,55
17.	Sobang	254,16	254,37	257,96	261,96	264,60
18.	Cipanas	696,29	695,57	705,38	716,18	720,69
19.	Lebakgedong	235,06	235,12	238,44	241,61	244,81
20.	Sajira	441,12	442,99	449,24	456,11	458,92
21.	Cimarga	324,26	325,12	329,70	334,60	336,17
22.	Cikulur	754,20	754,12	764,75	776,07	780,82
23.	Warunggunung	1.104,92	1.104,23	1.119,79	1.136,57	1.142,78
24.	Cibadak	1.597,54	1.598,17	1.620,69	1.644,28	1.652,38
25.	Rangkasbitung	1.599,53	1.595,95	1.618,44	1.643,24	1.647,45
26.	Kalanganyar	1.118,96	1.118,51	1.134,28	1.150,62	1.160,90
27.	Maja	644,99	646,35	655,46	665,28	669,04
28.	Curugbitung	323,27	322,37	326,91	331,87	335,02
	Kabupaten Lebak	364,19	364,32	369,45	375,08	377,57

Sumber : Pengolahan Bappeda Kabupaten Lebak

Tabel 2.17 di atas menggambarkan distribusi jumlah penduduk per kecamatan, persebaran dan kepadatannya, diketahui bahwa kecamatan di wilayah perkotaan selain Kecamatan Rangkasbitung seperti Kecamatan Cibadak, Kecamatan Warunggunung dan Kecamatan Kalanganyar sudah mulai dilirik sebagai tujuan utama penduduk untuk tinggal dan berusaha.



Gambar 2.24
Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak

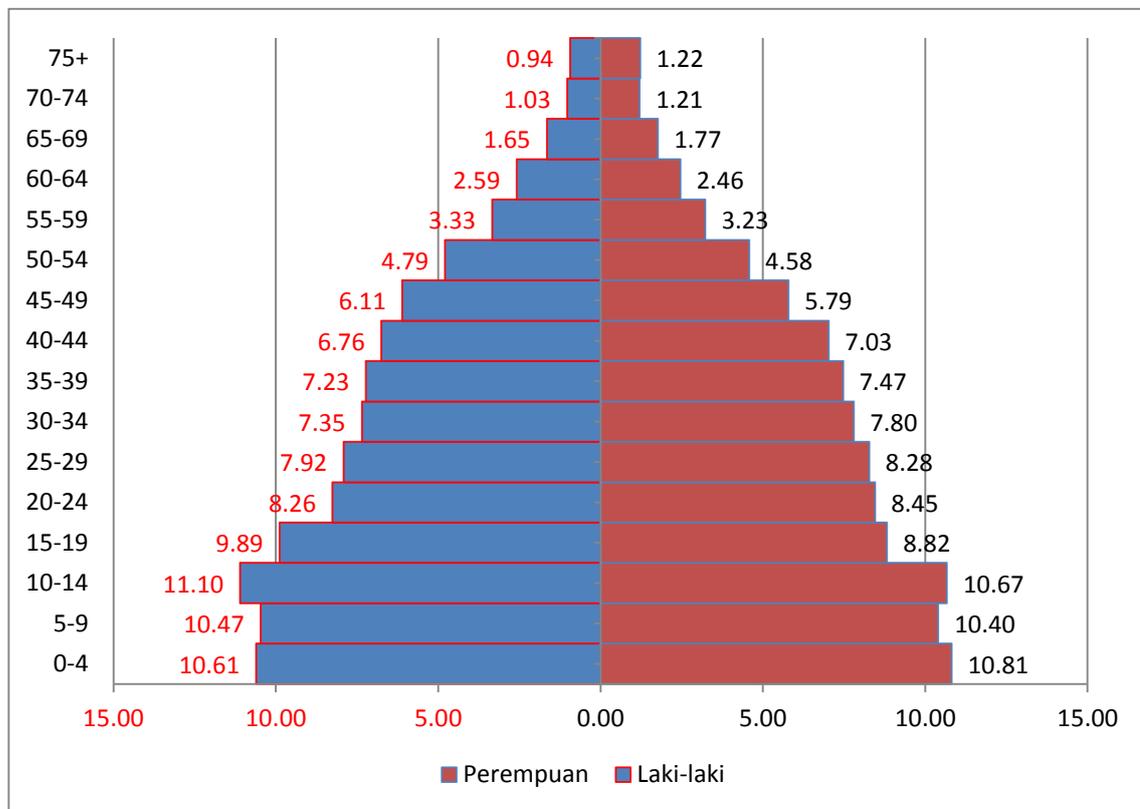


Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034

Sementara bila dilihat dari struktur usianya, penduduk Kabupaten Lebak tahun 2013 didominasi oleh penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun sebanyak 799.528 jiwa atau 64,07%, usia non produktif yakni usia 0 – 14 tahun dan usia diatas 65 tahun masing-masing sebesar 399.728 jiwa (32,03%) dan 48.650 (3,90%) Gambaran lengkap tentang hal ini dapat dilihat dari piramida penduduk pada grafik 2.4 sebagai berikut.



Grafik 2.4
Piramida Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2013



Sumber : BPS Kabupaten Lebak Tahun 2014, Hasil Estimasi

2.1.5 Pembangunan Wilayah Terpadu

Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) adalah pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Pembangunan Wilayah Terpadu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perumusan arah kebijakan dan sasaran RPJMD berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu.



2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur secara makro dari beberapa indikator makro ekonomi, antara lain: capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, Laju Inflasi, dan Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan. Meski indikator-indikator di atas tidak memotret secara detail kondisi kesejahteraan rakyat pada level mikro, namun indikator-indikator tersebut umumnya digunakan guna mengukur aspek kesejahteraan rakyat secara umum.

1) Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui tingkat struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per Kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

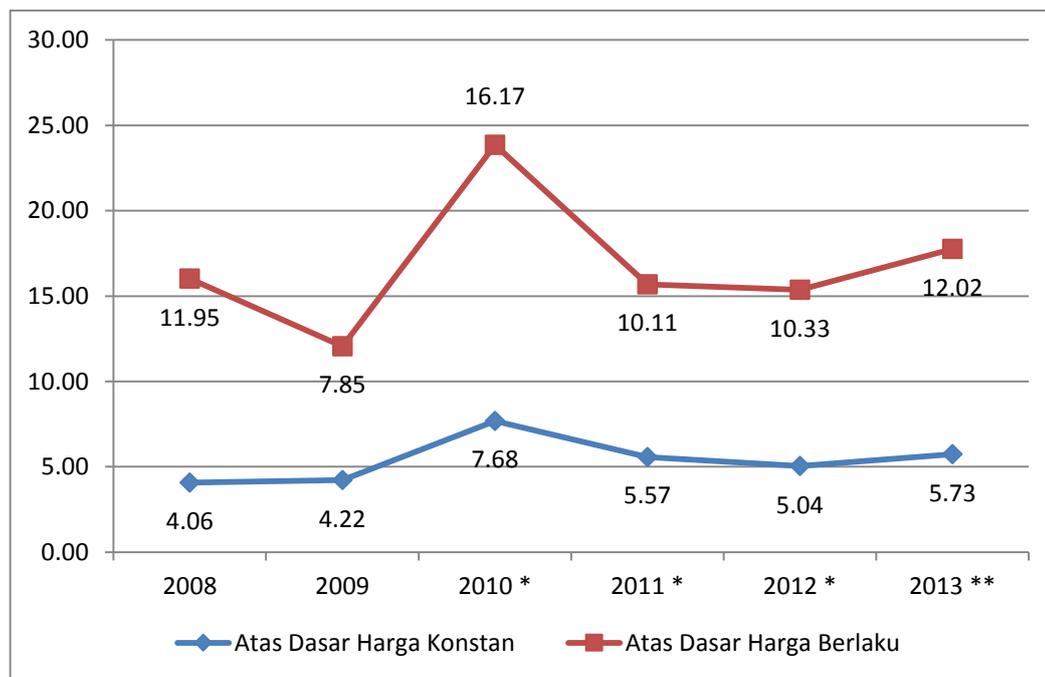
Laju Pertumbuhan Ekonomi merepresentasi kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun, yang diperoleh dari hasil perbandingan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB itu sendiri merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau periode tertentu.

Selama kurun waktu tahun 2008-2010, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak cenderung meningkat, akan tetapi pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan yang sangat besar. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan laju pertumbuhan di sektor primer terutama sektor pertanian dan peningkatan laju pertumbuhan di sektor sekunder dan tersier. Berdasarkan nilai PDRB,



perkembangan sektor pertanian meningkat akan tetapi mengalami perlambatan setiap tahunnya.

Grafik 2.5
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak
Tahun 2008 - 2013



Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2013

*) Angka Perbaikan

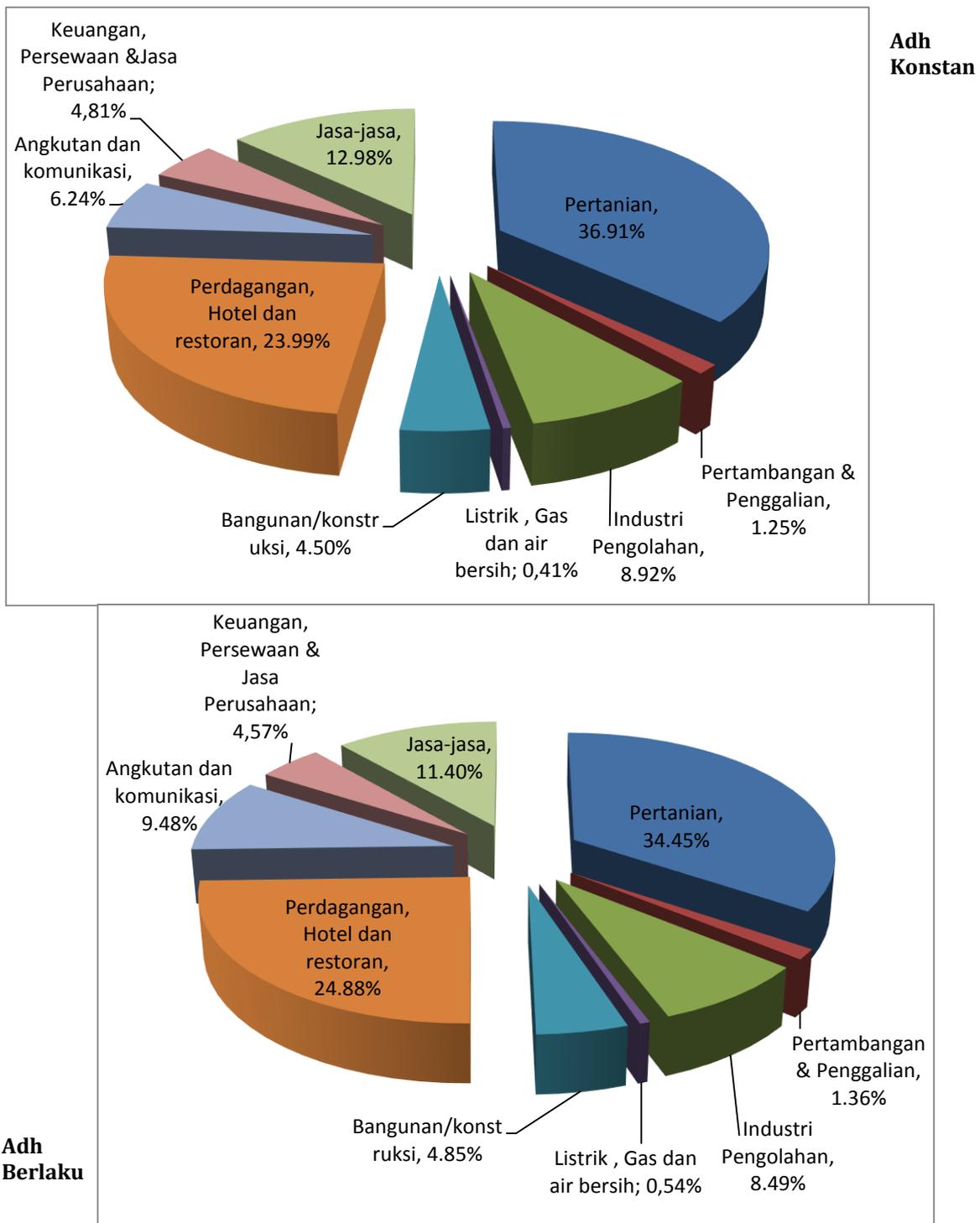
***) Angka Sementara

Grafik di atas, menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Konstan 2000 selama periode tahun 2008-2013. LPE Kabupaten Lebak dari tahun 2008-2013 rata-rata di atas 4%. Pada tahun 2012 mencapai pertumbuhan sebesar 5,04% dan di tahun 2013 mencapai 5,73%. Pertumbuhan ekonomi tersebut banyak dikontribusi oleh sektor primer, khususnya sektor pertanian yang kontribusinya rata-rata mencapai 36,91% dari nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2008-2013, disusul oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi sebesar 23,99%. Sementara sektor jasa-jasa, serta industri pengolahan hanya menyumbang 12,98% dan 8,92% terhadap total PDRB Kabupaten Lebak. Gambaran mengenai konstruksi perekonomian daerah di Kabupaten Lebak dapat dilihat dari rerata kontribusi



sektoral terhadap nilai PDRB atas dasar harga konstan dan harga berlaku selama periode tahun 2008-2013 dapat dilihat pada grafik 2.6.

Grafik 2.6
Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Konstan dan Harga Berlaku
2000 Tahun 2008-2013



Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2013



Masih dominannya kontribusi sektor pertanian adalah konsekuensi logis dari karakteristik wilayah Kabupaten Lebak yang berciri agraris. Ketersediaan lahan pertanian dan dukungan tenaga kerja yang cukup berlimpah di sektor ini membuat nilai tambah produk-produk pertanian dominan mempengaruhi pembentukan PDRB Kabupaten Lebak, meski sesungguhnya kapasitas untuk meningkatkan nilai tambah di sektor ini masih relatif kecil bila dibandingkan dengan sektor lainnya.

Dilihat dari sebaran per kecamatan, pertumbuhan ekonomi terbesar di Kecamatan Rangkasbitung sebesar 9,76%, selanjutnya Kecamatan Sajira sebesar 7,74% dan Kecamatan Bayah sebesar 7,44%. Sementara itu, kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi terendah yaitu Kecamatan Cijaku sebesar 2,22%, Kecamatan Panggarangan sebesar 2,24%, dan Kecamatan Bojongmanik sebesar 2,53%.

Tabel 2.18
Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Lebak
Tahun 2008-2013

No.	Kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi (%)					
		2008	2009	2010 *	2011 *	2012 *	2013 **
1.	Malingping	1,96	4,25	4,99	5,39	5,42	6,88
2.	Wanasalam	4,97	3,96	6,88	8,25	7,65	3,12
3.	Panggarangan	3,55	1,43	2,24	2,26	2,14	2,24
4.	Cihara	-	4,95	3,01	2,94	3,46	7,04
5.	Bayah	3,75	5,61	5,74	5,92	7,47	7,44
6.	Cilograng	2,84	3,79	4,93	5,38	4,20	5,05
7.	Cibeber	6,99	4,78	6,29	5,97	6,87	4,24
8.	Cijaku	1,17	1,52	3,04	2,19	1,74	2,22
9.	Cigemblong	-	5,11	4,73	3,74	6,05	3,73
10.	Banjarsari	3,58	3,32	4,35	3,87	2,49	3,65
11.	Cileles	2,35	2,83	3,42	2,99	3,30	5,67
12.	Gunungkencana	2,51	3,23	3,86	3,34	3,15	2,98
13.	Bojongmanik	2,25	1,96	3,05	2,96	2,32	2,53
14.	Cirinten	-	3,33	4,68	5,07	4,05	3,84
15.	Leuwidamar	3,28	5,55	5,60	4,60	3,72	5,32
16.	Muncang	3,67	6,42	3,70	3,39	2,61	5,12
17.	Sobang	3,16	3,49	4,16	3,40	3,47	6,89
18.	Cipanas	2,83	2,30	2,99	3,19	3,01	3,24
19.	Lebakgedong	-	5,45	6,39	4,99	4,41	4,82
20.	Sajira	3,14	4,02	4,20	4,74	4,44	7,74
21.	Cimarga	2,04	4,65	3,70	4,57	6,04	4,48
22.	Cikukur	2,43	4,26	4,07	4,84	4,52	5,68
23.	Warunggunung	3,27	4,36	4,45	5,51	5,68	4,93



No.	Kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi (%)					
		2008	2009	2010 *	2011 *	2012 *	2013 **
24.	Cibadak	2,76	3,44	4,73	5,52	5,57	5,44
25.	Rangkasbitung	5,34	5,49	5,81	6,85	8,82	9,76
26.	Kalanganyar	-	5,84	5,24	5,21	6,96	6,93
27.	Maja	3,26	5,58	3,72	4,11	5,71	5,83
28.	Curugbitung	3,20	3,58	3,04	2,81	3,58	3,43

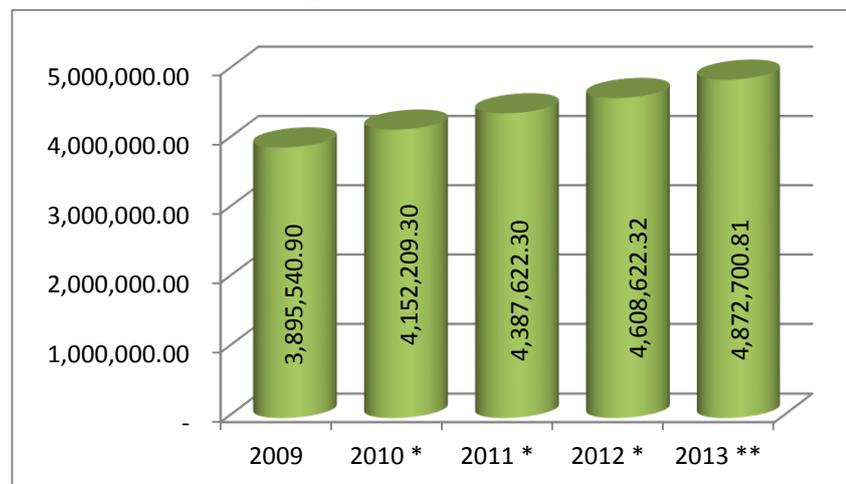
Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2013

*) Angka Perbaikan

***) Angka Sementara

Secara makro ekonomi Kabupaten Lebak terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan ini akan terus berlanjut mengingat kecenderungan perekonomian Kabupaten Lebak yang diperkirakan tidak lagi bergantung pada sektor primer karena berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Iklim usaha yang kian kondusif diyakini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai total PDRB di masa depan. Berdasarkan hasil estimasi, besaran nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 tahun 2013 adalah Rp. 4.872.700,81 (dalam Juta) dan Rp. 11.509.416,62 (dalam Juta) untuk nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, maka selama lima tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 5,64% dan 11,25%. Gambaran tentang perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 serta Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lebak dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.7 berikut.

Grafik 2.7
Perkembangan
PDRB
Kabupaten
Lebak
AdhK 2000
Tahun
2009-2013
(Dalam
Jutaan Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2013

*) Angka Perbaikan

***) Angka Sementara



Berdasarkan sektor ekonomi, perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19
Nilai PDRB Tahun 2008-2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Kabupaten Lebak Berdasarkan Sektor Ekonomi

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)				
	2009	2010 *	2011 *	2012 *	2013 **
Pertanian	1.464.061,43	1.568.877,39	1.610.386,11	1.653.902,67	1.734.375,90
Pertambangan & Penggalian	47.607,30	50.201,27	54.525,16	58.733,73	62.210,69
Industri Pengolahan	360.130,70	367.914,86	381.613,60	396.856,21	416.227,99
Listrik, Gas & Air Bersih	15.720,93	16.478,29	17.627,31	19.870,39	20.658,57
Bangunan	169.478,99	183.090,99	198.714,13	214.772,66	232.693,29
Perdagangan, Hotel & Restoran	899.393,51	982.061,55	1.072.572,38	1.141.408,61	1.210.953,18
Pengangkutan & Komunikasi	240.237,64	255.957,31	274.177,39	293.984,38	312.465,66
Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	186.391,85	197.627,99	211.740,14	227.545,35	244.957,78
Jasa-jasa	512.518,54	529.999,66	566.266,08	601.548,32	638.157,75
PDRB	3.895.540,90	4.152.209,30	4.387.622,30	4.608.622,32	4.872.700,81

Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2013

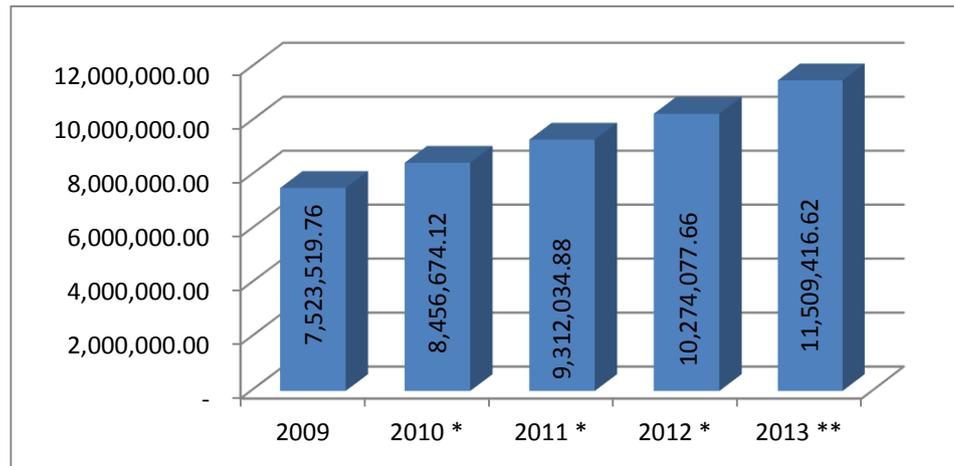
*) Angka Perbaikan

***) Angka Sementara

Kondusifitas iklim usaha di daerah juga dapat dilihat dari perkembangan PDRD atas dasar harga berlaku. Berdasarkan hasil estimasi nilai PDRB pada tahun 2013 sebesar Rp. 11.509.416,62 (dalam juta), sehingga dalam lima tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 11,25%. Gambaran tentang perkembangan PDRB sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada grafik 2.8 berikut.



Grafik 2.8
Perkembangan
PDRB
Kabupaten
Lebak
AdhB
Tahun
2009-2013
(Dalam
Jutaan Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2013

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Belaku berdasarkan sektor ekonomi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut.

Tabel 2.20
Nilai PDRB Tahun 2008-2013 Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Lebak

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2009	2010 *	2011 *	2012 *	2013 **
Pertanian	2.600.104,55	2.998.488,97	3.197.585,26	3.429.432,51	3.876.579,81
Pertambangan & Penggalian	100.954,12	114.029,49	125.487,38	141.201,48	153.088,89
Industri Pengolahan	673.476,02	707.684,75	763.949,80	823.819,13	902.448,67
Listrik, Gas & Air Bersih	41.004,54	43.888,14	49.067,70	55.847,00	59.965,64
Bangunan	349.625,59	411.564,22	467.977,89	527.351,44	602.721,56
Perdagangan, Hotel & Restoran	1.844.412,66	2.079.937,63	2.336.451,95	2.606.887,18	2.940.445,43
Pengangkutan & Komunikasi	726.985,33	803.048,02	884.594,91	968.115,55	1.062.070,07
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	346.741,99	381.144,80	422.544,92	473.390,56	534.652,53
Jasa-jasa	840.214,96	916.888,10	1.064.375,07	1.248.032,81	1.377.444,02
PDRB	7.523.519,76	8.456.674,11	9.312.034,88	10.274.077,66	11.509.416,62

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2013

*) Angka Perubahan

**) Angka Sementara



Sementara itu, dari sisi perkembangan distribusi dan kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2009-2013 dapat diketahui bahwa sektor dengan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor lain sudah mulai mengalami perkembangan terutama sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa yang mana selama kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan positif. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21
Perkembangan Kontribusi Sektor pada PDRB Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013

Lapangan Usaha	ADHB (%)					ADHK Tahun 2000 (%)				
	2009	2010*	2011*	2012*	2013**	2009	2010*	2011*	2012*	2013**
Pertanian	34,56	35,46	34,34	33,38	33,68	37,58	37,78	36,70	35,89	35,59
Pertambangan & Penggalian	1,34	1,35	1,35	1,37	1,33	1,22	1,21	1,24	1,27	1,28
Industri Pengolahan	8,95	8,37	8,20	8,02	7,84	9,24	8,86	8,70	8,61	8,54
Listrik, Gas & Air Bersih	0,55	0,52	0,53	0,54	0,52	0,40	0,40	0,40	0,43	0,42
Bangunan	4,65	4,87	5,03	5,13	5,24	4,35	4,41	4,53	4,66	4,78
Perdagangan, Hotel & Restoran	24,52	24,60	25,09	25,37	25,55	23,09	23,65	24,45	24,77	24,85
Pengangkutan & Komunikasi	9,66	9,50	9,50	9,42	9,23	6,17	6,16	6,25	6,38	6,41
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,61	4,51	4,54	4,61	4,65	4,78	4,76	4,83	4,94	5,03
Jasa-jasa	11,17	10,84	11,43	12,15	11,97	13,16	12,76	12,91	13,05	13,10
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2013

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Tahun 2009-2013. Pertumbuhan sektor PDRB ADHB Kabupaten Lebak terjadi di sektor bangunan dengan rata-rata pertumbuhan 15,58%, sektor jasa dengan rata-rata pertumbuhan 13,50% dan sektor perdagangan, hotel dan



restoran dengan rata-rata pertumbuhan 13,19%. Sedangkan pertumbuhan sektor PDRB ADHK yang tertinggi adalah sektor bangunan dengan rata-rata pertumbuhan 7,10%, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan rata-rata pertumbuhan 6,92% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan rata-rata pertumbuhan 6,75%.

Tabel 2.22
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 dan ADHB
Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

Lapangan Usaha	ADHB (%)					ADHK Tahun 2000 (%)				
	2009	2010*	2011*	2012*	2013**	2009	2010*	2011*	2012*	2013**
Pertanian	9,16	15,32	6,64	7,25	13,04	4,36	7,16	2,65	2,70	4,87
Pertambangan & Penggalian	6,67	12,95	10,05	12,52	8,42	1,58	5,45	8,61	7,72	5,92
Industri Pengolahan	4,50	5,08	7,95	7,84	9,54	1,57	2,16	3,72	3,99	4,88
Listrik, Gas & Air Bersih	7,03	7,03	11,80	13,82	7,37	3,98	4,82	6,97	12,73	3,97
Bangunan	23,63	17,72	13,71	12,69	14,29	7,12	8,03	8,53	8,08	8,34
Perdagangan, Hotel & Restoran	13,12	12,77	12,33	11,57	12,80	5,06	9,19	9,22	6,42	6,09
Pengangkutan & Komunikasi	12,64	10,46	10,15	9,44	9,70	6,72	6,54	7,12	7,22	6,29
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	13,91	9,92	10,86	12,03	12,94	11,64	6,03	7,14	7,46	7,65
Jasa-jasa	14,78	9,13	16,09	17,25	10,37	7,27	3,41	6,84	6,23	6,09

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2013

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

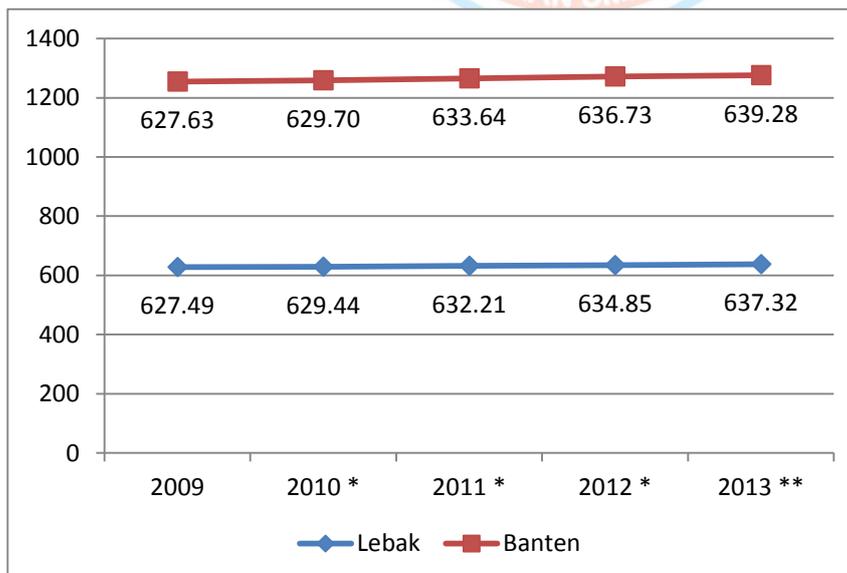
Berdasarkan data-data tersebut diatas, pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak atas dasar harga berlaku sampai dengan tahun 2013 tumbuh sebesar 12,02% atau bertambah dari 10,27 triliun rupiah pada tahun 2012 menjadi 11,51 triliun rupiah. Hal yang sama juga terjadi di Banten, yaitu tahun 2013 terjadi kenaikan yang tinggi dengan PDRB Kabupaten Lebak yaitu sebesar 14,70% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau secara nominal naik sebesar 244,55 triliun rupiah. Bila kita ambil rata-rata perkembangan dari tiap-tiap



kabupaten/kota berdasarkan perkembangan nilai PDRB provinsi, maka pada tahun 2013 level perekonomian di Kabupaten Lebak masih jauh dibawah rata-rata Provinsi Banten, yaitu sekitar 4,76% dari perkembangan Banten atau sekitar 38% dari nilai rata-rata.

2) PDRB Per Kapita

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah Indeks Daya Beli Masyarakat yang merupakan salah satu komponen utama pengukuran Indeks Pembangunan Manusia. Meski peningkatannya tidak begitu besar namun daya beli masyarakat terbukti cenderung naik dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2009 indeks daya beli masyarakat sebesar 61,82 pada tahun 2009 menjadi 62,27 pada tahun 2010. Naiknya indeks daya beli ini menunjukkan adanya kenaikan pada pengeluaran riil perkapita masyarakat Kabupaten Lebak, sebagaimana dikonfirmasi oleh data BPS pada tahun 2010 yang menunjukkan naiknya pengeluaran riil sebesar 0,31% dari sebesar Rp. 627.490,- pada tahun 2009, menjadi sebesar Rp. 629.440,- pada tahun 2010 dan Rp. 637.320,- pada tahun 2013. Gambaran tentang trend kenaikan pengeluaran perkapita dimaksud tampak nyata sebagaimana digambarkan pada grafik 2.9 sebagai berikut.



Grafik 2.9
Pengeluaran
Per Kapita
Kabupaten Lebak
2009-2013
(Dalam Ribuan
Rupiah)

Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2013

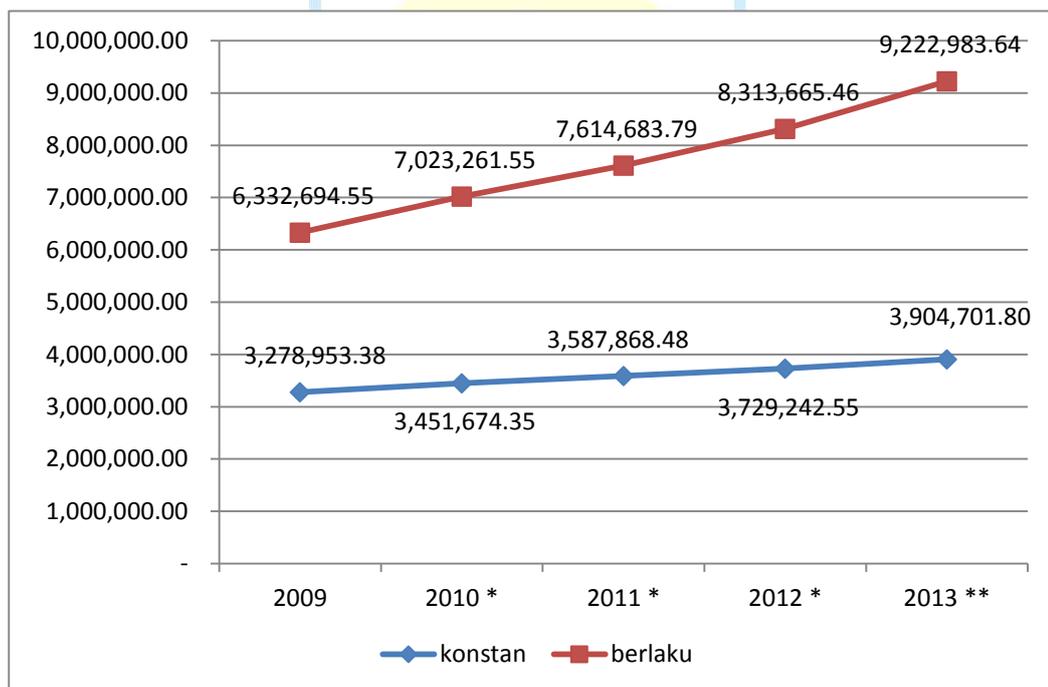
*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara



Kecenderungan meningkatnya kesejahteraan rakyat juga tercermin dari trend peningkatan nilai PDRB per kapita baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Sejak tahun 2009 hingga 2013, PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2000 naik rata-rata sebesar 4,30% dari sebesar Rp. 3,28 juta per jiwa pada tahun 2009 menjadi Rp. 3,90 juta per jiwa pada tahun 2013. Demikian pula dengan PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku yang naik rata-rata sebesar 9,84% dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari sebesar Rp. 6,33 juta per jiwa pada tahun 2009 menjadi Rp. 9,22 juta per jiwa pada tahun 2013. Gambaran tentang trend peningkatan PDRB per kapita ini dapat dilihat pada grafik 2.10.

Grafik 2.10
PDRB Per Kapita
Kabupaten Lebak 2009-2013



Sumber : BPS Kabupaten Lebak, 2013

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara



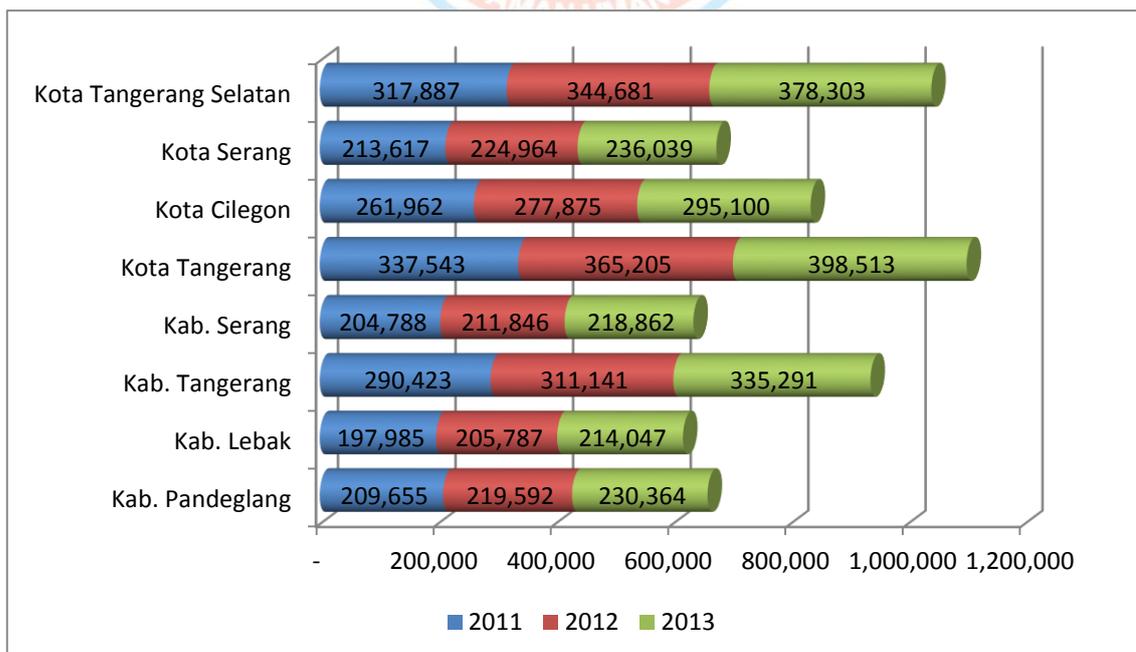
3) Penduduk Miskin

Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non pangan. Standar yang ditetapkan untuk garis kemiskinan yaitu, (1) Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi, dan (2) Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komiti di perdesaan. Apabila proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan nasional maka dikategorikan penduduk miskin.

Jika dilihat dari Garis Kemiskinan, Kabupaten Lebak merupakan kabupaten dengan tingkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasar paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten yaitu sebesar 214.047 rupiah/kapita/bulan.

Grafik 2.11
Perbandingan Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)
Menurut Kabupaten Tahun 2011-2013

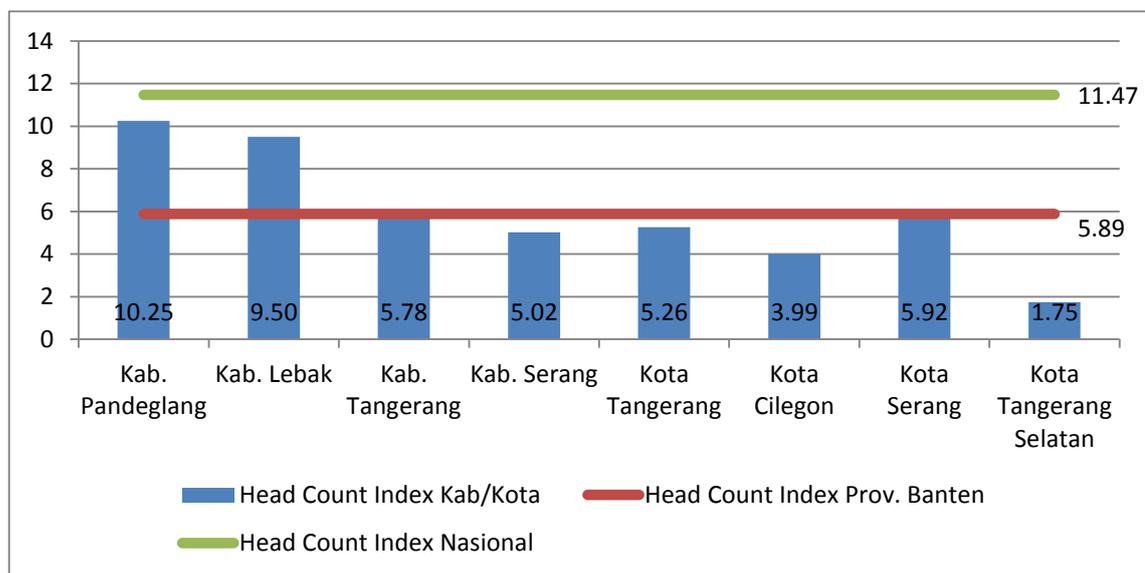


Sumber: BPS Provinsi Banten, 2013



Berdasarkan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan, pada tahun 2013 Kabupaten Lebak menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Pandeglang. Hal ini menunjukkan bahwa 9,50% penduduk Kabupaten Lebak berada di bawah garis kemiskinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.12.

Grafik 2. 12
Persentase Penduduk yang Berada Di Bawah Garis Kemiskinan
(Head Count Index) Tahun 2013



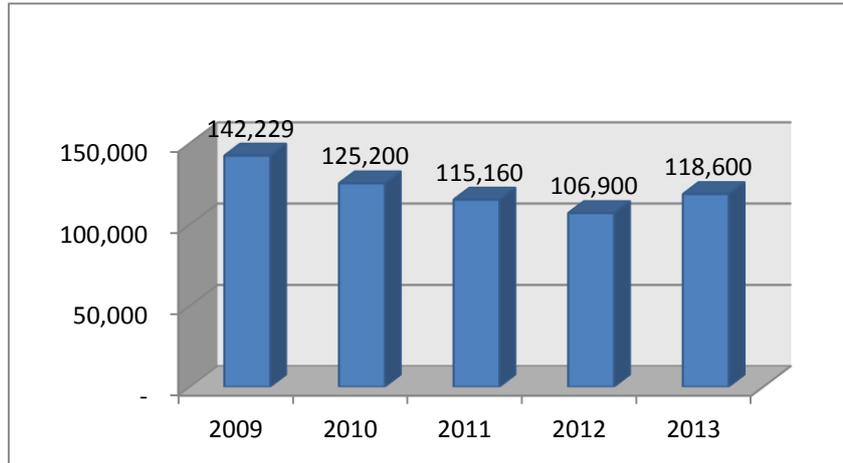
Sumber : Susenas

Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak pada tahun 2007 mencapai 160.000 jiwa (14,43%). Namun pada tahun 2013 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 118.600 jiwa (9,50%) jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 106.900 jiwa (8,63%). Perkembangan dan perbandingan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lebak disajikan dalam grafik 2.13.

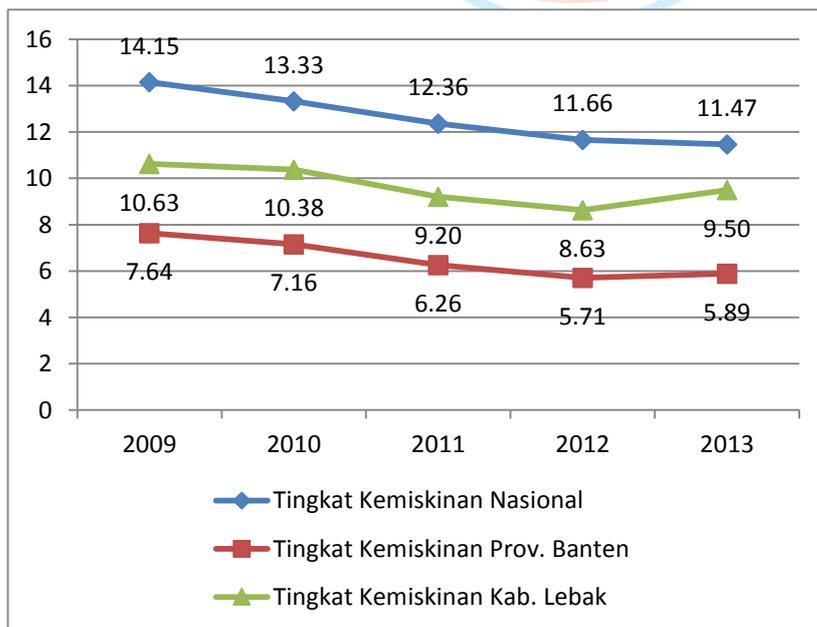


Grafik 2.13
Perkembangan
Jumlah Penduduk
Miskin (Jiwa) di
Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2013

Berdasarkan grafik 2.12 dan grafik 2.13, perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009-2012 mengalami penurunan dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,63% (149.229 jiwa) pada tahun 2009 menjadi 8,63% (106.900 jiwa) pada tahun 2013. Namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 9,50% (118.600 jiwa). Jika dilihat dari perbandingan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Lebak dengan Provinsi Banten dan Nasional, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2009-2012, akan tetapi tingkat kemiskinannya masih dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Banten. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dan pelaksanaan program yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lebak.



Grafik 2.14
Perkembangan
Tingkat
Kemiskinan (%)
Tahun 2009-2013

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2013

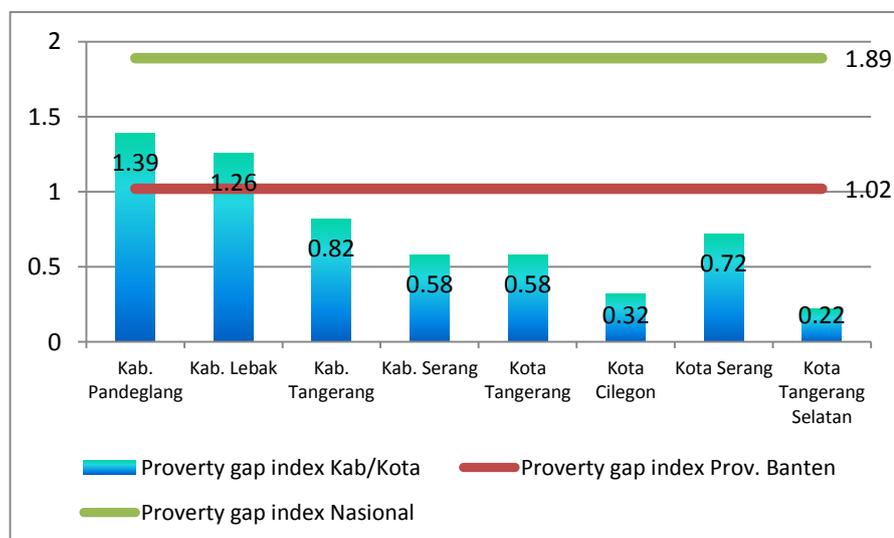


Ukuran Kemiskinan

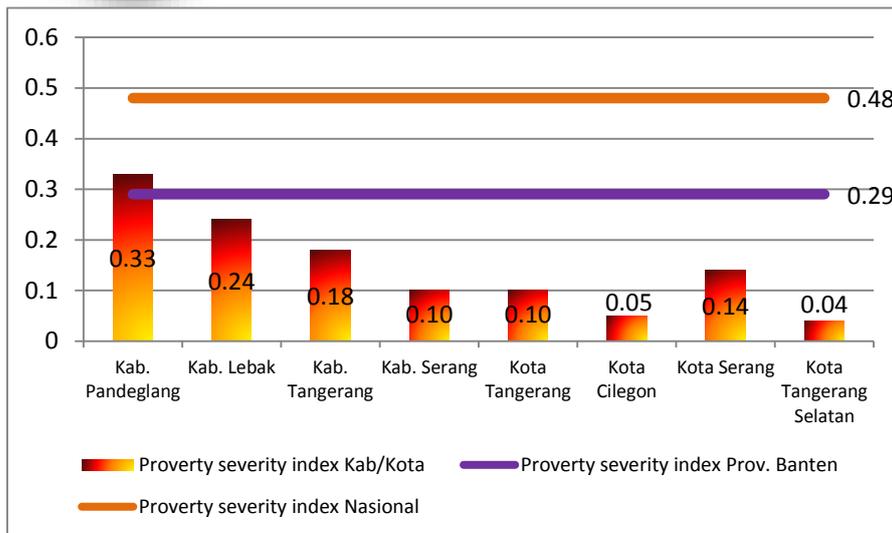
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (*Proverty Gap Index*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data tahun 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lebak sebesar 1,26% dan berada di atas rata-rata angka Provinsi Banten yaitu sebesar 1,02% dan di bawah angka nasional yaitu sebesar 1,89%. Dalam kurun waktu 2008-2013 perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Lebak cenderung menurun dari sebesar 1,68% menjadi 1,26%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Lebak dalam tiga tahun terakhir cukup efektif. Sedangkan Indeks Keparahahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Capaian indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Lebak pada tahun 2013 sebesar 0,24% atau di bawah rata-rata angka Provinsi Banten sebesar 0,29% dan di bawah rata-rata angka nasional sebesar 0,48%. Perbandingan ukuran kemiskinan disajikan dalam grafik 2.15.

Grafik 2.15
Perbandingan
Indeks
Kedalaman
Kemiskinan
Tahun 2013



Sumber : Susenas



Grafik 2.16
Perbandingan
Indeks
Keparahan
Kemiskinan
Tahun 2013

Sumber : Susenas

Berdasarkan grafik 2.16, Kabupaten Lebak menduduki urutan kedua tertinggi setelah Kabupaten Pandeglang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak mempunyai resiko yang relatif lebih rendah untuk menjadi miskin dengan tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 1,26% dan tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0,24%.

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011

Berdasarkan data BPS dan TNP2K, jumlah penduduk miskin berdasarkan sebaran per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut ini.

Tabel 2.23
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Lebak
Tahun 2008-2011

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga							
	Kelompok 1 (paling miskin)		Kelompok 2 (miskin)		Kelompok 3 (hampir miskin)		Total	
	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011
Malingping	2.013	1.553	3.622	3.420	2.650	3.226	8.285	8.199
Wanasalam	1.353	2.169	3.168	4.243	3.321	2.734	7.842	9.146
Panggarangan	395	486	1.781	1.892	2.604	2.079	4.780	4.457
Cihara	522	372	1.714	1.565	1.499	2.008	3.735	3.945
Bayah	526	336	1.040	1.084	1.791	1.491	3.357	2.911
Cilograng	453	313	1.593	1.225	1.706	1.584	3.752	3.122
Cibeber	639	554	2.944	2.566	2.668	3.154	6.251	6.274
Cijaku	509	510	1.409	1.675	1.777	1.720	3.695	3.905



Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga							
	Kelompok 1 (paling miskin)		Kelompok 2 (miskin)		Kelompok 3 (hampir miskin)		Total	
	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011
Cigemblong	495	403	1.928	1.566	1.628	1.763	4.051	3.732
Banjarsari	865	1.234	3.077	3.398	4.731	3.324	8.673	7.956
Cileles	794	1.133	2.551	2.206	3.177	1.690	6.522	5.029
Gunungkencana	855	667	2.118	1.926	2.562	2.131	5.535	4.724
Bojongmanik	186	288	717	1.522	1.011	1.295	1.914	3.105
Cirinten	361	356	1.395	1.577	1.644	1.914	3.400	3.847
Leuwidamar	912	1.389	1.818	2.380	2.473	2.140	5.203	5.909
Muncang	794	1.301	1.882	2.134	2.357	1.606	5.033	5.041
Sobang	405	406	1.562	1.737	3.224	2.125	5.191	4.268
Cipanas	654	672	1.680	1.445	2.818	1.507	5.152	3.624
Lebakgedong	337	441	806	937	1.174	866	2.317	2.244
Sajira	858	1.265	2.175	2.393	3.366	2.468	6.399	6.126
Cimarga	636	1.831	2.235	3.262	3.816	2.909	6.687	8.002
Cikukur	746	1.759	2.202	2.309	5.500	1.925	6.848	5.993
Warunggunung	472	1.258	1.742	1.997	4.072	1.939	6.286	6.194
Cibadak	712	899	1.864	2.071	4.461	2.304	7.037	5.274
Rangkasbitung	1.836	984	3.607	2.443	4.348	3.360	9.791	6.787
Kalanganyar	816	783	1.459	1.217	1.535	1.068	3.810	3.068
Maja	837	1.475	1.943	1.981	2.668	1.569	5.448	5.025
Curugbitung	437	688	1.383	1.561	2.390	1.741	4.210	3.990
Jumlah	25.525	20.418	57.732	55.415	57.640	75.371	151.204	140.897

Sumber : BPS dan TNP2K

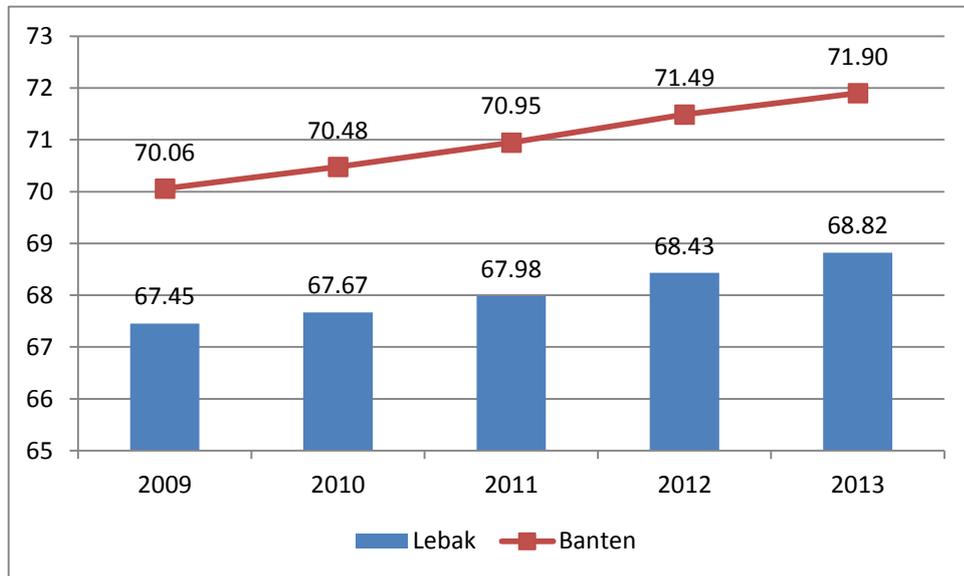
4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkat pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), serta pengeluaran per kapita guna akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Perkembangan IPM di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 0,50%, namun tingkat pencapaiannya masih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten seperti tergambar pada grafik 2.17 berikut.



Grafik 2.17
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013



Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2013

IPM Kabupaten Lebak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya menduduki peringkat paling kecil sebagaimana terlihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.24
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Se-Provinsi Banten Tahun 2011-2013

No.	Kabupaten/Kota	IPM		
		2011	2012	2013
1.	Pandeglang	68,77	69,22	69,64
2.	Lebak	67,98	68,43	68,82
3.	Tangerang	72,05	72,36	72,82
4.	Serang	69,33	69,83	70,25
5.	Kota Tangerang	75,44	75,72	76,05
6.	Kota Cilegon	75,60	75,89	76,31
7.	Kota Serang	71,45	72,30	73,12
8.	Kota Tangerang Selatan	76,01	76,61	77,13
BANTEN		70,95	71,49	71,90

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2013



Apabila dilihat dari tabel 2.24 di atas, program yang kongkrit dan berkelanjutan sangat diperlukan guna mengejar ketinggalan ketercapaian pembangunan manusia di Kabupaten Lebak. Berdasarkan 3 komponen IPM, program percepatan pembangunan di bidang ekonomi dan pendidikan diharapkan akan memberikan dampak pada bidang kesehatan. Dengan asumsi bahwa aksesibilitas pada bidang kesehatan akan semakin mudah karena dukungan dari keadaan ekonomi serta penyerapan informasi tentang kesehatan yang semakin baik.

Untuk meningkatkan IPM Kabupaten Lebak, maka IPM di setiap kecamatan perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Lebak. Estimasi Indeks Pembangunan Manusia diseluruh kecamatan di Kabupaten Lebak tersaji pada tabel 2.25.

Tabel 2.25
Estimasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Per-Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2013

No	Kecamatan	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	IPM
1.	Malingping	93,70	6,91	68,45
2.	Wanasalam	90,87	6,11	67,23
3.	Panggarangan	91,87	6,78	67,95
4.	Cihara	86,00	5,85	65,96
5.	Bayah	92,79	7,06	68,36
6.	Cilograng	94,33	6,59	68,36
7.	Cibeber	83,21	5,71	65,23
8.	Cijaku	87,73	5,74	66,26
9.	Cigemblong	76,88	4,43	62,88
10.	Banjarsari	93,14	6,53	68,04
11.	Cileles	93,26	6,37	67,95
12.	Gunungkencana	94,28	6,55	68,32
13.	Bojongmanik	82,41	5,32	64,76
14.	Cirinten	82,07	4,98	64,44
15.	Leuwidamar	70,57	4,61	61,61
16.	Muncang	93,38	6,39	67,99
17.	Sobang	83,01	5,30	64,88
18.	Cipanas	94,82	6,90	68,69
19.	Lebakgedong	90,57	4,84	66,23



No	Kecamatan	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	IPM
20.	Sajira	90,48	6,66	67,55
21.	Cimarga	92,63	6,32	67,77
22.	Cikukur	92,33	6,47	67,82
23.	Warunggunung	96,74	7,73	69,74
24.	Cibadak	94,81	7,66	69,26
25.	Rangkasbitung	97,39	8,64	70,55
26.	Kalanganyar	95,56	7,60	69,37
27.	Maja	90,61	6,64	67,57
28.	Curugbitung	90,27	6,27	67,21

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2013

Berdasarkan tabel 2.25, terlihat bahwa kecamatan perkotaan seperti Rangkasbitung, Warunggunung dan Cibadak memiliki capaian IPM paling tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana pendukung yang berkaitan dengan komponen IPM tersedia lengkap. Sedangkan kecamatan dengan nilai capaian IPM terendah adalah Leuwidamar, Banjarsari dan Cirinten.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Implikasi dari makin meningkatnya kinerja perekonomian daerah adalah meningkatnya kesejahteraan sosial, yang tercermin pada sejumlah indikator makro pembangunan manusia, antara lain: Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelangsungan hidup bayi, Angka Usia Harapan Hidup (AHH), persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja, dan lain-lain.

1) Pendidikan

Angka Melek Huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin atau huruf lainnya). Data pada dinas terkait menunjukkan peningkatan AMH dari tahun ke tahun. Tercatat AMH pada tahun 2013 telah mencapai 96,05%, meningkat sebesar 1,5 dibandingkan pada tahun 2009. Demikian pula dengan Rata-rata Lama Sekolah



yang dari waktu ke waktu juga mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, dimana pada tahun 2013 RLS di Kabupaten Lebak telah naik menjadi 6,29 tahun. Angka ini memang masih jauh di bawah angka RLS Provinsi Banten yang mencapai 8,41 tahun pada tahun 2011. Hal ini masih akan menjadi masalah yang harus mendapatkan perhatian serius di masa mendatang. Tabel 2.17 berikut mendeskripsikan capaian AMH, RLS, APS di Kabupaten Lebak pada kurun waktu 2009-2013.

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Melek Huruf
dan Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Angka Melek Huruf / AMH (%)	94,55	94,60	94,82	95,69	96,05
2.	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun)	6,22	6,24	6,25	6,27	6,29
3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)					
-	APS SD	98,37	97,72	96,53	97,40	99,83
-	APS SMP	77,58	73,18	83,76	84,49	99,29
-	APS SMA	32,13	33,58	41,25	44,09	99,75

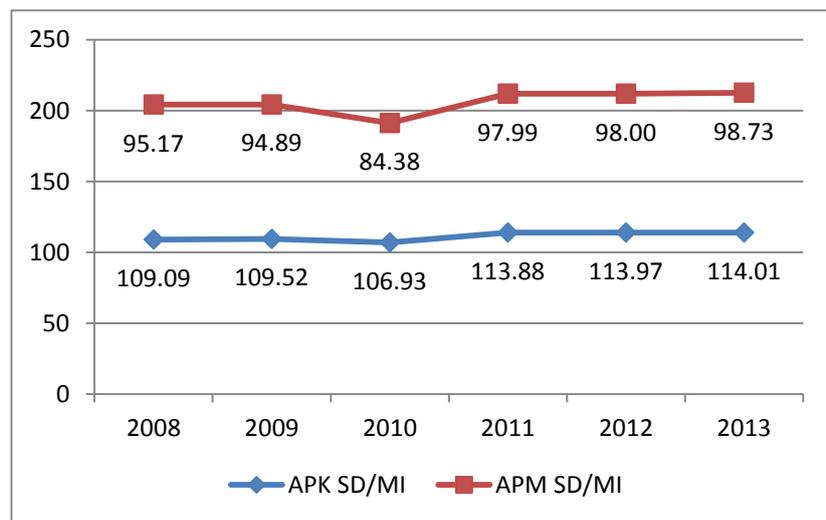
Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2014

Pendidikan dasar dan menengah merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Upaya untuk memperluas cakupan layanan pendidikan dasar dan menengah ini dilakukan tidak hanya melalui program pendidikan formal namun juga melalui program pendidikan non formal melalui penyelenggaraan Program Paket A, B dan C. Di samping itu, penyelenggaraan Taman Baca Masyarakat, penyelenggaraan keaksaraan fungsional, serta kelompok belajar masyarakat juga dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dan mengeradikasi buta huruf di kalangan masyarakat. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dari dari semua jenjang pendidikan merupakan indikator yang lazim digunakan guna mengukur efektivitas cakupan layanan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah, yang diukur berdasarkan tiap-tiap jenjang pendidikan.



Kebijakan yang terarah dan efektif dalam kurun waktu lima tahun terakhir berdampak cukup nyata pada meningkatnya APK dan APM di seluruh jenjang pendidikan, meski sejumlah kendala menyebabkan optimalitasnya masih harus ditingkatkan di masa depan. Pada jenjang Sekolah Dasar dan sederajat, selama kurun waktu tahun 2008-2013 APK jenjang ini mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,93%. Sedangkan APM-nya meningkat rata-rata sebesar 1,10% pada kurun waktu yang sama. Gambaran tentang perkembangan APK dan APM pada jenjang SD dan sederajat sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada grafik 2.18.

Grafik 2.14
Perkembangan APK
dan APM SD/MI
Kabupaten Lebak
Tahun 2008-2013

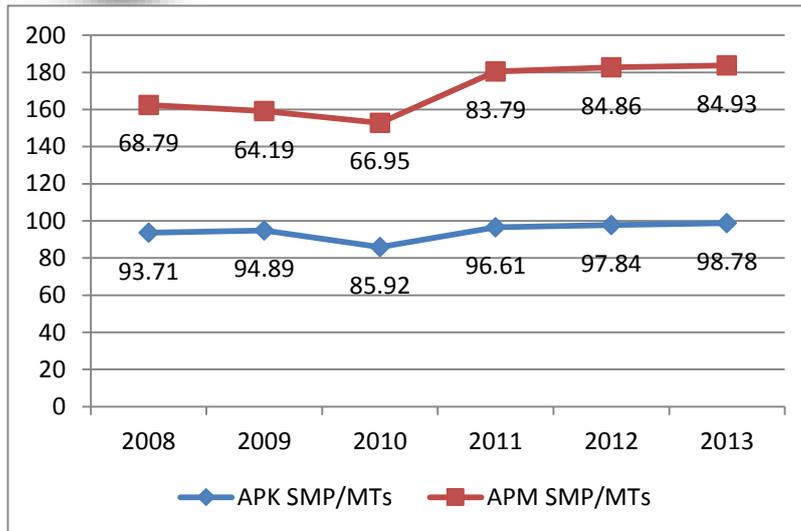


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, 2013

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs juga meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013, APK SMP/MTs meningkat rata-rata sebesar 1,30% dari sebesar 93,71% pada tahun 2008 menjadi 98,78% pada tahun 2013. Sedangkan APM meningkat sebesar 4,83%, dari sebesar 68,79% pada tahun 2008 menjadi 84,93% pada tahun 2013. Grafik 2.19 berikut menggambarkan trend perkembangan APK dan APM untuk jenjang SMP/MTs dimaksud.



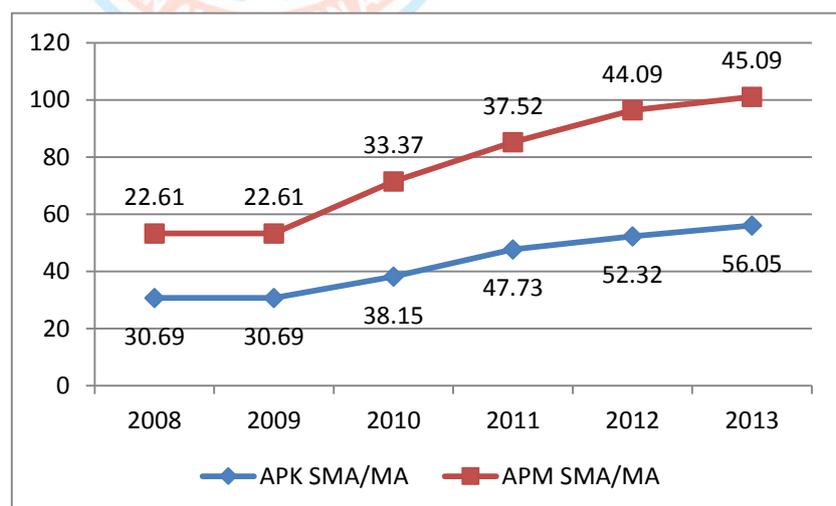
Grafik 2.19
Perkembangan APK dan APM SLTP/MTs
Kabupaten Lebak
Tahun 2008 - 2013



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, 2013

Sementara pada jenjang SMA/MA, APK dan APM juga mengalami peningkatan meski masih menggambarkan kesenjangan yang cukup lebar pada aspek aksesibilitas pendidikan pada jenjang ini. Tercatat pada kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013, APK SMA/MA meningkat rata-rata sebesar 13,23% dari sebesar 30,69% pada tahun 2008 menjadi 56,05% pada tahun 2013. Sedangkan APM meningkat sebesar 15,96%, dari sebesar 22,61% pada tahun 2008 menjadi 45,09% pada tahun 2013.

Grafik 2.20
Perkembangan APK dan APM SMA/MA
Kabupaten Lebak
Tahun 2008 - 2013

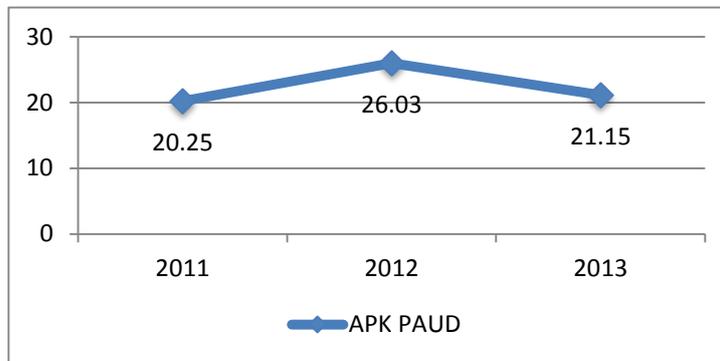


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, 2013

Selain APK dan APM sebagaimana diterangkan sebelumnya, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan sebagai pendukung mutu pendidikan. Mutu



pendidikan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas masukan pendidikan yaitu kesiapan mental dan emosional anak untuk memasuki sekolah dasar. Capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini terlihat pada tabel 2.21.



Tabel 2.21
Perkembangan APK PAUD
Kabupaten Lebak
Tahun 2011-2013

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, 2013

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Selama kurun waktu 2010-2012, jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD semakin meningkat dari 18,90% menjadi 24,70%. Jumlah penduduk yang berpendidikan/lulus SD/ sederajat masih relatif tinggi, walaupun kecenderungannya menurun. Interval capaian Angka Pendidikan yang Ditamatkan dengan Provinsi Banten sangat tinggi sehingga tantangan ke depan adalah menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Gambaran perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel 2.27.

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Kabupaten Lebak Tahun 2010-2012

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2010		2011		2012	
	Lebak	Banten	Lebak	Banten	Lebak	Banten
Tidak/Belum Tamat SD	18,90	11,41	23,16	14,64	24,70	13,24
SD/Sederajat	54,39	30,33	48,42	27,07	47,19	25,60
SMP/Sederajat	15,72	22,67	15,32	22,55	16,01	23,29
SMA/Sederajat	9,18	27,49	9,93	27,57	10,14	29,64
D-I/D-II	0,27	0,71	0,37	0,63	0,35	0,69
D-III	0,15	2,08	0,42	2,15	0,27	1,92
D-IV s.d S2+	1,38	5,31	2,38	5,39	1,25	5,61

Sumber : BPS Provinsi Banten



Perbandingan perkembangan APT dengan 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak menduduki urutan terkecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.28.

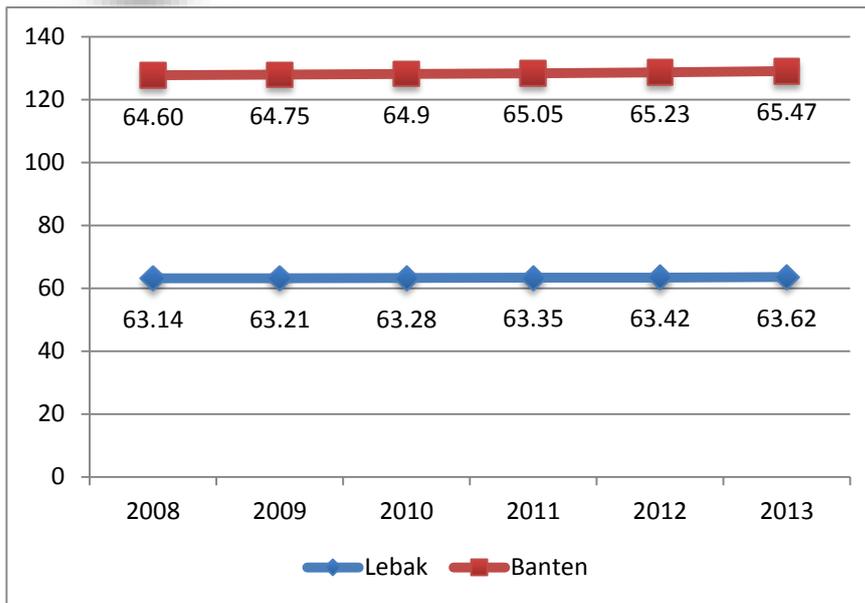
Tabel 2.28
Perbandingan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi Banten Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Tidak / Belum Tamat SD	SD	SMP	SMA	D-I/D-II	D-III	D-IV/S1 +
Kabupaten							
Pandeglang	21,07	41,01	20,93	13,62	0,50	0,39	2,48
Lebak	24,70	47,19	16,01	10,14	0,35	0,27	1,25
Tangerang	12,50	22,48	27,59	32,20	0,68	1,37	3,18
Serang	19,04	32,93	23,75	20,66	0,44	0,61	2,59
Kota							
Tangerang	7,38	14,06	23,34	43,78	0,62	2,71	8,11
Cilegon	5,73	21,06	26,72	37,66	1,49	1,39	5,95
Serang	13,04	27,74	20,98	29,62	0,59	1,99	6,05
Tangerang Selatan	4,75	13,24	21,40	38,28	1,28	5,72	15,34
Banten	13,24	25,60	23,29	29,64	0,69	1,92	5,61

Sumber : BPS Provinsi Banten

2) Kesehatan

Di samping aspek pendidikan, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari indikator pembangunan manusia lainnya, yaitu Usia Harapan Hidup yang merepresentasi derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Pada tahun 2008, UHH Kabupaten Lebak mencapai angka 63,14 tahun, sedangkan di tahun 2013 naik menjadi 63,62 tahun. Gambaran tentang kemajuan UHH di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.22.



Grafik 2.22
Perkembangan
Usia Harapan
Hidup (UHH)
Kabupaten Lebak
Tahun 2008-2013

Sumber : BPS Kab.
Lebak, 2013

Keadaan yang ditunjukkan pada grafik 2.18 memperlihatkan bahwa Usia Harapan Hidup di Kabupaten Lebak masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Usia Harapan Hidup di Provinsi Banten dengan tingkat kesenjangan yang semakin tinggi setiap tahunnya. Keadaan tersebut mengidentifikasi bahwa kinerja kesehatan secara rata-rata masih tertinggal dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Walaupun Usia Harapan Hidup dapat menggambarkan derajat kesehatan penduduk, namun angka ini pula dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diidentifikasi sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan, diantaranya persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan tersedianya air bersih. Oleh karena itu, derajat kesehatan yang lebih baik dapat terpenuhi, maka variabel-variabel tersebut harus menjadi perhatian yang serius.

Meski secara makro derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lebak telah terrepresentasi dari Usia Harapan Hidup waktu lahir (UHH) di atas, namun cakupan layanan bidang kesehatan pada level mezo indikator dapat dilihat pada Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Sepanjang tahun 2009-2013 AKI menurun rata-rata sebesar 7,63% dari sebesar 217,6 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menjadi sebesar 157,66 pada tahun 2013. Sedangkan AKB turun rata-rata sebesar 8,15% dari sebesar 34,67 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menjadi 24,64 pada



tahun 2013. Gambaran rinci trend penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Lebak pada kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut.

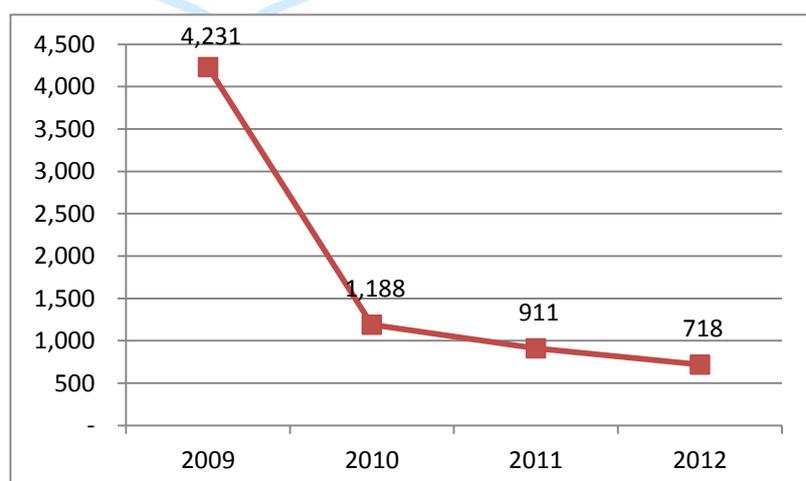
Tabel 2.29
Angka Kematian Ibu dan Bayi Di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	34.67	32.67	30.57	28.16	24.64
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	217.6	197.33	196.96	172.09	157.66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2013

Meski sejumlah indikator menggambarkan kecenderungan kemajuan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lebak, namun beberapa indikator lainnya menunjukkan masih adanya sejumlah permasalahan yang patut mendapat perhatian di masa yang akan datang. Jumlah anak penderita gizi buruk misalnya, meski jumlahnya fluktuatif namun menggambarkan trend naik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 4.231 balita atau sekitar 4,03% balita menderita gizi buruk. Capaian penuntasan gizi buruk terlaksana dengan baik yang ditandai dengan penurunan jumlah balita gizi buruk meskipun sangat kecil. Pada tahun 2010 menjadi hanya sebesar 1,17% pada tahun 2010 dan 0,82% dan pada tahun 2012 sebesar 0,67% sebagaimana tampak pada grafik 2.23.

Grafik 2.23
Jumlah Balita Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Lebak Tahun 2009 - 2012



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2013



2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1) Pendidikan

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dihasilkan dari keikutsertaan penduduk dalam pendidikan dan merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini dapat dibedakan sesuai usia sekolah yaitu penduduk pada usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang bisa dikategorikan berada pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap kelompok umur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali untuk kelompok umur 19-24 tahun mengalami penurunan setiap tahunnya seperti terlihat pada tabel 2.30.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah
Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

No.	Usia Sekolah	2009	2010	2011	2012	2013
1.	7 - 12	98,37%	97,72%	96,53%	96,99%	98,14%
2.	13 - 15	72,58%	73,18%	83,76%	84,49%	90,30%
3.	16 - 18	32,13%	33,58%	41,25%	44,09%	62,98%
4.	19 - 24	N/A	N/A	7,80%	7,17%	7,69%

Sumber : Susenas

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Lebak terbesar ada pada kelompok umur 7-12 tahun yang menandakan bahwa baiknya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar. Terlihat pula bahwa semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin berkurang capaian partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang mudah dan terjangkau baik dari segi jarak maupun biaya berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan sebagai penunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sebagai gambaran kondisi



fasilitas pendidikan di Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2013 disajikan dalam tabel 2.31.

Tabel 2.31
Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar

Jenis Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombongan Belajar	Rasio
SD	4,663	5.595	0.83
MI	692	963	0.94
SMP	1,417	1,483	0.96
MTs	861	748	1.15
SMA	587	627	0.94
SMK	506	593	0.85
MA	136	252	0.54
Total	8.862	10.261	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2013

Apabila dilihat dari distribusi ruang kelas berdasarkan kondisi ruang kelas sampai dengan tahun 2013 disajikan dalam tabel 2.32.

Tabel 2.32
Distribusi Kondisi Ruang Kelas Menurut Jenis Pendidikan

Satuan Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas			%		
	Baik	Rusak ringan	Rusak berat	Baik	Rusak ringan	Rusak berat
SD	2.728	1.178	757	59	25	16
MI	324	170	198	47	25	29
SMP	874	392	217	59	26	15
MTs	377	281	203	44	33	24
SMA	482	60	45	82	10	8
SMK	347	98	61	69	19	12
MA	63	39	34	46	29	25
Total	5.195	2.218	1.515			

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2013



Untuk menunjang kegiatan belajar di sekolah diperlukan fasilitas perpustakaan sekolah. Ketersediaan fasilitas perpustakaan sekolah sampai dengan 2013 dapat dilihat pada tabel 2.33.

Tabel 2.33
Ketersediaan Ruang Perpustakaan

Jenjang	Tahun		
	2011	2012	2013
SD	147	212	248
MI	2	2	2
SMP	88	88	92
MTs	27	27	27
SMA	24	24	33
SMK	17	17	26
MA	34	34	34
Total	339	404	462

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2013

Berdasarkan tabel 2.31, 2.32 dan 2.33, untuk fasilitas pendidikan Sekolah Dasar masih terdapat kekurangan ruang kelas terhadap rombongan belajar sebanyak 1.046 ruang kelas. Jumlah rombongan belajar SMP sebanyak 1.416 rombongan belajar yang terdiri dari 851 rombongan belajar SMP Negeri dan 566 rombongan belajar SMP Swasta. Dari jumlah tersebut masih ada selisih atau kelebihan ruang kelas terhadap rombongan belajar sebanyak 1 ruang kelas. Namun jika dilihat dari distribusi per kecamatan, masih terdapat 15 kecamatan kekurangan ruang kelas yaitu sejumlah 331 ruang kelas dan terdapat 13 kecamatan yang memiliki ruang kelas lebih yaitu sejumlah 332 ruang kelas.

Rombongan Belajar untuk pendidikan SMA berjumlah 627 Rombel terdiri dari SMA Negeri sebanyak 491 Rombel dan SMA Swasta 136 Rombel. Dari jumlah tersebut masih ada selisih (kekurangan) Ruang Kelas terhadap Rombel sebanyak 40 Ruang Kelas. Sedangkan untuk Rombongan Belajar SMK berjumlah 453 Rombel terdiri dari SMK Negeri sebanyak 186 Rombel dan SMK



Swasta 267 Rombel. Dari jumlah tersebut masih ada selisih (kelebihan) Ruang Kelas terhadap Rombel sebanyak 53 Ruang Kelas. Namun jika dilihat distribusi per kecamatan, masih terdapat 8 kecamatan kekurangan ruang kelas sejumlah 90 Ruang Kelas dan terdapat 11 kecamatan yang memiliki ruang kelas lebih yaitu sejumlah 143 Ruang Kelas, sedangkan 6 kecamatan belum memiliki SMK.

Distribusi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan untuk setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.34.

Tabel 2.34
Jumlah Sekolah SMP, SMA/SMK di Kabupaten Lebak
Sampai Dengan Tahun 2013

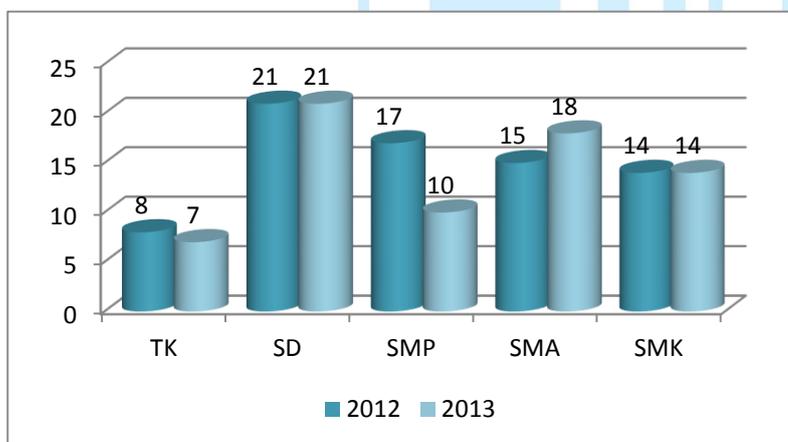
Kecamatan	SMP	SMA	SMK
Malingping	10	2	3
Wanasalam	7	1	0
Panggarangan	9	1	1
Cihara	7	1	0
Bayah	10	3	1
Cilograng	6	1	2
Cibeber	11	2	2
Cijaku	5	1	1
Cigemblong	4	1	0
Banjarsari	9	2	3
Cileles	7	1	1
Gunungkencana	6	1	1
Bojongmanik	3	1	0
Cirinten	4	0	1
Leuwidamar	6	2	1
Muncang	9	2	1
Sobang	5	1	0
Cipanas	9	4	3
Lebakgedong	5	1	2
Sajira	7	3	0
Cimarga	9	2	1
Cikukur	8	2	2
Warunggunung	8	1	4
Cibadak	5	1	2
Rangkasbitung	16	11	10
Kalanganyar	5	2	2



Kecamatan	SMP	SMA	SMK
Maja	7	2	1
Curugbitung	4	1	1
JUMLAH	201	53	46

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2013

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini selain mengidentifikasi ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran. Data tahun 2013 menunjukkan bahwa di seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Lebak rasio guru-murid sudah amat baik, jauh dibawah rasio minimal untuk setiap jenjang pendidikan. Diharapkan dengan makin rendahnya rasio guru murid maka kualitas pendidikan di Kabupaten Lebak menjadi lebih baik. Yang dapat menjadi permasalahan apabila terjadi ketidakmerataan penyebaran guru di wilayah Kabupaten Lebak, sehingga guru-guru hanya berkumpul di daerah perkotaan saja.



Grafik 2.24
Rasio Guru dan Murid
Kabupaten Lebak
Tahun 2012-2013

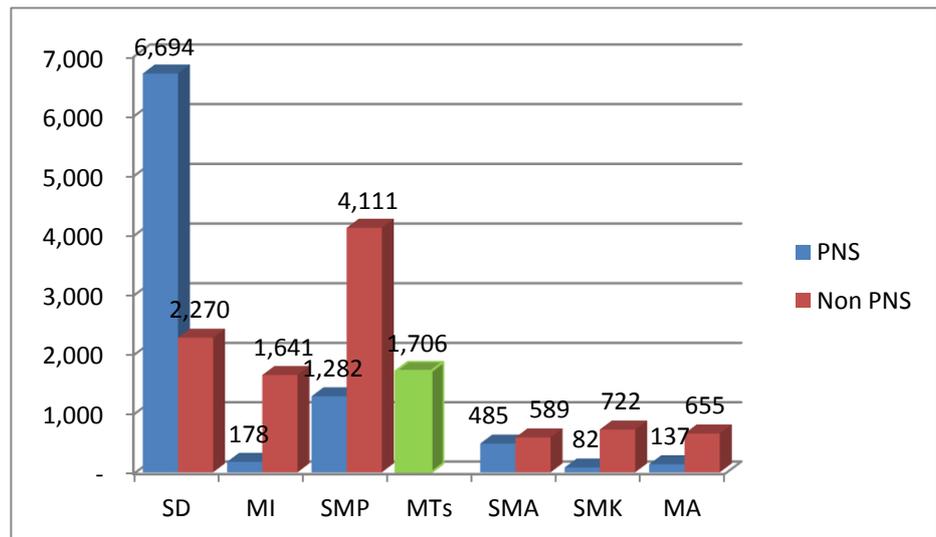
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2013

Dari grafik 2.24 terlihat bahwa terjadi penurunan rasio guru/murid pada tahun 2013 untuk jenjang pendidikan TK dari 1:8 menjadi 1:7. Begitu pula untuk jenjang pendidikan SMP terjadi penurunan pada tahun 2013 dari 1:17 menjadi 1:10. Namun apabila dilihat dari kompetensi dan distribusi guru, jumlah guru di Kabupaten Lebak masih belum mencukupi. Hal ini disebabkan jumlah guru



PNS masih didominasi oleh bukan PNS terutama untuk jenjang MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, sedangkan untuk jenjang SD jumlah guru non PNS lebih kecil dibandingkan dengan guru PNS. Selain itu distribusi tenaga pengajar masih belum merata dan terpusat pada daerah perkotaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.25.

Grafik 2.25
Jumlah Guru
per Jenjang
Pendidikan
di Kabupaten
Lebak
Tahun 2013



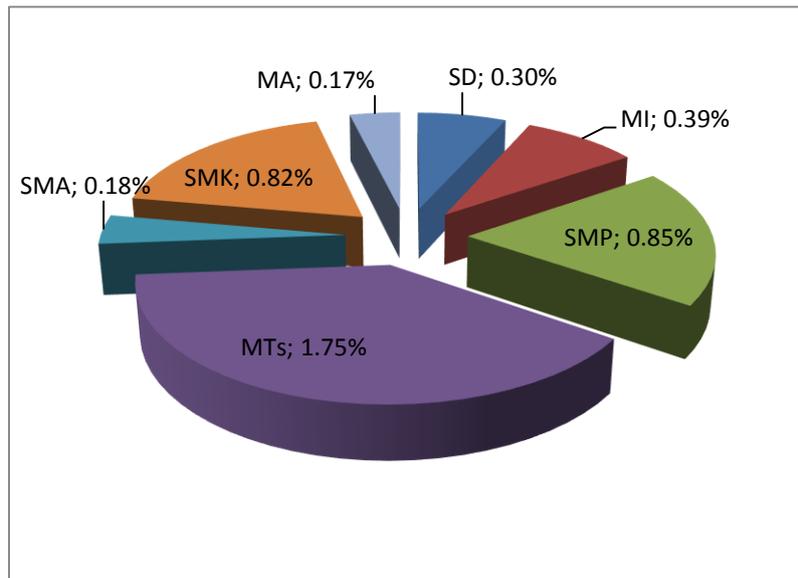
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2013

Kualitas / mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling berpengaruh. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Masukan pendidikan dapat dilihat dari kesiapan murid dalam kesempatan mendapatkan pendidikan. Ketidaksiapan murid dalam mengikuti pendidikan antara lain dimanifestasikan dalam bentuk mengulang kelas atau putus sekolah.

Angka Putus Sekolah menggambarkan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah ini dipergunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12 tahun/SD, 13-15 tahun/SMP, dan 16-18 tahun/SMA). Angka Putus Sekolah di Kabupaten Lebak berdasarkan data tahun 2013 disajikan pada grafik 2.26.

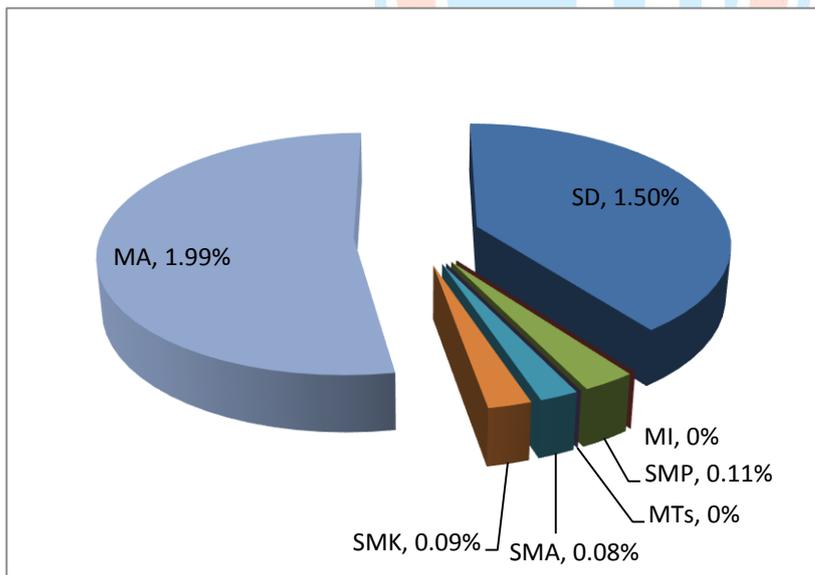


Grafik 2.26
Angka Putus Sekolah
di Kabupaten Lebak
Tahun 2013



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2013

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Lebak sudah dibawah 1% hanya jenjang MTs saja yang masih diatas angka 1%. Sedangkan untuk Angka Mengulang sebagaimana grafik 2.27 berikut.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2013

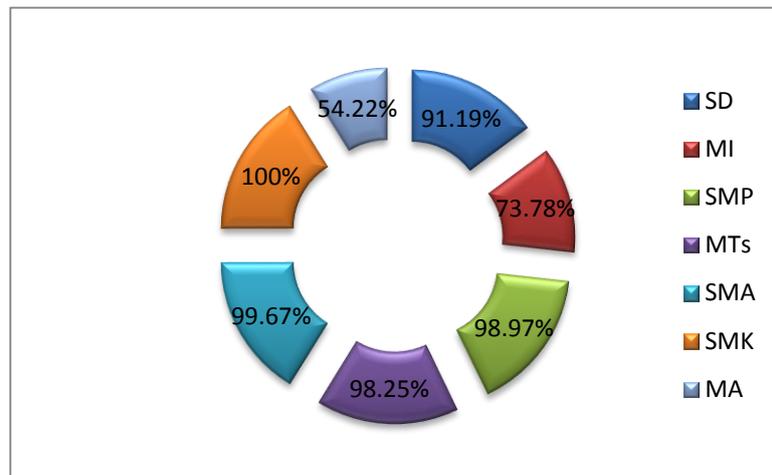
Grafik 2.27
Angka Mengulang
di Kabupaten Lebak
Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa angka mengulang kelas paling besar berada pada jenjang SD sebesar 1,50% dari jumlah siswa ini menunjukkan masih lemahnya kesiapan muris / siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas.



Selain Angka Mengulang Mutu Pendidikan juga dilihat dari angka kelulusan siswa sebagaimana grafik 2.28.

Grafik 2.28
Angka Kelulusan
di Kabupaten Lebak
Tahun 2013



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2013

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa angka kelulusan siswa sudah berada diatas 90% (sembilan puluh) hanya untuk jenjang MA masih perlu ditingkatkan lagi karena belum memuaskan masih berada pada angka 54,22%.

2) Kesehatan

Berdasarkan capaian indikator kesehatan sebagaimana dibahas pada point sebelumnya mengalami peningkatan, indikator kapasitas dan cakupan layanan kesehatan di Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan, sebagaimana tergambar dari meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan bagi masyarakat sebagaimana tampak pada tabel 2.35 berikut ini.

Tabel 2.35
Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Puskesmas	40	40	41	41	41
2	Jumlah Poliklinik	88	77	90	101	73
3	Jumlah Pustu	73	73	72	70	64
4	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0,07	0,06	0,07	0,08	0,06

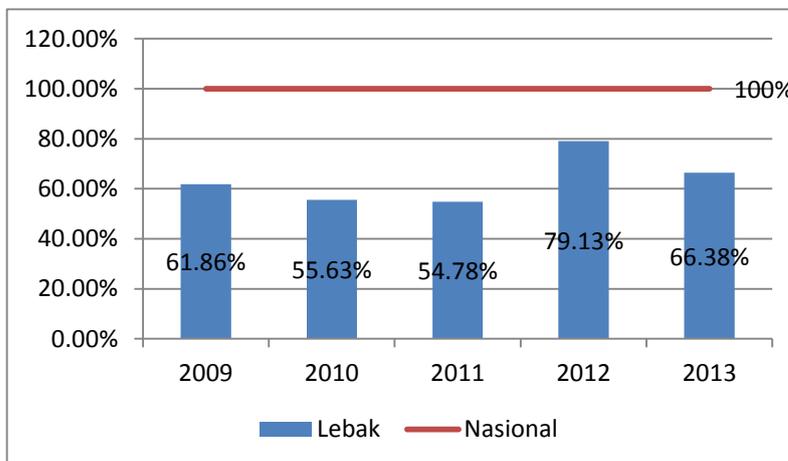


No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
6	Rasio Pustu persatuan penduduk	0.01	0.00	0.01	0.01	0,00
7	Cakupan Puskesmas	1,43	1,43	1,46	1,46	1,46
8	Cakupan Pustu	21.16	21.16	20.87	20.29	18,55
9	Jumlah Posyandu	1,788	1,853	1,930	1,947	1.938
10	Rasio Jumlah Posyandu Terhadap Jumlah Balita	17.19	18.21	17.42	18.05	21,89
11	Jumlah Dokter	100	270	230	244	105
12	Rasio Jumlah Dokter Terhadap Jumlah Penduduk	0.08	0.22	0.19	0.19	0,08
13	Jumlah Tenaga Medis	845	1,929	2,199	2,324	1.041
14	Rasio Jumlah Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk	0.68	1.59	1.83	1.81	0,83

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2014

Pada awal tahun 2014 jumlah Puskesmas yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, adalah sebanyak 42 yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) katagori, yaitu puskesmas dengan rawat inap sebanyak 14 puskesmas dan puskesmas non rawat inap sebanyak 27 puskesmas.

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana lebih dari 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Capaian UCI per tahun mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dan jika dibandingkan dengan dengan standar nasional masih jauh dari target yang sudah ditetapkan yaitu 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.29 berikut.



Grafik 2.29
Cakupan UCI
di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lebak, 2014



Penemuan kasus TBC BTA (+) pada tahun 2010 sebanyak 5.484 penderita dan semakin menurun setiap tahunnya menjadi 1.288 penderita pada tahun 2011 dan 2012. Jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati sebanyak 978 penderita atau 17,83% pada tahun 2010, 1.120 penderita atau 85,56% pada tahun 2012, dan 928 penderita atau 72,05% dari jumlah penemuan kasua TBC BTA (+).

Cakupan penemuan kasus DBD di Kabupaten Lebak setiap tahunnya meningkat mulai dari tahun 2010-2012. Pada tahun 2010 ditemukan kasus sejumlah 485 penderita dengan jumlah penderita yang ditangani sebanyak 203 penderita atau 41,86%. Pada tahun 2011 penemuan kasus DBD sebanyak 539 penderita dan ditangani sebanyak 157 penderita atau 29,13%, dan pada tahun 2012 ditemukan sebanyak 599 penderita dan tertangani sebanyak 246 penderita atau 41,07%.

Kondisi masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat adalah faktor penting yang berpengaruh terhadap status kesehatan penduduk disuatu daerah, karena sselain kondisi lingkungan yang buruk, perilaku merupakan faktor yang mempunyai kontribusi besar terhadap derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Dari data profil kesehatan Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa PHBS tatanan rumah tangga baru mencapai 25.00% persen pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 54.55% persen pada tahun 2013. Kondisi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. tantangan lainnya adalah masih cukup tingginya kasus penyakit menular seperti HIV/AIDS, DBD, malaria, dan TBC serta penyakit tidak menular seperti antara lain Diabetes militus, Stroke, dan jantung. Disamping itu cakupan pemberian ASI eksklusif juga masih cukup kurang, hal ini berdampak pada kondisi gizi balita.

Faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari indikator kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. Kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Lebak masih belum menggembirakan yang ditunjukkan dengan indikator rumah sehat baru mencapai 54.55 persen, pendudukan memanfaatkan jamban keluarga 57.30 %, keluarga yang mempunyai akses terhadap air bersih baru mencapai 77.27%. Selain indikator tersebut, pengendalian vektor dan pelayanan sanitasi tempat-



tempat umum juga mempengaruhi kondisi kesehatan lingkungan. Rumah tangga yang bebas jentik nyamuk aedes baru mencapai 90.00 % yang seharusnya sudah mencapai 95%. Sedangkan tempat-tempat umum yang memenuhi persyaratan kesehatan baru mencapai 67.02 %. hal ini berkaitan erat dengan berbagai masalah penyakit seperti TBC, DBD, Laptospirosis, kusta, malaria, flu burung, diare, pneumonia, filariasis dan penyakit menular lainnya.

3) Pekerjaan Umum

Kondisi Jalan

Urusan pekerjaan umum dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan yang mendasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan seperti sumberdaya air, jalan, jembatan, air minum dan sanitasi lingkungan (air limbah, drainase dan persampahan) yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal.

Urusan Pekerjaan Umum yang ditangani sesuai dengan kewenangan Kabupaten Lebak meliputi jalan, jembatan, sumber daya air, air bersih, sanitasi, persampahan dan jasa konstruksi.

Panjang jaringan jalan tahun 2013 beraspal dengan kondisi baik sepanjang 581,26 km. Namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kabupaten dengan kondisi sedang, rusak, ataupun rusak berat dimana proporsinya menurun dari tahun ke tahun. Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Lebak ditunjukkan pada tabel 2.36.

Tabel 2.36
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi
Tahun 2011-2013 di Kabupaten Lebak

No	Tahun	Kondisi			
		Baik (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Sedang (Km)	Rusak Berat (Km)
1	2011	444,00	54,80	83,95	249,07
2	2012	521,26	91,43	60,80	164,47
3	2013	581,26	81,43	50,80	124,47

Sumber : Dinas Bina Marga Kab. Lebak, 2014



Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertanahan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi, status dan kelas.

Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Lebak terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Lebak 837,96 km yang terbagi menjadi 790,40 km jalan luar kota dengan jumlah ruas jalan sebanyak 63 ruas, dan 47,56 km jalan dalam kota dengan jumlah ruas jalan sebanyak 50 ruas jalan. Panjang jalan provinsi 118,72 km dengan kondisi baik sepanjang 33,61 km atau 26,99%. Sedangkan panjang jalan nasional 141,81 km. Selain jalan, jumlah jembatan di Kabupaten Lebak sebanyak 169 unit dengan dimensi panjang 2.321,20 m dengan kondisi rusak sebanyak 1 unit yaitu jembatan cimoyan yang menghubungkan ruas jalan Gunungkencana dan Banjarsari. Jembatan dengan kondisi rusak berat sebanyak 1 unit yaitu jembatan cidurakim.

Sumber Daya Air

Area layanan irigasi di Kabupaten Lebak seluas 63.857 ha yang tercakup dalam 483 Daerah Irigasi (DI), dengan pembagian kewenangan pengelolaan DI yaitu 9 Daerah Irigasi (DI) dengan areal potensial 13.310 ha menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten dan 474 Daerah Irigasi (DI) dengan areal potensial 50.547 ha menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lebak. Kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lebak yaitu 77,24% kondisi baik pada tahun 2013 dengan ketersediaan air irigasi mencapai 62,15%. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan lokasi Daerah Irigasi di Kabupaten Lebak tersaji pada tabel 2.37.



Tabel 2.37
Jumlah dan Lokasi Daerah Irigasi di Kabupaten Lebak
Sampai Dengan Tahun 2013

Kecamatan	Kewenangan Kabupaten						Kewenangan Provinsi		Total	
	Irigasi Permukaan		Irigasi Pompa		Jumlah Total		Irigasi Permukaan			
	Jumlah DI	Area (ha)	Jumlah DI	Area (ha)	Jumlah DI	Area (ha)	Jumlah DI	Area (ha)	Jumlah DI	Area (ha)
Banjarsari	20	1.733			20	1.733			20	1.733
Bayah	22	2.435			22	2.435			22	2.435
Bojongmanik	19	1.624			19	1.624			19	1.624
Cibadak	3	280	2	250	5	530			5	530
Cibeber	68	7.363			68	7.363			68	7.363
Cigemblong	6	505			6	505			6	505
Cihara	15	1.991			15	1.991			15	1.991
Cijaku	11	1.026			11	1.026	2	2.939	13	3.965
Cikurur	20	2.083	1	10	21	2.093			21	2.093
Cileles	19	1.945			19	1.945			19	1.945
Cilograng	23	2.884			23	2.884	2	3.000	25	5.884
Cimarga	11	685	3	335	14	1.020			14	1.020
Cipanas	24	3.105			24	3.105			24	3.105
Cirinten	11	1.075			11	1.075	1	1.500	12	2.575
Curugbitung	2	225			2	225			2	225
Gunungkencana	19	1.553	1	108	20	1.661			20	1.661
Kalanganyar	1	211	1	100	2	311			2	311
Lebakgedong	14	1.787			14	1.787			14	1.787
Leuwidamar	19	1.811			19	1.811			19	1.811
Maja	4	270	1	100	5	370			5	370



Kecamatan	Kewenangan Kabupaten						Kewenangan Provinsi		Total	
	Irigasi Permukaan		Irigasi Pompa		Jumlah Total		Irigasi Permukaan			
	Jumlah DI	Area (ha)	Jumlah DI	Area (ha)	Jumlah DI	Area (ha)	Jumlah DI	Area (ha)	Jumlah DI	Area (ha)
Malingping	10	1.885			10	1.885	1	2.570	11	4.455
Muncang	22	2.402			22	2.402			22	2.402
Panggarangan	23	2.730			23	2.730	1	1.050	24	3.780
Rangkabitung	8	650	2	380	10	1.030			10	1.030
Sajira	19	1.740			19	1.740			19	1.740
Sobang	30	2.945			30	2.945			30	2.945
Wanasalam	3	335			3	335	1	1.805	4	2.140
Warunggunung	17	1.986			17	1.986	1	446	18	2.432
Jumlah Total	463	49.264	11	1.283	474	50.547	9	13.310	483	65.857

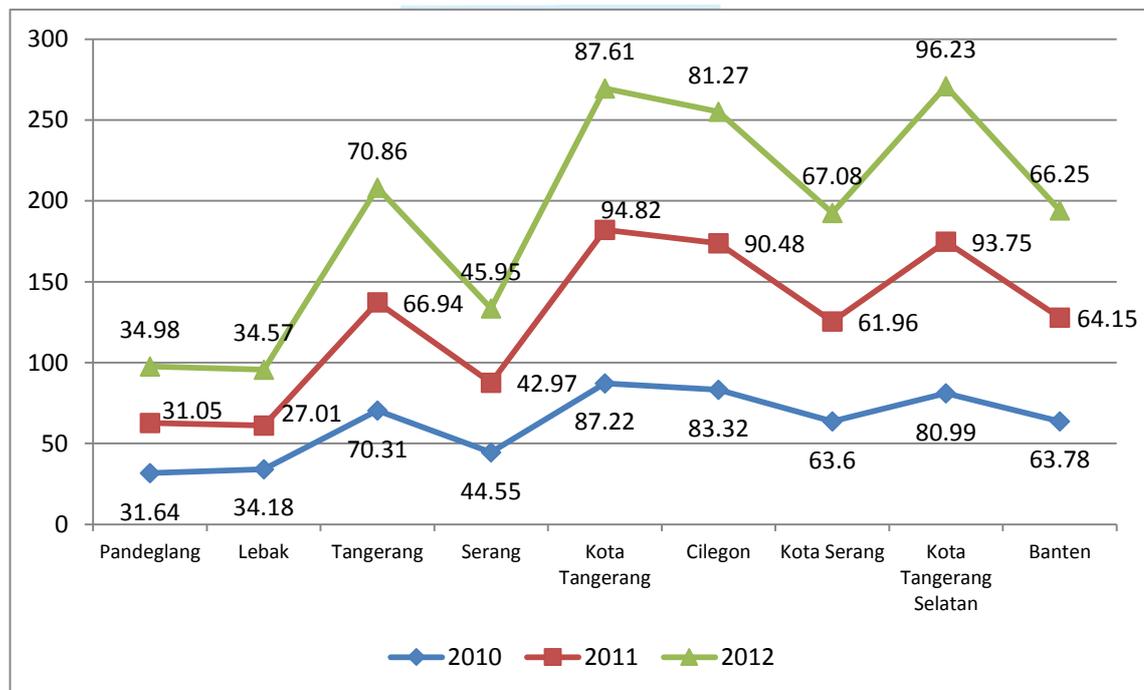
Sumber : Dinas Sumber Daya Air Kab. Lebak, 2013





Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu fasilitas air bersih, air limbah domestik, drainase dan persampahan. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak di Kabupaten Lebak memiliki capaian paling rendah di Provinsi Banten. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik 2.30.

Grafik 2.30
Perbandingan Persentase Rumahtangga yang Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2010-2012



Sumber : BPS Provinsi Banten

4) Perumahan

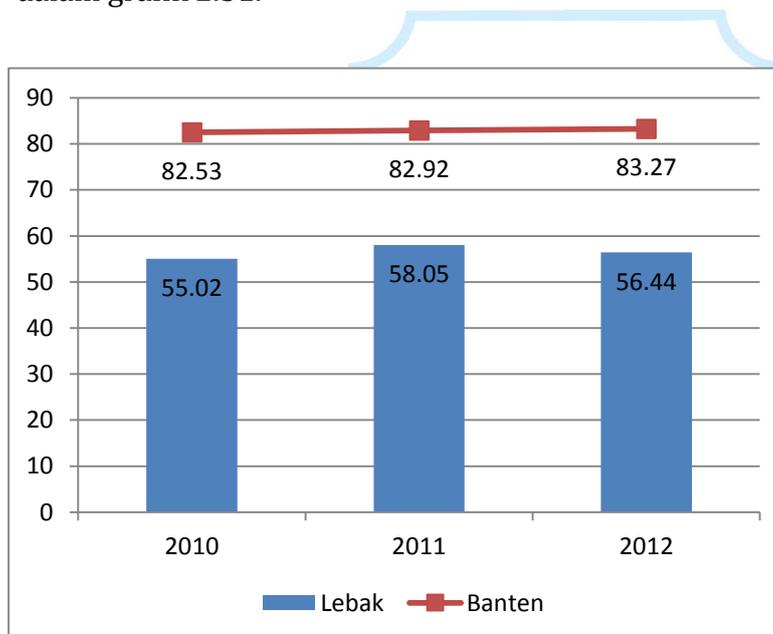
Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau dengan kondisi yang sehat.

Perkembangan persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2010-2012 berfluktuasi, pada tahun 2010 mencapai 31,78%, 32,24% pada tahun 2011 dan pada tahun 2012



mencapai 31,78%. Dalam hal penggunaan listrik, persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 persentase rumahtangga pengguna listrik mencapai 92,86%, dan terus mengalami peningkatan menjadi 98,14% pada tahun 2011, dan 98,46% pada tahun 2012.

Pada tahun 2011, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Lebak sebanyak 140.897 Rumah Tangga. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Disamping itu, banyak satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga. Persentase rumahtangga yang menempati rumah layak huni disajikan dalam grafik 2.31.



Grafik 2.31
Persentase Rumah
Layak Huni
di Kabupaten Lebak
Tahun 2010-2012

Sumber : BPS Prov. Banten

5) Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. permasalahan penataan ruang di Kabupaten Lebak saat ini adalah meningkatnya alih fungsi lahan, kurangnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah, belum optimalnya penjabaran rencana tata ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang, masih terbatasnya pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang, serta masih terbatasnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang.



6) **Perencanaan Pembangunan**

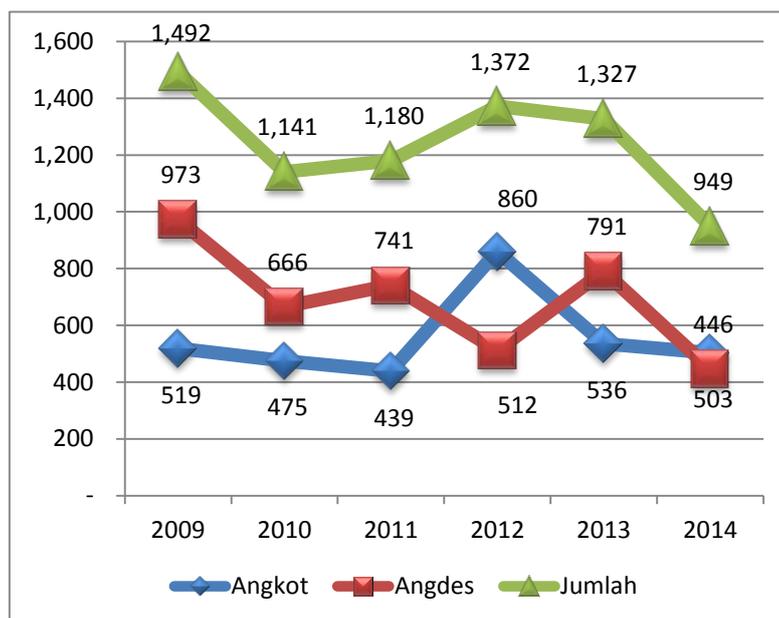
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah. Dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan dengan peraturan bupati. Agar mengefektifkan pelaksanaan program-program pembangunan tersebut telah dibangun sistem informasi yang nantinya akan berdampak pada keselarasan antar dokumen rencana pembangunan daerah, meningkatnya kualitas perencanaan, serta optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) **Perhubungan**

Sektor perhubungan memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karenanya cakupan layanan sektor perhubungan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun melalui pembangunan dan pemeliharaan terminal angkutan umum dan pelayanan ijin trayek angkutan umum.

Sejak tahun 2009-2014, jumlah ijin trayek angkutan umum tercatat mengalami fluktuasi. Ijin trayek angkutan perkotaan rata-rata mengalami penurunan sebesar 7,20%, dan angkutan perdesaan 8,06% sehingga rata-rata penurunan ijin trayek angkutan umum sepanjang periode tersebut mencapai 7,12%. Gambaran fluktuasi perijinan trayek angkutan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada grafik 2.32.



Grafik 2.32
Perkembangan
Jumlah
Ijin Trayek
Angkutan Umum
Tahun 2009-2014

Sumber : Dishub
Kab. Lebak, 2014

Di samping itu, jumlah terminal di Kabupaten Lebak dari tahun 2009 hingga tahun 2013 tercatat sebanyak 6 terminal, terdiri dari 1 terminal tipe B berada di Kecamatan Cibadak dan 5 terminal tipe C berada di Kecamatan Rangkasbitung, Kalanganyar, Malingping, Bayah dan Wanasalam.

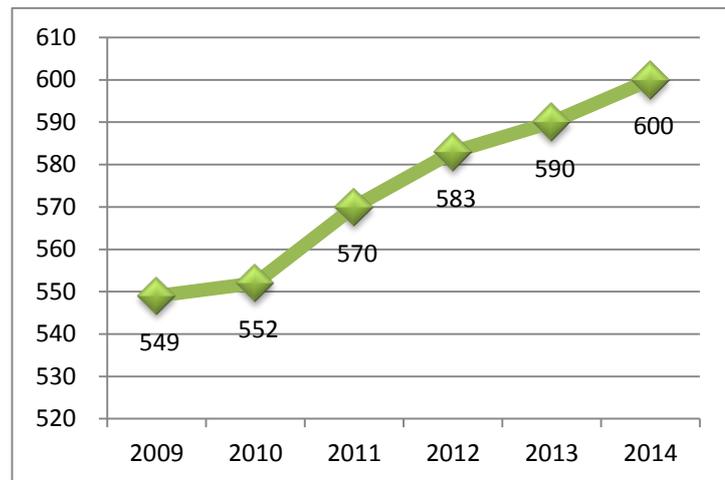
Indikator bidang perhubungan lainnya adalah jumlah rambu-rambu lalu lintas terpasang. Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia di Kabupaten Lebak yaitu sebanyak 1.693 rambu-rambu, namun sampai dengan tahun 2013 baru terpasang sebanyak 102 rambu-rambu.

8) Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat saat ini masih merupakan andalan dalam proses pembangunan. Seiring dengan pertumbuhan investasi di Kabupaten Lebak, perusahaan wajib amdal yang telah diawasi dapat dilihat pada grafik 2.33.



Grafik 2.33
Jumlah Perusahaan
Wajib AMDAL yang
Telah Diawasi
Tahun 2009-2014



Sumber: Badan LH Kab. Lebak, 2014

Jumlah kasus lingkungan dari tahun 2009-2014 sebanyak 10 kasus, terselesaikan 8 kasus.

Salah satu permasalahan umum yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya Kabupaten Lebak adalah masalah persampahan, dimana salah satu penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang layak. Keberadaan TPA selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

Sampai dengan tahun 2014, Kabupaten Lebak memiliki TPA sebanyak 2 unit yang berlokasi di Kecamatan Maja dan Kecamatan Cihara, serta 346 unit TPS. Jumlah total timbunan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak 2.915 m³ per hari. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 3.030,99 m³ per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangni/terangkut ke TPA sebesar 396 m³ per hari (12,96%). Dengan demikian masih tersisa sampah sebesar 2.659,17 m³ (87,04%) yang belum terangkut/terbuang ke TPA. Berikut pada tabel 2.38 adalah kondisi persampahan di Kabupaten Lebak.



Tabel 2.38
Persentase Volume Sampah per Tahun yang Tertangani
di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2014

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah volume sampah yang ditangani (m ³)	142.560	142.560	142.460	460.943	144.720	149.983
2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	1.091.148	2.083.686	1.154.572	1.099.848	1.014.287	1.049.488
3.	Persentase	13,07	13,16	12,35	41,91	14,27	14,29

Sumber: Dinas Kebersihan Kabupaten Lebak, 2014

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu dikumpulkan di beberapa lokasi TPS yang sudah ditentukan. Jumlah TPS di Kabupaten Lebak mulai dari tahun 2009-2014 sebanyak 346 unit dengan daya tampung seluruh TPS selama satu tahun sebanyak 95.760 m³. Dengan kondisi ini dapat diketahui bahwa sampah yang dihasilkan oleh 1.000 orang penduduk di Kabupaten Lebak hanya dapat ditampung 0,0048 m³. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.39.

Tabel 2.39
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di
Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014

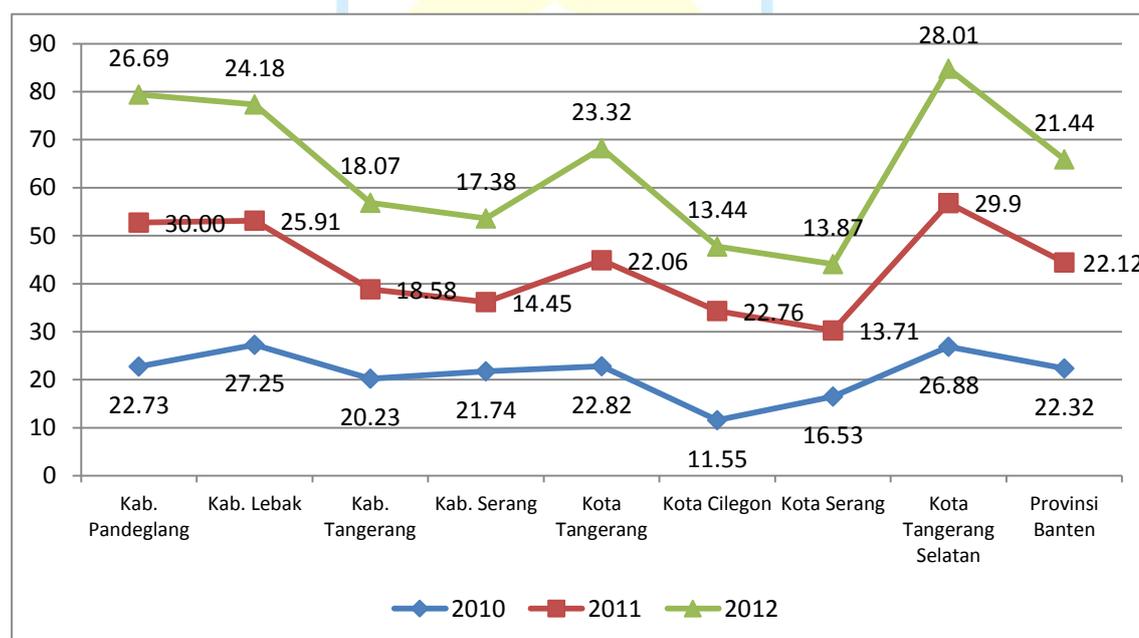
No.	Tahun	Jumlah TPS (Unit)	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Daya Tampung TPS Terhadap Jumlah Penduduk
1.	2009	21	6	1.203.680	0,00050
2.	2010	21	6	1.204.095	0,00050
3.	2011	21	6	1.228.884	0,00049
4.	2012	21	6	1.239.660	0,00048
5.	2013	N/A	N/A	1.247.906	N/A
6.	2014	346	95.760	1.259.305	7,60

Sumber: Dinas Kebersihan Kabupaten Lebak, 2014



Persentase rumah tangga menempati rumah dengan sumber air minum layak adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak yang mencakup air leding dan air hujan serta pompa/sumur bor, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak minimal 10 m dari penampungan kotoran. Persentase rumah tangga menempati rumah dengan sumber air minum layak di Kabupaten Lebak, setiap tahun mengalami penurunan dari 27,25% pada tahun 2010 menjadi 24,18% pada tahun 2012, namun demikian nilai cakupannya masih di atas Provinsi Banten. Perkembangan tersebut dapat terlihat pada grafik 2.34.

Grafik 2.34
Persentase Rumah Tangga Menempati Rumah dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2010-2012



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2013

9) Kependudukan dan Catatan Sipil

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Kabupaten Lebak pada tahun 2013 sebanyak 908.334 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.40.



Tabel 2.40
Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Berdasarkan Wajib KTP
Tahun 2013

No	Nama Kecamatan	PENDUDUK WAJIB KTP			%
		Sudah Memiliki KTP	Belum Memiliki KTP	Total	
1	Malingping	32,000	14,676	46,676	68.56
2	Panggarangan	20,463	6,364	26,827	76.28
3	Bayah	25,221	6,124	31,345	80.46
4	Cipanas	26,409	8,602	35,011	75.43
5	Muncang	18,092	5,701	23,793	76.04
6	Leuwidamar	24,241	11,480	35,721	67.86
7	Bojongmanik	13,449	2,654	16,103	83.52
8	Gunung Kencana	19,229	5,733	24,962	77.03
9	Banjarsari	35,967	7,862	43,829	82.06
10	Cileles	27,863	8,730	36,593	76.14
11	Cimarga	35,578	10,104	45,682	77.88
12	Sajira	27,716	7,967	35,683	77.67
13	Maja	29,957	7,395	37,352	80.20
14	Rangkasbitung	74,053	17,847	91,900	80.58
15	Warunggunung	30,799	9,006	39,805	77.37
16	Cijaku	15,971	3,965	19,936	80.11
17	Cikukur	26,597	9,005	35,602	74.71
18	Cibadak	34,726	9,883	44,609	77.85
19	Cibeber	32,131	7,058	39,189	81.99
20	Cilograng	19,525	4,390	23,915	81.64
21	Wanasalam	24,416	13,622	38,038	64.19
22	Sobang	17,490	3,119	20,609	84.87
23	Curug Bitung	18,454	4,468	22,922	80.51
24	Kalanganyar	18,324	4,748	23,072	79.42
25	Lebakgedong	11,351	2,060	13,411	84.64
26	Cihara	15,503	6,523	22,026	70.38
27	Cirinten	16,039	2,697	18,736	85.61
28	Cigemblong	8,587	6,400	14,987	57.30
Jumlah		700,151	208,183	908,334	77.08

Sumber : Dinas Kependudukan & Capil Kab. Lebak, 2014



Berdasarkan tabel 2.40, persentase penduduk wajib ber-KTP di Kabupaten Lebak tahun 2013 baru mencapai 77,08% atau , oleh karena itu penyelenggaraan kependudukan sangat penting untuk dapat dikelola secara baik.

Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Lebak pada tahun 2013 mencapai 79,06% atau sebanyak 293,660 KK.

Tabel 2.41
Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)
Tahun 2013

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KK			
			Sudah Memiliki KK	Belum Memiliki KK	Total	%
1	Malingping	61,872	14,367	4,582	18,949	75.82
2	Panggarangan	35,068	8,677	2,417	11,094	78.21
3	Bayah	43,268	10,485	2,767	13,252	79.12
4	Cipanas	48,245	10,712	3,419	14,131	75.80
5	Muncang	32,974	6,858	2,483	9,341	73.42
6	Leuwidamar	48,663	11,813	3,190	15,003	78.74
7	Bojongmanik	19,946	5,639	1,258	6,897	81.76
8	Gunung Kencana	32,664	8,071	2,074	10,145	79.56
9	Banjarsari	56,501	13,564	4,281	17,845	76.01
10	Cileles	48,854	10,852	3,788	14,640	74.13
11	Cimarga	63,213	15,479	3,062	18,541	83.49
12	Sajira	49,297	11,497	2,625	14,122	81.41
13	Maja	52,477	11,704	2,973	14,677	79.74
14	Rangkasbitung	129,558	31,840	5,558	37,398	85.14
15	Warunggunung	56,346	14,108	1,906	16,014	88.10
16	Cijaku	25,514	6,584	1,506	8,090	81.38
17	Cikukur	49,253	11,058	3,081	14,139	78.21
18	Cibadak	62,873	16,372	1,724	18,096	90.47
19	Cibeber	50,987	11,081	5,888	16,969	65.30
20	Cilograng	31,662	8,470	1,630	10,100	83.86
21	Wanasalam	48,925	10,054	5,552	15,606	64.42
22	Sobang	26,195	7,018	1,960	8,978	78.17
23	Curug Bitung	31,386	6,956	2,148	9,104	76.41
24	Kalanganyar	33,576	7,909	1,294	9,203	85.94
25	Lebakgedong	17,996	4,769	883	5,652	84.38
26	Cihara	27,339	7,125	1,941	9,066	78.59



NO	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KK			
			Sudah Memiliki KK	Belum Memiliki KK	Total	%
27	Cirinten	23,027	5,513	2,343	7,856	70.18
28	Cigemblong	17,753	5,085	1,436	6,521	77.98
JUMLAH		1.225.432	293,660	77,769	371,429	79.06

Sumber : Dinas Kependudukan & Capil Kab. Lebak, 2013

Ketersediaan database kependudukan mengalami penurunan pada tahun 2013. Tingkat capaian ketersediaan database kependudukan tahun 2009 sebesar 92,80%, meningkat selama tiga tahun berturut-turut dari 99,60% pada tahun 2010, 99,70% pada tahun 2011, 99,80% pada tahun 2012, dan mengalami penurunan menjadi 92,02% pada tahun 2013 meskipun Kabupaten Lebak telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara online.

Berdasarkan hasil pelayanan kependudukan yang telah diberikan kepada Masyarakat Kabupaten Lebak sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun terakhir, capaian administrasi pelayanan kependudukan tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 2.42.

Tabel 2.42
Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2009 - 2013

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan				
		2009	2010	2011	2012	2013
A	Pelayanan Pencatatan Sipil					
	1.Akta Umum (Tepat Waktu)	3.631	3.775	6.262	9.190	11.746
	2.Akta Istimewa (Terlambat)	27.185	24.858	2.591	2.796	17.041
	3.Akta Perkawinan	23	33	25	22	23
	4.Akta Perceraian	-	2	1	-	3
	5.Akta Kematian	4	16	6	10	19
	6.Akta Pengakuan Anak	-	-	-	-	-
	7.Akta Pengangkatan Anak	-	-	-	-	-



No	Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan				
		2009	2010	2011	2012	2013
	8.Surat Keterangan/Catatan Pinggir	-	-	-	-	-
B	Pelayanan Administrasi Kependudukan					
	1.KTP WNI	179.925	134.874	120.974	114.228	29.134
	1. KTP WNA					
	2. KK WNI	20,487	15.839	59.213	75.692	81.202
	3. KK WNA	-	-	-	-	-
	4. SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)	-	-	-	4	249
	6. Surat Keterangan Pindah WNI	-	-	-	3.580	4.172
	7. Surat Keterangan Datang WNI	-	-	-	290	1.795
	8. Surat Keterangan Pindah WNA	-	-	-	-	-
	9. Surat Keterangan datang WNA	-	-	-	-	-
	10. SKPLN (Surat Keterangan Pindah Luar Negeri)	-	-	-	-	-
	11. SKDLN (Surat Keterangan Datang Luar Negeri)	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kependudukan & Capil Kab. Lebak, 2013

10) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus KDRT di Kabupaten Lebak belum dapat dipantau secara keseluruhan dikarenakan belum semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mau melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwenang. Pada tahun 2013, ditemukan 10 kasus kekerasan terhadap anak dan 11 kasus kekerasan seksual pada anak perempuan. Diharapkan dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindakan kekerasan akan menjadi solusi yang tepat melalui penanganan secara optimal mulai dari pra peradilan sampai dengan pasca peradilan.



Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Angkatan Kerja Perempuan menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Lebak tahun 2013 berdasarkan data Sakernas mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu 194.357 orang atau 49,64% dari jumlah penduduk perempuan usia kerja.

Tabel 2.43
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK-P)
Kabupaten Lebak Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	TPAK-P
2010	393.076	168.871	42,96
2011	423.880	181.975	42,93
2012	431.790	176.573	40,89
2013	391.561	194.357	49,64

Sumber : Susenas

11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga

Indikator keberhasilan program Keluarga Berencana adalah rata-rata jumlah anak per keluarga serta rata-rata jumlah jiwa dalam setiap keluarga. Semakin sedikit jumlah jiwa dalam keluarga dapat diindikasikan keluarga yang bersangkutan mempunyai kepedulian yang tinggi dalam perencanaan keluarga serta kesehatan reproduksi wanita. Oleh karena itu, program Keluarga Berencana bukan sekedar sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk, akan tetapi juga harus dimaknai sebagai sebuah upaya perlindungan kesehatan reproduksi wanita dan menekan angka kematian ibu saat melahirkan. Berikut adalah data rata-rata jumlah anak per keluarga dan rata-rata jumlah jiwa dalam setiap keluarga.



Tabel 2.44
Rata-rata Jumlah Anak dan Rata-rata Jumlah Jiwa
Per Keluarga Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Jiwa	Jumlah Anak (0-21 Thn)	Jumlah Keluarga	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	Rata-rata Jumlah Jiwa Per Keluarga
2009	1.242.413	N/A	382.401	N/A	3,83
2010	1.218.213	598.762	328.437	1,82	3,71
2011	1.223.776	602.791	351.602	1,71	3,48
2012	1.274.647	616.618	340.367	1,81	3,75
2013	1.278.667	N/A	352.177	N/A	3,63

Sumber : BPPKB Kab. Lebak & BKKBN Prov. Banten

Rasio akseptor KB

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB di Kabupaten Lebak pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 74,03% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014, sedangkan pertumbuhan rata-rata rasio akseptor KB selama 6 tahun terakhir sebesar 80,92%.

Tabel 2.45
Rasio Akseptor KB Tahun 2009-2014

No.	Tahun	Jumlah Peserta KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio (%)
1.	2009	154.948	233.859	66,26
2.	2010	207.531	257.057	80,73
3.	2011	220.614	257.057	85,82
4.	2012	254.328	259.203	98,12
5.	2013	200.165	270.380	74,03



No.	Tahun	Jumlah Peserta KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Rasio (%)
6.	2014	222.313	276.054	80,53

Sumber : BPPKB Kab. Lebak, 2014

Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Keluarga dikategorisasikan kedalam 5 tahapan keluarga seperti terlihat pada tabel 2.46.

Tabel 2.46
Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Lebak
Tahun 2010-2014

Tahapan Keluarga Sejahtera	2010	2011	2012	2013	2014
Pra Sejahtera	80.028	71.979	72.122	83.797	89.929
KS I	91.162	95.887	100.321	98.505	105.266
KS II	103.325	107.284	119.114	113.823	114.979
KS III	41.353	43.613	49.314	47.973	47.816
KS III+	8.333	9.674	10.045	8.079	8.251
Jumlah KK	324.201	328.437	350.916	352.177	366.241

Sumber : BPPKB Kab. Lebak, 2014

12) Sosial

Perbaikan dan peningkatan kesejahteraan sosial atau masyarakat pada dasarnya merupakan tujuan dan orientasi utama pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang. Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang tidak hanya diukur berdasarkan parameter sektoral semata, melainkan pada akhirnya akan diukur berdasarkan dampak atau pengaruhnya terhadap upaya mendorong peningkatan kesejahteraan sosial/masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari adanya saling keterkaitan yang erat antar berbagai bidang pembangunan yang ujungnya akan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pembangunan di bidang sosial adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar.



Angka penyandang masalah kesejahteraan sosial mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk, Banyaknya keluarga penyandang kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2013 tersaji pada tabel 2.47.

Tabel 2.47
Jumlah Penyandang Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Lebak s/d Tahun 2013

NO	JENIS PMKS	Jumlah / Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Balita Terlantar	160	84	266	327
2	Anak Terlantar	512	454	1.907	2.539
4	Anak Jalanan	141	721	589	212
5	Anak Korban Tindak Kekerasan	376	337	256	218
6	Wanita Korban Tindak Kekerasan	663	555	399	251
7	Wanita Tua Susiala (WTS)	229	102	92	80
8	Wanita Rawan Sosial	13.365	13.084	13,200	13,621
9	Lanjut Usia Terlantar	2.832	3.152	10,011	11.599
10	Lansia Korban tindak Kekerasan	94	80	54	63
11	Anak Cacat Usia 5-21 th	703	703	760	767
12	Penyandang Cacat	1.491	1.569	1,581	1,601
13	Penyandang Cacat Eks. Kusta	199	199	199	199
14	Eks. Napi	582	621	633	647
15	Eks. Korban NAFZA	122	122	139	155
16	Eks. HIV / AIDS	-	-	-	-
17	Penyakit HIV/ AIDS	16	-	-	112
18	Waria	50	20	32	32
19	Pengemis	335	-	276	267
20	Pemulung	96	123	97	41
21	Gelandangan	61	49	112	99
22	Korban Bencana Alam / Sosial	721	-/ 433	3.211/ 265	2.721/ 133
23	Penduduk KAT	8.310	11.501	2,425	1823
24	Penduduk Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Alam	3.228	3.228	3.228	3.228
25	Keluarga Fakir Miskin	143.555	154.639	151,328	140.897
26	Tinggal Di rumah Tidak Layak huni	13.920	14.347	14.410	14.396
27	Keluarga Rentan Sosial Ekonomi	61.264	53.362	50.040	49,230

Sumber : Dinas Nakersos Kab. Lebak, 2014

Selain disebabkan oleh faktor ekonomi, penduduk Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial juga dapat disebabkan oleh faktor geografis, PMKS disebabkan oleh faktor geografis ini terdiri dari masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana alam dan komunitas Adat terpencil (KAT).



Sementara itu, pemerintah dalam upaya penanganan PMKS disamping memberikan bantuan-bantuan dan pemberdayaan sosial juga sinergis serta menggalakkan dan pemberdayaan terhadap Lembaga-lembaga Sosial juga Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya, sampai dengan tahun 2013 PSKS di Kabupaten Lebak sebagaimana tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
di Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013

No	Jenis PSKS	Jumlah		
		2011	2012	2013
1	Pekerja Sosial masyarakat (Desa)	-	1.229	1.306
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	23	23	28
3	Organisasi Sosial	97	116	139
4	Karang taruna	300	300	320
5	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	640	679	734
6	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).	6	9	15
7	Dunia Usaha / BUMN	5	5	5

Sumber : Dinas Nakersos Kab. Lebak, 2014

Organisasi kesosialan tersebut dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah social yang ada di Kabupaten Lebak.

13) Ketenagakerjaan

Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2009-2013, cenderung menunjukkan angka yang berfluktuatif. Berdasarkan data Sakernas, Kabupaten Lebak pada tahun 2013 mencapai 841.936 orang (Agustus 2013). Untuk lebih jelas, gambaran jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas berdasarkan kegiatan tersaji pada tabel 2.49.



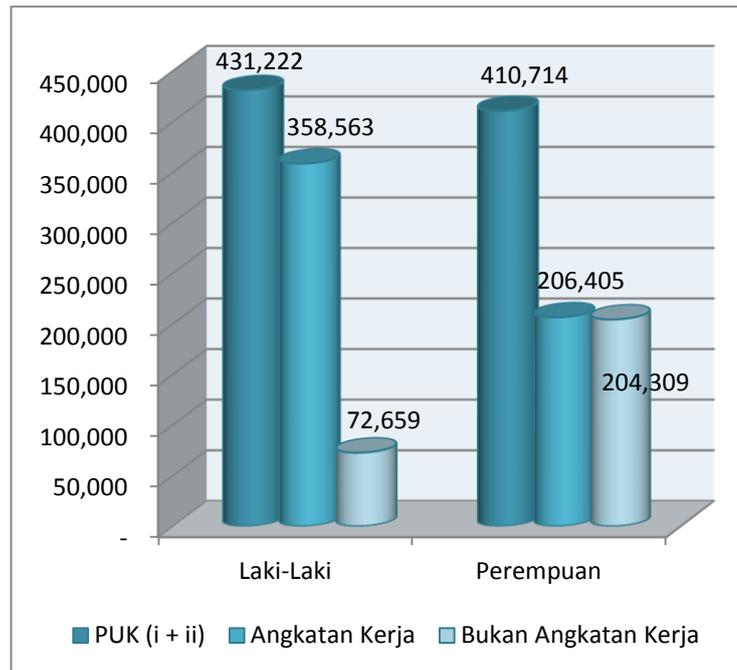
Tabel 2.49
Jumlah Penduduk Usia Kerja 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenis Kegiatan
di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

No.	Uraian	Agustus 2009	Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012	Agustus 2013
1.	ANGKATAN KERJA					
	Bekerja	491.465	491.465	549.378	305.162	524.130
	Pengangguran	472.440	75.729	66.471	67.274	40.838
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (i)	963.905	567.194	615.849	372.436	564.968
2.	BUKAN ANGGATAN KERJA					
	Sekolah dan Mengurus Rumah Tangga	225.437	278.698	N/A	98.059	233.430
	Lainnya	35.066	43.702	N/A	29.294	43.538
	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (ii)	260.503	322.400	N/A	127.353	276.968
	Jumlah Penduduk Usia Kerja (i) + (ii)	1.224.408	889.594	N/A	499.789	841.936

Sumber : Sakernas Agustus 2009-2013 diolah Pusdatinaker



Apabila dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk usia kerja laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan dengan sex ratio 105,3 berdasarkan data Sakernas Agustus 2013, artinya setiap 100 orang usia kerja perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki. Gambaran jumlah penduduk usia kerja menurut jenis kelamin dan kegiatan dapat dilihat pada grafik 2.35.



Grafik 2.35
Penduduk Usia Kerja
di Kabupaten Lebak
Menurut Jenis Kelamin
dan Kegiatan
Agustus 2013

Sumber : Sakernas
Agustus 2013
diolah Pusdatinaker

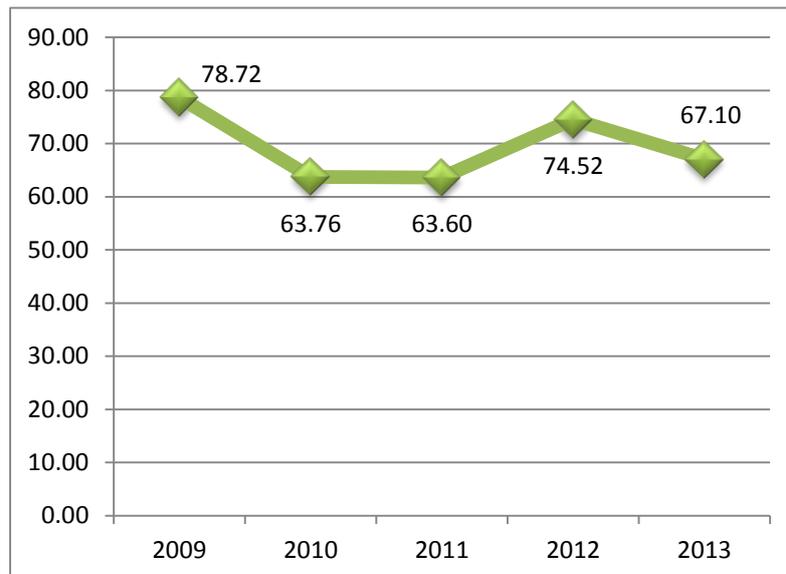
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TAPK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perkeonomian. Semakin tinggi TAPK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

TAPK Kabupaten Lebak pada periode Agustus 2009 hingga Agustus 2013 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2009 TAPK mencapai 78,72% dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2011 menjadi 63,60%. Akan tetapi pada tahun 2012 mengalami lonjakan TAPK menjadi 74,52% dan tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi 67,10%. Perkembangan TAPK Kabupaten Lebak dapat dilihat pada grafik 2.36.



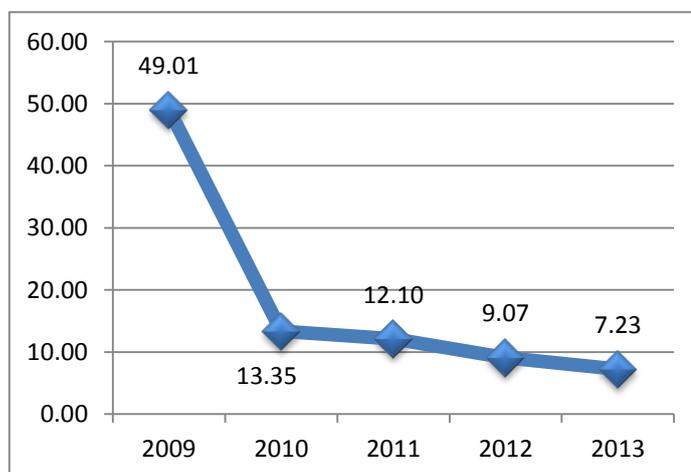
Grafik 2.36
Perkembangan
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK) Kabupaten
Lebak Periode
Agustus 2009-
Agustus 2013

Sumber : Sakernas
Agustus 2009-2013
diolah Pusdatinaker



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Ketiadaan pekerjaan itu menurut BPS bisa karena sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged worker*), serta telah diterima bekerja namun belum mulai bekerja.

TPT bisa dipergunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran. Perkembangan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lebak pada periode Agustus 2009 sampai dengan Agustus 2013 menunjukkan trend penurunan seperti tersaji pada grafik 2.37.



Grafik 2.37
Perkembangan Tingkat
Pengangguran Terbuka
(TPT) di Kabupaten Lebak
Periode Agustus 2009-
Agustus 2013

Sumber : Sakernas Agustus
2009-2013 diolah Pusdatinaker



Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upay yang rendah merupakan salah satu akar kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami trend penurunan, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lebak masih dinilai cukup tinggi. Hal in menunjukkan bahwa potensi wilayah yang tersedia di Kabupaten Lebak ternyata belum mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerja.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, penganggur laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan penganggur perempuan. Pada Agustus 2013, TPT masing-masing sebesar 8,03% untuk laki-laki dan 5,84% untuk perempuan. Untuk lebih jelasnya, perkembangan TPT berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 2.38.

Grafik 2.38
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lebak
Periode Agustus 2009-Agustus 2013



Sumber : Sakernas Agustus 2009-2013 diolah Pusdatinaker

Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Lebak lebih didominasi oleh sektor pertanian, selain wilayah Kabupaten Lebak yang masih kaya akan lahan pertanian juga pertanian masih merupakan warisan pekerjaan yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Lebak. Perkembangan penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel 2.50.



Tabel 2.50
Perkembangan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
di Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013

Lapangan Pekerjaan Utama	2009		2010		2011		2012		2013	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	265.804	56,26	271.832	55,31	207.112	42,89	418.325	13,63	124.281	37,69
Industri	28.472	6,03	34.429	7,01	27.020	5,60	790.603	25,77	23.942	7,26
Perdagangan	70.746	14,97	63.739	12,97	87.106	18,04	630.363	20,55	35.702	10,83
Jasa-jasa	37.847	8,01	56.980	11,59	56.674	11,74	501.831	16,36	36.300	11,01
lainnya	69.571	14,73	64.485	13,12	104.995	21,74	726.987	23,69	109.548	33,22
Jumlah	472.440	100,00	491.465	100,00	482.907	100,00	3.068.109	100,00	329.773	100,00

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2012-2014



Dari tabel 2.50 dapat dilihat bahwa sudah terjadi pergeseran lapangan pekerjaan utama. Meskipun demikian, sektor pertanian masih tetap menjadi lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Lebak. Pada tahun 2011 sektor perdagangan menjadi sektor kedua setelah sektor pertanian. Begitu pula pada tahun 2012 sektor industri sudah mulai dilirik oleh penduduk usia kerja. Namun pada tahun 2013 terjadi perubahan sektor kembali yaitu sektor jasa yang menjadi lapangan pekerjaan kedua setelah sektor pertanian.

Selain lapangan pekerjaan utama, Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Lebak pada tahun 2013 sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja bebas yaitu 31,01% diikuti status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga. Hal ini sesuai dengan tradisi disebagian masyarakat Kabupaten Lebak dimana salah satu sektor yaitu pertanian apabila suami hendak pergi ke sawah/kebun maka istri/anak/anggota keluarga lainnya ikut membantu terutama menjelang dan pada saat musim panen tiba. Perkembangan penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama dapat dilihat pada tabel 2.51.

Tabel 2.51
Persentase Perkembangan Jumlah Penduduk yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama
Tahun 2011-2013

Status Lapangan Pekerjaan	2011	2012	2013
Berusaha Sendiri	12,72	11,86	15,31
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap / Pekerja Keluarga	24,50	20,38	24,12
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	4,41	4,84	4,44
Buruh/Karyawan	14,15	18,10	21,27
Pekerja Bebas	24,08	29,33	31,01
Pekerja Tidak Dibayar	20,14	15,49	3,86

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2014



Jumlah angkatan kerja yang meningkat seringkali tidak diikuti dengan jumlah tenaga yang terserap. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kesempatan kerja yang terbatas serta kualifikasi angkatan kerja yang tidak sesuai serta diduga karena kurang lengkapnya informasi yang ada di pasar kerja baik dari sisi penawaran maupun permintaan, maka penyerapan tenaga kerja menjadi tidak optimal.

Tabel 2.52
Perkembangan Pencari Kerja yang Ditempatkan
di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Sisa Pencari Kerja Terdaftar s/d	17.602	17.900	14.471	12.526	12.474
Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar	6.166	7.240	6.941	6.995	3.269
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	911	573	1.082	438	764
Persentase	14,77	7,91	15,59	6,36	23,37

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2014

Berdasarkan tabel 2.30, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Lebak selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2009 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 6.166 orang, kemudian menurun cukup tajam menjadi 3.269 pada tahun 2013. Apabila dilihat dari perbandingan antara jumlah pencari kerja yang mendaftar dengan jumlah pencari kerja yang ditempatkan, pada tahun 2009 sebesar 14,77%, kemudian menurun tajam pada tahun 2010 menjadi 7,91%, dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan yg cukup signifikan menjadi 23,37%. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhannya selama lima tahun terakhir mencapai 13,60%.

Selain itu, penurunan jumlah pencari kerja yang terdaftar juga diikuti oleh menurunnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2009



sebanyak 911 orang yang ditempatkan dan pada tahun 2013 sebanyak 764 orang yang ditempatkan.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dari aspek ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Disnakersos membentuk Dewan pengupahan Daerah yang mempunyai tugas membahas dan menetapkan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Perhatian pemerintah dalam menetapkan UMK ditunjuk untuk memberikan rekomendasi (ambang batas) kepada pemilik usaha/perusahaan mengenai besaran UMK tahun berikutnya.

Untuk Upah minimum kabupaten (UMK) Lebak Perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tersaji pada tabel 2.53.

Tabel 2.53
Jumlah Upah Minimum Kabupaten Lebak

No	Tahun	Jumlah UMK	Kenaikan (%)
1	2010	Rp. 959.500,-	-
2	2011	Rp. 1.007.500,-	5,00%
3	2012	Rp. 1.047.800,-	4,00%
4	2013	Rp. 1.187.500,-	10,51%
5	2014	Rp. 1.490.000,-	25,47%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak, 2013

Disamping penetapan UMK, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dari aspek ekonomi dan kesejahteraan bagi tenaga kerja, pemerintah juga mewajibkan dilaksanakannya program Jamsostek pada setiap perusahaan dan juga tenaga kerja sesuai dengan amanat undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja. Hal ini terus di galakan melalui jejaring kesadaran menjadi peserta Jamsostek. Sampai dengan tahun 2013 mengalami pasang surut karena kurangnya Sosialisasi dan pemahaman tentang Jamsostek, namun tingkat kepesertaan terus mengalami peningkatan sampai dengan saat ini terdapat 61 Perusahaan yang mengikuti program Jamsostek di Kabupaten lebak dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek aktif sejumlah 3.406 Pekerja, terinci pada tabel 2.54.



Tabel 2.54
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Peserta Jamsostek

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Peserta Jamsostek
1	2010	46	1.670
2	2011	52	2.592
3	2012	59	2.956
4	2013	61	3.406

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak, 2013

Terkait dengan upaya perlindungan tenaga kerja adalah Serikat Pekerja (SP)/Serikat buruh (SB). Menurut definisinya SP/SB adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, menyuarkan, dan membela hak-hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Tabel 2.55
Jumlah Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB)
di Kabupaten Lebak

No	Nama Serikat Pekerja	Jumlah Pengurus Cabang	Jumlah Pengurus Unit	Lembaga Kerjasama BIPARTIT
1	SPSI	1	17	13
2	SP.BUN	1	5	4
3	SBSI	1	2	-
4	IKKAMI	1	1	1
Jumlah		4	25	18

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak, 2013

Sejak di berlakukannya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, maka sejak saat itu



penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak lagi di tangani oleh panitia perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

Berdasarkan Undang-undang tersebut penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu konsfirasi perundangan bipartit. Jika perudangan tidak mencapai kesepakatan maka perselisihan dapat diupayakan melalui mediasi arbitrase. Dan jika perselisihan belum juga dapat diselesaikan maka pada tahap akhir perselisihan dapat diajukan pada Pengadilan hubungan Industrial (PHI). Tabel 2.56 berikut menyajikan jumlah kasus perselisihan industrial dan PHK di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.56
Kasus Perselisihan Industrial (PHI) dan PHK di Kabupaten Lebak

No	Tahun	Jumlah kasus	Penyelesaian kasus	
			PHI	PHK
1	2011	46	46	-
2	2012	67	42	15
3	2013	26	20	6
Jumlah		139	108	21

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak, 2013

14) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyak koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Jumlah koperasi aktif pada tahun 2014 sebanyak 689 koperasi, meningkat sebesar 2,68% sepanjang kurun waktu 2009-2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.57.



Tabel 2.57
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2014

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah koperasi aktif	591	618	645	657	671	689
2.	Jumlah koperasi	735	726	753	769	769	791
3.	Persentase koperasi aktif	80,41	85,12	85,66	85,44	87,26	87,10

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, 2014

Jumlah UMKM dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan walaupun sedikit. Untuk itu diperlukan pengembangan kewirausahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah UMKM di Kabupaten Lebak. Perkembangan UMKM di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada tabel 2.58.

Tabel 2.58
Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Berdasarkan Kriteria Usaha Tahun 2011-2014

No.	Jenis Usaha	2011	2012	2013	2014
1	Usaha Mikro	47.504	48.892	48.892	49.205
2	Usaha Kecil	706	785	785	538
3	Usaha Menengah	9	9	9	17
Jumlah		48.219	49.686	49.686	49.760

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, 2014

Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, berperan besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi tingkat pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil dan memperbaiki pemerataan pendapatan



masyarakat. Pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan usaha baru disektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi, berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal.

Tabel 2.59
Data UMKM Per-Kecamatan di Kabupaten Lebak
Sampai Dengan Tahun 2014 Berdasarkan Klasifikasi

No	Kecamatan	Mikro	Kecil	Mene- ngah	Jumlah	Pertum- buhan Dari 2009-2014
1	Rangkasbitung	4.564	250	3	4.817	(2,65)
2	Cibadak	1.335	20	-	1.355	(39,56)
3	Kalanganyar	838	30	2	870	(6,90)
4	Cimarga	2.387	9	-	2.396	(5,18)
5	Warunggunung	1.995	14	-	2.009	0,14
6	Maja	1.549	6	-	1.555	(17,89)
7	Curugbitung	982	5	1	988	7,28
8	Sajira	2.788	6	-	2.794	(0,71)
9	Lebakgedong	763	2	-	765	0
10	Cipanas	2.488	38	-	2.526	25,10
11	Leuwidamar	1.808	13	1	1.822	0,11
12	Muncang	963	18	-	981	3,70
13	Sobang	1.432	-	-	1.432	8,24
14	Bojongmanik	721	-	-	721	15,36
15	Cirinten	968	-	-	968	0
16	Cikulur	1.481	3	-	1.484	13,89
17	Cileles	1.398	25	6	1.493	7,10
18	Gunungkencana	1.401	8	-	1.409	20,61
19	Banjarsari	2,161	-	1	2,162	(3,40)
20	Cijaku	784	-	-	784	21,55
21	Cigemblong	1.387	1	-	1.388	17,71
22	Malingping	3.274	37	-	3.311	10,33
23	Wanasalam	1.527	19	2	1.548	6,03
24	Cihara	1.680	4	-	1.684	5,51
25	Panggarangan	1.763	6	-	1.769	(4,78)
26	Bayah	1.914	2	1	1.917	2,75



No	Kecamatan	Mikro	Kecil	Mene- ngah	Jumlah	Pertum- buan Dari 2009-2014
27	Cibeber	3.216	15	-	3.231	30,27
28	Cilograng	1.638	7	-	1.645	12,51
Jumlah/Rata-rata		49.205	538	17	49.760	7,56

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, 2015

15) Penanaman Modal

Iklim investasi di Kabupaten Lebak dari tahun ke tahun terus membaik. Bahkan kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Lebak selalu menjadi daerah tujuan investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDM).

Beberapa langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya mendorong minat dan realisasi investasi di Kabupaten Lebak antara lain menjaga iklim investasi yang kondusif dalam penanaman modal, melaksanakan penyederhanaan prosedur perijinan, serta pada tahun 2013 ini menintegrasikan fungsi penanaman modal dan pelayanan perijinan dengan adanya Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Nilai Investasi secara kumulatif di Kabupaten lebak sampai dengan tahun 2013 telah mencapai Rp. 4.378.061.117.082 dan \$ 590.827.300 Perkembangan investasi terlihat tabel 2.60 berikut.

Tabel 2.60
Perkembangan Investasi PMA - PMDN di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013

NO	JENIS INVE- TASI	TAHUN				JUMLAH KESELURUHAN		KET.
		S/D 2012		2013				
1	PMDN	Rp.	1,093,714,078,031	Rp.	55,00 0,000,000	Rp.	1,148,714,078,031	Melalui Ijin Prinsip Penanaman Modal
		Rp.	2,267,674,622,064	Rp.	869,357,015,987	Rp.	3,137,031,638,051	Tanpa Melalui Ijin Prinsip Penanaman Modal



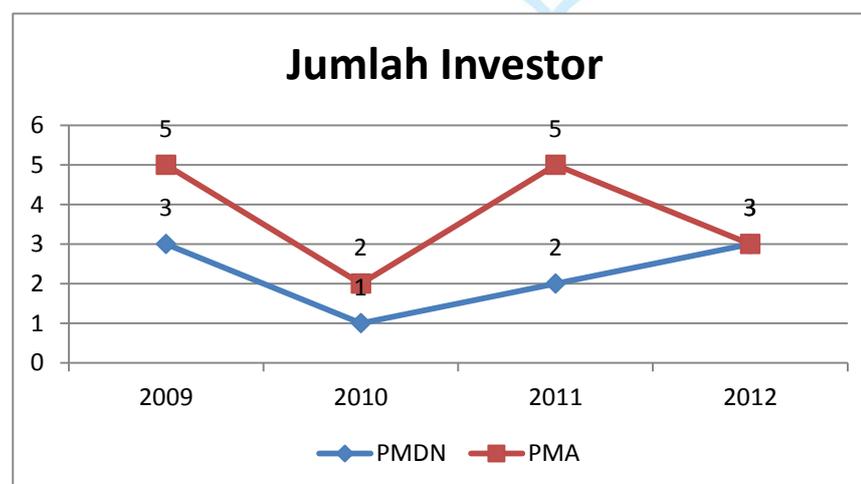
NO	JENIS INVESTASI	TAHUN				JUMLAH KESELURUHAN		KET.
		S/D 2012		2013				
2	PMA	\$	432,801,000	\$	158,026,300	\$	590,827,300	
		Rp.	16,815,401,000	Rp.	75,500,000,000	Rp.	92,315,401,000	
Jumlah		\$	432,801,000	\$	158,026,300	\$	590,827,300	
		Rp.	3,378,204,101,095	Rp.	999,857,015,987	Rp.	4,378,061,117,082	

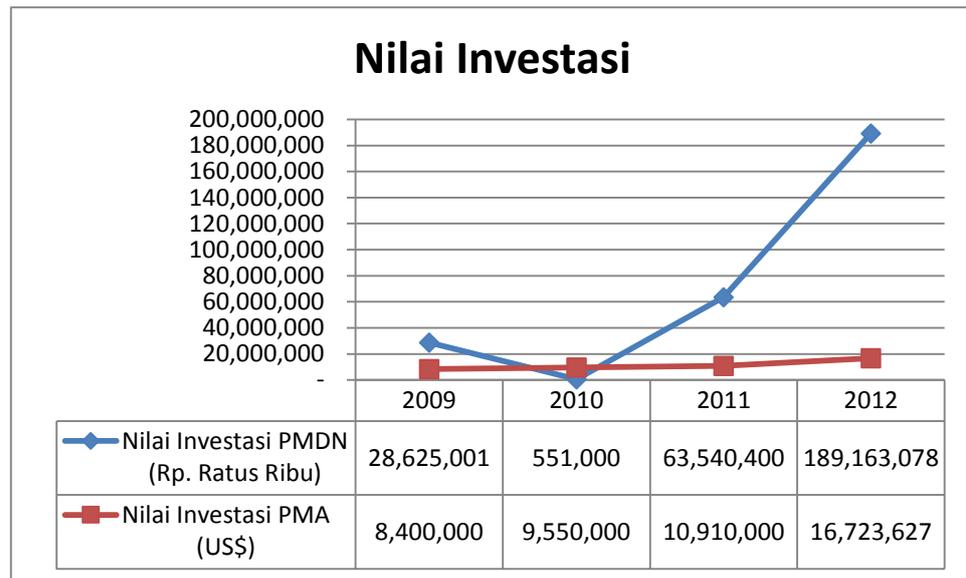
Sumber : Bidang Data Dan Pengaduan BPPPT Kabupaten Lebak Tahun 2014

Realisasi investasi pada tahun 2013 berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terdiri dari 4 (empat) Perusahaan PMA, yaitu PT. Suma Heksa Sinergi, PT. Samudera Banten Jaya, PT. Sinoma Engineering Ind, dan PT. Cemindo Gemilang. Perusahaan PMDN (skala nasional) terdiri dari 1 (satu) perusahaan, yaitu PT. Situmulya Hydropower. Sedangkan investasi tanpa melalui ijin prinsip penanaman modal terdiri dari 789 Perusahaan.

Jumlah investor dan nilai investasi swasta di Kabupaten Lebak yang berskala nasional terlihat pada grafik 2.39 berikut.

Grafik 2.39
Jumlah Investor dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2012





Sumber: BPMPT Kabupaten Lebak, 2013

16) Kebudayaan

Banyaknya potensi seni dan budaya masyarakat di Kabupaten Lebak merupakan salah satu potensi yang dapat ditingkatkan, sampai saat ini baru sebagian potensi seni yang terdata dengan baik termasuk fasilitas keseniannya. Jenis kesenian yang berpotensi untuk dikembangkan tersaji pada tabel 2.61.

Tabel 2.61
Jenis Kesenian di Kabupaten Lebak

No	Jenis Kesenian	Jumlah
1	Debus	5
2	Saman	2
3	Angklung Buhun	1
4	Angklung	3
5	Qasidah / Rebana	17
6	Calung Renteng	1
7	Calung	3
8	Wayang Golek	14
9	Dogdog Lojor	1
10	Topeng / Ubrug	35
11	Degung	14



No	Jenis Kesenian	Jumlah
12	Kecapi Suling	1
13	Reog	2
14	Pencak Silat	7
15	Kuda Lumping	2
16	Teater	1
17	Marching Band	1
18	Seni Lukis	1
19	Seni Kriya	1
20	Rudat	1
21	Jaipongan	1
22	Sanggar Seni Rupa	4
23	Sanggar Teater	37

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lebak

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah kesenian di Kabupaten Lebak sebagaimana tabel diatas, tetapi masih banyak yang belum terdata dengan baik dan ini merupakan tantangan yang harus ditindaklanjuti demi tersedianya database kebudayaan di Kabupaten Lebak yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang masih memiliki Komunitas Adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Komunitas Adat di Kabupaten Lebak sebagaimana tabel 2.62.

Tabel 2.62
Komunitas Adat di Kabupaten Lebak

No	Nama	Acara seremonial / Ritual
1	Masyarakat Kaolotan Selatan	Seren taun
2	Masyarakat Tradisional Baduy	Seba Baduy, Kawalu
3	Masyarakat Adat Citorek	

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lebak

Ketiga Komunitas adat tersebut sampai saat ini masih memegang teguh nilai-nilai warisan leluhur dan ini memerlukan perhatian khusus dari



pemerintah baik Daerah maupun Pusat untuk memberikan fasilitasi dalam rangka pengembangan keanekaragaman budaya.

Belum terdatanya potensi seni di Kabupaten Lebak juga dipengaruhi oleh belum optimalnya sumber daya manusia baik pada dinas pendidikan dan kebudayaan maupun para pelaku seni di Kabupaten Lebak. Sampai dengan Tahun 2013 jumlah pelaku seni di Kabupaten Lebak sebagaimana tersaji pada tabel 2.63.

Tabel 2.63
Pelaku Seni di Kabupaten Lebak

No	Uraian	Jumlah
1	Pelaku Seni / Seniman	10
2	Pegawai di Bidang Kebudayaan	4*

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, 2013

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pelaku seni/seniman di Kabupaten Lebak masih sedikit baru berjumlah 10 orang tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya potensi seni di Kabupaten Lebak.

17) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos siskamling. Jumlah anggota satuan linmas pada tahun 2010 sebanyak 3.937 org, sedangkan pada tahun 2011 adalah 4.609 org atau meningkat sebanyak 672 org.

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2014-2019 difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Pelanggaran peraturan daerah oleh masyarakat terus mengalami



fluktuasi, yaitu dari 41 kasus pengaduan pelanggaran pada tahun 2007 menjadi 78 kasus pada tahun 2008, dan 42 kasus pada tahun 2009. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perda masih kurang, hal ini disebabkan belum efektifnya sosialisasi peraturan daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.

Capaian kinerja Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2009-2014 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan jumlah anggota perlindungan masyarakat (Linmas);
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan daerah;
3. Terkendalinya dan terdeteksinya secara dini gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;

Terdapatnya informasi/data obyektif mengenai prediksi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat pada akhir 2008, serta langkah-langkah penanggulangannya.

Selama tahun 2011, penyakit masyarakat (Pekat) yang paling menonjol adalah wanita rawan sosial ekonomi yang mencapai 39.825 kasus, diikuti eks napi sebanyak 1.021 kasus, anak jalanan sebanyak 96 kasus dan eks narkoba sebanyak 592 kasus. Penyalahgunaan narkoba, terus mengalami kenaikan dari 122 kasus eks narkoba pada tahun 2007 menjadi 592 kasus pada tahun 2011. Hal ini merupakan ancaman laten yang memerlukan penanganan berkesinambungan serta terintegrasikan antara aparat ketentraman daerah, yang bekerja sama dengan perangkat satuan polisi pamong praja, aparat perlindungan masyarakat (LINMAS) serta lingkungan keluarga masing-masing.

Tindak pidana kriminal yang paling dominan pada kurun waktu 2009-2012 adalah pencurian dengan pemberatan, diikuti oleh pencurian kendaraan bermotor serta penipuan. Perkembangan tindak pidana kriminal di Kabupaten Lebak dapat dilihat pada tabel 2.64.



Tabel 2.64
Perkembangan Angka Kriminalitas Paling Tinggi
di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2012

No	Kasus	Kasus 2009			Kasus 2010			Kasus 2011			Kasus 2012		
		Kejadi-an	Terta-ngani	Angka Krimi-nalitas yg Terta-ngani	Kejadi-an	Terta-ngani	Angka Krimi-nalitas yg Terta-ngani	Kejadi-an	Terta-ngani	Angka Krimi-nalitas yg Terta-ngani	Kejadi-an	Terta-ngani	Angka Krimi-nalitas yg Terta-ngani
1.	Pencurian dengan Pemberatan	90	64	0,53	70	42	0,35	50	30	0,23	58	27	0,21
2.	Pencurian Ranmor	60	15	0,12	60	22	0,18	47	17	0,13	62	12	0,09
3.	Penadahan	36	36	0,30	23	23	0,19	11	11	0,09	9	9	0,07
4.	Penipuan	41	32	0,26	57	35	0,29	35	22	0,17	46	24	0,19
5.	UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak	9	9	0,07	7	7	0,06	13	12	0,09	17	16	0,12

Sumber : Kepolisian Resor Lebak, 2013



Berdasarkan data Kepolisian Resor Lebak, jumlah kejadian tindak pidana kriminal dengan 43 kasus berjumlah 438 kejadian pada tahun 2009, yang tertangani sebanyak 347 kasus sehingga angka kriminalitas yang tertangani sebesar 2,86% dengan crime rate 79,22%. Pada tahun 2010 berjumlah 378 kasus kejadian menurun dibandingkan tahun 2009, yang tertangani sebanyak 2,69 kasus sehingga angka kriminalitas yang tertangani sebesar 2,23% dengan crime rate 71,16%. Pada tahun 2011 berjumlah 280 kasus kejadian menurun dibandingkan tahun 2010, yang tertangani sebanyak 200 kasus sehingga angka kriminalitas yang tertangani sebesar 1,56% dengan crime rate 71,43%. Sedangkan pada tahun 2012 berjumlah 313 kasus kejadian mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, yang tertangani sebanyak 185 kasus sehingga angka kriminalitas yang ditangani sebesar 1,44% dengan crime rate 59,11%.

Kondisi ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami fluktuasi sehingga menimbulkan peningkatan pengangguran, yang mendorong tumbuhnya tindak pidana. Walaupun demikian secara umum penanganan tindak pidana kriminalitas di Kabupaten Lebak masih dalam konstelasi terkendali oleh aparat penegak hukum kepolisian daerah dibantu oleh masyarakat.

Dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan, fungsi pengawasan dan mekanisme kontrol dilaksanakan oleh lembaga penegak perda terutama Satuan Polisi Pamong Praja yang disiagakan di kabupaten dan kecamatan. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja hingga akhir tahun 2014 berjumlah 68 orang, sebagian besar bertugas di kabupaten. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang mengingat kompleksnya tugas dan fungsi yang diemban.



18) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Berkaitan dengan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD yang meliputi Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, pada tahun 2014 jumlah raperda yang dimasukkan dalam prolegda sebanyak 12 buah yang terdiri dari 4 Raperda merupakan usulan/inisiatif Dewan dan 8 Raperda merupakan usulan eksekutif. Dari jumlah tersebut, yang berhasil dibahas sidang DPRD dan telah ditetapkan menjadi perda sebanyak 8 Perda atau sekitar 66,67%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan



pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Rasio kemandirian Kabupaten Lebak tahun 2014 sebesar 13,22% lebih rendah dari target yang ditentukan yaitu 16,69%.

Pengelolaan barang daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan opini BPK Kabupaten Lebak masih berstatus WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Hasil survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun 2014 terhadap 3 bidang pelayanan, yaitu bidang kependudukan dan pencatatan sipil, bidang perijinan dan



bidang kesehatan, menunjukkan persepsi baik/puas dari masyarakat pengguna layanan. Besar capaian IKM pada tahun 2014 sebesar 79,70% meningkat dari capaian IKM tahun 2013 yaitu sebesar 75,52%. Hasil kontribusi tersebut dari 4 SKPD pemberi layanan yaitu 77,20% dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bidang kependudukan dan pencatatan sipil, 85,90% dari BPMPTT untuk bidang perijinan, 81,59% dari Dinas Kesehatan dan 74,10% dari RSUD dr. Adjidarmo untuk bidang kesehatan.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemanfaatan teknologi informasi dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan sudah diterapkan di pemerintah daerah, diantaranya untuk bidang pelayanan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), pengaduan masyarakat secara online, publikasi informasi umum dan pemerintahan melalui website Kabupaten Lebak serta SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit). Untuk bidang administrasi dan manajemen, telah terbangun SIMONEV (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi). Untuk Bidang pembangunan telah terbangun SIMDAPOK (Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan) dan SISRENBANGDA (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) yang mencakup input dan output usulan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi dan informasi hasil pembangunan daerah. Untuk bidang keuangan telah terbangun SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Untuk bidang kepegawaian telah terbangun SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian).

Dalam bidang penanggulangan bencana, pemerintah daerah Kabupaten Lebak mendukung upaya pengurangan risiko bencana. Kabupaten Lebak memiliki 19 potensi bencana dengan kerentanan beragam untuk setiap potensi bencana.

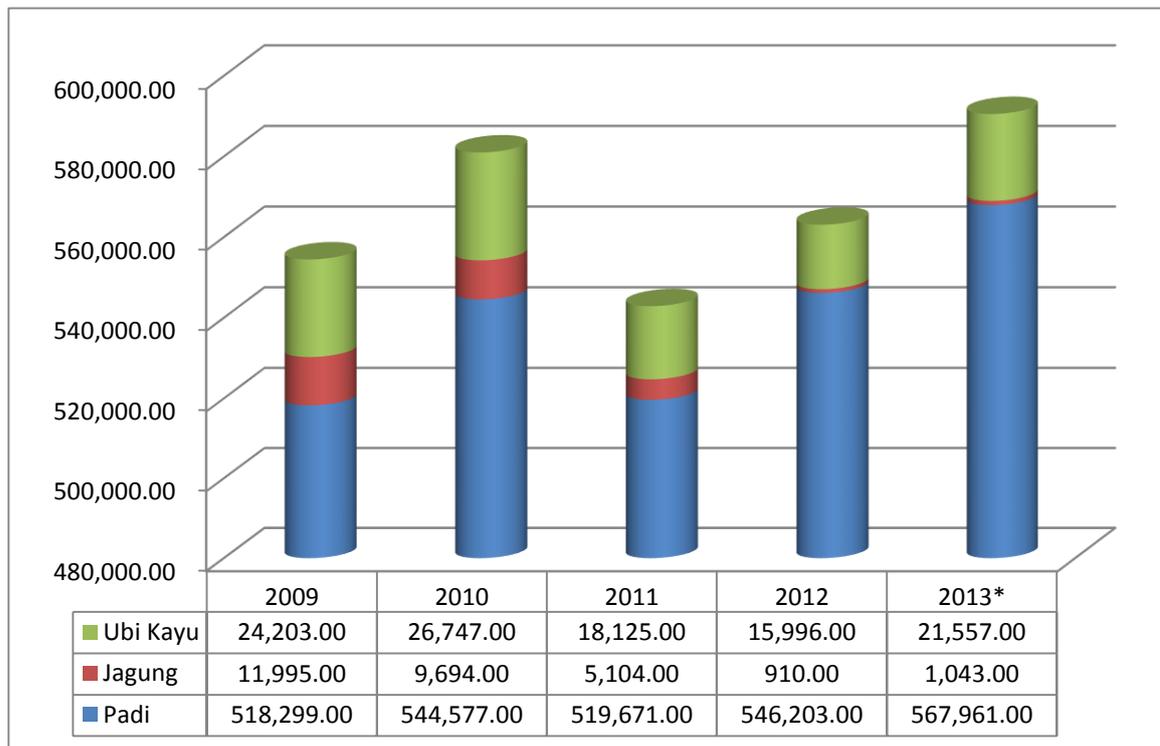
19) Ketahanan Pangan

Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan, Kabupaten Lebak mengalami fluktuasi produksi pangan nabati untuk komoditas utama padi, sedangkan untuk komoditas utama lainnya yaitu jagung dan ubi kayu mulai tahun



2009-2012 mengalami penurunan namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.40.

Grafik 2.40
Perkembangan Produksi Komoditas Pangan Utama
Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013 (dalam ton)



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lebak, 2013

*) BPS Kab. Lebak, 2014

Sebagai daerah penyangga pangan Provinsi Banten, produksi padi di Kabupaten Lebak merupakan komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Meski belum optimal, produksi padi cenderung meningkat walaupun berfluktuasi dengan rata-rata mencapai 6,11% pada kurun waktu tahun 2009-2013.

Beras merupakan bahan pokok utama masyarakat pada umumnya, rasio ketersediaan produksi beras untuk konsumsi penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.65.



Tabel 2.65
Rasio Ketersediaan Beras Kabupaten Lebak
Tahun 2010-2012

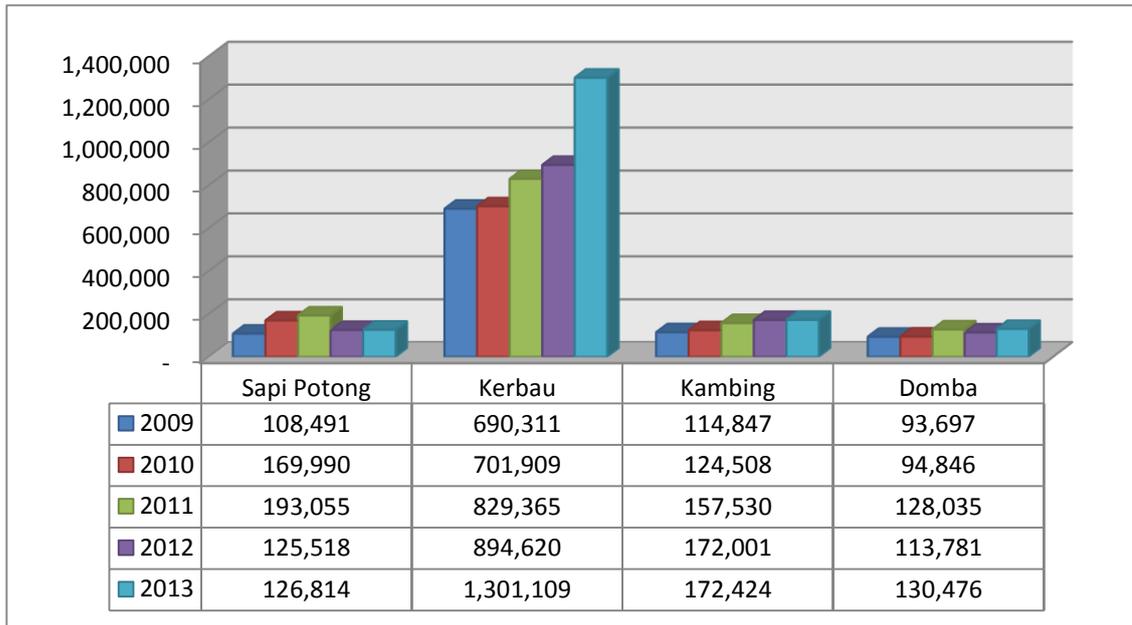
Uraian	2010	2011	2012
Produksi Beras untuk Konsumsi Penduduk (kg)	171.883	169.678	159.971
Jumlah Penduduk (orang)	1.204.095	1.228.884	1.239.660
Rasio Ketersediaan Beras (kg/orang)	142,75	138,08	129,04

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2013

Produksi pangan hewani selama kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan untuk komoditas kerbau, kambing dan domba. Peningkatan produksi ini sejalan dengan meningkatnya populasi komoditas tersebut. Produksi daging sapi potong mengalami penurunan selama kurun waktu lima tahun terakhir, hal ini disebabkan tingginya harga daging sapi di pasaran sehingga mengurangi minat pembeli untuk membeli daging sapi dan mengalihkan ke daging kerbau, kambing dan domba. Untuk komoditas pangan hewani lainnya yaitu ayam buras dan ayam ras pedaging merupakan pangan hewani yang memiliki produksi paling tinggi di Kabupaten Lebak. Gambaran produksi pangan hewani selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada grafik 2.41.



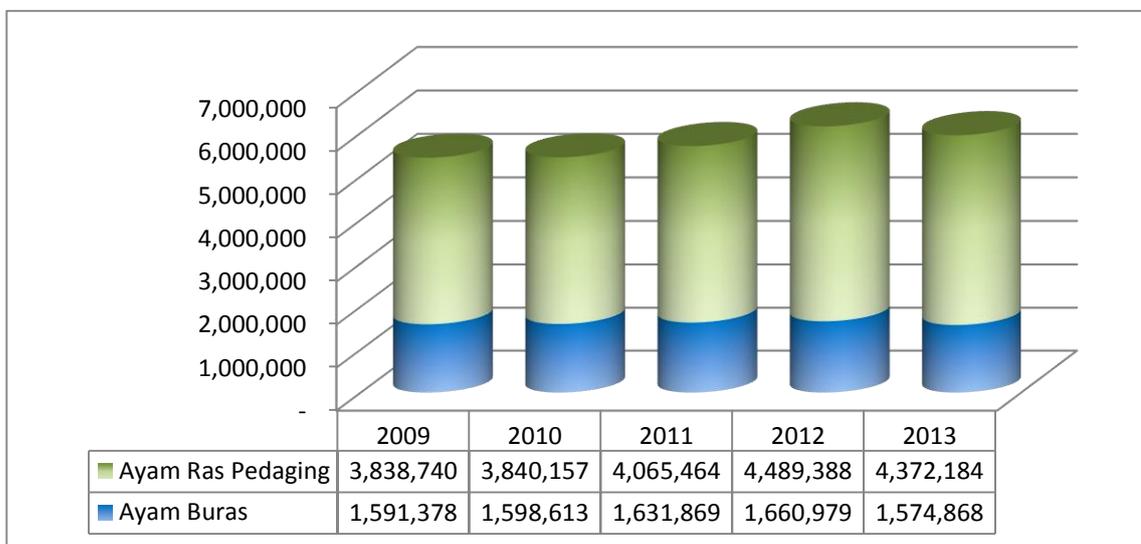
Grafik 2.41
Produksi Pangan Hewani di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013 (dalam kilogram)

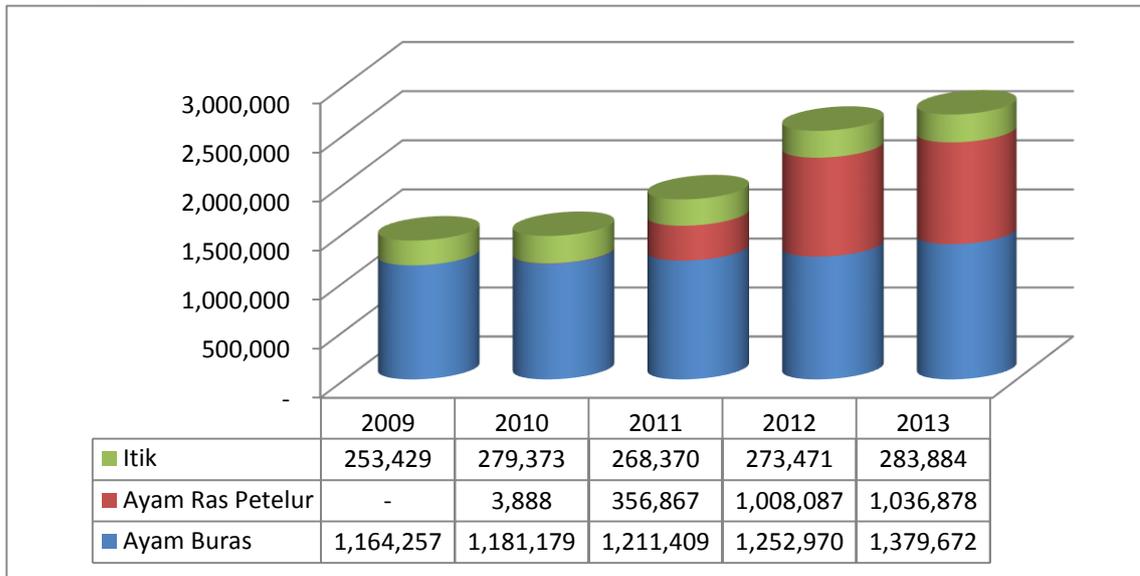


Sumber : Dinas Peternakan Kab. Lebak, 2014

Seiring dengan peningkatan populasi unggas, produksi dari unggas baik berupa daging maupun telur juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti tergambar pada grafik 2.42.

Grafik 2.42
Produksi Daging Ayam dan Produksi Telur
Tahun 2009-2013





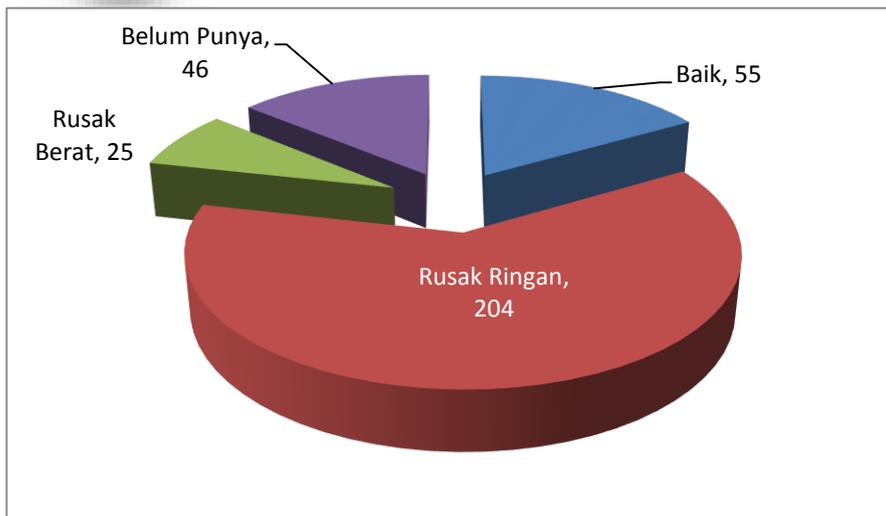
Sumber : Dinas Peternakan Kab. Lebak, 2014

20) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi desa, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi maupun kesejahteraan keluarga.

Guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, diperlukan penyelenggara urusan pemerintahan desa yaitu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana pemerintahan desa. Kondisi kantor desa sampai dengan tahun 2013 tergambar pada grafik 2.43.



Grafik 2.43
Kondisi Kantor
Desa Sampai
Dengan
Tahun 2013

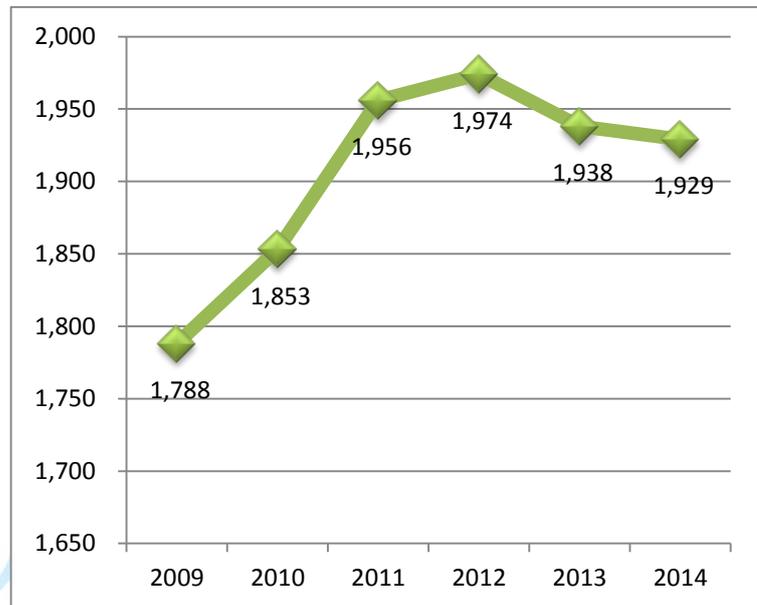
Sumber : BPMPD
Kab. Lebak,
2014

Kelembagaan desa merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Sampai dengan tahun 2013, potensi kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang sudah terbentuk terdiri dari UPK dengan anggota 81 orang, BKPAD dengan anggota 81 orang, BP UPK dengan anggota 81 orang, TPK dengan anggota 987 orang dan KPMD dengan anggota 897 orang. Sedangkan potensi kelembagaan masyarakat yang sudah dibentuk yaitu, PKK sebanyak 340 lembaga, KT sebanyak 345 lembaga, LPM sebanyak 345 lembaga, RW sebanyak 1.680 orang dan RT sebanyak 5.995 orang.

Posyandu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya kesehatan bayi dan balita. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam membangun kualitas manusia semenjak dini. Dalam pelaksanaan kegiatannya, kader posyandu memberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak sejak usia dini. Gambaran perkembangan posyandu di Kabupaten Lebak disajikan pada grafik 2.44.



Grafik 2.44
Jumlah Posyandu
di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2014



*Sumber : Dinas Kesehatan
Kab. Lebak, 2014*

21) Statistik

Kunci pokok keberhasilan suatu perencanaan tergantung pada ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas yang diharapkan menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Program pengembangan statistik daerah dijabarkan dalam dua kegiatan, yaitu kegiatan pengolahan, analisis, monitoring dan evaluasi data statistik daerah dan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik dalam. Bentuk keluaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Lebak Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS, analisis PDRB Kabupaten Lebak dan Data Pokok Perencanaan pembangunan Daerah.

22) Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi dimana keberadaannya sangat penting untuk mengingat peristiwa / kejadian / kronologi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya diperlukan



pengelolaan arsip secara baku. Berdasarkan data dari Kantor Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan, dari 63 SKPD di Kabupaten Lebak pada tahun 2010-2012, baru 2 SKPD mengelola arsip secara baku.

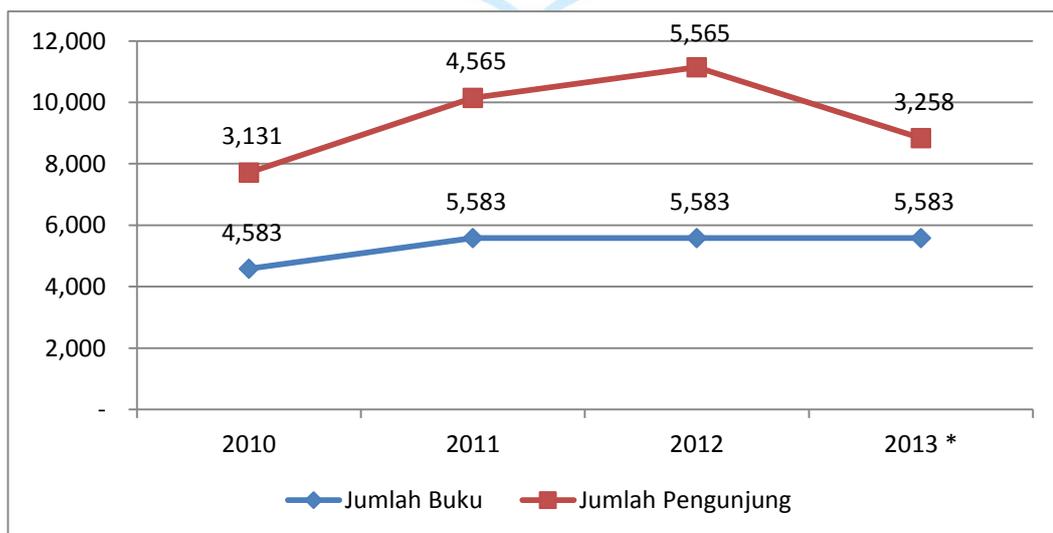
Pengelolaan arsip secara baku akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang terlatih. Sampai saat ini sudah dilaksanakan pelatihan kearsipan sebanyak 25 orang pegawai untuk SKPD dan 110 orang untuk staf desa/kelurahan.

23) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Selama kurun waktu 2010-2013, Kabupaten Lebak hanya memiliki 1 buah perpustakaan milik pemerintah daerah, dengan ketersediaan buku dan jumlah pengunjung perpustakaan sebagaimana tergambar pada grafik 2.45 berikut.

Grafik 2.45
Jumlah Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Lebak Tahun 2010-2013



Sumber: Kantor Pengelolaan Arsip & Perpustakaan Kabupaten Lebak, 2013

*) Kondisi Semester I

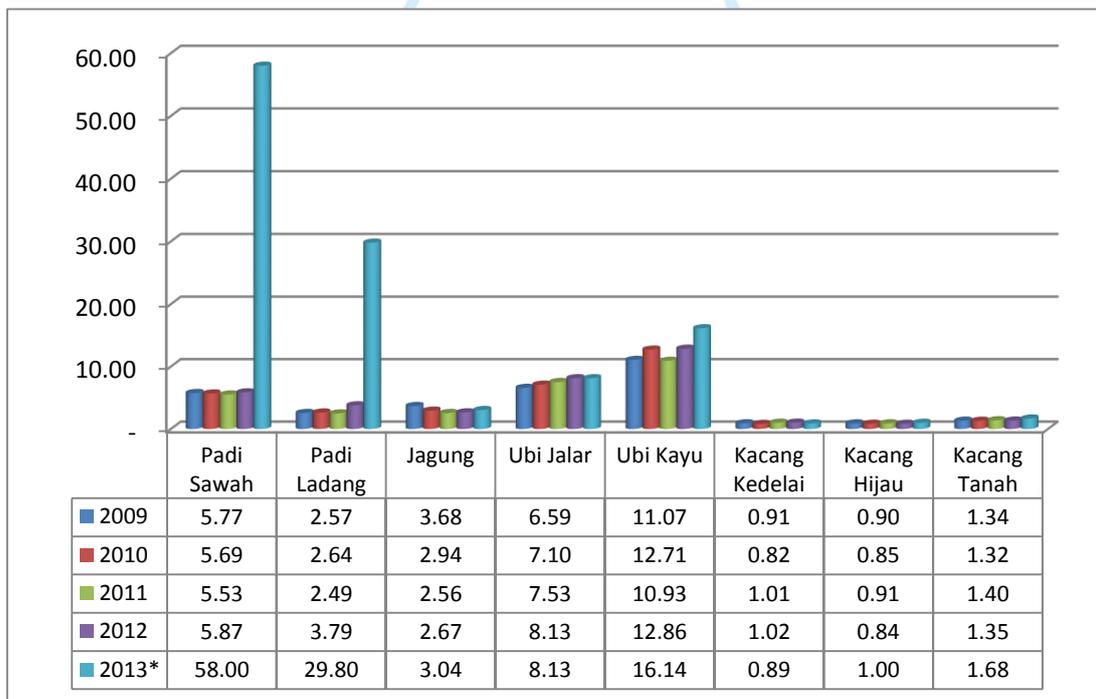


B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Pertanian

Sub sektor pertanian merupakan sektor andalan pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Komoditas unggulan dari sektor ini diantaranya adalah padi dan palawija. Perkembangan produktivitas tanaman padi dan palawija selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada grafik 2.46.

Grafik 2.46
Perkembangan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija
di Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013 (dalam ton/ha)



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lebak, 2010-2013

*) BPS Kab. Lebak, 2014

Dari grafik 2.47 terlihat bahwa pada tahun 2013 terjadi kenaikan produktivitas yang cukup signifikan pada komoditas padi baik padi sawah maupun padi ladang. Kenaikan tersebut disebabkan selain cuaca yang lebih mendukung juga diterapkannya teknologi pertanian “System of Rice Intensification”, yaitu dengan penggunaan pupuk yang berimbang dan benih unggulan. Sedangkan



komoditas palawija, selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan produktivitas kecuali komoditas kacang kedelai, dengan rata-rata produktivitas mencapai 3,12% untuk komoditas jagung, 7,60% untuk komoditas ubi kalar, 12,90% untuk komoditas ubi kayu, 0,96 untuk komoditas kacang kedelai, 0,98% untuk komoditas kacang hijau dan 1,49% untuk komoditas kacang tanah.

Wilayah Kabupaten Lebak juga merupakan penghasil buah-buahan dengan komoditas unggulan pisang dan rambutan. Total komoditas buah-buahan di Kabupaten Lebak yaitu sebanyak 22 komoditas. Perkembangan produksi komoditas buah-buahan dapat dilihat pada tabel 2.66.

Tabel 2.66
Perkembangan Produksi Komoditas Buah-buahan
di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013 (dalam kwintal)

No.	Jenis Komoditas	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Alpukat	722,00	1.272,00	804,00,00	786,00	1.025,00
2.	Mangga	39.270,00	8.238,00	109.621,00	41.850,00	45.412,00
3.	Rambutan	77.394,34	91.386,00	100.100,00	92.811,00	83.041,00
4.	Duku/Kokosan	7.204,26	17.894,00	9.871,00	13.094,00	76.532,00
5.	Jeruk Siam/Kepron	951,12	2.642,00	912,00	1.874,00	2.906,00
6.	Durian	49.854,42	44.485,00	190.207,00	97.394,00	57.886,00
7.	Jambu Biji	2.413,83	8.128,00	10.555,00	7.357,00	6.264,00
8.	Sawo	3.384,81	4.941,00	6.031,00	5.410,00	2.153,00
9.	Pepaya	9.547,07	14.254,00	14.953,00	15.791,00	8.719,00
10.	Pisang	1.670.968,77	1.467.151,00	1.509.484,00	1.023.726,00	1.278.533,00
11.	Nanas	6.602,85	2.155,71	2.949,00	2.387,00	1.913,00
12.	Salak	2.934,85	6.346,00	7.415,00	6.044,00	1.977,00
13.	Sirsak	11.885,50	11.581,00	18500,00	19.604,00	20.132,00
14.	Nangka	14.729,85	15.594,00	12.946,00	13.364,00	19.123,00
15.	Manggis	27.674,54	7.043,00	61.858,00	88.150,00	42.813,00
16.	Belimbing	2.967,65	2.217,00	2.870,00	2.606,00	1.025,00
17.	Jambu Air	1.562,12	6.828,00	7.866,00	4.727,00	7.014,00
18.	Sukun	5.092,92	13.583,00	8.199,00	9.260,00	6.776,00
19.	Markisa	0,00	1,00	19,00	33,00	54,00
20.	Melinjo	12.355,30	20.951,00	24.680,00	20.215,00	39.412,00
21.	Petai	7.682,04	4.519,00	23.654,00	17.809,00	8.511,00
22.	Jengkol	00,00	5.735,00	15.481,00	5.913,00	5.095,00
	Jumlah	1.955.198,24	1.741.350,71	2.138.171,00	1.490.205,00	1.716.316,00

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lebak, 2010-2014



Kecamatan penghasil komoditas buah-buahan terbanyak adalah Kecamatan Cilograng, Kecamatan Malingping dan Kecamatan Bayah. Namun pada umumnya hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak menghasilkan komoditi buah-buahan. Apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2009-2013 mencapai 7,48%.

Selain komoditi buah-buahan, Kabupaten Lebak juga menghasilkan komoditas sayuran dengan jenis komoditas sebanyak 15 komoditas. Untuk lebih jelasnya perkembangan produksi komoditi sayur-sayuran di Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada tabel 2.67.

Tabel 2.67
Perkembangan Produksi Komoditas Sayuran
di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013 (dalam kwintal)

No.	Jenis Komoditas	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kacang Panjang	66.930,00	27.870,00	27.932,00	36.454,00	44.377,00
2.	Cabe Rawit	8.000,00	3.919,00	4.403,00	4.456,00	5.058,00
3.	Cabe Besar	5.850,00	3.372,00	5.030,00	2.792,00	3.786,00
4.	Tomat	9.360,00	3.181,00	5.067,00	1.248,00	3.796,00
5.	Terung	33.320,00	12.098,00	10.015,00	17.535,00	13.128,00
6.	Buncis	3.225,00	1.594,00	487,00	1.076,00	297,00
7.	Mentimun	44.500,00	45.241,00	37.649,00	53.043,00	78.117,00
8.	Kangkung	2.840,00	6.582,00	4.867,00	4.730,00	9.172,00
9.	Bayam	1.170,00	1.868,00	1.433,00	1.653,00	1.964,00
10.	Kacang Merah	140,00	102,00	0,00	0,00	0,00
11.	Daun Bawang	125,00	238,00	38,00	0,00	0,00
12.	Kentang	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kembang Kol	80,00	0,00	2,00	0,00	0,00
14.	Petsai-Sawi	1.035,00	1.183,00	1.008,00	436,00	1.105,00
15.	Jamur	0,00	38.370,00	40.546,00	122.495,00	34.786,00
	Jumlah	177.475,00	145.618,00	138.513,00	245.918,00	195.586,00

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lebak, 2010-2014

Dari tabel 2.67 terlihat bahwa komoditas mentimun menjadi komoditas unggulan disusul dengan komoditas kacang panjang dan mentimun. Namun ada 4 komoditas yang pada kurun waktu tiga tahun terakhir tidak ditanam kembali yaitu kacang merah, daun bawang, kentang dan kembang kol. Apabila dilihat dari trend



pertumbuhan produksi komoditas sayuran berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata 9,12%.

Selain komoditas padi dan palawija, buah-buahan dan sayuran, komoditas biofarmaka sudah mulai dilirik oleh masyarakat di Kabupaten Lebak. Selama kurun waktu 2009-2013, produksi komoditas biofarmaka rata-rata tumbuh sebesar 162,91%. Perkembangan produksi komoditas biofarmaka dapat dilihat pada tabel 2.68.

Tabel 2.68
Perkembangan Produksi Komoditas Biofarmaka
di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013 (dalam kilogram)

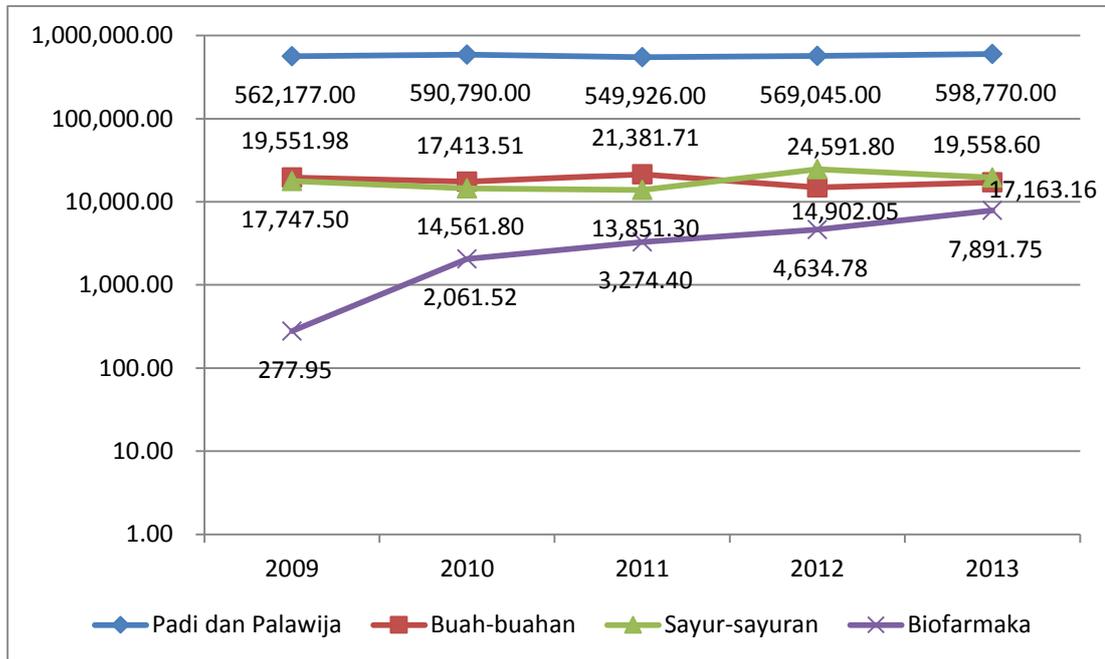
No.	Jenis Komoditas	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jahe	86.583,60	204.660,00	403.094,00	270.166,00	2.597.325,00
2.	Laos/Lengkuas	108.264,96	117.8574,00	231.9419,00	3.234.247,00	3.039.608,00
3.	Kencur	26.243,24	252.996,00	223.883,00	625.413,00	1.570.083,00
4.	Kunyit	44.843,84	21.3967,00	177.240,00	489.662,00	645.847,00
5.	Lempuyang	6.394,02	65.677,00	15.555,00	4.399,00	2.051,00
6.	Temulawak	1.853,18	12.666,00	10.159,00	1.600,00	100,00
7.	Temuireng	0,00	5.238,00	2.173,00	90,00	0,00
8.	Temukunci	0,00	10.074,00	6.397,00	797,00	205,00
9.	Kapulaga	35.54,19	23.468,00	9.820,00	2.337,00	2.049,00
10.	Mengkudu/Pace	82,60	48.682,00	28.085,00	658,00	32.487,00
11.	Mahkota Dewa	0,00	36.332,00	70.300,00	4.075,00	1.620,00
12.	Kejibeling	129,88	4.135,00	2.115,00	230,00	207,00
13.	Sambiloto	0,00	1.924,00	2.720,00	281,00	14,00
14.	Lidah Buaya	0,00	3.125,00	3.442,00	820,00	154,00
	Jumlah	277.949,51	2.061.518,00	3.274.402,00	4.634.775,00	7.891.750,00

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lebak, 2010-2014

Secara keseluruhan perkembangan sub sektor pertanian disajikan pada grafik 2.47.



Grafik 2.47
Perkembangan Produksi Sub Sektor Pertanian
Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013



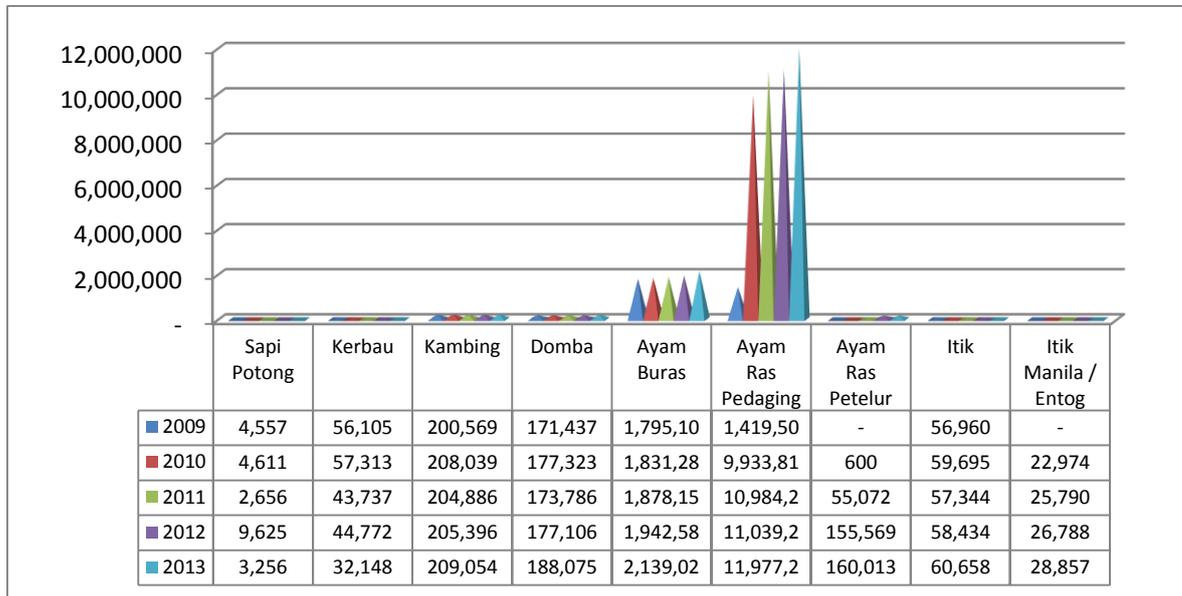
Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lebak, 2010-2014

Sementara itu, untuk sub sektor peternakan, Kabupaten Lebak juga merupakan wilayah penghasil ternak terbesar di Provinsi Banten. Pada tahun 2013 tercatat jumlah sapi sebanyak 3.256 ekor, mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 9.625 ekor. Ternak kerbau merupakan salah satu andalan komoditas peternakan di Kabupaten Lebak dengan jumlah populasi pada tahun 2013 sebanyak 32.148 ekor, juga mengalami penurunan populasi dibandingkan tahun 2012. Penurunan ini disebabkan banyaknya ternak terjual karena harga yang menggiurkan pada saat menjelang hari raya maupun untuk konsumsi. Selain itu berkurangnya populasi ternak yang mengakibatkan kematian dikarenakan memakan rumput yang telah terkena pestisida meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan.

Perkembangan populasi ternak selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada grafik 2.48.



Grafik 2.48
Populasi Sub Sektor Peternakan di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013 (dalam ekor)



Sumber : Dinas Peternakan Kab. Lebak, 2010-2014

2) Kehutanan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Adapun yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Luas Hutan/tutupan hutan di Kabupaten Lebak adalah 108.968,29 Ha atau 32,97 % dari luas wilayah Kabupaten Lebak terdiri dari :

1. Hutan yang dikelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas ±16.380,00 Ha yang berfungsi konservasi, terdapat di Kecamatan Cipanas, Muncang, dan Cibeber, Lebakgedong, dan Sobang.
2. Hutan yang dikelola PT. Perhutani seluas ±35.369,23 Ha yang berfungsi produksi dan lindung, letaknya tersebar di seluruh wilayah kabupaten kecuali di kecamatan Rangkasbitung, Warunggunung dan Cibadak.



3. Hutan adat yang dikelola masyarakat Baduy seluas 5.136,58 Ha yang berfungsi lindung, terdapat di Kecamatan Leuwidamar, Bojongmanik dan Sobang.
4. Hutan Rakyat seluas 52.082,48 Ha tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lebak.

Tabel 2.69 di bawah ini menjelaskan luas hutan/tutupan hutan yang ada di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.69
Luas Hutan/Tutupan Hutan di Kabupaten Lebak

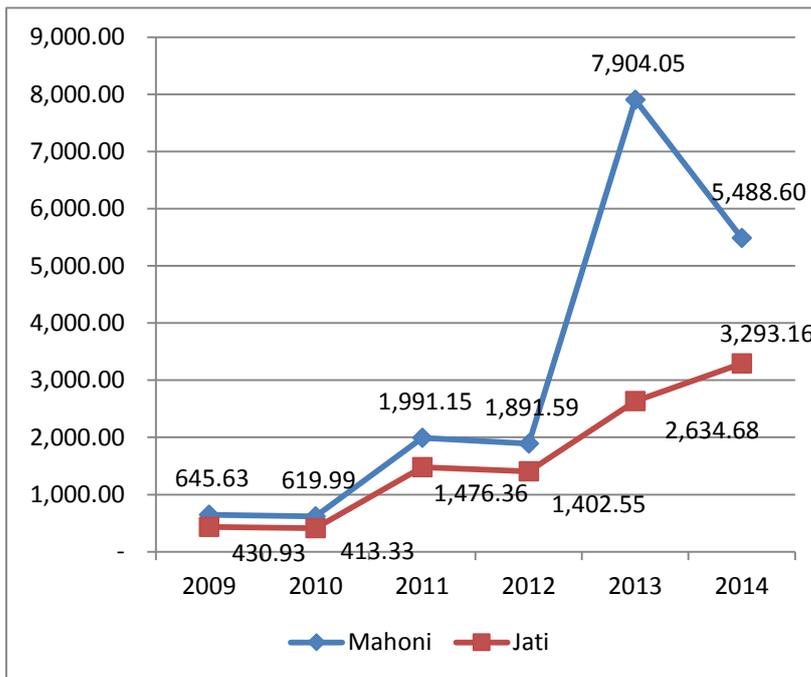
No	Hutan/Tutupan Hutan	Luas (ha)
1.	Hutan Konservasi (TN G Halimun Salak)	16.380,00
2.	Hutan Adat Baduy	5.136,58
3.	Kawasan Hutan PT. Perhutani	35.369,23
4.	Hutan Milik Masyarakat/ Hutan Rakyat (HR)	52.082,48
Jumlah Luas		108.968,29

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Lebak, 2013

Industri perikanan di Kabupaten Lebak cukup banyak dan tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2013 terdaftar 303 buah industri perikanan/penggergajian kayu, jumlah produksi kayu di Kabupaten Lebak pada Tahun 2013 dapat dilihat pada grafik 2.49. Dengan meningkatnya kebutuhan kayu rakyat yang sejalan dengan laju kepadatan penduduk, maka dalam pembangunan kehutanan sangatlah penting diperhatikan aspek kesinambungan produksi, karena produk kayu tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat, terutama untuk jenis-jenis tertentu. Penebangan yang tidak terkendali akan mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat diabaikannya kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

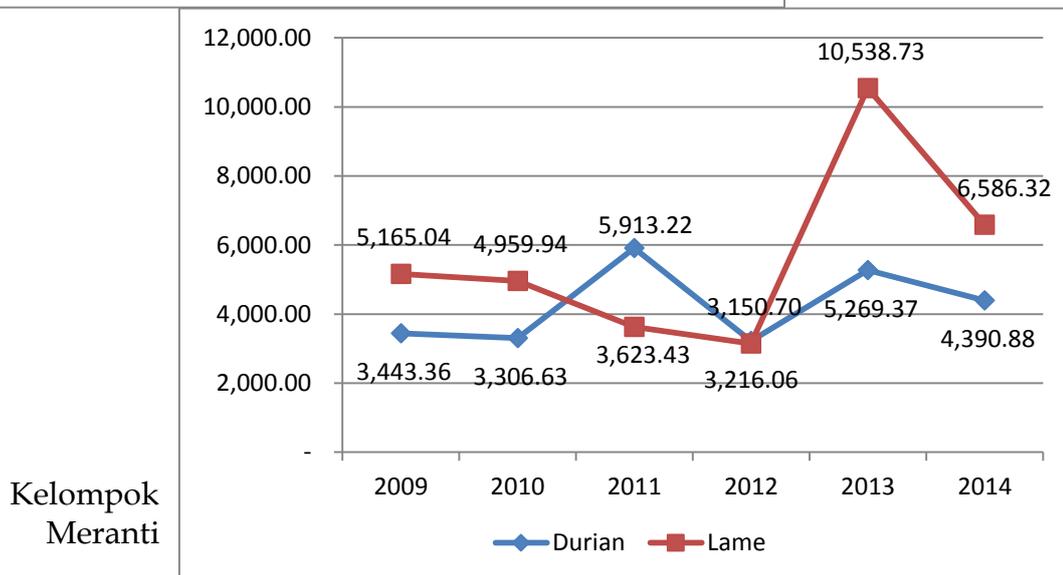


Apabila dilihat dari trend produksi kayu selama kurun waktu 2009-2014 cenderung mengalami kenaikan waupun dengan nilai yang berfluktuasi dengan rata-rata 52,07%. Namun mulai tahun 2013 dan 2014 terdapat menambahkan jenis produksi kayu yaitu sobsis dan jabon. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik 249.

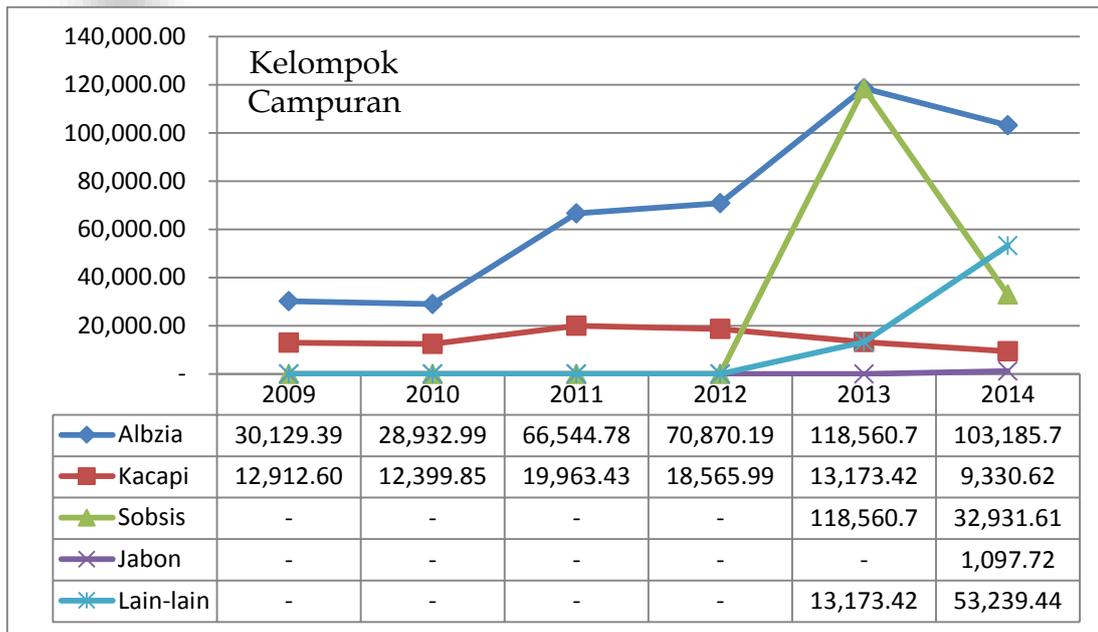


Grafik 2.49
Perkembangan
Produksi
Kayu di
Kabupaten
Lebak
Tahun 2009-2014
(dalam m³)

Kelompok
 Kayu Indah



Kelompok
 Meranti



Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Lebak, 2010-2014

Rata-rata pertumbuhan produksi kayu selama lima tahun terakhir adalah 85,96% untuk kelompok kayu indah, 19,18% untuk kayu meranti dan 55,83% untuk kayu Campuran.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan kayu, maka terjadi pula pengurangan populasi tanaman pada areal hutan rakyat dengan luas 52.082,48 ha, serta diakibatkan pula oleh penebangan-penebangan untuk pemenuhan permintaan pasar yang kurang terkendali. Kemudian akibat negatif yang ditimbulkannya terus bertambahnya berupa lahan-lahan kritis baru. Pemahaman lahan kritis disini adalah kondisi lahan yang tidak hanya kritis secara fisik tetapi termasuk kritis secara ekonomis. Dengan kata lain lahan terlantar (tidak dimanfaatkan) dikategorikan pula sebagai lahan kritis. Data luas rehabilitasi lahan kritis tahun 2009 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada tabel 2.70.



Tabel 2.70
Luas Rehabilitasi Lahan Kritis Tahun 2009-2014

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Luas Lahan Kritis (ha)	22.206,88	19.986,18	16.945,17	12.092,53	9.665,59	270,00
Rehabilitasi Lahan Kritis (ha)	2.220,70	3.041,01	3.041,01	4.852,64	2.448,88	270,00

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Lebak, 2010-2014

Berdasarkan hasil review terbaru BP-DAS Citarum-Ciliwung Kementerian Kehutanan Tahun 2013 terdapat lahan dengan kategori kritis di Kabupaten Lebak seluas 9.640,99 ha dan lahan potensial kritis seluas 164.710,74 ha dengan klasifikasi sebagaimana tercantum pada tabel 2.71.

Tabel 2.71
Luas Lahan Kritis Tahun 2013 Berdasarkan Klasifikasinya

No	Kecamatan	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
1	Malingping	4.524,06	1.774,51	197,84	-
2	Wanasalam	2.957,59	1.039,55	92,14	118,52
3	Pangarangan	13.813,89	2.979,87	14,55	-
4	Cihara	7.164,80	3.288,54	199,20	-
5	Bayah	9.797,81	1.796,84	1.347,46	-
6	Cilograng	6.320,30	2.523,40	105,54	-
7	Cibeber	22.908,29	10.060,64	2.244,21	-
8	Cijaku	7.010,85	4.106,37	198,15	30,07
9	Cigemblong	11.417,88	2.384,61	239,67	-
10	Banjarsari	2.860,37	11.315,57	714,20	-
11	Cileles	4.572,71	10.188,81	178,20	-
12	Gunungkencana	7.308,14	5.536,57	360,46	102,71
13	Bojongmanik	3.136,68	6.259,83	48,31	-
14	Cirinten	7.521,92	3.111,59	175,22	-
15	Leuwidamar	5.720,65	8.153,61	311,77	-
16	Muncang	3.834,39	3.953,97	690,21	-
17	Sobang	8.928,28	1.219,95	-	-
18	Cipanas	2.611,87	2.059,53	218,37	-
19	Lebakgedong	5.415,66	1.848,50	-	-
20	Sajira	2.885,67	6.371,78	141,43	-
21	Cimarga	4.221,32	11.491,90	1.170,75	-
22	Cikurur	2.037,26	3.353,63	21,43	-

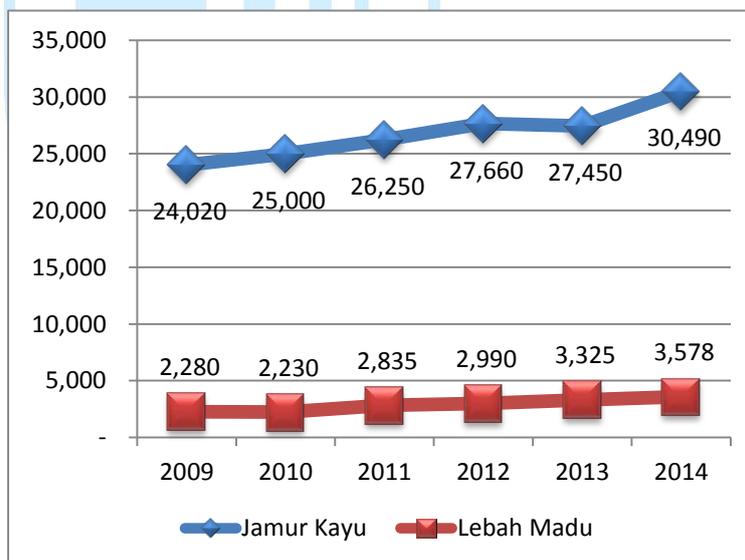


No	Kecamatan	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
23	Warunggunung	3.725,66	936,55	-	-
24	Cibadak	988,78	1.048,06	-	-
25	Rangkasbitung	3.447,06	2.326,06	228,41	-
26	Kalanganyar	377,88	1.114,30	158,52	-
27	Maja	5.924,50	1.435,48	518,49	-
28	Curugbitung	3.276,47	5.726,47	66,45	-
Jumlah		164.710,74	117.406,52	9.640,99	251,30

Sumber : BP DAS Citarum Ciliwung Kemenhut Tahun 2013

Selain tujuan memperoleh kayu, dalam pembangunan kehutanan terdapat program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan berupa kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu yaitu suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan untuk mendapatkan hasil atau komoditi non kayu. Komoditas hasil hutan non kayu yang dikembangkan antara lain Bambu, jamur kayu dan lebah madu. Perkembangan komoditas hasil hutan non kayu dapat dilihat pada grafik 2.50.

Grafik 2.50
Produksi Komoditas
Hasil Hutan Non Kayu
di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2014
(dalam kilogram)



Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Lebak, 2010-2014

Apabila dilihat dari grafik 2.50, produksi masing-masing komoditas meningkat setiap tahunnya. Untuk komoditas jamur kayu rata-rata produksi selama lima tahun terakhir sebesar 4,95% dengan jumlah budidaya 55.320 baglog/tahun yang dikembangkan di 11 kecamatan. Sedangkan untuk komoditas lebah madu juga mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya dengan rata-



rata produksi selama lima tahun terakhir sebesar 9,85% dengan jumlah budidaya 418 stup/tahun yang dikembangkan di 7 kecamatan.

Selain kedua komoditas hutan non kayu di atas, bambu merupakan komoditi kehutanan yang dapat diandalkan dengan prospek pangsa pasar yang cukup baik sebagai alternatif pemanfaatan pengganti kayu. Luas tanaman bambu saat ini tercatat 2.008 Ha setara dengan 199.670 rumpun dengan produksi 2.314.404 batang/tahun. Adapun potensi pengembangan bambu terutama terdapat di kecamatan Cimarga, Sajira, Cibeber, Bojongmanik, Cileles, Rangkasbitung dan Cikulur.

Selain komoditas kehutanan, Kabupaten Lebak juga menghasilkan komoditas perkebunan. Areal perkebunan di Kabupaten Lebak meliputi perkebunan rakyat (PR), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PTPN VIII). Jumlah Perkebunan Besar Negara (PBN/PTPN) terdiri dari 4 Kebun/Site, Perkebunan Besar Swasta (PBS) terdiri dari 8 kebun dan yang dominan adalah Perkebunan Rakyat. Luas areal perkebunan adalah 71.000,27 ha (21,48 %), yang terdiri dari :

- Perkebunan Rakyat (PR) : 55.420,90 ha
- Perkebunan Besar Negara (PTP)/HGU : 8.775,21 ha (4 kebun)
- Perkebunan Besar Swasta (PBS)/HGU : 6.804,16 ha (12 kebun)

Komoditas perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Lebak sebanyak 15 jenis tanaman, 6 diantaranya merupakan komoditas unggulan utama yaitu : kelapa dalam, karet, kelapa sawit, kakao, cengkeh, dan aren adapun luas areal, produksi dan produktivitas komoditas perkebunan Rakyat Tahun 2014 di Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam tabel 2.72.

Tabel. 2.72
Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat
Tahun 2014

No	Nama Komoditas	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1	Karet	15.184,60	6.351,72	943,75
2	Kelapa Dalam	21.321,59	12.188,91	790,72
3	Kelapa Hibrida	229,50	177,91	2.541,57
4	Kelapa Sawit	4.110,04	5.796,78	2.172,71



No	Nama Komoditas	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
5	Kopi Robusta	1.685,00	531,10	370,75
6	Kakao	3.125,86	1.463,39	1.079,32
7	Teh	44,55	24,34	981,45
8	Cengkeh	5.969,95	2.796,78	548,38
9	Lada	372,10	35,33	177,90
10	Jambu Mete	3,00	2,51	929,63
11	Kapok	148,90	49,58	369,97
12	Panili	57,50	4,55	165,45
13	Aren	2.496,70	1.446,14	1.031,48
14	Jarak Pagar	193,50	95,76	925,22
15	Pandan	385,90	323,87	1.474,15
Jumlah		55.328,69	31.288,67	14.502,45

Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan Kab. Lebak, 2014

3) Energi dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Lebak pada kurun waktu tahun 2009-2014 relatif tetap. Perkembangan dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.73.

Tabel 2.73
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian terhadap PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014

Tahun	ADHB		ADHK	
	Nilai (jutaan rupiah)	Kontribusi (%)	Nilai (jutaan rupiah)	Kontribusi (%)
2009	100.954,12	34,56	47.607,30	1,22
2010	114.029,49	1,35	51.392,53	1,24
2011*	125.487,38	1,35	54.525,16	1,24
2012*	141.201,48	1,37	58.733,73	1,27
2013**	153.088,89	1,33	62.210,69	1,28
2014***	165.685,50	1,33	65.137,86	1,28

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2014

*) Angka Perbaikan

***) Angka Sementara

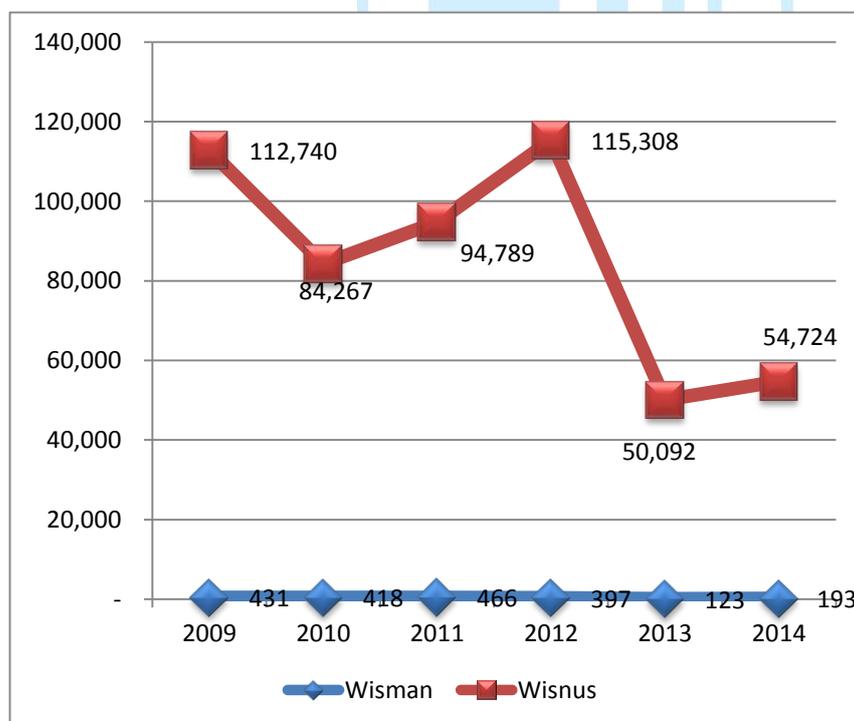
****) Angka Proyeksi



Indikator Rasio Elektrifikasi merupakan pencapaian pembangunan terkait dengan energi yang menunjukkan jumlah KK yang sudah berlistrik. Sampai dengan tahun 2013 Rasio Elektrifikasi sebesar 73,31%. Walaupun demikian, dari data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 26,69% rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik. Dalam rangka meningkatkan rasio tersebut, telah dilakukan berbagai upaya antara lain dengan pembangunan jaringan listrik perdesaan. Persentase kampung dan desa berelektrifikasi sampai dengan tahun 2013 yaitu sebesar 86,94% kampung dan 99,71% desa.

4) Pariwisata

Perkembangan jumlah obyek wisata di Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2013 yaitu 4 daerah wisata budaya, 23 wisata alam dan 3 wisata buatan. Sedangkan perkembangan jumlah wisatawan selama kurun waktu 2009-2014 dapat dilihat pada grafik 2.51.



Grafik 2.51
Perkembangan
Jumlah
Wisatawan
Nusantara
& Wisatawan
Mancanegara
Tahun
2009-2014

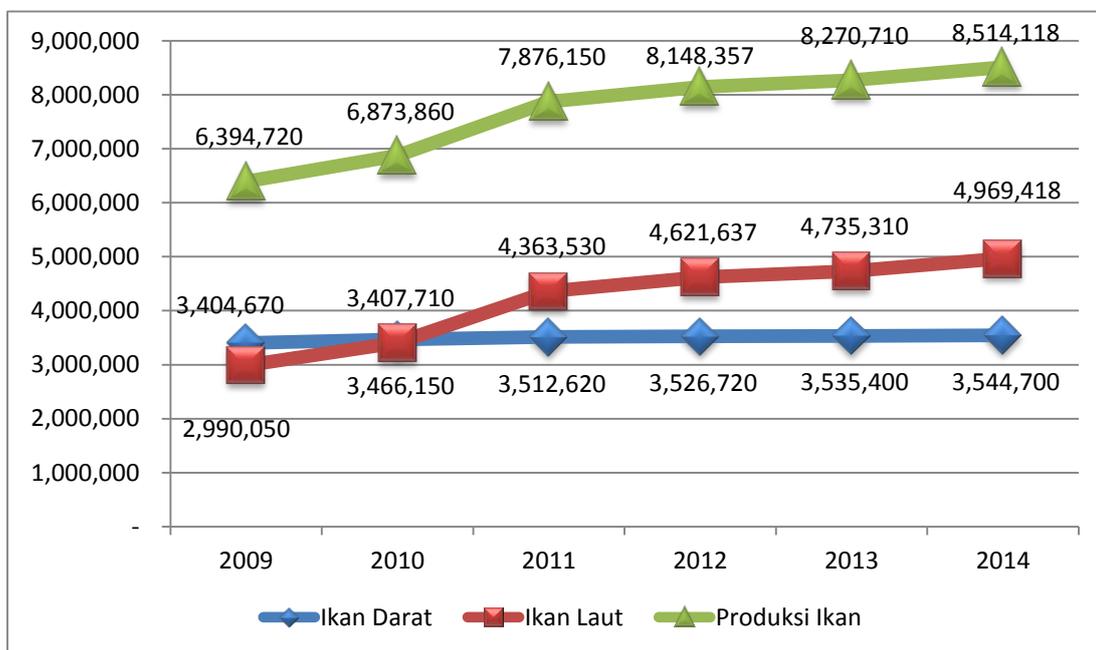
Sumber : Dinas
Porapar Kab. Lebak
2010-2014



5) Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Lebak pada tahun 2014 tercatat sebanyak 8.514.118kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 179.822.364.900,-. Jumlah ini meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,49%. Gambaran produksi ikan selama kurun waktu 2009-2014 terlihat pada grafik 2.52.

Grafik 2.52
Produksi Ikan Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014
(dalam kilogram)

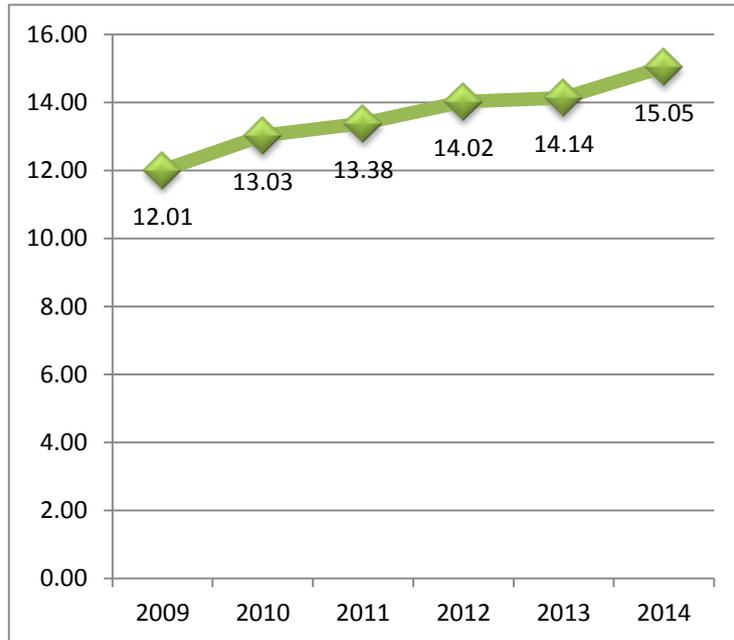


Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Lebak, 2010-2014

Pemenuhan kebutuhan akan protein hewani dari ikan dapat dilihat dengan adanya peningkatan ketersediaan ikan per kapita untuk dikonsumsi dari tahun ke tahun. Konsumsi ikan pada tahun 2014 mencapai 15,05 kg/kapita/tahun. Selama kurun waktu 2009-2014, ketersediaan ikan per kapita menunjukkan kecenderungan peningkatan. Hal ini disebabkan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Lebak. Gambaran mengenai konsumsi ikan per kapita terlihat pada grafik 2.53.



Grafik 2.53
Perkembangan
Konsumsi Ikan
di Kabupaten
Lebak Tahun
2009-2014
(dalam kg/kapita/
tahun)



Sumber : Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Lebak, 2010-2014

6) Perdagangan

Kegiatan perdagangan di Kabupaten Lebak ditopang oleh sarana perdagangan. Kondisi sarana perdagangan sampai dengan tahun 2014 berupa :

- 79 buah pasar tradisional
- Pasar modern, terdiri dari 1 buah supermarket, dan 180 buah minimarket.

7) Perindustrian

Kontribusi sektor energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Lebak pada kurun waktu tahun 2009-2014 mengalami penurunan setiap tahunnya. Perkembangan dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.74.



Tabel 2.74
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014

Tahun	ADHB		ADHK	
	Nilai (jutaan rupiah)	Kontribusi (%)	Nilai (jutaan rupiah)	Kontribusi (%)
2009	673.476,02	8,95	360.130,70	9,24
2010	707.684,75	8,37	367.914,86	8,85
2011*	763.949,80	8,20	381.613,60	8,70
2012*	823.819,13	8,02	396.856,21	8,61
2013**	902.448,67	7,84	416.227,99	8,54
2014***	971.101,88	7,81	429.621,53	8,41

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2014

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

***) Angka Proyeksi

Berdasarkan tabel 2.74 terlihat bahwa perkembangan sektor industri selama kurun waktu lima tahun memiliki capaian yang negatif. Untuk itu diperlukan peningkatan kontribusi industri pengolahan melalui pengembangan industri kecil dan menengah sehingga mengalami pertumbuhan yang positif. Sampai dengan tahun 2013, jenis dan jumlah industri menengah berjumlah 20 jenis industri dengan jumlah industri sebanyak 24 unit. Perkembangan jenis dan jumlah industri kecil di Kabupaten Lebak selama kurun waktu 2009-2014 tersaji pada tabel 2.75.

Tabel 2.75
Jenis dan Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2014

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jenis Usaha	16	16	16	16	18	22
Jumlah Unit Usaha	14.730	14.813	14.999	15.146	15.298	15.454
Jumlah Tenaga Kerja	32.272	32.438	32.810	33.251	N/A	34.141



Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kapasitas Produksi	111.361.442	111.535.742	111.882.242	113.006.562	N/A	127.556.294
Nilai Produksi (Rp. 000)	278.866.605	279.912.405	281.991.405	318.329.405	N/A	319.658.498

Sumber : Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Lebak, 20010-2014

8) Ketransmigrasian

Dalam mendukung pengurangan pengangguran, membuka peluang dan kesempatan kerja sekaligus mengurangi kemiskinan, program Transmigrasi yang telah dilaksanakan juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, namun dalam pelaksanaannya banyak menghadapi berbagai kendala, antara lain masyarakat masih rendah mempunyai jiwa merantau sehingga program ini hanya menjadi pilihan alternative tetapi animo bertransmigrasi masih tinggi.

Disamping itu proses pelaksanaan sering berjalan lambat karena sebelum pelaksanaan penempatan/pemberangkatan transmigran harus telah ada perjanjian kerjasama antar daerah yakni daerah pengirim dengan daerah penerima transmigran, sedangkan dalam proses kerjasama (MOU) antar daerah tersebut harus melalui tahapan-tahapan yang harus ditempuh dan memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Hal ini dilaksanakan agar transmigran yang ditempatkan benar-benar mendapatkan kepastian hukum, terpenuhi hak-haknya serta mendapatkan keamanan dan kenyamanan berusaha di daerah Transmigrasi.

Penempatan/pemberangkatan transmigran asal Kabupaten Lebak yang telah dilaksanakan antara lain ke Provinsi Sumatra selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau dan Provinsi Maluku, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah.

Untuk jumlah penempatan/pemberangkatan calon transmigran mengalami pasang surut, hal ini di sebabkan karena pembagian jumlah kuota sudah di tentukan Departemen dan Provinsi, sehingga sering tidak bisa memenuhi jumlah animo calon transmigran di Kabupaten Lebak. Rekapitulasi dan komposisi penempatan/pemberangkatan transmigrasi lokal asal Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2013 disajikan pada tabel 2.76.



Tabel 2.76
Komposisi Penempatan Transmigrasi Lokal Asal Kabupaten Lebak
Sampai Dengan Tahun 2013

No	Tahun	Daerah Tujuan			
		Kabupaten	Provinsi	KK	Jiwa
1	s/d 2009			176	718
2	2010	Buol	Sulawesi Tengah	10	51
3	2011	Katingan	Kalimantan Tengah	23	107
4	2012	Kapuas	Kalimantan Tengah	5	17
5	2013	Kubu Raya	Kalimantan Barat	5	22
Jumlah				217	915

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Sosial Kab. Lebak, 2014

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

- 1) Kabupaten Lebak merupakan sentra penghasil gula aren dengan jenis produk gula semut dan cetak yang telah memiliki sertifikat makanan organik internasional sehingga dapat menembus pasar Belanda, Italia, dan sejumlah negara Eropa lainnya. Kelebihan gula aren Lebak, selain organik yang menyehatkan juga cocok dijadikan pemanis berbagai jenis bahan makanan dan minuman. Produksi gula aren yang diekspor ke pasar mancanegara diperkirakan mencapai 50-70 ton per bulan, yang dikumpulkan dari Kecamatan Sobang, Panggarangan, Cigemblong, Cihara, Cibeber, dan Muncang.
- 2) Di sektor pertambangan, Kabupaten Lebak juga potensial dalam menghasilkan beragam produksi bahan-bahan tambang antara lain: emas, Fosfat, Obsidian, Tras, Batu Gamping, Batu Pasir Kuarsa, Opal, Kaolin, Zeolith, Batu Besi, Timah Hitam, Feldspar, Batu Apung, Lempung, Bentonit Ca, Batu Gunung (Andesit-Basalt), Perak, dan Fosil Kayu. Berlimpahnya bahan baku semen (batu gamping, tanah liat, dan batu kapur) di Kecamatan Bayah, Cilograng, Panggarangan, Bojongmanik dan Muncang, memosisikan Lebak menjadi daerah yang



menjanjikan bagi masuknya investor pabrik semen di masa depan. Industri batu sembur atau fosil kayu (Silicified wood) bahkan telah menembus pasar di sejumlah negara Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Sementara Zeolith yang merupakan bahan campuran pakan ternak, perikanan, atau tambak udang, bahan penurun kadar Ph tanah, bahan pengendali limbah industri, penjernih air minum, penghilang kesadahan air, dan penghilang bau/warna, belum banyak dieksploitasi meski potensinya sangat berlimpah di Kecamatan Bayah, yang mencapai lebih dari 123 juta ton.

- 3) Kabupaten Lebak mewarisi sejumlah obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata, spiritual. Dengan 13 obyek wisata marina, 27 wisata tirta, 16 obyek wisata sejarah, 1 suaka alam, serta 20 obyek wisata budaya dan lainnya, menjadikan pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan di masa depan. Sebagai contoh: wisata alam pantai di Kecamatan Malingping, Panggarangan, dan Bayah; wisata alam lainnya Lebak Gedong (arung jeram) dan pemandian air panas di Cipanas. Demikian pula dengan potensi wisata budaya yang menjadi ikon Kabupaten Lebak, yang dapat ditemui pada Masyarakat Adat Cisungsang dan Citorek, Masyarakat Adat Kanekes, serta situs purbakala Kosala atau Lebak Sangka Kosala di Desa Lebak Gedong yang merupakan peninggalan tradisi megalitik berbentuk bangunan punden berundak dan menhir di tiap undakannya yang berjumlah lima; dan situs megalitik Cibedug yang terletak di Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber.
- 4) Kerajinan mebel dan perkakas berbahan baku bambu juga memiliki potensi ekspor yang tinggi, sebagaimana telah berkembang di daerah Pasir Ona Rangkasbitung Timur yang telah berhasil membuka pasar ekspor di Eropa dan Amerika Serikat.



B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi infrastruktur wilayah bahkan secara langsung menjadi daya tarik bagi investor dalam mengembangkan rencana bisnisnya di suatu daerah. Terkait dengan hal ini, infrastruktur wilayah dimaksud adalah mencakup beberapa bidang, yaitu: jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah dalam konteks tata ruang bahkan tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

1) Jalan dan Jembatan

Dibandingkan dengan daerah sekitar, Lebak memiliki keunggulan kompetitif dalam hal kualitas infrastruktur jalan yang kondisinya relatif lebih baik. Dari sekitar 837,96 km jalan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Lebak 64,88% dalam kondisi baik dan hanya 35,11% saja yang dalam kondisi rusak, terdiri dari rusak ringan sekitar 13,58%; rusak sedang sekitar 11,11%; dan rusak berat hanya sekitar 10,42% saja. Tabel 2.77 menyajikan gambaran tentang kondisi jalan di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.77
Kondisi Jalan di Kabupaten Lebak
Tahun 2014

No	Kondisi	Panjang	Keterangan
1.	Total Jalan Kab/Kota	837.96 Km	Merupakan panjang jalan status kabupaten/kota berdasarkan SK Bupati/Walikota dilampirkan peta dan SK dimaksud
2.	Jumlah Jembatan Kabupaten	169.00 Unit	Merupakan jumlah dan panjang jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota
3.	Panjang Jembatan Kabupaten	2,349.20 Meter	



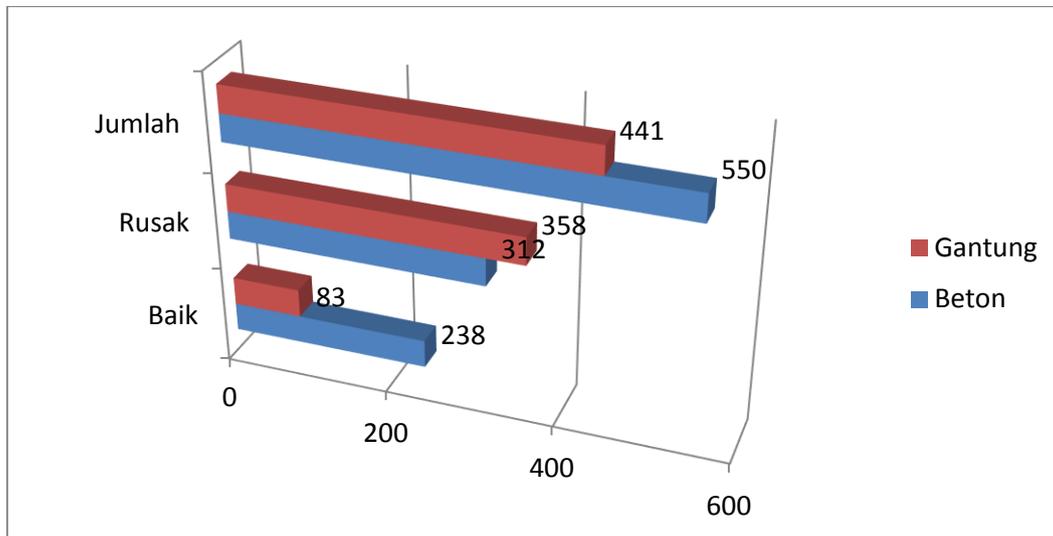
No	Kondisi	Panjang		Keterangan
4.	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	543,63	Km	Merupakan total panjang jalan dalam kondisi baik. Kriteria baik sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan $\leq 11\%$ (dilampirkan peta)
5.	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Ringan	113.80	Km	Kriteria sedang sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan 11 - < 16%
6.	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Sedang	93,13	Km	Kriteria rusak sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan 16 - < 23%
7.	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Berat	87,31	Km	Kriteria rusak berat sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan $\geq 23\%$
8.	Panjang Jalan Poros Desa	5,647.20	Km	Merupakan total panjang jalan poros desa berdasarkan SK Bupati/Walikota (dilampirkan peta dan data pendukung administrasinya/SK/Ketetapan lainnya)

Sumber : Dinas Bina Marga Kab. Lebak, 2014

Namun demikian harus diakui bahwa kondisi yang agak berbeda tampaknya nyata dihadapi pada infrastruktur jembatan, dimana dari sebanyak 991 unit jembatan yang terdiri dari jembatan beton sebanyak 550 unit dan jembatan gantung sebanyak 441 unit, terdapat sekitar 56.73% jembatan beton dalam kondisi rusak dan 81.18% jembatan gantung dalam kondisi rusak. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan pada 5 tahun mendatang.



Grafik 2.54
Kondisi Sarana Jembatan di Kabupaten Lebak
Tahun 2012



Sumber : Dinas Bina Marga Kab. Lebak, 2013

C. Fokus Iklim Berinvestasi

Dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak termasuk pelopor dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Tercatat sejak tahun 2008, Kabupaten Lebak telah memiliki Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPT) yang berfungsi untuk mengendalikan sekaligus mempercepat proses perijinan yang sebelumnya berbelit-belit dan berbiaya mahal. Melalui BPMPT tersebut 15 jenis perijinan yang semula ditangani secara sporadis berdasarkan SKPD terkait telah disatukan di bawah satu atap. Dampaknya sangat signifikan. Tercatat surat izin yang terbitkan oleh BPMPT Lebak pada tahun 2013 sebanyak 3.721, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 3.959 pada tahun 2012, sedangkan dari tahun 2009-2011 mengalami peningkatan sebanyak 2.623 pada tahun 2009, 2.786 pada tahun 2010 serta 3.749 pada tahun 2011.



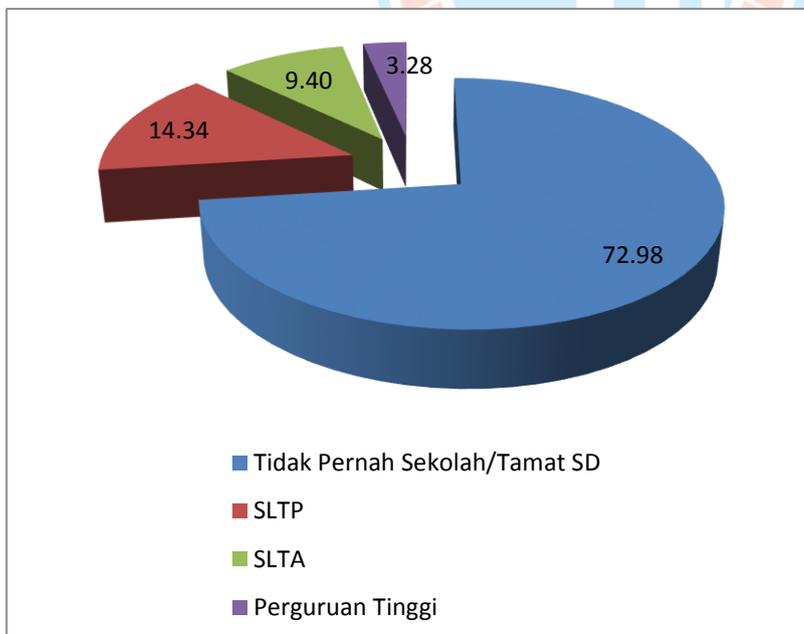
Dengan inovasi yang dilakukan inilah iklim investasi menjadi lebih baik, yang terbukti dengan meningkatnya realisasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri di Kabupaten Lebak.

D. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Dengan sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengelola sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya dan mampu menjawab permasalahan pembangunan yang ada.

Berdasarkan data sakernas periode Agustus 2012, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lebak menurut pendidikan yang ditamatkan yaitu, 407.762 orang tidak pernah sekolah/tamat SD, 80.115 orang tamat SMP, 52.527 orang tamat SLTA dan 18.348 orang tamat perguruan tinggi.

Apabila dilihat dari komposisi penduduk 15 tahun berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, diperlihatkan pada grafik 2.55.



Grafik 2.55
Persentase Penduduk
Usia 15 Tahun Keatas
Di Kabupaten Lebak
Menurut Pendidikan
Tertinggi yang
Ditamatkan
Tahun 2013

Sumber : Sakernas

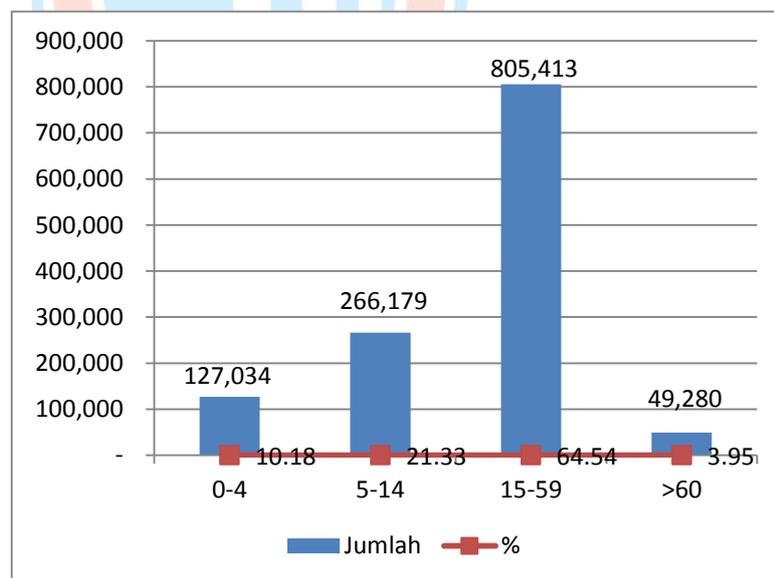


Dari dua data tersebut terlihat bahwa penduduk tidak pernah sekolah/tamat SD mendominasi baik dari segi angkatan kerja maupun komposisi penduduk diatas 15 tahun. Oleh karena itu, peningkatan sumberdaya manusia perlu mendapat perhatian agar menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Selain indikator di atas rasio ketergantungan merupakan salah satu aspek penentu dalam fokus sumberdaya manusia. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Apabila dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Lebak menurut kelompok umur tahun 2013 seperti terlihat pada grafik 2.56, penduduk berdasarkan kelompok umur 0-4 tahun sebesar 10,18% dari jumlah penduduk. Sementara persentase terbesar ada pada kelompok umur 15-59 tahun (usia produktif) yaitu mencapai 64,54%, ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lebak untuk penduduk usia kerja/produktif sangat besar, setidaknya secara ekonomi beban yang ditanggung akan lebih kecil. Hal ini bisa tercapai apabila didukung dengan sumberdaya manusia yang lebih baik dan memadai.

Grafik 2.56
Jumlah Penduduk
Kab. Lebak
Menurut Kelompok
Umur Tahun 2013

Sumber : BPS Kab. Lebak,
2014



Berdasarkan kelompok umur tersebut dapat tergambar bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk di Kabupaten Lebak sebesar 54,94%. Ini berarti bahwa dari 100 orang usia produktif dapat menanggung beban



sebanyak 55 orang yang termasuk bukan usia produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.53.

Tabel 2.53
Jumlah Penduduk & Rasio
Ketergantungan
(Dependency Ratio) Menurut
Kelompok Umur di
Kabupaten Lebak Tahun
2013

Kelompok Umur	Jumlah	Dependency Ratio
0 – 14	393.213	54,94
15 – 59	805.413	
> 60	49.280	

Sumber : BPS Kab. Lebak, 2014

2.5 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu. Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk selanjutnya, Pemerintah menetapkan SPM sebagai “instrumen” agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penerapan SPM ini merupakan amanat UU 32 tahun 2004 beserta perubahannya Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Pengintegrasian SPM dalam Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah adalah memastikan terbangunnya sinergitas antara dokumen rencana pencapaian target SPM dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk Pemerintah Kabupaten, penerapan SPM meliputi 15 bidang yaitu SPM Bidang Perumahan, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Bidang Sosial, Bidang Kesehatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera, Bidang



Ketenagakerjaan, Bidang Pendidikan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Ketahanan pangan, Bidang Kesenian, Bidang Komunikasi dan Informasi, Bidang Perhubungan, dan Bidang Penanaman Modal. Dalam pelaksanaannya, tidak semua indikator dan target SPM pada suatu bidang SPM dapat dicapai hingga tahun terakhir RPJMD. Namun demikian target pencapaian yang telah ditetapkan secara bertahap diarahkan untuk selalu mengalami perbaikan pada setiap tahun.





BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak akan terlepas dari kemampuan manajerial dari pemerintah daerah yang didukung sepenuhnya oleh kapasitas sumber daya aparatur, sistem kelembagaan dan tentunya yang tidak kalah penting adalah kemampuan keuangan daerah. Bahkan dalam konteks negara kita, kemandirian daerah yang diamanatkan oleh otonomi daerah seringkali diidentikkan dengan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Melihat krusialnya peran keuangan daerah dalam era otonomi daerah, pengelolaan terhadap keuangan daerah dan kebijakan-kebijakan yang melandasinya akan menjadi faktor strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, perlu dikaji terlebih dahulu kinerja keuangan daerah di masa lalu hingga saat ini, termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mendasarinya. Berangkat dari evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja inilah kemudian disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akan mendasari penetapan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan telah diberikan kerangka, batasan dan rambu-rambu yang jelas lewat berbagai peraturan perundang-undangan seperti: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan



Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Agar kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat terpetakan dengan baik, maka dibutuhkan gambaran tentang realisasi APBD serta kondisi neraca daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Lebak

Pembahasan kinerja APBD tentunya akan selalu merujuk pada struktur APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah termasuk didalamnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah akan melingkupi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL), sementara Pembiayaan Daerah akan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Pendapatan Daerah

Dari ketiga kelompok pendapatan daerah dalam struktur APBD Kabupaten Lebak, Dana Perimbangan masih berperan besar dalam pembentukan struktur APBD. Tercatat selama lima tahun terakhir, kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD Kabupaten Lebak rata-rata tiap tahunnya mencapai 77,57%. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat



ketergantungan daerah terhadap pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Mengingat otonomi daerah telah mengamanatkan kemandirian daerah, khususnya dalam hal pendanaan, upaya terhadap peningkatan PAD masih menjadi pekerjaan rumah sekaligus agenda utama bagi pemerintah daerah.

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22,59%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun realisasi Dana Perimbangan yang hanya 10,62%. Melihat pertumbuhan PAD yang cukup menggembirakan ini tentunya menjadi angin segar tersendiri bagi pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lebak. Hal ini sekaligus memberi bukti bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menggalang PAD mulai menunjukkan hasil. Secara lengkap, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tersaji pada tabel 3.1.





Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013*) (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	823.089.133.098	954.981.181.046	1.185.100.258.482	1.292.072.654.610	1.475.432.194.169	13,13
1.1	Pendapatan asli daerah	58.021.746.576	64.200.116.205	93.065.058.829	127.295.426.056	136.180.145.486	22,59
	a. Pajak daerah	7.111.016.717	6.527.234.936	14.041.078.255	22.667.691.016	20.943.040.987	31,32
	b. Retribusi daerah	38.134.320.720	47.422.446.197	66.815.310.818	91.952.015.520	100.090.890.962	28,08
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.277.986.593	2.756.944.249	3.123.406.815	3.157.065.437	2.843.366.827	8,80
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.498.422.546	7.493.490.823	9.085.262.941	9.518.654.083	12.302.846.710	2,65
1.2	Dana perimbangan	688.615.574.665	801.068.806.148	859.990.344.602	939.862.523.205	1.092.499.273.049	10,62
	a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	44.359.050.665	54.287.873.548	51.430.163.882	69.278.880.205	69.573.196.049	11,35
	b. Dana alokasi umum	576.180.524.000	655.633.732.600	737.431.880.720	804.122.393.000	901.740.477.000	10,28
	c. Dana alokasi khusus	68.076.000.000	91.147.200.000	71.128.300.000	66.461.250.000	121.185.600.000	18,18
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	80.444.098.857	89.712.258.693	232.044.855.051	224.914.705.349	246.752.775.634	33,12
	a. Pendapatan Hibah	-	-	-	782.100.000	17.000.000	-97,83
	b. Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
	c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	20.208.745.857	23.898.283.693	33.656.391.093	42.221.229.118	47.082.016.634	20,44
	d. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	41.243.066.000	47.513.975.000	164.615.559.000	133.704.907.000	186.115.759.000	53,78
	e. Bantuan Keuangan dari Propinsi	15.000.000.000	18.300.000.000	33.750.000.000	47.725.000.000	13.538.000.000	10,24
	f. Pendapatan Lainnya	3.992.287.000	-	22.904.958	481.469.231	-	360,41

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

*) Unaudited



Berpijak pada laju pertumbuhan realisasi PAD yang cukup menjanjikan, sudah selayaknya Pemerintah Daerah lebih mendorong tingkat kepastian dan rasio efektifitas dari perencanaan anggaran yang tercermin lewat disparitas antara target dan realisasi PAD dalam APBD. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terlihat bahwa tingkat kepastian dan rasio efektifitas perencanaan anggaran terus mengalami peningkatan sehingga sejak tahun 2011 rasio efektifitas untuk pencapaian PAD selalu berada di atas 100%. Sebuah pencapaian yang harus dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya dengan senantiasa mengedepankan semangat intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan asli daerah.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

Tahun	Target		Realisasi		Rasio Efektifitas
	Rp.	Pertumbuhan (%)	Rp.	Pertumbuhan (%)	
2009	74.268.196.396	(3,48)	58.021.746.576	13,56	78,12
2010	68.180.133.214	(8,20)	64.200.116.205	10,65	94,16
2011	89.906.414.000	31,87	93.065.058.829	44,96	103,51
2012	125.402.416.500	39,48	127.295.426.056	36,78	101,51
2013*)	147.202.074.600	27,15	136.180.145.486	6,98	92,51
Rata-rata per tahun		17,36		22,59	93,96

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

*) Unaudited

Sebagai catatan tambahan, bahwa PAD Kabupaten Lebak 55,86%-nya merupakan kontribusi dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Adjidarmo sehingga bila pemberlakuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Adjidarmo diterapkan, perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Lebak untuk segera melakukan terobosan dalam mendapatkan sumber pendapatan daerah lainnya yang prospektif sebagai upaya ekstensifikasi pendapatan.



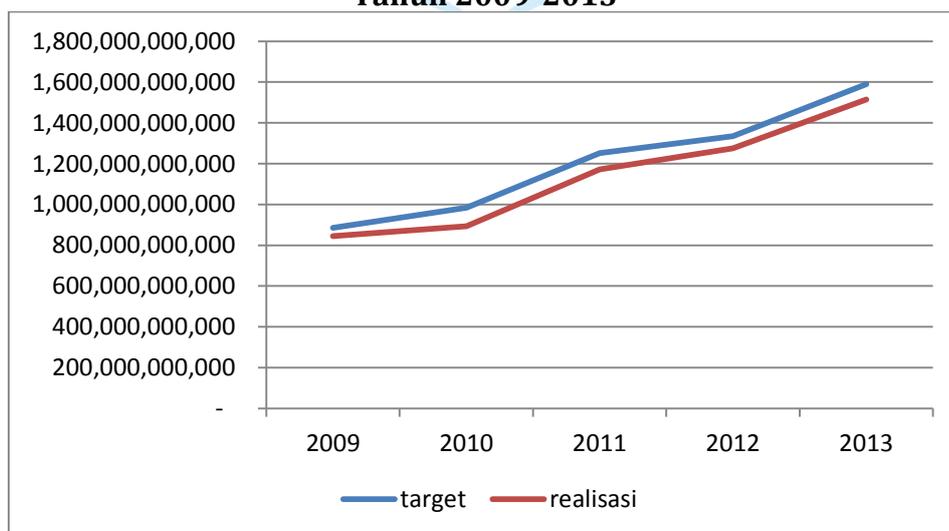
b. Belanja Daerah

Pembahasan kinerja APBD tidak terlepas dari kinerja Belanja Daerah yang telah dialokasikan selama kurun 2009-2013. Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta dengan mengembangkan perekonomian masyarakat.

Pada pelaksanaannya, pengalokasian belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Secara kumulatif target Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2009-2013 sebesar Rp. 6.046.028.154.512,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.699.630.774.972,- atau 94,12 persen. Realisasi belanja daerah tersebut setiap tahun memang fluktuatif, namun secara umum capaian realisasi belanja daerah terus berada di atas 90 persen. Gambaran lengkap realisasi belanja daerah setiap tahun tersaji pada gambar 3.1.

Gambar 3.1
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013
*) Unaudited



Bila mencermati gambar 3.1, nampak bahwa realisasi belanja daerah terendah terjadi selama tahun 2010 dengan capaian realisasi sebesar 90,79 persen. Namun demikian, realisasi belanja daerah pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami perbaikan.

Secara umum, belanja daerah dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada kurun 2009-2013 tersaji pada gambar 3.2.

Gambar 3.2
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013
*) Unaudited



Sebagaimana belanja daerah, capaian realisasi yang fluktuatif juga terjadi pada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencatat capaian realisasi rata-rata pada kurun 2009-2013 sebesar 97,04 persen. Capaian realisasi belanja tidak langsung tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 97,88 persen. Meski pernah menurun pada tahun 2010 menjadi sebesar 96,08 persen, namun capaian realisasi anggaran belanja tidak langsung ini terus mengalami perbaikan.

Jika melihat lebih dalam terhadap 8 jenis belanja penyusun belanja tidak langsung, rata-rata capaian realisasi tertinggi terjadi pada belanja bantuan keuangan sebesar 98,71 persen dan belanja hibah sebesar 97,39 persen. Sementara belanja pegawai dari target Rp. 3.096.826.728.629,- terealisasi sebesar Rp. 3.009.364.401.597,- atau sebesar 97,19 persen.

Pada Belanja Langsung (BL), capaian realisasi rata-rata selama kurun 2009-2013 mencapai sebesar 90,41 persen. Dari kumulatif target sebesar Rp. 2.627.249.291.575 telah terealisasi sebesar Rp. 2.375.403.229.054,-. Tercatat bahwa dalam rentang waktu tahun 2009-2013, pertumbuhan realisasi belanja langsung hanya sebesar 12,44% per tahun. Sementara realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) mampu tumbuh sebesar 14,68% per tahun. Laju pertumbuhan ini ternyata banyak dipengaruhi oleh rasio efektifitas belanja daerah itu tersendiri. Meski sebagian besar Belanja Langsung yang tidak terserap berupa retensi maupun sisa kontrak pengadaan barang dan jasa, namun kedepan perencanaan anggaran belanja yang lebih matang, rasional dan proporsional diharapkan dapat mengurangi pengembalian pasal yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

b. Pembiayaan Daerah

Pembahasan kinerja APBD selanjutnya berkenaan dengan target dan realisasi pembiayaan daerah selama kurun 2009-2013. Sebagaimana fungsinya, pembiayaan daerah dialokasikan untuk menutup defisit atau



memanfaatkan surplus yang terjadi akibat adanya selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah selama kurun 2009 - 2013 terutama diarahkan untuk menggunakan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dengan didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional; serta untuk menyediakan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dengan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan kebijakan tersebut, alokasi total pembiayaan netto daerah tahun 2009-2013 mencapai sebesar Rp. 375.330.405.986,- dan terealisasi sebesar Rp. 374.554.752.476,- atau sebesar 99,79 persen. Total pembiayaan netto daerah ini merupakan akumulasi dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah terutama diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya. Target penerimaan pembiayaan selama 2009-2013 secara total mencapai Rp. 419.413.445.320,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 417.669.802.447,- atau sebesar 99,58 persen. Sementara pengeluaran pembiayaan dari target total Rp. 44.083.039.334,- telah terealisasi sebesar Rp. 43.115.049.971,- atau sebesar 97,80 persen.

3.1.2. Neraca Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Di dalamnya akan memuat informasi tentang kondisi keuangan daerah, berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan agar pengelolaan sumber daya ekonomi daerah dapat lebih terarah, efektif dan efisien.

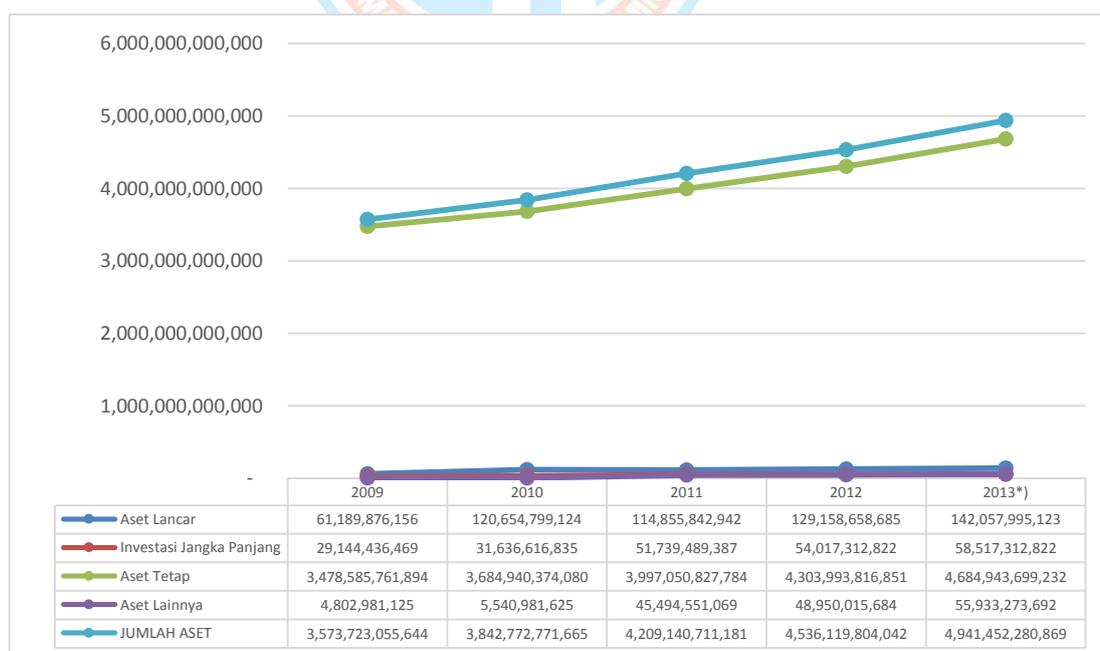
Komponen pertama yang terkandung dalam setiap neraca daerah adalah aset daerah yang akan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang mempunyai manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah dan



masyarakat, serta dapat diukur dalam bentuk uang. Dalam hal pengelolaan aset ini, Pemerintah Kabupaten Lebak masih mengalami kendala, meskipun rata-rata pertumbuhan per tahunnya mencapai 8,47% selama kurun waktu 2008-2012. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset daerah yang berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terlihat di tahun 2008 dengan besaran 230,21% seiring dengan dilakukannya revaluasi aset daerah, terutama aset tetap yang digalakkan inventarisasinya. Sementara untuk tahun 2009-2012 pertumbuhan aset daerah cenderung stabil dan berada di kisaran 7%-9%.

Pertumbuhan yang positif dicatat oleh aset tetap yang tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun 7,76%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 8,96%. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa aset Pemerintah Kabupaten Lebak berada dalam kondisi sehat dengan peningkatan yang luar biasa, dari nilai 3,277 Triliun Rupiah lebih pada tahun 2008 menjadi 4,536 Triliun Rupiah lebih di tahun 2012 atau meningkat 38,42% (kondisi aset daerah dapat dilihat pada gambar berikut).

Grafik 3.3
Perkembangan Nilai Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013



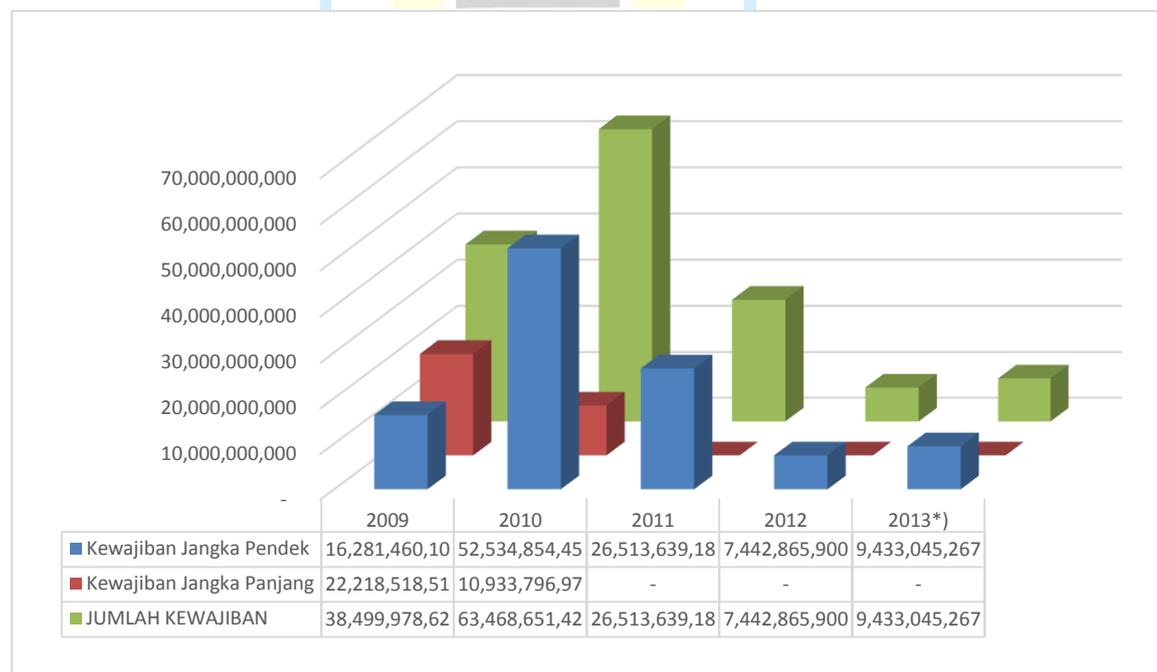
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

*) Unaudited



Dari komponen kewajiban, dapat diketahui informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Dalam komponen ini akan terlihat secara rinci seluruh kewajiban Pemerintah daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lebak dalam kurun waktu lima tahun terakhir terbilang cukup besar, mencapai 141,288 Miliar Rupiah lebih meskipun di akhir tahun 2012 tinggal menyisakan kewajiban sebesar 7,442 Miliar Rupiah lebih. Yang harus diperhatikan adalah besarnya porsi kewajiban jangka pendek yang rata-rata per tahun berkontribusi 85,01% terhadap total kewajiban pemerintah daerah sehingga akan membutuhkan prioritas pendanaan.

Grafik 3.4
Perkembangan Nilai Kewajiban Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013
*) Unaudited



Dari uraian aset dan kewajiban di atas, dapat diketahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin pada ekuitas dana. Pada dasarnya ekuitas dana merupakan selisih antara aset daerah dengan kewajiban daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan rincian komponen meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan. Secara total pertumbuhan ekuitas dana dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 8,48% per tahunnya dengan kontribusi terbesar berasal dari ekuitas dana investasi, yaitu rata-rata sebesar 98,14% per tahunnya. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam hal pendanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lebak masih harus meningkatkan kemampuannya terutama pada komponen Dana Lancar.

Grafik 3.5
Perkembangan Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013
*) Unaudited



3.1.3. Kemampuan Keuangan Daerah

Setelah mengetahui kinerja APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah (neraca daerah), maka kemampuan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktifitas. Rasio likuiditas terdiri atas rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio solvabilitas terdiri dari rasio total kewajiban terhadap total aset, dan rasio kewajiban terhadap modal. Sementara rasio aktifitas akan terdiri dari rata-rata umur piutang, dan rata-rata umur persediaan.

Rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi, dari rasio ini akan diketahui apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajibannya. Dari definisi ini dapat terlihat bahwa rasio lancar Pemerintah Kabupaten Lebak sempat mengalami penurunan dari tahun 2008-2010 dan baru mengalami perkembangan positif di dua tahun terakhir. Meskipun masih dalam kondisi mampu memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo dengan rata-rata rasio lancar per tahun mencapai 8,56%, kondisi tahun 2013 mengindikasikan bahwa aset lancar Pemerintah Kabupaten Lebak hanya tinggal 15,06 kali lipat dari kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo, itupun hanya 80,03% saja yang tersedia dalam bentuk cash.

Seperti halnya rasio lancar, rasio cepat (*quick ratio*) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam periode tahun 2009-2013 menunjukkan nilai rata-rata per tahun 435,36% dengan pertumbuhan rata-rata per tahun -42,10%. Sebuah pertanda agar pemerintah daerah lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah sehingga pertumbuhan yang negatif dapat terkoreksi mengingat rasio cepat ini merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik yang akan menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dalam waktu dekat.



Tabel 3.3
Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
1	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	3,76%	2,30%	4,33%	17,35%	15,06%	8,56%
2	Rasio Cepat (<i>Quick Ratio</i>)	3,27%	2,06%	3,82%	15,27%	8,90%	6,66%
3	Rasio Total Utang terhadap Total Aset	0,011%	0,017%	0,006%	0,002%	0,002%	0,007%
4	Rasio Utang terhadap Modal	0,011%	0,017%	0,006%	0,002%	0,002%	0,007%
5	Rata-rata Umur Piutang	2,27 hari	2,36 hari	1,79 hari	2,21 hari		
6	Rata-rata Umur Persediaan	339 hari	300 hari	346 hari	342 hari		

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

*) Unaudited

Guna melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, khususnya kewajiban jangka panjang, dapat dilihat dari rasio solvabilitas yang akan membandingkan total aset daerah dengan total utang daerah. Dari tabel di atas nampak bahwa rata-rata rasio solvabilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lebak per tahunnya masih berkisar di angka 0,008%, jauh di bawah nilai 1 (satu) sebagai ambang batas kemampuan daerah dalam menyelesaikan kewajibannya. Angka tersebut sesungguhnya juga menggambarkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak dapat dikatakan sangat sehat karena nilai total aset daerah masih bisa menutup seluruh kewajiban meskipun dalam kondisi terburuk sekalipun (aktiva lancar tidak mampu menutup utang daerah).

Bila dari rasio likuiditas dan solvabilitas, Pemerintah Kabupaten Lebak masih dalam kondisi sehat, begitu pula dengan kondisi rasio aktifitas keuangan daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata umur piutang daerah masih berada pada kisaran angka 2 hari, yang artinya bahwa



Pemerintah Kabupaten Lebak mempunyai kemampuan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas) dalam waktu 2 hari saja.

Sementara dari rata-rata umur persediaan ikut menguatkan alasan perlunya peningkatan kemampuan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pengelolaan keuangan daerah. Terbukti dengan tidak adanya kepastian pada rasio dana dalam bentuk persediaan yang digunakan untuk pelayanan publik. Rata-rata umur persediaan Pemerintah Kabupaten Lebak secara akumulasi pada periode tahun 2009-2013 masih berada di angka 325 hari per tahun, yang artinya dana dalam bentuk persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan (khususnya untuk pelayanan publik) selama kurang lebih 325 hari atau kurang dari satu tahun anggaran. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak hingga tahun 2013 baru mampu menyediakan dana dalam bentuk persediaan untuk memenuhi kebutuhan selama 342 hari saja.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kapasitas fiskal daerah, serta tujuan pembangunan daerah yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lebak akan meliputi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah dapat tercapai guna mendukung arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, perlu diingat bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang



Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kewenangan pengelolaan pajak bagi Kabupaten/Kota meliputi 11 jenis pajak sebagai berikut :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan,
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sedangkan untuk Retribusi Daerah, bila mengacu pada peraturan tersebut di atas, jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk diperluas sesuai dengan peraturan dan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengenakan retribusi terhadap 8 jenis Retribusi Jasa Umum, 7 jenis Retribusi Jasa Usaha, dan 4 jenis Retribusi Perijinan Tertentu.

3.2.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Secara umum, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lebak untuk tahun 2009-2014 mengarah pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

1. Peningkatan kemampuan dan SDM Pengelola Pendapatan Daerah;
2. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
3. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas,



- keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
4. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, dan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah;
 5. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
 6. Peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
 7. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 8. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
 9. Penerapan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui skema kerjasama "*Public-Private Partnership*" maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) seperti misalnya deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Lebak.

Untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, belanja daerah tahun 2009-2014 dirumuskan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Kebijakan belanja daerah tahun 2009-2014 diarahkan untuk mendukung pencapaian target SPM dan MDG's dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur. Namun mengingat pendanaan yang relatif terbatas, maka



upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien ditempuh melalui :

1. Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
2. Penerapan pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang disertai sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan.
3. Pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indeks pendidikan.
4. Peningkatan alokasi anggaran untuk kesehatan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan.
5. Pengalokasian kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan service mobil);
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan;
 - d. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak (*committed budget*);



- e. Pemenuhan kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah seperti pembayaran hutang dan belanja bunga pada Bank Jabar-Banten berdasarkan perjanjian pinjaman daerah.
6. Peningkatan alokasi anggaran di bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktifitas ekonomi lokal dan penguatan struktur ekonomi perdesaan.
7. Peningkatan alokasi anggaran di bidang lingkungan hidup guna menjaga daya dukung lingkungan, diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, mempertahankan fungsi kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi sumber daya alam.
8. Penggunaan anggaran belanja yang terukur dan berbasis pada prioritas pembangunan daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lebak.
9. Pelaksanaan proper budgeting untuk efisiensi belanja melalui cost benefit analysis sehingga tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah dapat terpetakan.
10. Peningkatan efektivitas belanja bantuan sosial kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat, belanja hibah yang diperuntukkan bagi lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat, serta belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak.
11. Peningkatan alokasi belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa yang dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal desa.
12. Pengalokasian belanja tidak terduga sebagai bentuk antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.



Kebijakan pembiayaan daerah selama 2009 – 2014 umumnya diarahkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh adanya selisih belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan daerah dimaksud meliputi kebijakan untuk memanfaatkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA dengan tetap memperhatikan pemenuhan penyertaan modal secara rasional dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah daerah.

3.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi penggunaan anggaran ditujukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang guna meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Merujuk pada realisasi belanja daerah Kabupaten Lebak selama lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami kenaikan dengan rata-rata proporsi terhadap total pengeluaran per tahun sebesar 56,14%. Oleh karena itu efisiensi terhadap belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang sehingga kerangka pendanaan dapat lebih diarahkan pada kegiatan pembangunan daerah yang langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat.



Tabel 3.4
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

No	Uraian	Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	Proporsi
1	Tahun Anggaran 2009	507.332.185.679	886.788.479.332	57,21
2	Tahun Anggaran 2010	605.333.890.903	991.198.440.096	61,07
3	Tahun Anggaran 2011	664.377.187.014	1.271.811.436.609	52,24
4	Tahun Anggaran 2012	798.245.263.760	1.345.590.879.420	59,32
5	Tahun Anggaran 2013	876.542.857.036	1.594.721.958.389	54,97

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013
*) Unaudited

3.2.3. Analisis Pembiayaan

Periode tahun 2009-2013 mencatat bahwa kondisi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Lebak berfluktuasi, dimana defisit terjadi pada tahun 2009 dan 2011 sementara tahun 2010 dan 2012 justru terjadi surplus pembiayaan daerah. Secara keseluruhan, pembiayaan daerah membaik pada tahun 2010 yang ditunjukkan oleh berkurangnya defisit riil pembiayaan, dari semula berada di angka 19,108 Miliar rupiah lebih pada tahun 2009 menjadi surplus 55,277 Miliar rupiah lebih. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2011 sehingga defisit riil kembali pada angka 6,987 Miliar rupiah lebih tetapi kembali terkoreksi pada tahun 2012 sehingga pembiayaan daerah dapat mencapai surplus 6,646 Miliar rupiah lebih sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Diharapkan pada tahun 2013 surplus pembiayaan daerah dapat dipertahankan mengingat realisasi hingga bulan September 2013 masih tercatat surplus sebesar 137,490 Miliar rupiah lebih.



Tabel 3.5
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013*)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	823.089.133.098	954.981.181.046	1.185.100.258.482	1.292.072.654.610	1.475.432.194.169
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	844.322.060.135	893.656.193.255	1.172.221.338.158	1.274.592.540.523	1.514.838.642.901
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.867.923.637	6.047.127.000	19.866.666.000	10.833.333.334	4.500.000.000
	Defisit Riil	(23.100.850.674)	55.277.860.791	(6.987.745.676)	6.646.780.753	(43.906.448.732)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	41,579,692,901	46,365,423,317	102,104,909,653	95,569,828,269	102,470,684,472
5	Pencairan Dana Cadangan	0	0			
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0			
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	28,000,000,000	0	0	0	0
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	201,233,490	297,004,545	465,569,850	59,329,450	11,410,750.00
9	Penerimaan Piutang Daerah	185,348,750	164,621,000		194,746,000	
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	69,966,275,141	46,827,048,862	102,570,479,503	95,823,903,719	102,482,095,222
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	46,865,424,467	102,104,909,653	95,582,733,827	102,470,684,472	58,575,646,490

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

*) Unaudited



Guna menutup defisit riil anggaran tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lebak masih sangat mengandalkan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang bila merujuk pada ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Tabel 3.6
Proporsi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2013 (persen)

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2009	2010	2011	2012	2013*)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya	217,60	83,88	1461,20	1437,84	74,53
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	146,53	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,42	0,54	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,05	0,54	6,66	0,89	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,97	0,30	0	2,93	0,01

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

*) Unaudited

Dari ke tujuh rincian SiLPA yang ada, terdapat 3 (tiga) komponen yang berkontribusi besar terhadap penerimaan SiLPA selama tahun 2009-2013, yakni dari:

1. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan, komponen ini memiliki kontribusi rata-rata per tahun sebesar 12,23% terhadap nilai SiLPA. Pengecualian terjadi pada tahun 2009 karena realisasi dana perimbangan hanya sebesar 99,61%, atau dengan kata lain tidak terjadi pelampauan penerimaan. Bila dicermati lebih lanjut, pelampauan

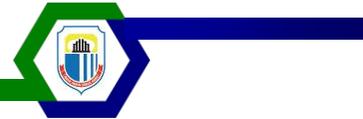


penerimaan Dana Perimbangan berasal dari jenis Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang realisasinya selalu berfluktuasi tiap tahunnya mengingat besarnya sangat bergantung pada kontribusi pajak/bukan pajak yang dikelola oleh negara.

2. Penghematan belanja, yang umumnya berasal dari sisa anggaran yang tidak terserap, baik karena proses pengadaan barang dan jasa atau akibat lainnya. Besaran efisiensi belanja terhadap SiLPA sendiri ternyata juga berfluktuasi dengan kontribusi terbesar tercatat di tahun 2008 yang menyentuh 89,89% dari total SiLPA. Sedangkan kontribusi terendah terjadi setahun berikutnya dengan kisaran 34,49% dari total SiLPA. Dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 58% terhadap total SiLPA, menunjukkan bahwa masih ada kelemahan yang harus segera di atasi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak terkait dengan perencanaan alokasi anggaran dan penyerapan belanja daerah.
3. Sisa Dana Kegiatan Lanjutan, sebagian besar merupakan sisa kontrak pekerjaan dalam bentuk retensi (masa pemeliharaan) dengan kontribusi rata-rata per tahun sebesar 11,09%.

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait dengan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Untuk mengetahui besaran penerimaan daerah dimaksud diperlukan proyeksi pendapatan daerah tahun 2014-2019 yang disusun dengan menggunakan beberapa asumsi serta dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2014-2019 tersaji pada tabel 3.3.



Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2019

No	Uraian	2014 (Rp.)	2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
1	PENDAPATAN	1.678.189.568.497	1.758.154.833.809	1.856.792.350.956	1.958.677.750.263	2.062.188.072.468	2.173.062.045.234
1.1	Pendapatan asli daerah	236.900.317.500	236.400.766.715	248.584.234.314	259.979.134.132	271.948.783.346	284.861.759.903
	a. Pajak daerah	30.201.832.900	36.205.859.949	39.129.352.115	42.517.855.232	46.449.196.642	51.027.131.670
	b. Retribusi daerah	195.587.484.600	69.726.420.766	72.635.822.199	73.971.822.700	75.006.053.470	75.986.642.553
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.311.000.000	3.566.200.000	3.571.660.000	3.579.686.200	3.588.274.234	3.597.463.430
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.800.000.000	126.902.286.000	133.247.400.000	139.909.770.000	146.905.259.000	154.250.522.250
1.2	Dana perimbangan	1.174.388.652.165	1.231.964.680.613	1.293.749.222.943	1.360.793.308.396	1.424.426.868.439	1.496.440.472.973
	a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	69.294.037.165	78.302.261.996	88.481.556.053	95.560.080.537	103.204.886.980	111.461.277.938
	b. Dana alokasi umum	1.000.878.505.000	1.050.922.430.250	1.103.468.551.763	1.158.641.979.351	1.216.574.078.318	1.227.402.782.234
	c. Dana alokasi khusus	104.216.110.000	102.739.988.367	101.799.115.127	106.591.248.508	104.647.903.141	107.576.412.801
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	266.900.598.832	289.789.386.481	314.458.893.699	337.905.307.735	365.812.420.684	391.759.812.358
	a. Pendapatan Hibah						
	b. Dana Darurat						
	c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	63.218.407.832	67.011.512.301	73.042.548.407	79.616.377.764	86.781.851.763	93.724.399.903
	d. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	186.115.759.000	189.838.074.180	192.685.645.292	195.575.929.971	198.509.568.921	201.487.212.455
	e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya	17.566.432.000	32.939.800.000	48.730.700.000	62.713.000.000	80.521.000.000	96.548.200.000
	f. Pendapatan Lainnya						

Sumber : DDPKD Kabupaten Lebak



Penerimaan daerah yang telah disusun pada akhirnya akan digunakan sebagai pendanaan terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan. Sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pengalokasian sumber-sumber penerimaan hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain :

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Berdasarkan pendapatan dan kebijakan pengeluaran tersebut, kapasitas riil keuangan daerah dapat diketahui. Namun perlu ditetapkan terlebih dahulu pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama bagi pemerintah daerah. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Rencana tahun 2014 sebesar Rp. **779.521.934.327** atau sebesar 46,45% dari total penerimaan.
2. Proyeksi tahun 2015 sebesar Rp. **773.352.681.843** atau sebesar 43,99% dari total penerimaan.



3. Proyeksi Tahun 2016 sebesar Rp. **777.341.940.497** atau sebesar 41,86% dari total penerimaan.
4. Proyeksi Tahun 2017 sebesar Rp. **774.747.007.868** atau sebesar 39,55% dari total penerimaan.
5. Proyeksi tahun 2018 sebesar Rp. **763.418.042.606** atau sebesar 37,02% dari total penerimaan.
6. Proyeksi tahun 2019 sebesar Rp. **748.573.238.147** atau sebesar 34,45% dari total penerimaan.

Untuk lebih jelasnya Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan daerah tersaji pada tabel 3.8.





Tabel 3.8
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan	1.678.189.568.497	1.758.154.833.809	1.856.792.350.956	1.958.677.750.263	2.062.188.072.468	2.173.062.045.234
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	33.784.779.097	0	0	0	0	0
	Total penerimaan	1.711.974.347.594	1.758.154.833.809	1.856.792.350.956	1.958.677.750.263	2.062.188.072.468	2.173.062.045.234
	Dikurangi:						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	912,913,609,450	997,901,651,895	1,097,071,594,085	1,198,987,908,393	1,315,019,769,232	1,441,654,891,155
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	779.521.934.327	773.352.681.843	777.341.940.497	774.747.007.868	763.418.042.606	748.573.238.147

Sumber: DPPKD Kabupaten Lebak



Setelah pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama ditentukan, maka dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah sebagai acuan bagi kerangka pendanaan untuk mendanai pembangunan daerah hingga tahun 2019 mendatang. Adapun Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah selama 5 tahun ke depan tersaji pada tabel 3.9.

Sebagaimana permendagri 54 tahun 2010, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) rencana penerimaan daerah dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III.

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I berkaitan dengan tema atau program pembangunan unggulan Kepala Daerah serta belanja wajib dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prioritas II berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta berdampak luas pada segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan layanan dasar serta tugas pokok dan fungsi SKPD, termasuk didalamnya peningkatan kapasitas kelembagaan. Sedangkan Prioritas III berkaitan dengan alokasi belanja tidak langsung yang akan dipenuhi setelah prioritas I dan II terpenuhi lebih dahulu.



Tabel 3.9
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Rupiah)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	779,521,934,327	773,352,681,843	777,341,940,497	774,747,007,868	763,418,042,606	748,573,238,147
II	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH						
	- Belanja Tidak Langsung	39,491,150,600	43,963,271,940	43,595,383,546	43,268,133,991	42,977,459,392	42,719,702,253
	- Belanja Langsung	446,604,771,300	366,998,462,142	377,339,576,368	387,208,642,839	394,804,227,642	408,842,021,002
III	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
	Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah	226,502,944,975	290,923,147,002	290,988,920,080	287,184,084,816	270,837,315,061	229,633,410,661
IV	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III						
	Belanja Tidak Langsung	65,423,067,452	67,967,800,759	61,918,060,503	53,586,146,221	51,299,040,512	63,878,104,231
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III-IV)*	0	0	0	0	0	0

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2013

*) Unaudited



Melihat proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang terus mengecil proporsinya terhadap total penerimaan, sedangkan proyeksi jumlah penerimaan cenderung meningkat, maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya pengetatan dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya.
2. Perlunya peningkatan peran serta sektor swasta dalam pendanaan pembangunan. Hal ini bisa dilaksanakan melalui beberapa skenario kemitraan:
 - a. Kemitraan pemerintah dan sektor swasta (*public private partnership*) terutama melalui bentuk BOT untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai ekonomis;
 - b. Menggali potensi *corporate social responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar di berbagai lapangan usaha untuk turut membangun dan mendukung program-program prioritas I.
3. Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan dengan posisi dan kedudukan pemerintah kabupaten yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada skala regional dan lintas kabupaten/kota. Dengan restrukturisasi ini, akan diperlukan besaran organisasi yang lebih efisien serta penugasan yang makin ahli dengan penguatan jabatan fungsional di berbagai lini.



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan terjadi dengan kondisi sebenarnya terjadi di suatu daerah. Karenanya merumuskan permasalahan pembangunan haruslah didasarkan pada perbandingan obyektif antara *existing conditions* yang ada pada berbagai aspek pembangunan daerah dengan ekspektasi yang dirumuskan sebagai tujuan atau target pembangunan daerah.

Secara alamiah, permasalahan pembangunan daerah dikonstruksi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar. Permasalahan internal bersumber pada adanya sejumlah kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mendayagunakan sumberdaya pembangunan daerah sehingga menyebabkan tidak optimalnya kinerja pembangunan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena adanya berbagai potensi ancaman yang tidak terantisipasi sehingga kemudian bermanifes sebagai masalah dalam kehidupan sosial. Berangkat dari pemahaman inilah maka identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Lebak akan dirumuskan, yang pada satu sisi berfokus pada pemerintah daerah beserta segenap instrumentasinya, dan di sisi lain menelaah berbagai hal dengan pendekatan sektoral sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lebak.

4.1.1. Bidang pendidikan

Permasalahan utama adalah: (1) Masih kurangnya layanan pendidikan anak usia dini; (2) Terbatasnya layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; (3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; (4) Masih tingginya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah;



(5) Terbatasnya layanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah; (6) Terbatasnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan dengan kompetensi dan distribusi yang belum merata; (7) Belum optimalnya layanan pendidikan Non Formal; (8) Sistem informasi manajemen pendidikan yang belum berjalan baik; dan (9) Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan yang belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing; serta (10) Masih relatif terbatasnya aksesibilitas layanan pendidikan karena faktor ekonomi.

4.1.2. Bidang Kesehatan

Permasalahan utama di bidang kesehatan dapat diidentifikasi antara lain: (1) Perilaku masyarakat di bidang kesehatan yang masih rendah; (2) Kondisi kesehatan lingkungan yang masih rendah; (3) Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; (4) Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; dan (5) Terbatasnya tenaga kesehatan; serta (6) Masih relatif terbatasnya aksesibilitas layanan kesehatan karena faktor ekonomi.

4.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Permasalahan utama pada aspek kebinamargaan adalah: (1) Kurangnya ketersediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan; (2) Tingginya tingkat kerusakan jalan; (3) Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan; dan (4) Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan jasa alat berat; (5) Kurang berjalannya sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan database kondisi jalan secara aktual.

Permasalahan utama terkait aspek sumber daya air dan irigasi adalah: (1) Tingginya kerusakan jaringan irigasi; (2) kurangnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi; (3) Relatif rendahnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pemeliharaan jaringan irigasi; serta (4) Kurang berjalannya sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan database kondisi jaringan irigasi.



Permasalahan utama pada aspek keciptakarya adalah: (1) Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih; (2) Masih relatif terbatasnya kondisi sanitasi lingkungan khususnya di permukiman; (3) Masih rendahnya PSU permukiman; dan (4) Kurangnya ketersediaan dan tingginya tingkat kerusakan fasilitas sosial dan fasilitas umum kecamatan.

4.1.4. Perumahan

Permasalahan utama pada bidang perumahan adalah: (1) Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang sehat dan layak; serta (2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana lingkungan yang memadai.

4.1.5. Bidang penataan Ruang

Permasalahan utama di bidang penataan ruang antara lain terkait dengan: (1) Kurangnya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah; (2) Belum optimalnya penjabaran rencana tata ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang; (3) Masih terbatasnya pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang; serta (4) Masih terbatasnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang.

4.1.6. Bidang Perencanaan Pembangunan

Permasalahan utama pada bidang perencanaan pembangunan yaitu (1) Sinkronisasi antar dokumen rencana pembangunan daerah belum optimal; (2) Masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan; (3) Belum tersedianya sistem informasi manajemen perencanaan yang efektif dan efisien; serta (4) Kurang optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

4.1.7. Bidang Perhubungan

Permasalahan utama bidang perhubungan adalah (1) Kurangnya fasilitas keselamatan jalan; (2) Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan; (3) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam transportasi; (4)



Terbatasnya kapasitas pemerintah dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.

4.1.8. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan utama pada Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: (1) Makin tingginya laju pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; (2) Kurang tersedianya pos jaga hutan; (3) Batas zonasi TNHGS yang belum sinkron antara Kemeterian Kehutanan dengan Masyarakat yang termasuk dalam areal perluasan TNGHS; (4) Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau di area perkotaan; (5) Terbatasnya ruang terbuka bagi publik; (6) Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup; (7) Kurangnya sumber benih dan bibit berkualitas; (8) Rendahnya ketaatan para pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup; (9) Adanya persaingan pemanfaatan air untuk irigasi dan penggunaan air untuk sektor lain; (10) Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan; (11) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan / mitigasi bencana; (12) Kurangnya sarana dan prasarana serta SDM di bidang Penanggulangan Bencana; dan (13) Banyaknya daerah rawan bencana.

4.1.9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan utama adalah (1) Belum optimalnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyerasian perkembangan kependudukan; (2) Kurangnya pembinaan kepada masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan sipil; serta (3) Relatif terbatasnya kapasitas layanan kependudukan karena faktor sarana dan prasarana serta SDM pelayanan.

4.1.10. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama bidang termaksud yaitu (1) Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan; (2) Rendahnya pemahaman



perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta (3) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah.

4.1.11. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan utama bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut: (1) Belum meratanya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi; (2) Rendahnya Tingkat partisipasi KB pria; (3) Kurangnya Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (KB); (4) Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); (5) Rendahnya tingkat kepesertaan KB dari pasangan usia subur; (6) Belum optimalnya Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); dan (7) Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR dan PKLK) belum optimal.

4.1.12. Bidang Sosial

Permasalahan utamanya adalah: (1) Banyaknya orang terlantar, Anak jalanan, Anak berhadapan dengan hukum, Anak korban tindak kekerasan, korban *trafficking*, korban penyalahgunaan Napza dan perlunya rehabilitasi korban bencana alam dan bencana sosial serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; serta (2) Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

4.1.13. Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan utamanya adalah: (1) Rendahnya kualitas/SDM para pencari kerja (penganggur); (2) Relatif terbatasnya peluang kerja / kesempatan berusaha di sektor formal; (3) Masih rendahnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan masyarakat; dan (4) Banyaknya kasus PHK dan kasus ketenagakerjaan lainnya.



4.1.14. Bidang Koperasi dan UKM

Permasalahan Utama yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut: (1) Rendahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (2) Masih terbatasnya akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan; dan (3) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dan UKM.

4.1.15. Bidang Penanaman Modal

Sebagai Daerah yang relatif masih memiliki daya saing yang rendah, maka dalam rangka pengembangan penanaman modal dan Perijinan ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Belum Optimalnya promosi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pertumbuhan investasi; (2) Masih kurangnya pemahaman masyarakat/stakeholders tentang regulasi investasi dan penanaman modal; (3) Pengelolaan pelayanan investasi dan penanaman modal belum memanfaatkan pengembangan teknologi informasi secara optimal.

4.1.16. Bidang Kebudayaan

Permasalahan utamanya adalah: (1) Belum terdatanya potensi seni dan budaya masyarakat; (2) Belum optimalnya pembinaan budaya dan kearifan lokal; (3) Belum optimalnya fungsi kawasan budaya dan pelaku budaya; dan (4) Sarana dan prasarana kesenian yang kurang memadai; (5) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian daerah.

4.1.17. Bidang Pemuda dan Olahraga

Permasalahan utama bidang pemuda dan olahraga yaitu: (1) Terbatasnya sarana dan prasana untuk memwadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri; (2) Jiwa



kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah; dan (3) Terbatasnya sarana dan pembinaan olahraga.

4.1.18. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Permasalahan utama adalah: (1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah; (2) belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; (3) Masih rendahnya pemahaman tentang ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat; serta (4) Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda.

4.1.19. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Permasalahan utama bidang termaksud berupa : (1) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*; (2) Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual yang jelas terkait prosedur pelayanan di setiap SKPD; (3) Pengawasan Internal dan Pengendalian yang berkelanjutan belum optimal; (4) Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi; (5) Belum optimalnya penataan aset-aset daerah; (6) Belum semua pelayanan publik sesuai harapan masyarakat; (7) Masih rendahnya kapasitas, profesionalisme dan jumlah sumber daya manusia aparatur; dan (8) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada masyarakat.

4.1.20. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Permasalahan utama adalah: (1) Masih rendahnya kinerja pelayanan publik pemerintah desa; (2) Relatif rendahnya kapasitas dan kemandirian pemerintahan desa; serta (3) Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan di desa.



4.1.21. Bidang Statistik

Permasalahan utama adalah: (1) Masih rendahnya akses dan informasi masyarakat terhadap data statistik; (2) Masih rendahnya kesadaran SKPD terhadap pentingnya data sebagai bahan perencanaan; dan (3) Referensi data pembangunan yang berbeda-beda.

4.1.22. Bidang Kearsipan

Permasalahan utama adalah: (1) Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan; (2) Terbatasnya SDM fungsional yang menangani kearsipan; serta (3) Rendahnya kesadaran aparaturnya tentang nilai penting dan strategis bidang kearsipan.

4.1.23. Bidang Perpustakaan

Permasalahan utama bidang perpustakaan adalah: (1) Sarana dan prasarana perpustakaan yang belum memadai; (2) Rendahnya minat baca masyarakat; (3) Rendahnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam peningkatan minat baca di kalangan masyarakat.

4.1.24. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama bidang komunikasi dan informatika adalah: (1) Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) Terbatasnya sarana dan prasarana TIK yang dapat menunjang optimalisasi fungsi pemerintahan daerah; (3) Terbatasnya SDM di bidang TIK yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan daerah.

4.1.25. Bidang Ketahanan Pangan

Jumlah penduduk yang belum sebanding dengan kecukupan pangan dan wilayah yang relatif luas dapat menimbulkan beberapa permasalahan terutama permasalahan sebagai berikut : (1) Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (2) Terbatasnya diversifikasi pangan dalam pola konsumsi



masyarakat; (3) Masih banyaknya terdapat daerah rawan pangan; dan (4) Masih Kurangnya jaminan keamanan pangan.

4.1.26. Bidang Pertanian

Struktur Perekonomian Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa Pertanian merupakan sektor dominan dalam memberikan kontribusi pembangunan, namun untuk dapat meningkatkan dan mengembangkannya masih ditemukan beberapa permasalahan utama seperti: (1) Rendahnya kualitas SDM kelompok tani; (2) Tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani; (3) Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani; (4) Sempitnya penguasaan lahan milik petani; (5) Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi pengolahan produk pertanian; (6) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian; (7) Terbatasnya ketersediaan alat pasca panen Pertanian; (8) Komoditas unggulan tanaman perkebunan potensial belum di kelola secara optimal; (9) Subsektor peternakan masih didominasi oleh para peternak dengan skala usaha terbatas dan belum menjadi usaha pokok; (10) Terbatasnya bibit ternak baik kualitas dan kuantitas; (11) Rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi dan informasi peternakan; (12) Penyakit Hewan menular masih menjadi Ancaman; (13) Masih terdapat pemotongan hewan betina produktif tanpa dukungan upaya penyelamatan dan pencegahannya yang belum memadai; (14) Panjangnya sistem tata niaga produk pertanian, peternakan dan perkebunan; dan (15) Belum jelasnya wilayah kawasan usaha peternakan.

4.1.27. Bidang Kehutanan

Luas tutupan hutan yang ada hampir separuh luas wilayah Kabupaten Lebak, namun pemanfaatannya baik secara ekonomi maupun konservasi belum dilakukan secara optimal hal ini disebabkan masih banyaknya potensi aneka usaha kehutanan yang belum dikembangkan.



4.1.28. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan utama yang dihadapi adalah: (1) Cakupan elektrifikasi belum menjangkau seluruh kampung; dan (2) kurangnya ketersediaan PJU untuk jalan raya rawan kecelakaan dan PJU perdesaan.

4.1.29. Bidang Pariwisata

Sektor Pariwisata dalam satu dekade ini merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan di hampir seluruh daerah di Indonesia baik yang mengandalkan pariwisata alam terbuka maupun pariwisata yang sifatnya buatan dan merupakan hasil kreatifitas. Hal inipun tidak terlepas dari semangat pembangunan Kabupaten Lebak, namun dalam pengembangannya masih ditemukan permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya pengelolaan objek wisata potensial baik dari aspek regulasi, promosi dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.

4.1.30. Bidang Kelautan dan Perikanan

Potensi Sumberdaya Air di daratan dan Lautan yang dimiliki Kabupaten Lebak belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pengembangannya. Adapun permasalahan utamanya adalah sebagai berikut: (1) Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM nelayan; (2) Rendahnya produktivitas usaha perikanan; (3) Masih rendahnya sistem alih teknologi pengolahan produk hasil perikanan; (4) lemahnya kelembagaan dan posisi tawar pembudidaya, nelayan dan pengolahan ikan; (5) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan selain perikanan; dan (6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana baik secara kualitas dan kuantitas dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi ikan budidaya dan tangkap.



4.1.31. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Sektor Industri dan Perdagangan dalam tahapan pembangunan sebelumnya belum menjadi sektor yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Lebak, hal ini tidak terlepas dari masih banyaknya permasalahan yang dihadapi seperti: (1) Produktivitas IKM masih rendah; (2) terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan; dan (3) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian barang beredar dari alur distribusi dan konsumsi.

4.1.32. Bidang Transmigrasi

Permasalahan utama yang dihadapi pada bidang transmigrasi yaitu: (1) Belum dimilikinya keterampilan yang dibutuhkan di kalangan calon transmigran; serta (2) Rendahnya minat dan motivasi calon transmigran.

4.2. Isu Strategis

Dalam rencana pembangunan daerah, penyusunan isu-isu strategis merupakan tahapan yang penting. Hal ini karena ketepatan penyusunan isu strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Secara umum, karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Upaya ini dapat dilakukan melalui analisa permasalahan umum daerah dengan tetap memperhatikan



hal-hal yang menjadi prioritas dan isu strategis pada dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi.

Secara nasional, beberapa hal yang dijadikan isu strategis nasional meliputi kebijakan pengembangan wilayah dengan mendorong percepatan pembangunan pada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Hal lainnya yang menjadi isu strategis nasional adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dalam RPJMD Provinsi Banten 2012-2017, beberapa hal yang menjadi isu strategis meliputi infrastruktur wilayah/kawasan dan lingkungan hidup, ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030, Kabupaten Lebak ditetapkan sebagai bagian dari beberapa kawasan strategis yang dibentuk untuk mengurangi kesenjangan daerah, yaitu :

- 1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan Pemerintah yaitu Kawasan TNI AD Komando Pendidikan Latihan Tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.
- 2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan ekonomi untuk :
 - a. Kawasan Malingping di Kabupaten Lebak;
 - b. Kawasan Bayah di Kabupaten Lebak;
 - c. Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak;

Selain itu, Kabupaten Lebak juga ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Provinsi Banten yang meliputi :

- 1) Kawasan agropolitan terpadu (termasuk agrowisata);
- 2) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Kawasan pengembangan minapolitan terpadu (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan dan minawisata);
- 4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya



- 5) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi :
 - a. Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;
 - b. Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak;
 - c. Bendungan Cilawang di Kabupaten Lebak;
 - d. Bendungan Tanjung di Kabupaten Lebak;
 - e. Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak;
- 6) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi pada 5 (lima) tahun mendatang, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan daerah kabupaten Lebak sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan daerah;
2. Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Wilayah ;
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Kelestarian Lingkungan Hidup;
4. Ketahanan Pangan;
5. Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
6. Kemiskinan dan ketenagakerjaan;
7. Kemampuan perekonomian daerah;
8. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
9. Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah;
10. Pelestarian cagar budaya dan penerapan nilai-nilai budaya lokal;
11. Kepemudaan dan Olahraga;
12. Kesetaraan gender dan perlindungan anak;
13. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Ke-13 isu strategis di atas secara substansial telah mencakup 5 (lima) isu dan permasalahan pembangunan yang dijadikan dasar dalam penyusunan visi dan misi calon kepala daerah terpilih pada Pemilu pada tahun 2013, yaitu:



1. Pengembangan infrastruktur daerah, pengelolaan lingkungan hidup, penanganan desa tertinggal, dan kebencanaan;
2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar;
3. Peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
5. Peningkatan kinerja aparatur daerah dan pelayanan publik.





BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pada dasarnya adalah pandangan atau wawasan ke depan tentang suatu keadaan yang diharapkan dapat dicapai pada suatu waktu tertentu. Visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 merupakan transformasi dari visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, yang disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada periode lima tahun mendatang. Visi RPJPD sebagaimana dimaksud **adalah “Lebak Menjadi Daerah yang Maju dan Religius Berbasis Perdesaan”**, serta RPJMD Kabupaten Lebak 2014-2019 merupakan tahapan ketiga pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak 2005-2025 yaitu **“Tahap Pertumbuhan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”**, dengan karakteristik yang diharapkan pada kondisi : (1) sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing; (2) Hampir setiap sendi kehidupan masyarakat termasuk seni dan budaya akan memasuki tahap komersialisasi; (3) berkembangnya industri pariwisata yang mendorong permintaan terhadap barang seni dan kerajinan rakyat; (4) perkembangan yang pesat dalam investasi bidang industri jasa berbasis sumberdaya alam yang didukung faktor kedekatan geografis Kabupaten Lebak dengan wilayah Jabodetabek; serta (5) pemerintahan daerah menerapkan *e-Government* yang mencapai tingkat kedewasaan (*maturity level*).

Di samping itu, visi dalam RPJMD juga merupakan abstraksi yang mengakomodasi visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada DPRD Kabupaten Lebak pada saat pencalonannya, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Lebak yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui**



Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Agama serta Kearifan Lokal”.

Berdasarkan visi RPJPD tersebut, serta visi calon kepala daerah di atas, maka visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 diarahkan dalam rangka mencapai :

“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Lebak yang Maju, menggambarkan kondisi Kabupaten Lebak yang lebih baik dengan pembangunan yang dinamis, inovatif dan kreatif, yang didukung dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Lebak yang Maju dicirikan dengan pencapaian indikator-indikator makro daerah yang lebih baik dari sebelumnya yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, peningkatan kualitas ke arah yang lebih baik juga terjadi pada indeks kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Lebak yang Berdaya Saing, menggambarkan kondisi daerah dimana perekonomian daerah mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kondusifitas investasi yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur wilayah dan sumber daya manusia dengan kemampuan untuk



bersaing dengan sehat, baik dalam lingkup daerah, regional maupun nasional.

Pemantapan Pembangunan Perdesaan, merupakan upaya untuk terus melanjutkan pembangunan perdesaan sebagai basis utama pembangunan yang dilakukan pada periode pembangunan sebelumnya. Pemantapan pembangunan perdesaan menunjukkan itikad pemerintah daerah untuk mengusung desa sebagai pusat pengembangan ekonomi, sosial dan budaya dan menggiring mereka menjadi desa yang berkembang dan mandiri.

Pengembangan ekonomi Kerakyatan, merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Melalui Pengembangan ekonomi rakyat diharapkan terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya muaranya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat.

5.2. Misi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Karenanya, misi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari visi yang dirumuskan dalam bentuk aktivitas yang menggambarkan upaya mewujudkan visi tersebut.

Adapun misi sebagaimana dimaksud dirumuskan dalam 6 (enam) misi operasional sebagai berikut :

Misi 1 : *Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif*, hal ini ditunjukkan dengan kondisi sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan



kompetensi yang mumpuni, kreatif, inovatif yang didukung dengan moralitas yang berbasis agama yang kokoh.

Misi ini merupakan hasil dari reformulasi rumusan misi pertama calon kepala daerah yaitu mewujudkan SDM Kabupaten Lebak yang produktif, kreatif, inovatif, partisipatif, dan berdaya saing;

Misi 2 : *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik.* Birokrasi berperan sebagai katalisator pembangunan daerah dengan karakteristik organisasi yang responsif terhadap tuntutan publik sehingga senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan secara transparan dan akuntabel.

Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-5 calon kepala daerah yaitu menguatkan tata pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

Misi 3 : *Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan.* Kondisi perekonomian yang kokoh yang mengandalkan kekuatan ekonomi kerakyatan akan menciptakan Kabupaten Lebak menjadi daerah yang mampu bertahan dari berbagai permasalahan ekonomi baik yang disebabkan dari aktifitas ekonomi domestik maupun aktifitas ekonomi global sehingga akan memposisikan Kabupaten Lebak sebagai daerah yang mampu bersaing dengan daerah sekitar melalui penguatan ekonomi usaha/industri kecil dan menengah, pariwisata dan sektor pertanian serta pengembangan investasi yang mampu mendayagunakan potensi sumber daya daerah.



Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-3 calon kepala daerah yaitu meningkatkan akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal;

Misi 4 : *Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas.* Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur yang memprioritaskan perluasan akses terhadap pusat-pusat kegiatan masyarakat terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Selain itu pembangunan infrastruktur juga dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya setempat dengan tetap memperhatikan kualitas.

Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-2 calon kepala daerah yaitu meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur melalui pemantapan pembangunan perdesaan;

Misi 5 : *Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan,* Kabupaten Lebak tetap memposisikan diri sebagai wilayah daerah resapan air. Dengan kondisi tersebut maka pembangunan yang dilaksanakan tetap mempertimbangkan aspek ekologi sehingga terjaga kelestarian lingkungan yang mendukung pola pembangunan yang berkelanjutan.

Misi ini merupakan reformulasi dari misi ke-4 calon kepala daerah yaitu meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam kerangka rencana tata ruang.

Misi 6 : *Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah,* hal ini ditunjukkan dengan kondisi Lebak menjadi tempat yang nyaman bagi siapa saja, untuk melakukan segala aktivitas dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.



5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi di atas, maka diperlukan adanya kerangka kerja logis yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada kelima misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan tersebut akan menjadi arahan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lebak, baik yang menyangkut urusan wajib maupun urusan pilihan, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Adapun tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. *Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif*

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar;
- 2) Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK, kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun berbudaya.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata;
- 2) Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata;
- 3) Meningkatnya daya saing sumber daya manusia;
- 4) Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga;
- 5) Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal;
- 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan.



2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik berorientasi Pelayanan Publik

Tujuan :

- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan

Sasaran :

- 7) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan

Tujuan :

- 4) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Sasaran :

- 8) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi;
- 9) Meningkatnya Ketahanan pangan daerah;
- 10) Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan;
- 11) Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah.

4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas

Tujuan :

- 5) Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur;
- 6) Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Transportasi.

Sasaran :

- 12) Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;
- 13) Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat;
- 14) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat;
- 15) Meningkatnya kualitas perumahan permukiman;
- 16) Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat;



- 17) Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ;
- 18) Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan.

5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan

Tujuan :

- 7) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup;
- 8) Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

Sasaran :

- 19) Meningkatnya rehabilitasi lahan;
- 20) Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air;
- 21) Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas;
- 22) Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah;
- 23) Pengendalian dan pemanfaatan ruang;
- 24) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah

Tujuan :

- 9) Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah

Sasaran :

- 25) Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 26) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator yang digunakan dalam upaya pencapaian misi diuraikan pada tabel 5.1 berikut.



Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019

Visi : Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata	APK PAUD (%)	21,15	22,10	23,05	24,00	24,95	25,90	27,00
			APK SLTP (%)	98,78	98,93	99,14	99,35	99,56	99,77	99,98
			APK SLTA (%)	56,05	60,00	60,75	61,50	62,25	63,00	63,75
			APM SD/MI (%)	98,73	98,78	98,83	98,88	98,93	98,98	99,03
			APM SLTP (%)	99,29	99,31	99,33	99,35	85,95	86,00	86,05
			APM SLTA (%)	45,09	47,11	50,12	53,24	56,16	59,18	62,2
			APS SD (%)	99,83	99,85	99,87	99,89	99,91	99,93	99,95
			APS SLTP (%)	92,29	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00
			APS SLTA (%)	45,10	46,25	47,25	48,25	49,25	50,10	50,25
			Angka Putus Sekolah SD (%)	0,35	0,31	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20
			Angka Putus Sekolah SLTP (%)	0,37	0,30	0,25	0,20	0,15	0,10	0,08
			Angka Putus Sekolah SLTA (%)	0,60	0,58	0,56	0,54	0,52	0,50	0,48
			Angka Kelulusan SD (%)	95,63	96,13	96,63	97,13	97,63	98,13	98,63
Angka Kelulusan SLTP (%)	99,67	99,72	99,77	99,82	99,87	99,92	99,97			



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Angka Kelulusan SLTA (%)	98,84	98,67	98,70	98,73	98,76	98,79	98,82
			Angka Melanjutkan dari SD ke SLTP (%)	94,42	94,49	94,56	94,63	94,70	94,77	94,84
			Angka Melanjutkan dari SLTP ke SLTA (%)	86,45	86,75	87,05	87,35	87,65	87,95	88,25
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,29	6,30	6,34	6,38	6,42	6,46	6,50
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (orang)	6.336	6.510	6.830	7.150	7.470	7.790	8.110
			Angka Melek Huruf (%)	98,10	98,26	98,36	98,46	98,56	98,66	98,76
		2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata	Angka Kematiaan Ibu (AKI) (/100.000 KH)	157,66	155,00	150,00	145,00	140,00	135,00	127,00
			Angka Kematian Bayi (AKB) (/1.000 KH)	24,64	24,00	23,00	22,00	21,00	20,00	18,00
			Angka Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	63,35	63,44	63,45	63,46	63,47	63,48	63,50
			Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,65	0,63	0,61	0,59	0,57	0,55	0,52



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	81,08	83,75	88,75	91,25	92,50	95,00	95,00
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	66,38	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular (%)	61,00	60,67	76,67	80	83,33	86,67	86,67
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	78,25	80,00	82,50	85,00	90,00	95,00	95,00
			Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	82,00	83,75	88,75	91,25	92,50	95,00	95,00
			Cakupan pelayanan anak balita (%)	67,41	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00



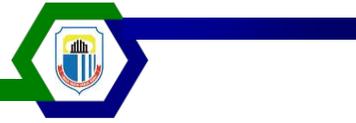
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita (%)	12,00	12,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00
			Cakupan Desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Kejadian Infeksi Pasca Operasi (%)	1,50	1,50	1,45	1,40	1,35	1,30	1,25
			Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)	65	75	80	85	95	98	100
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS / BTLS / ACLS/PPGD (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Kepuasan pelayanan RSUD (%)	70,26	73,00	75,00	78,00	80,00	85,00	87,00
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	10,27	9,57	8,87	8,17	7,47	6,77	6,07
			Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%) (%)	64,22	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) 5% (%)	12,19	11,69	11,19	10,69	10,19	9,69	9,19



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 desa/kel. (%)	30,05	41,61	52,02	62,42	73,41	85,55	97,69
			Jumlah kelompok bina keluarga :							
			- Bina Keluarga Balita (BKB) (Kelompok)	369	371	373	375	377	379	381
			- Bina Keluarga Remaja (BKR) (Kelompok)	199	201	203	205	207	209	301
			- Bina Keluarga Lansia (BKL) (Kelompok)	249	251	253	255	257	259	261
	2. Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK & kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun berbudaya	3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,52	7,37	7,10	6,80	6,50	6,30	6,00



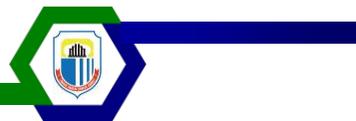
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (Orang)	40	49	16	32	32	32	32
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (Orang)	13	58	144	192	224	256	256
			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (Orang)	250	300	300	300	300	300	300
			Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui Padat Karya (Desa)	0	345	345	345	345	345	345
			Jumlah Transmigrasi Umum (Orang)	22	40	40	40	40	40	40
			Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	29,16	32,60	37,00	41,00	46,00	51,00	55,00



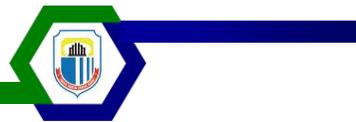
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)	30,10	31,80	33,00	35,00	38,33	41,08	43,00
			Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	26,15	29,09	32,48	35,35	39,00	42,00	45,00
			Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Kelompok)	5	9	15	15	15	15	15
			Jumlah penerima manfaat kartu sejahtera (Orang)	0	3.520	4.800	6.300	8.300	9.800	10.000



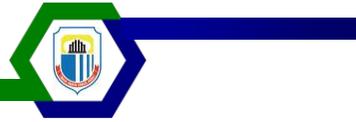
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	60,92	61,96	62,96	63,96	64,96	65,96	66,96
		4. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga	Jumlah pemuda mendapatkan pembinaan (Pemuda)	N/A	140	140	140	140	140	140
			Jumlah penyelenggaraan event olahraga (Event/Tahun)	5	2	2	2	2	2	2
			Pembinaan atlet berprestasi (Atlet)	0	0	30	33	36	40	43
		5. Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal	Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya (%)	0	100	100	100	100	100	100
			Jumlah event budaya (Event/Tahun)	9	10	10	10	10	10	10
		6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Pengunjung)	N/A	10.300	11.845	13.622	15.665	18.000	19.000
			Jumlah perpustakaan milik daerah (Unit)	1	0	0	1	0	0	0



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *	
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik berorientasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan	7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	1	1	0	0	1	0	1	
			Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1
			Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	89,73	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	92,50	
			Opini audit BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (Skala 1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Tertatanya aset daerah (%)	90	97	100	100	100	100	100	
			Sistem Informasi Manajemen Pemda (Aplikasi)	4	3	1	1	1	1	1	1
			Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan (Orang)	403	10	13	20	25	25	25	



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Jumlah aparatur yang terbina (Org)	11.091	11.091	11.395	11.395	11.395	11.395	11.395
			Rasio Kemandirian Daerah	N/A	16,69	17,99	20,29	22,59	24,89	25,00
			Jumlah prasarana aparatur pemerintah terbangun dan tertata (Unit)	24	4	3	3	3	3	3
			Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (Unit)	30	15	15	15	15	15	15
			Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan (Orang)	340	100	135	140	145	150	150
			Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (%)	77,06	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	86,00
			Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	78,00	81,50	83,00	84,50	86,00	87,50	88,00
			Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (%)	33,00	42,00	44,00	46,00	49,00	52,00	52,00



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Ketersediaan database kependudukan (%)	92,02	93,00	93,50	95,00	96,50	98,00	99,00
3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan	8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi;	Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional (%)	8,57	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional : - PMDN (Perusahaan) - PMA (Perusahaan)	894 5	2 1	3 1	3 1	3 1	3 1	3 1
			Presentase antara realisasi investasi & peminat investasi (%)	30	40	50	60	70	80	80
			Jumlah koperasi aktif (Unit)	671	691	711	731	751	771	791
			Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah : - Usaha Mikro - Usaha Kecil - Usaha Menengah	48.892 785 9	49.140 805 11	49.388 825 13	49.636 845 15	49.884 865 17	50.132 885 19	50.380 905 21
			Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah (Unit)	2	2	2	1	1	2	1



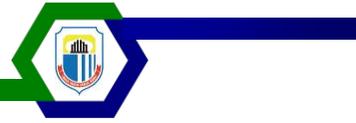
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Jenis dan jumlah industri menengah: - Jenis industri - Jumlah industri	20 24	20 28	20 30	22 33	22 35	24 38	26 41
			Jenis dan jumlah industri kecil : - Jenis industri - Jumlah industri	18 15.298	18 15.454	20 15.769	22 16.334	24 16.559	26 16.744	28 16.929
		9. Meningkatnya Ketahanan pangan daerah;	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok : - Padi (Ton)	539.349	550.135,98	561.138,70	572.361,47	583.808,70	595.484,88	607.395
			- Palawija (Ton)	31.932,00	32.570,64	33.222,05	33.886,49	34.564,22	35.255,51	35.961,00
			- Hortikultura (Ton)	166.708,00	170.042,16	173.443,00	176.911,86	180.450,10	184.059,10	187.740,00
			Daerah rawan pangan (Kecamatan)	9	5	4	3	2	1	1
			Sentra kawasan unggulan (Lokasi)	0	0	0	2	3	4	5
			Produksi Daging (Kg)	7.812.487	7.996.386	8.204.292	8.405.539	8.847.772	9.316.869	10.010.044
			Produksi ikan budidaya (Ton)	3.535,40	3.540,00	3.552,00	3.564,00	3.576,00	3.588,00	3.600,00
			Produksi ikan tangkap (Ton)	4.735,36	4.946,81	5.194,04	5.453,87	5.726,70	6.012,93	6.313,66



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Konsumsi ikan (Kg per Kapita)	14,41	15,01	15,72	16,45	17,23	18,04	18,89
			Cakupan Bina Kelompok Tani:							
			- Pemula	-	1.636	1.561	1.480	1.393	1.300	1.207
			- Lanjut	-	702	771	842	918	996	1.076
			- Madya	-	79	85	93	103	116	128
			- Utama	-	-	-	2	3	5	6
		10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan;	Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun) (Kg)	32.274,60	33.888,33	35.582,75	37.361,88	39.229,98	41.191,48	43.251,05
			Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun) (Ton)	30.963,50	31.273,14	31.582,87	31.901,73	32.220,74	32.542,95	32.868,38
		11. Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah.	Jumlah dan jenis obyek wisata (Lokasi)	13	14	15	16	16	17	17
			Jumlah kunjungan wisatawan (Wisatawan)	50.215	53.741	54.115	54.527	54.979	55.477	56.024



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas	5. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur;	12. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang (%)	52,99	51,32	57,52	60,27	65,40	66,47	66,47
		13. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya (%)	62,15	63,20	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00
			Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung) (Unit)	26	28	31	38	44	50	56
			Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir	27	31	36	41	47	53	59
		14. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat;	Terbangunnya jalan perdesaan (Km)	349,19	160,05	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
			Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan (Unit)	0	2	2	2	2	2	2
			Persentase cakupan air bersih (%)	58,47	59,22	59,97	60,72	61,47	62,22	62,27
			Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%)	58,30	59,50	60,00	61,50	62,00	62,50	63,00
		15. Meningkatnya kualitas perumahan permukiman	Tertatanya rumah sehat dan layak huni (Unit)	297.590	133	100	100	100	100	100
		16. Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat	Cakupan elektrifikasi (%)	70,43	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00
			Terbangunnya jaringan listrik di perkampungan (Kampung)	3.663	36	50	50	50	50	80
			Pemasangan PJU (Titik)	2.357	110	60	60	85	85	85
			Pemeliharaan PJU (Titik)	2.287	600	620	640	660	680	680



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
	6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Transportasi	17. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	Jumlah jenis rambu terpasang :							
			- Rambu-rambu (Unit)	178	75	80	80	80	80	80
			- Lampu lalu lintas (Unit)	4	4	4	4	4	4	4
			- Marka (M ²)	2.352	550	500	500	500	500	500
		18. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun dan terpelihara (Unit)	3	1	1	1	0	0	0
5. Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan	7. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	19. Meningkatnya rehabilitasi lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Hektar)	650	50	400	400	400	400	400
		20. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air	Meningkatnya daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang direhabilitasi :							
			- Mata air (Unit)	41	10	10	10	10	10	10
			- Bendungan (Unit)	12	2	2	2	2	2	2
			- Sempadan sungai (Km)	16	2	2	2	2	2	2



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *
		21. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas;	Tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL	3	5	7	10	13	16	17
		22. Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah	Persentase penanganan sampah (%)	27,15	28,57	28,57	32,14	35,71	42,86	45,00
		23. Pengendalian dan pemanfaatan ruang;	Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%)	40	40	40	40	40	40	40
	8. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	24. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	N/A	80	82	84	86	88	90
			Cakupan penanggulangan korban bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan) (Kali)	28	20	15	13	12	10	10



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2013)	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *	
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah	25. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;	Tingkat penegakan perda (%)	N/A	90	85	90	90	90	90	
			Tingkat ketertiban dan ketentraman masyarakat (%)	86,00	88,00	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
			Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat) (%)	81,00	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	
		26. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat	Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) (Kegiatan)	2	2	2	2	2	2	2	2
			Terselenggaranya kegiatan keagamaan (Kegiatan)	2	2	4	4	5	5	5	
			Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan (Unit)	428	20	20	20	20	20	20	
			Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas)	0	50	75	100	120	150	150	

Keterangan: * (target masa transisi)



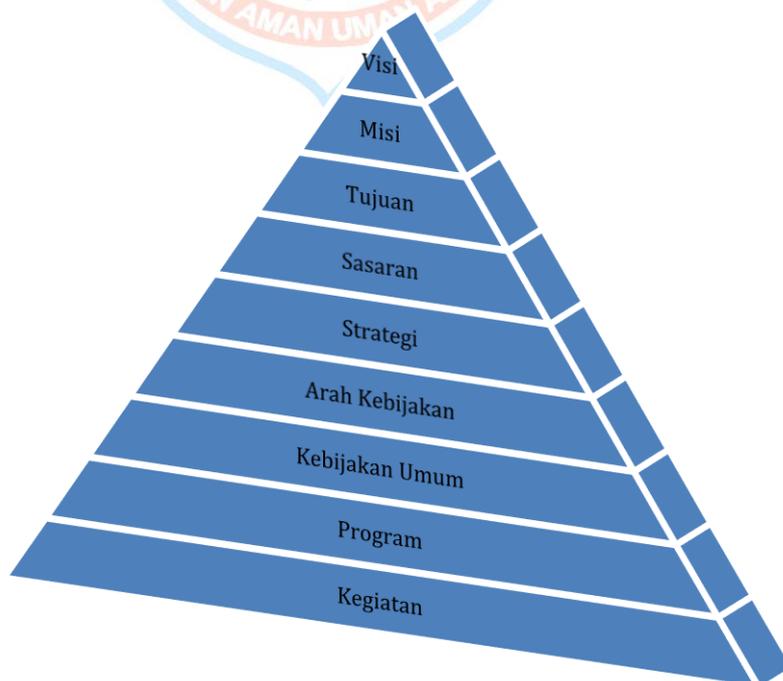
BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya adalah cara atau sejumlah cara yang direncanakan dengan sangat teliti dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari setiap misi yang telah ditetapkan. Karenanya, strategi disusun guna memastikan bahwa masing-masing misi yang telah dirumuskan tersebut dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan pemahaman tersebut maka strategi dikembangkan sesuai dengan misi yang hendak dilaksanakan guna mencapai visi yang diharapkan. Demikian pula dengan arah kebijakan, yang pada dasarnya merupakan arah atau tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan.

Gambaran tentang relasi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat dianalogikan secara grafis sebagai berikut :

Gambar 6.1
**Relasi Hierarkis Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi, Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Program dan Kegiatan**





6.1. Strategi

Berdasarkan pengertian dan kerangka logis pada gambar 6.1, maka strategi pembangunan Kabupaten Lebak dalam RPJMD Tahun 2014-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan;
- 2) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata;
- 3) Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
- 4) Optimalisasi pembinaan kepemudaan dan olah raga;
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan penerapan nilai-nilai budaya lokal;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan;
- 7) Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tata pemerintahan dan pelayanan publik yang prima;
- 8) Menciptakan Iklim usaha yang kondusif;
- 9) Meningkatkan status ketahanan pangan dan pengembangan Perekonomian masyarakat;
- 10) Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang;
- 11) Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
- 12) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat;
- 13) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
- 14) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 15) Menjaga daerah resapan air sebagai modal ekonomi daerah;
- 16) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- 17) Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
- 18) Meningkatkan ruang terbuka hijau;



- 19) Meningkatkan kesiap siagaan dalam penanggulangan bencana;
- 20) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik dan toleransi kehidupan beragama untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

6.2. Arah Kebijakan

Pelaksanaan kedua puluh dua strategi diatas diarahkan pada pencapaian sasaran antara atau sasaran tahunan dalam periode implementasi RPJMD ini, yaitu sebagai berikut :

1. Tahun pertama (~~Tahun Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kualitas Kinerja Birokrasi~~)

Arah kebijakan pada tahun pertama RPJMD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 diarahkan untuk memperluas cakupan pemenuhan pelayanan dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi kartu sehat, kartu pintar dan kartu sejahtera; penyediaan sarana dan prasarana pendukung prioritas yang berkualitas; peningkatan akses masyarakat terhadap penyedia layanan, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, penataan ruang terbuka bagi masyarakat, peningkatan perlindungan sosial serta mengembangkan kemitraan dan peran serta para pihak dalam pembangunan.

Upaya tersebut dilaksanakan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang menjadi pilar penting pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebak melalui upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, peningkatan upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Penataan pada seluruh sektor pembangunan juga perlu dilakukan sebagai persiapan guna menghadapi periode pembangunan ke depan yang akan berjalan dengan lebih pesat.



2. Tahun kedua (Tahun Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Penguatan Perekonomian Daerah)

Arah kebijakan pada tahun kedua RPJMD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 diarahkan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan dasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berdaya saing, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, mendorong penyediaan sarana prasarana yang mendukung terselenggaranya pelayanan dasar yang berkualitas, meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang bersih, efektif dan efisien, serta menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan seiring dengan upaya penguatan perekonomian daerah yang menjadi pendukung penting pencapaian kualitas pelayanan dasar melalui pengembangan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses masyarakat pada kelembagaan keuangan, serta penguatan peran serta para pihak dalam pembangunan.

3. Tahun ketiga (Tahun Pemantapan Perekonomian Daerah dan Pengembangan sumber daya Manusia)

Arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga RPJMD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 diarahkan untuk melanjutkan upaya pembangunan tahun kedua dengan terus memantapkan perekonomian daerah agar menjadi penopang utama perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Penyediaan sarana prasarana pendukung upaya pemantapan perekonomian daerah menjadi fokus pembangunan tahun ketiga terutama sarana prasarana yang menjadi pendorong bagi masuknya modal pihak swasta seperti jaringan jalan, jaringan listrik dan ketersediaan air bersih, dengan didukung oleh peningkatan pelayanan



transportasi, serta perumahan dan pemukiman dengan tetap memperhatikan upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

Upaya tersebut dilaksanakan seiring dengan upaya mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia, dan peningkatan upaya perlindungan sosial.

4. Tahun Keempat (Tahun Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan kualitas pembangunan daerah)

Arah kebijakan pada tahun keempat RPJMD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 diarahkan untuk memperkuat perekonomian Kabupaten Lebak melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul dan kesejahteraan masyarakat.

Tahun keempat ini juga diarahkan untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector dan dengan pengembangan sinergitas pilar-pilar pembangunan daerah melalui perwujudan pelayanan prima, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan agar terwujud pembangunan daerah yang berkualitas.

5. Tahun kelima (Tahun Evaluasi dan Inovasi)

Arah kebijakan pada tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 diarahkan sebagai tahap konsolidasi untuk memastikan pencapaian



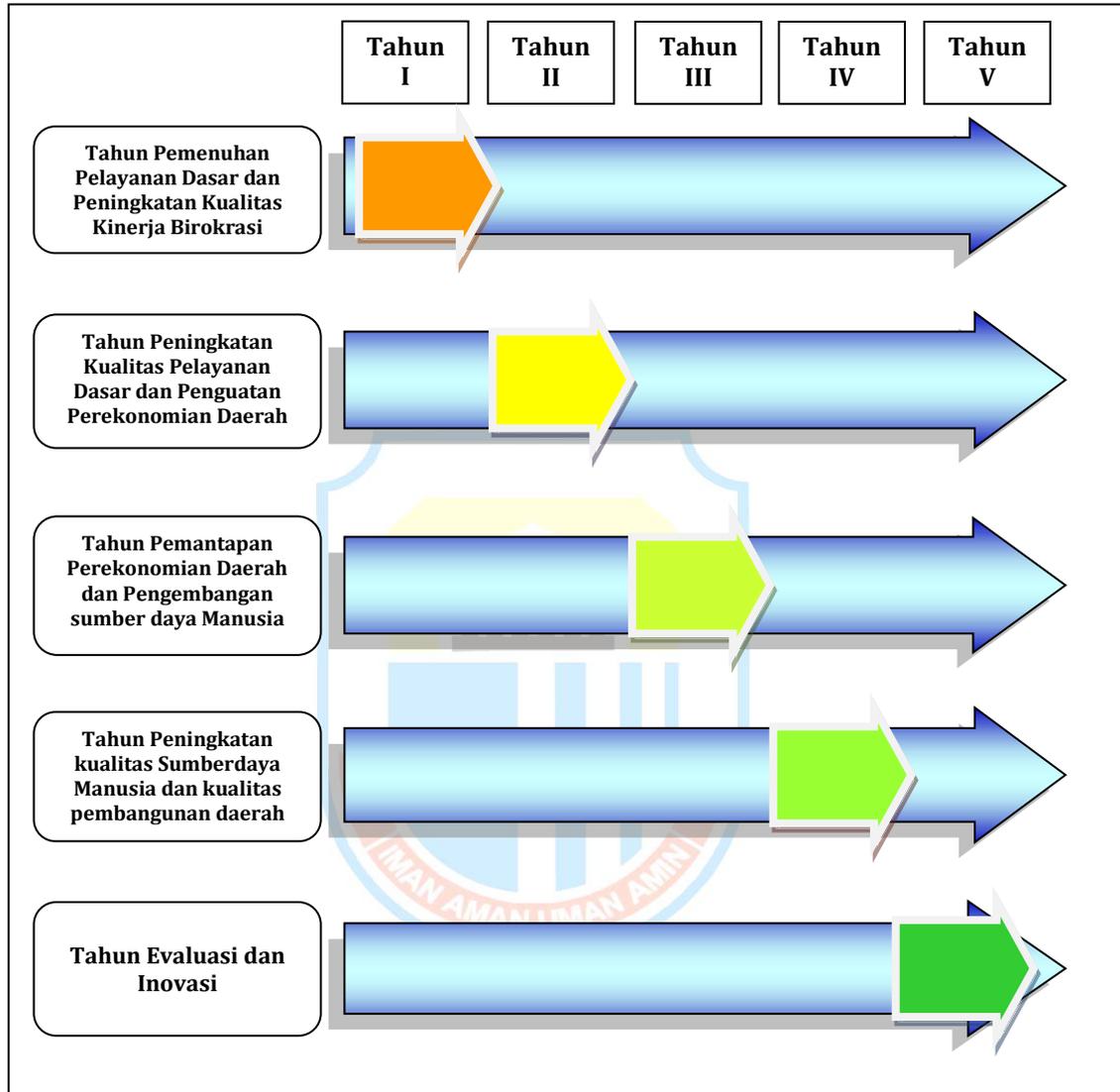
sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir. Fokus pembangunan tersebut dilaksanakan dengan berbagai inovasi mendasar bagi pencapaian target kinerja pada sisa waktu yang tersedia. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar bagi penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada RPJMD berikutnya.





Gambar 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2018



Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan dalam konteks substansi urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab daerah dirumuskan dalam bentuk matriks di bawah ini guna memberikan gambaran tentang relasinya dengan sasaran, tujuan, misi, serta visi yang mendasarinya.



Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI <i>“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”</i>				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar 2. Membangun sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan kompetitif dengan tetap mempertahankan ciri masyarakat yang santun berbudaya	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata 2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata 3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia 4. Meningkatnya peran pemuda dan olahraga 5. Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal	1. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan 2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata 3. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan 4. Optimalisasi pembinaan kepemudaan dan olah raga 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan penerapan nilai-nilai budaya lokal	1. Tahun Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kualitas Kinerja Birokrasi. 2. Tahun Pemantapan Perekonomian Daerah dan Pengembangan sumber daya Manusia. 3. Tahun Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan kualitas pembangunan daerah. 4. Tahun Evaluasi dan Inovasi.



VISI

“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan	6. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi Pelayanan Publik	3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan	7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	7. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tata pemerintahan dan pelayanan publik yang prima	1. Tahun Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Kualitas Kinerja Birokrasi. 2. Tahun Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan kualitas pembangunan daerah. 3. Tahun Evaluasi dan Inovasi.
3. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	4. Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan	8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi 9. Meningkatnya Ketahanan pangan Daerah 10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan 11. Tumbuhnya Industri Pariwisata unggulan daerah	8. Menciptakan Iklim usaha yang kondusif 9. Meningkatkan Status Ketahanan pangan Daerah dan Pengembangan Perekonomian masyarakat	1. Tahun Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Penguatan Perekonomian Daerah. 2. Tahun Pemantapan Perekonomian Daerah dan Pengembangan sumber daya Manusia. 3. Tahun Evaluasi dan Inovasi.



VISI

“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemanfaatan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Strategis Wilayah yang berkualitas	5. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur 6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas infrastruktur Transportasi	12. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan 13. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat 14. Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana dasar masyarakat 15. Meningkatnya Kualitas Perumahan Permukiman 16. Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat 17. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ 18. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	10. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang 11. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air 12. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat 13. Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan	1. Tahun Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Penguatan Perekonomian Daerah. 2. Tahun Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan kualitas pembangunan daerah. 3. Tahun Evaluasi dan Inovasi.



VISI

“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemanfaatan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5. Menjaga Keseimbangan Fungsi Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan	7. Meningkatkan kelestarian lingkungan 8. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	19. Meningkatnya rehabilitasi lahan 20. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air 21. Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas 22. Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah 23. Pengendalian dan pemanfaatan ruang 24. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	14. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 15. Menjaga daerah resapan air sebagai modal ekonomi daerah 16. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 17. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 18. Meningkatkan ruang terbuka hijau 19. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	1. Tahun Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan kualitas pembangunan daerah. 2. Tahun Evaluasi dan Inovasi.
6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah	9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah	25. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	20. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik dan toleransi kehidupan beragama untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	1. Tahun Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan kualitas pembangunan daerah. 2. Tahun Evaluasi dan Inovasi.



VISI

“Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		26. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat		





BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan Umum dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta sasaran dan tujuan yang merupakan operasionalisasi dari visi dan misi yang hendak dicapai dalam RPJMD ini. Berdasarkan kebijakan umum tersebut kemudian dirumuskan program pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam menjabarkan rencana kerja di setiap satuan kerja setiap tahunnya. Program pembangunan daerah inilah yang kemudian menjadi payung program atau kegiatan di tingkat SKPD tersebut.

Atas pengertian dan pemahaman di atas maka kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun mendatang di Kabupaten Lebak dapat diuraikan sebagai berikut :

7.1. Kebijakan Umum

Misi 1 :

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Sasaran 1, Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata, ditempuh melalui kebijakan umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendidikan usia dini, yang didukung oleh program prioritas Pendidikan Usia Dini;
2. Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, yang didukung oleh program prioritas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, yang didukung oleh program prioritas Pendidikan Menengah;



4. Penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa yang tidak mampu pada jenjang pendidikan menengah, yang didukung oleh program prioritas Pendidikan Menengah;
5. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, yang didukung oleh program prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
6. Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal, yang didukung oleh program pendukung Pendidikan Non Formal.

Sasaran 2, Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata, ditempuh melalui kebijakan umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah kualitas sarana dan prasarana kesehatan, yang didukung oleh program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
 - b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
 - c. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; serta
 - d. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, yang didukung oleh program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
 - b. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
 - c. Program perbaikan gizi masyarakat;
 - d. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Program Pengembangan lingkungan sehat; serta



- g. program standarisasi pelayanan kesehatan;
3. Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, didukung oleh program prioritas upaya kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB, yang didukung oleh program prioritas Keluarga Berencana, pelayanan kontrasepsi, Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat dan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.

Sasaran 3, Meningkatkan daya saing sumber daya manusia, ditempuh melalui kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing tenaga kerja, yang didukung oleh program prioritas Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
2. Peningkatan penempatan tenaga kerja, yang didukung oleh program prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui pola pembangunan padat karya di berbagai sektor, yang didukung oleh program prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja;
4. Perlindungan pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja, yang didukung oleh program prioritas Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
5. Mengadakan kerjasama dengan beberapa daerah lain yang potensial untuk 5 tahun ke depan, yang didukung oleh program prioritas pengembangan wilayah Transmigrasi dan transmigrasi lokal;
6. Memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS, yang didukung oleh program prioritas Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
7. Mengembangkan KUBE, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi PMKS serta pemberian santunan orang terlantar, yang didukung



oleh program prioritas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;

8. Meningkatkan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS, yang didukung oleh program prioritas Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) serta Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Sasaran 4, Meningkatkan peran pemuda dan olahraga dengan kebijakan umum meningkatnya pembinaan dan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga. Guna mendukung ketercapaian sasaran 4 ditetapkan 3 program prioritas yaitu, Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Sasaran 5, Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal dengan kebijakan umum :

1. Perekrutan tenaga pemelihara benda cagar budaya dari masyarakat setempat, yang didukung oleh program prioritas pengembangan nilai budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya;
2. Promosi dan penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya lokal, yang didukung oleh program prioritas pengelolaan keragaman budaya.

Sasaran 6, Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan dengan kebijakan umum membangun perpustakaan daerah yang terintegrasi dengan berbagai layanan pendidikan yang lain. Program prioritas yang dilaksanakan guna mendukung sasaran 6 ini adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.



Misi 2 :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Pelayanan Publik.

Sasaran 7, Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditempuh melalui kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan daerah, yang didukung oleh program prioritas Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial dan Budaya dan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
2. Peningkatan pengelolaan satu pintu data pembangunan, yang didukung oleh program prioritas Pengembangan Data/Informasi;
3. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, yang didukung oleh program pendukung Penataan peraturan perundang-undangan;
4. Peningkatan kerjasama kemitraan antara kabupaten/ kota, yang didukung oleh dengan program prioritas Kerjasama Pembangunan;
5. Penataan struktur organisasi pemerintahan daerah, yang didukung oleh program prioritas pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi daerah;
6. Peningkatan pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang didukung oleh program prioritas Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
7. Meningkatnya pengawasan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang didukung oleh program prioritas Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
8. Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program prioritas Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Penyelamatan



dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;

9. Peningkatan koordinasi dalam menyelesaikan aset-aset, yang didukung oleh program prioritas Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan;
10. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
11. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi, yang didukung oleh program prioritas Peningkatan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
12. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian daerah, yang didukung oleh program prioritas Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peningkatan kinerja pemerintahan desa, yang didukung oleh program prioritas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
14. Optimalisasi penataan dan pengelolaan administrasi, yang didukung oleh program prioritas Penataan Administrasi Kependudukan.

Misi 3 :

Meningkatkan Perekonomian yang Kokoh Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Sasaran 8, Meningkatnya kualitas dan kuantitas investasi dilaksanakan melalui kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan nilai investasi, yang didukung oleh program prioritas Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,



- serta Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
2. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, yang didukung oleh program prioritas Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, serta Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
 3. Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, yang didukung oleh program prioritas Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 4. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Pasar-pasar Desa dan Tradisional, yang didukung oleh program prioritas peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
 5. Penataan Pasar berskala Besar agar lebih representatif, yang didukung oleh program prioritas peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
 6. Peningkatan pengawasan harga dan alur distribusi Barang dan Jasa, yang didukung oleh program prioritas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
 7. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri, yang didukung oleh program prioritas Pengembangan Industri kecil dan menengah;
 8. Peningkatan Produksi dan Kualitas Produksi unggulan, yang didukung oleh program prioritas Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
 9. Peningkatan Produksi hasil laut selain ikan, yang didukung oleh program prioritas optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Sasaran 9, Meningkatnya ketahanan pangan daerah, ditempuh melalui kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pangan, yang didukung oleh program prioritas Peningkatan



Ketahanan Pangan (pertanian / Perkebunan).

2. Menjaga luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang didukung oleh program prioritas peningkatan penerapan teknologi pertanian, peningkatan produksi Peternakan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, pengembangan budidaya perikanan, pengembangan sistem perikanan tangkap, serta Program pemberdayaan penyuluh petani / perkebunan ternak.

Sasaran 10, Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan dengan kebijakan umum :

1. Pengembangan usaha hasil hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dengan program prioritas pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
2. Pengembangan hasil produksi perkebunan dengan program prioritas peningkatan produksi pertanian / perkebunan.

Sasaran 11, Tumbuhnya industri pariwisata unggulan daerah dengan kebijakan umum yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong seni dan budaya menjadi objek wisata potensial dengan program prioritas pengembangan destinasi pariwisata;
2. Penciptaan rekayasa objek pariwisata yang inovatif dan kreatif dengan program prioritas pengembangan destinasi pariwisata;
3. Peningkatan promosi dan kreatifitas untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dengan program prioritas pengembangan pemasaran pariwisata;
4. Peningkatan dukungan infrastruktur pada sentra-sentra objek wisata dengan program prioritas pengembangan pemasaran pariwisata.



Misi 4 :

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Strategis Wilayah yang Berkualitas.

Sasaran 12, Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan dengan kebijakan umum peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Sasaran ini didukung oleh dua program prioritas yaitu:

1. Pembangunan jalan dan jembatan;
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

Sasaran 13, Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat dengan kebijakan umum :

1. Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi dengan program prioritas pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya serta Program pengendalian banjir;
2. Peningkatan konservasi sumber daya air dengan program prioritas pengembangan, Pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

Sasaran 14, Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat dengan kebijakan umum peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perdesaan. Sasaran ini didukung oleh dua program prioritas yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur perdesaan;
2. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
3. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.



Sasaran 15, Meningkatnya kualitas perumahan permukiman dengan kebijakan umum pengembangan lingkungan permukiman sehat, dengan program prioritas pengembangan perumahan.

Sasaran 16, Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat dengan kebijakan umum :

1. Peningkatan cakupan pelayanan listrik perkampungan;
2. Peningkatan jumlah PJU terpasang.

Kedua kebijakan umum tersebut didukung oleh program prioritas pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

Sasaran 17, Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ dengan kebijakan umum pengadaan dan pemasangan marka, rambu-rambu dan lampu lalu lintas di lokasi rawan dan belum ada. Sasaran ini didukung oleh program prioritas pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Sasaran 18, Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dengan kebijakan umum peningkatan sarana dan prasarana perhubungan. Sasaran ini didukung oleh dua program prioritas yaitu :

1. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
2. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;

Misi 5 :

Menjaga Keseimbangan Fungsi Lingkungan dan Pembangunan yang Berkelanjutan.

Sasaran 19, Meningkatnya rehabilitasi lahan ditempuh melalui kebijakan umum implementasi pembangunan berkelanjutan. Sasaran ini didukung oleh program prioritas rehabilitasi hutan dan lahan.



Sasaran 20, Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air dengan kebijakan umum implementasi pembangunan berkelanjutan. Sasaran ini didukung oleh program prioritas perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Sasaran 21, Terjaganya tingkat cemaran sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas dengan kebijakan umum implementasi pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pada sasaran 21 ini didukung oleh program prioritas Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Sasaran 22, Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah dan limbah dengan kebijakan umum yang dilaksanakan yaitu implementasi pembangunan berkelanjutan. Program prioritas yang dilaksanakan guna mendukung kebijakan ini adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Sasaran 23, Pengendalian dan pemanfaatan ruang dengan kebijakan umum yang dilaksanakan yaitu implementasi pembangunan berkelanjutan dengan program prioritas yang dilaksanakan adalah Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sasaran 24, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang didukung oleh kebijakan umum sebagai berikut :

1. Pembentukan relawan bencana diutamakan pada daerah rawan bencana; serta
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam kondisi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Kedua kebijakan umum tersebut dilaksanakan melalui program prioritas pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.



Misi 6 :

Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.

Sasaran 25, Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ditempuh melalui kebijakan umum :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan yang dilaksanakan melalui program prioritas peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2. Peningkatan pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta satuan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan melalui program prioritas Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal serta Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

Sasaran 26, Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat dengan dukungan kebijakan umum Peningkatan toleransi dalam kehidupan beragama serta dilaksanakan melalui program prioritas Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

7.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 berjumlah 153 program yang terbagi kedalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, adalah sebagai berikut :

URUSAN WAJIB

1. Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Non Formal
- e. Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan



- f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Kesehatan

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- k. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- l. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- n. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

3. Pekerjaan Umum

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- e. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah



- g. Program Pengendalian Banjir
- h. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- i. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

4. Perumahan

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

5. Penataan Ruang

- a. Program Perencanaan Tata Ruang
- b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6. Perencanaan Pembangunan

- a. Program Pengembangan Data/Informasi
- b. Program Kerjasama Pembangunan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- f. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

7. Perhubungan

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- e. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor



8. Lingkungan Hidup

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- f. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
- g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

9. Pertanahan

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Program Keluarga Berencana
- b. Program Pelayanan Kontrasepsi



- c. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
- d. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- e. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

13. Sosial

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

14. Tenaga Kerja

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi



16. Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

17. Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

18. Pemuda dan Olahraga

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- b. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- b. Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- g. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- h. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam



20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- f. Program Peningkatan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- g. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- i. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- j. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- k. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- l. Program Pemerintahan Umum Daerah
- m. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
- n. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- o. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan



22. Statistik

- a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

23. Kearsipan

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

24. Komunikasi dan Informatika

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- b. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

URUSAN PILIHAN

1. Pertanian

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / Perkebunan)
- c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- e. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan
- f. Program pemberdayaan penyuluh petani / perkebunan ternak
- g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- h. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- i. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- j. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan



2. Kehutanan

- a. Program pemanfaatan potensi sumber Daya Hutan
- b. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- c. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

3. Energi dan Sumberdaya Mineral

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
- b. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- c. Program Penelitian dan Pengendalian Geologi dan Air Tanah

4. Pariwisata

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

5. Kelautan dan Perikanan

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- c. Program pengembangan budidaya perikanan
- d. Program pengembangan sistem perikanan tangkap
- e. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
- f. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- g. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
- h. Program Perencanaan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan

6. Perdagangan

- a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- b. Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri



7. Perindustrian

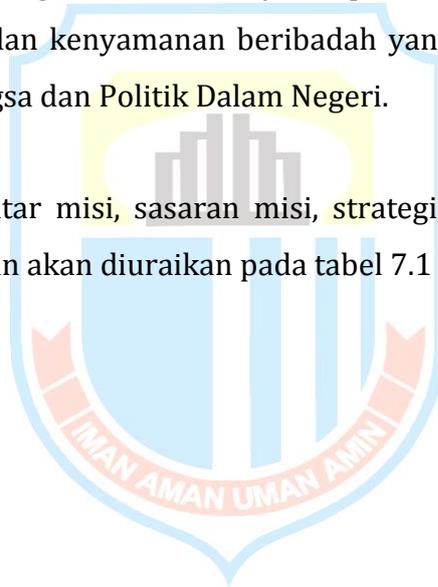
- a. Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah
- b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

8. Transmigrasi

- a. Program pengembangan wilayah Transmigrasi
- b. Program Transmigrasi lokal

Salah satu urusan wajib mengenai keagamaan merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya berperan dalam penciptaan iklim kondusif, keamanan dan kenyamanan beribadah yang dilaksanakan melalui urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Keterkaitan antar misi, sasaran misi, strategi, kebijakan umum dan program pembangunan akan diuraikan pada tabel 7.1 berikut.





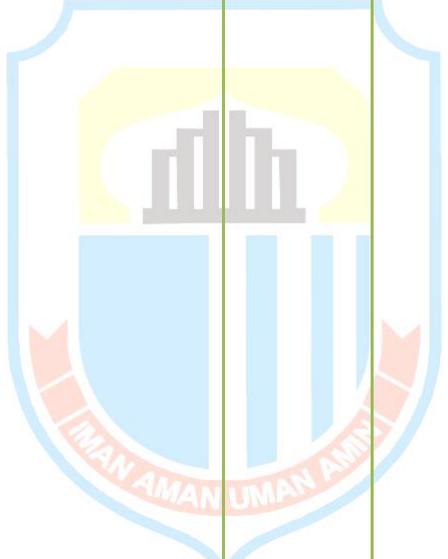
Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Misi 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia								
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang terjangkau dan merata	1. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan	1. Meningkatkan pendidikan usia dini	APK PAUD	21,15%	25,90%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			APK SLTP	98,78%	99,77%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		2. Peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar	APM SD/MI	98,73%	98,98%			
			APM SLTP	84,93%	86,00%			
			APS SD	99,83%	99,93%			
			APS SLTP	99,29%	99,39%			
			Angka Putus Sekolah SD	0,20%	0,10%			
			Angka Putus Sekolah SLTP	0,73%	0,63%			
			Angka Kelulusan SD	95,63%	98,13%			
			Angka Kelulusan SLTP	99,67%	99,92%			
			Angka Melanjutkan dari SD ke SLTP	94,42%	94,77%			
Angka Melanjutkan dari SLTP ke SLTA	86,45%	87,95%						



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		3. Peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah	APK SLTA	56,05%	63,00%	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			APM SLTA	45,09%	59,18%			
			APS SLTA	99,77%	99,85%			
			Angka Putus Sekolah SLTA	0,60%	0,50%			
		4. Penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa yang tidak mampu pada jenjang pendidikan menengah	Angka Kelulusan SLTA	98,64%	98,79%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,29 Tahun	6,46 Tahun			
5. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	6.336 orang	7.790 orang	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Sekretariat Daerah		
6. Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal	Angka Melek Huruf	98,10%	98,66%					



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata	2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Kesehatan	RSUD
						Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Kesehatan	RSUD
						Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematiaan Ibu (AKI)	157,00 / 100.000 KH	135,00 / 100.000 KH	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB)	24,64/ 1.000 KH	20,00 / 1.000 KH					



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	81,08%	95,00%			
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	78,25%	95,00%			
			Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	82,00%	95,00%			
			Cakupan pelayanan anak balita	67,41%	90,00%			
			Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	63,35 Tahun	63,48 Tahun	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,65%	0,55%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%			
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	66,38%	100%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular	61,00%	86,67%			
			Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita	12%	60,00%			
			Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%			
			Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%			



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Kejadian Infeksi Pasca Operasi	1,50%	1,30%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	RSUD
			Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	65%	98%			
			Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS / BTLS/ACLS/PPGD	100%	100%			
			Kepuasan pelayanan RSUD	70,26%	85%			
		3. Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%			
		4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	64,22%	67,00%	Program Keluarga Berencana	KB dan KS	BPPKB



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	10,27%	6,77%	Program Pelayanan Kontrasepsi	KB dan KS	BPPKB
			Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	12,19%	9,69%			
			Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	30,05%	85,55%			
			Jumlah kelompok bina keluarga : - Bina Keluarga Balita (BKB)	369 kelompok	379 kelompok	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	KB dan KS	BPPKB
			- Bina Keluarga Remaja (BKR)	199 kelompok	209 kelompok			
			- Bina Keluarga Lansia (BKL)	249 kelompok	259 kelompok	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR	KB dan KS	BPPKB



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	3. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan	1. Peningkatan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,52%	6,30%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Nakerosos
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	40 Orang	32 Orang			
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	13 orang	874 orang			
		2. Peningkatan penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	250 orang	1.500 orang	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Nakerosos
		3. Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui pola pembangunan padat karya di berbagai sektor	Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui Padat Karya	0 desa	345 desa			



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		4. Perlindungan, pengawasan dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja				Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Dinas Nakeros
		5. Mengadakan Kerjasama dengan beberapa daerah lain yang potensial untuk 5 tahun ke depan	Jumlah Transmigrasi Umum	22 orang	200 orang	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Transmigrasi	Dinas Nakeros
		6. Memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	29,16%	51,00%	Program pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Sosial	Dinas Nakeros
		7. Mengembangkan KUBE, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi PMKS serta pemberian santunan orang terlantar	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	30,10%	41,08%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Nakeros



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	26,15%	42,00%	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Sosial	Dinas Nakersos
		8. Meningkatkan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS	Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	5 kelompok	69 kelompok	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Nakersos
			Jumlah penerima manfaat kartu sejahtera	0	32.720 Orang	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Sosial	Dinas Nakersos



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
4. Meningkatnya peran pemuda dan olahraga	4. Optimalisasi pembinaan kepemudaan dan olah raga	Meningkatkan pembinaan dan kualitas sarana dan prasarana	Jumlah pemuda mendapatkan pembinaan	N/A	700 pemuda	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pemuda & Olahraga	Dinas Porapar
			Jumlah penyelenggaraan event olah raga	5 Event/Tahun	2 Event/Tahun	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda & Olahraga	Dinas Porapar
			Pembinaan atlet berprestasi	0 Atlet	40 Atlet	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemuda & Olahraga	Dinas Porapar
5. Terpelihara dan termanfaatkannya benda cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal	5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya dan penerapan nilai-nilai budaya lokal	1. Perekrutan tenaga pemelihara benda cagar budaya dari masyarakat setempat	Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya	0	100%	Program pengembangan nilai budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan			
		2. Promosi dan penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya lokal	Jumlah event budaya	9 event	10 event	Program pengelolaan keragaman budaya	Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan	6. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan	Membangun perpustakaan daerah yang terintegrasi dengan berbagai layanan pendidikan yang lain	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	N/A	18.000 pengunjung	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Jumlah perpustakaan milik daerah	1 unit	1 unit			
Misi 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Pelayanan Publik								
7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	7. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tata pemerintahan dan pelayanan publik yang prima	1. Peningkatan kualitas perencanaan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen	2 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP	1 dokumen	5 dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	89,73%	92,00%	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
					Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	
		2. Peningkatan pengelolaan satu pintu data pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Skala 3	Skala 3	Program Pengembangan Data/Informasi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		3. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian	Sekretariat Daerah
		4. Peningkatan Kerjasama Kemitraan antara kabupaten / kota				Program Kerjasama Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		5. Penataan struktur organisasi pemerintahan daerah				Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		6. Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat Kabupaten
		7. Meningkatkan pengawasan kualitas pelayanan kepada masyarakat				Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat Kabupaten

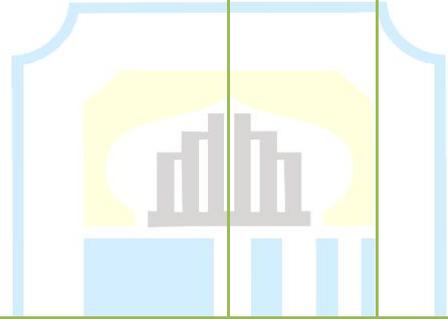


Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		8. Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		90,00%	100,00%	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				Kearsipan	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Kearsipan	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah						
		9. Peningkatan koordinasi dalam menyelesaikan aset-aset	Tertatanya aset daerah	90,00%	100,00%	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Opini audit BPK	WDP	WTP	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
		10. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan	Sistem Informasi Manajemen Pemda	4 aplikasi	7 aplikasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
		11. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah berdasarkan standar kompetensi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan	403 orang	496 orang	Program Peningkatan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Dae-	Inspektorat Kabupaten



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
							rah, Kepegawaian dan Persandian	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD, Kantor Diklat
			Jumlah aparatur yang terbina	11.091 orang	11.395 orang	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
		12. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan	Rasio Kemandirian Daerah	N/A	24,89%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi	DPPKD



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		kemandirian daerah					Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
			Jumlah prasarana aparatur pemerintah terbangun dan tertata	24 Unit	40 Unit	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Non Urusan	Dinas Cipta Karya
		13. Peningkatan kinerja pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	30 unit	75 unit	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
			Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan	340 orang	670 orang	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		14. Optimalisasi penataan dan pengelolaan administrasi	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	77,06%	86,00%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan & Capil	Dinas Kependudukan & Capil
			Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	78,00%	87,50%			
			Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	33,00%	52,00%			



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Ketersediaan database kependudukan	92,00%	98,00%			
Misi 3. Meningkatkan Perekonomian yang Kokoh Berbasis Ekonomi Kerakyatan								
8. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Investasi	8. Menciptakan Iklim Usaha yang kondusif	1. Peningkatan Jumlah dan Nilai Investasi	Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional	8,57 trilyun	5 trilyun	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	BMPPT
			Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional :			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	BMPPT
			- PMDN	894 perusahaan	908 perusahaan			
		- PMA	5 perusahaan	10 perusahaan				
			Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi	30%	80%			
		2. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi aktif	671 unit	771 unit	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi & UKM	Dinas Koperasi & UKM



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah : - Usaha Mikro - Usaha Kecil - Usaha Menengah	48.892 unit 785 unit 9 unit	50.132 unit 885 unit 19 unit	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi & UKM	Dinas Koperasi & UKM
		3. Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk & pembiayaan bagi Koperasi & UMKM				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi & UKM	Dinas Koperasi & UKM
		4. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Pasar-pasar Desa dan Tradisional	Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah	2 unit	8 unit	Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan	Dinas Perindag
		5. Penataan Pasar berskala Besar agar lebih representatif						
		6. Peningkatan pengawasan harga dan alur distribusi Barang dan Jasa				Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	Dinas Perindag



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		7. peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan antar industri	Jenis dan jumlah industri menengah: - Jenis industri - Jumlah industri	20 jenis 24 unit	24 jenis 38 unit	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Perindag
		8. Peningkatan Produksi dan Kualitas Produksi unggulan	Jenis dan jumlah industri kecil : - Jenis industri - Jumlah industri	18 jenis 15.298 unit	26 jenis 16.744 unit	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Perindustrian	Dinas Perindag
		9. Peningkatan Produksi hasil laut selain ikan	Konsumsi ikan	14,41 kg per kapita	18,04 kg per kapita	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kelautan & Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan
9. Meningkatnya Ketahanan pangan Daerah	9. Meningkatkan Status Ketahanan pangan Daerah dan Pengembangan Perekonomian masyarakat	1. Peningkatan akses dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok : - Padi - Palawija - Hortikultura	539.349 ton 31.932,00 ton 166.708, ton	595.484,8 ton 35.255,51 ton 184.059,1 ton	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / Perkebunan)	Pertanian	Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, BP4K



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		2. Menjaga luas lahan pertanian pangan berkelanjutan	Daerah rawan pangan	9 kec.	1 kec.	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Dinas Peternakan
			Sentra kawasan unggulan	0 lokasi	4 lokasi			
			Produksi Daging	7.812.487 kg	9.316.869 kg	Program peningkatan produksi Hasil Peternakan	Pertanian	Dinas Peternakan
						Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pertanian	Dinas Peternakan
			Produksi ikan budidaya	3.535,40 ton	3.588,00 ton	Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan & Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan
			Produksi ikan tangkap	4.735,36 ton	6.012,93 Ton	Program pengembangan sistem perikanan tangkap	Kelautan & Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan
			Cakupan Bina Kelompok Tani			Program pemberdayaan penyuluh petani / perkebunan ternak	Pertanian	BP4K
- Pemula	0 kelompok	1.300 Kelompok						
- Lanjut	0 kelompok	996 Kelompok						
- Madya	0 kelompok	116 kelompok						
- Utama	0 kelompok	5 kelompok						



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
10. Meningkatnya hasil produksi perkebunan dan kehutanan		1. Pengembangan usaha hasil hutan dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan	Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Tahunan)	32.274,60 kg	41.191,48 kg	Program pemanfaatan potensi sumber Daya Hutan	Kehutanan	Dinas Hutbun
		2. Pengembangan hasil produksi perkebunan	Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % tahunan)	30.963,50 ton	32.542,95 ton	Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Pertanian	Dinas Hutbun
11. Tumbuhnya Industri Pariwisata unggulan daerah		1. Mendorong Seni dan Budaya menjadi objek wisata potensial	Jumlah dan jenis obyek wisata	13 lokasi	17 lokasi	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Porapar
		2. Penciptaan rekayasa objek pariwisata yang inovatif dan kreatif						
		3. Peningkatan promosi dan kreatifitas untuk meningkatkan daya tarik pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	50.215 wisatawan	55.477 wisatawan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Porapar



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		4. Peningkatan dukungan infrastruktur pada sentra - sentra objek wisata						
Misi 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Strategis Wilayah yang Berkualitas								
12. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan	10. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	52,99%	66,47%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga
			Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	97,10%	100,00%	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga
13. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	11. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air & irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air	1. Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	62,15%	71,00%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas SDA



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir	27 lokasi	26 lokasi	Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum	Dinas SDA
		2. Peningkatan konservasi sumber daya air	Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung)	26 Unit	50 Unit	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas SDA
14. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar masyarakat	12. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perdesaan	Terbangunnya jalan perdesaan	349,19 km	640,05 km	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pekerjaan Umum	Dinas Bina Marga
			Persentase cakupan air bersih	58,47%	62,22%			Dinas Cipta Karya
			Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun & tertata di kecamatan	0 unit	10 unit	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pekerjaan Umum	Dinas Cipta Karya
			Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	58,30%	62,50%	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas Cipta Karya
15. Meningkatnya Kualitas Perumahan Permukiman		Pengembangan lingkungan permukiman sehat	Tertatanya rumah sehat dan layak huni	279.590 unit	298.123 unit	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	Dinas Cipta Karya



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab			
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir						
16. Meningkatnya pemenuhan listrik masyarakat		1. Peningkatan cakupan pelayanan listrik perkampungan	Cakupan elektrifikasi	70,43%	82,00%	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Energi & Sumber Daya Mineral	Dinas Tamben			
				2. Peningkatan jumlah PJU terpasang	Terbangunnya jaringan listrik di perkampungan				3.663 kampung	3.899 kampung	
									Pemasangan PJU	2.357 titik	2.757 titik
									Pemeliharaan PJU	2.287 titik	3.200 titik
17. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ	13. Meningkatkan kualitas sarana prasarana Perhubungan	Pengadaan dan pemasangan marka, rambu-rambu dan lampu lalu lintas di lokasi rawan dan belum ada	Jumlah jenis rambu terpasang : - Rambu-rambu - Lampu lalu lintas - Marka	178 unit 4 unit 2.352 m'	395 unit 20 unit 4.902 m'	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan			
				18. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan				Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun dan terpelihara	3 unit	6 unit
						Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan			



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Misi 5. Menjaga Keseimbangan Fungsi Lingkungan dan Pembangunan yang Berkelanjutan								
19. Meningkatnya rehabilitasi lahan	14. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Implementasi pembangunan Berkelanjutan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	650 ha	1.650 ha	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Kehutanan	Dinas Hutbun
20. Meningkatnya fungsi daerah tangkapan air	15. Menjaga daerah resapan air sebagai modal ekonomi daerah		Meningkatnya daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang direhabilitasi di sekitar : - Mata air - Bendungan - Sempadan sungai	41 unit /Tahun 12 unit /Tahun 16 km /Tahun	10 unit /Tahun 2 unit /Tahun 2 km /Tahun	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Dinas Hutbun, Badan LH
21. Terjaganya tingkat cemar-an sungai, udara dan air tanah di bawah ambang batas	16. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Tingkat cemar-an sungai, udara dan air tanah	100%	100%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Badan LH
		Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL	3 perusahaan	16 perusahaan				



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
22. Meningkatnya kuantitas pengelolaan sampah dan limbah	17. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan		Persentase penanganan sampah	27,15%	42,86%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan
23. Pengendalian dan pemanfaatan ruang	18. Meningkatkan ruang terbuka hijau		Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak	40%	40%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup	Dinas Hutbun, Badan LH
24. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	19. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	1. Pembentukan relawan bencana diutamakan pada daerah rawan bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	N/A	88%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Satpol PP
		2. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam kondisi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi)	Cakupan penanggulangan korban bencana	100%	100%			BPBD



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 Jam setelah pengaduan)	28 kali	10 kali			Satpol PP
Misi 6. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah								
25. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	20. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik dan toleransi kehidupan beragama untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	1. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan	Tingkat penegakan perda (%)	N/A	90%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol & Linmas, Satpol PP
		2. Peningkatan pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta satuan perlindungan masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat	0 kegiatan	12 kegiatan	Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol & Linmas
			Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)	81,00%	84,00%	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol & Linmas
26. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama di masyarakat		3. Peningkatan toleransi dalam kehidupan beragama	Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama)	2 kegiatan	10 kegiatan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol & Linmas, Sekretariat Daerah



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja	Capain Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Terselenggaranya kegiatan keagamaan	2 kegiatan	20 kegiatan		Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Sekretariat Daerah
			Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan	428 unit	100 unit		Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Sekretariat Daerah
			Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	0 ormas	495 ormas		Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol & Linmas





BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1 Program Prioritas

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka disusunlah program-program prioritas pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang terkandung dalam 6 (enam) misi RPJMD. Program prioritas disusun berdasarkan urusan kewenangan wajib dan pilihan, terdiri dari 20 bidang urusan wajib dengan 87 program pembangunan dan 8 bidang urusan pilihan dengan 20 program pembangunan.

Misi I :

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif.

- 1) **Bidang Pendidikan**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - c. Program Pendidikan Menengah
 - d. Program Pendidikan Non Formal
 - e. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 - f. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- 2) **Bidang Kesehatan**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
 - b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
 - c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat



- d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - e. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - f. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - g. Program Pengembangan Lingkungan sehat
 - h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - i. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - j. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - k. Program peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia
- 3) **Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**, melalui program prioritas sebagai berikut :
- a. Program Keluarga Berencana
 - b. Program Pelayanan Kontrasepsi
 - c. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
 - d. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- 4) **Bidang Ketenagakerjaan**, melalui program prioritas sebagai berikut :
- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- 5) **Bidang Sosial**, melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Program pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - d. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma



- e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- 6) **Bidang Transmigrasi**, melalui program prioritas Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- 7) **Bidang Kepemudaan dan Olahraga**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 - b. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 8) **Bidang Budaya**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program pengembangan nilai budaya
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - c. Program pengelolaan keragaman budaya

Misi II.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik berorientasi Pelayanan Publik

- 1) **Bidang Perencanaan Pembangunan**, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - c. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
 - d. Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
 - e. Program Pengembangan Data/Informasi
 - f. Program Kerjasama Pembangunan



- 2) **Bidang Kependudukan**, dengan program prioritas Penataan Administrasi Kependudukan.

- 3) **Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - c. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - d. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - e. Program Peningkatan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah
 - h. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - i. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 4) **Bidang Pertanahan**, dengan program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - b. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

- 5) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa



- 6) **Bidang Kearsipan**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
 - c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Misi III.

Meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan

- 1) **Bidang Koperasi dan UKM**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - b. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- 2) **Bidang Perdagangan**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- 3) **Bidang Perindustrian**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah
 - b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 4) **Bidang Penanaman Modal**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- 5) **Bidang Pertanian**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / Perkebunan)
 - b. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian
 - c. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan
 - d. Program pemberdayaan penyuluh petani / perkebunan ternak



- e. Program peningkatan produksi Peternakan
 - f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- 6) **Bidang Kehutanan**, melalui program prioritas pemanfaatan potensi sumber Daya Hutan.
- 7) **Bidang Kelautan dan Perikanan**, melalui program prioritas sebagai berikut :
- a. Program pengembangan budidaya perikanan
 - b. Program pengembangan sistem perikanan tangkap
 - c. Program Optimisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- 8) **Bidang Pariwisata**, melalui program prioritas sebagai berikut :
- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Misi IV :

Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur strategis Wilayah yang berkualitas

- 1) **Bidang Pekerjaan Umum**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - c. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - d. Program Pengendalian Banjir
 - e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - f. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
 - g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah



- 2) **Bidang Perumahan**, melalui program prioritas Pengembangan Perumahan.
- 3) **Bidang Perhubungan**, melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 4) **Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**, melalui program prioritas pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Misi V :

Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan

- 1) **Bidang Lingkungan Hidup**, melalui program prioritas melalui program prioritas sebagai berikut :
 - a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 2) **Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**, melalui program prioritas Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- 3) **Bidang Kehutanan**, melalui program prioritas Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Misi VI :

Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah



Urusan pemerintahan yang mendukung misi tersebut adalah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, melalui program prioritas sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- b. Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

8.2 Kebijakan Pendanaan

Dalam merumuskan kerangka pendanaan bagi program dan kegiatan tahun 2014-2019, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa berpedoman pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yang mensyaratkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan anggaran, serta menjamin efektifitas, efisiensi, logis, dan realistis dalam penggunaannya sehingga pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan menjadi layak dikedepankan.

Selain berorientasi pada program prioritas pembangunan, kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Lebak juga diupayakan untuk mendorong pencapaian target-target indikator makro. Pencapaian program prioritas pembangunan dan target-target indikator makro dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif padapembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan bidangpenunjang lain, dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar pemerintah daerahseperti belanja gaji dan tunjangan serta belanja tetap (*fixed cost*).

Secara umum kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Prioritas anggaran diarahkan pada pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pemerintahan yang menjadi prioritas pembangunan guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati;



2. Kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years) tetap menjadi prioritas pertama dalam anggaran belanja;
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk kepentingan publik yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
4. Pengalokasian anggaran diarahkan sesuai dengan arah kebijakan per tahun yang telah ditetapkan;
5. Anggaran belanja bidang kesehatan didorong untuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan, terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, termasuk perbaikan fasilitas kesehatan;
6. Dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, anggaran belanja diarahkan pada pengembangan aktivitas ekonomi lokal di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, serta penguatan struktur ekonomi perdesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan dukungan infrastruktur perdesaan yang memadai;
7. Untuk menjaga daya dukung lingkungan, Pemerintah Kabupaten Lebak mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, mempertahankan fungsi kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi sumber daya alam;
8. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja yang terukur dan telah disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran;
9. Efisiensi belanja dilakukan dengan melaksanakan *proper budgeting* melalui *cost benefit analysis* sehingga tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah dapat terpetakan;



10. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengalokasikan pembayaran hutang dan belanja bunga pada Bank Jabar-Banten berdasarkan perjanjian pinjaman daerah;
 - c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk pemberian bantuan kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat;
 - d. Mengalokasikan belanja hibah yang diperuntukkan bagi lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan;
 - e. Mengalokasikan belanja tidak terduga sebagai bentuk antisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
 - f. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa yang dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal desa;
 - g. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada partai politik yang diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Rincian pagu anggaran selengkapnya disajikan dalam tabel 8.1 berikut ini.

Tabel 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014-2019
UNTUK DANA PRIORITAS I (PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab		
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		2019				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	Urusan Wajib																				
1 01	Pendidikan					99.553.527.250		85.354.713.561		81.268.783.585		83.618.787.250		85.752.168.003		435.472.979.649		176.382.962.252			
1 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya akses dan mutu PAUD	% APK PAUD	21.15	22.10	3.008.285.000	23.05	1.405.200.000	24.00	1.504.100.000	24.95	1.607.280.000	25.90	1.715.025.000	25.90	9.239.890.000	27.00	1.873.527.500	Dinas Pendidikan		
1 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya APM SD dan APM SMP serta mutu pendidikan dasar	%APM SD %APM SMP %APK SMA	98.73 84.93 97.93 56.05	98.78 85.80 98.40 60.00	55.649.468.000	98.83 85.85 99.14 60.75	40.340.623.336	98.88 85.90 99.06 61.50	35.862.716.697	98.93 85.95 99.39 62.25	36.879.931.673	98.98 86.00 99.72 63.00	37.305.542.520	98.98 86.00 99.72 63.00	206.038.282.226	99.03 86.05 99.99 63.75	31.811.137.851	Dinas Pendidikan		
1 01 17	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya APK SLTA serta mutu pendidikan menengah	%AMH	98.10	98.26	35.669.713.000	98.36	35.305.400.000	98.46	35.207.765.000	98.56	35.207.765.000	98.66	35.207.765.000	98.66	37.595.806.500	98.66	180.132.013.500	63.75	41.355.387.150	Dinas Pendidikan
1 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas	%AMH	98.10	98.26	1.568.224.500	98.36	2.163.770.000	98.46	2.307.711.000	98.56	2.152.199.000	98.66	2.298.438.000	98.66	10.490.342.500	98.66	2.478.241.000		Dinas Pendidikan Sekretariat Daerah	
1 01 20	Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang	5.307	5.481	961.182.000	6510	2.547.700.000	6121	2.710.275.000	6441	2.885.475.500	6761	3.073.196.500	6761	12.177.829.000	7081	3.380.516.150		Dinas Pendidikan	
1 01 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya cakupan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan : - Desa (TBM) - Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun - Jumlah perpustakaan milik daerah	Persen Pengunjung Unit	15.07 N/A 1	16.23 10.300 0	245.326.000	17.39 11.845 0	1.364.358.600	18.55 13.622 1	1.426.794.000	19.71 15.665 0	1.587.952.000	20.87 18.000 0	1.653.116.250	20.87 18.000 1	6.277.546.850	22.15 19.000 0	1.782.027.875		Dinas Pendidikan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
1 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terkeblala dan tersosialisasiannya berbagai peraturan dan data pendidikan	Buah Peraturan Dokumen profil pendidikan	1 3	1 3	2.601.328.750	1 3	3.622.661.625	1 3	3.701.921.888	1 3	3.788.370.076	1 3	3.882.368.234	5 15	17.596.650.573	1 3	95.632.582.226		Dinas Pendidikan	
1 02	Kesehatan					196.697.084.650		192.661.633.550		198.126.976.900		199.708.020.000		201.133.960.000		988.327.675.100		161.565.960.000			
1 02 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya pemberian obat secara tepat dan rasional	Puskesmas	41	42	41.266.539.000	42	10.731.130.000	42	11.267.690.000	42	10.770.720.000	42	11.046.350.000	42	85.082.429.000	42	11.046.350.000		Dinas Kesehatan	
1 02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Persen	100	100	133.656.346.000	100	102.928.840.000	100	104.446.880.000	100	106.028.860.000	100	108.028.860.000	100	555.089.786.000	100	68.569.860.000		Dinas Kesehatan RSUD	
1 02 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persen	0	0	-	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	260.000.000	100	90.000.000		Dinas Kesehatan	
1 02 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	4.315.719.000	100	4.776.500.000	100	4.997.840.000	100	4.315.720.000	100	4.315.720.000	100	22.721.499.000	100	4.315.720.000		Dinas Kesehatan	
1 02 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya status gizi masyarakat	Persen	84	85	556.000.000	88	556.000.000	90	556.000.000	93	556.000.000	95	556.000.000	95	2.780.000.000	95	556.000.000		Dinas Kesehatan	
1 02 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tercapainya cakupan sanitasi dasar dimasyarakat	Persen	57,3	58	635.000.000	59,3	635.000.000	60,3	635.000.000	61,3	635.000.000	62,3	635.000.000	62,3	3.175.000.000	63,3	635.000.000		Dinas Kesehatan	
1 02 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persen	61	60,67	831.000.000	76,67	1.079.500.000	80,00	1.131.500.000	83,33	1.076.220.000	86,67	1.118.530.000	86,67	5.236.750.000	86,67	1.118.530.000		Dinas Kesehatan	
1 02 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya sarana pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan	PKM BLUD	20 0	25 0	306.568.000	35 1	410.000.000	42 0	460.000.000	42 0	260.000.000	42 0	260.000.000	42 1	1.696.568.000	42 0	266.000.000		Dinas Kesehatan RSUD	
1 02 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persen	100	100	193.030.500	100	212.333.550	100	233.566.900	100	240.000.000	100	250.000.000	100	1.128.930.950	100	275.000.000		Sekretariat Daerah	
1 02 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Terlaksananya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya - Puskesmas DTP - Puskesmas - Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Unit	14 42 7	0 0 8	10.519.561.850	3 0 16	20.521.000.000	3 0 10	19.608.500.000	3 1 10	19.108.500.000	3 0 10	15.333.500.000	26 43 61	85.091.061.850	0 0 0	12.583.500.000		Dinas Kesehatan	
1 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakti Jiwa/Rumah Sakti Paru-Paru/Rumah Sakti Mata	Tersedianya serta meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Unit	1	3	650.000.000	2	49.200.000.000	2	53.050.000.000	2	53.850.000.000	2	57.700.000.000	8	214.450.000.000	2	60.300.000.000		RSUD	
1 02 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakti Jiwa/Rumah Sakti Paru-Paru/Rumah Sakti Mata	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Paket	1	1	1.100.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	2.400.000.000	1	1.400.000.000	1	7.400.000.000	1	1.400.000.000		RSUD	

1	02	30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan anak pra sekolah, anak remaja dan deteksi kesehatan lansia	Persen	20	36.25	106.325.000	42.50	106.330.000	45.00	110.000.000	48.75	112.000.000	52.50	115.000.000	52.50	549.655.000	52.5	115.000.000	Dinas Kesehatan				
1	02	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan penanganan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persen	78.00	81.88	295.200.000	85.63	255.000.000	88.13	270.000.000	90.63	285.000.000	93.75	295.000.000	100.00	1.400.200.000	100	295.000.000	Dinas Kesehatan				
1	02	33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan yang Komprehensif	Persen		85	2.265.795.300	-		-		-		-		2.265.795.300		-	RSUD					
1	03		Pekerjaan Umum					243.218.267.847			304.426.623.765			259.681.967.258			325.545.986.941		347.854.279.713		1.480.727.125.524			371.163.926.310	
1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	Persen	97.10	97.70	10.232.791.400	98.28	8.276.487.859	98.85	8.690.312.253	99.43	9.124.827.866	100	9.581.069.258	100.00	45.905.488.636	100.00	10.060.122.721	Dinas Bina Marga				
1	03	18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	Persen	52.99	51.32	101.669.029.560	57.52	185.118.089.234	60.27	201.134.795.614	65.4	214.376.757.028	66.47	231.844.217.167	66.47	934.142.888.603	66.47	249.027.028.026	Dinas Bina Marga				
1	03	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Jumlah Alat Berat dalam Kondisi Baik	Unit	22	21	2.322.435.000	23	5.154.372.500	24	3.240.809.750	25	3.555.890.725	26	3.902.479.798	26	18.175.987.773	27	4.011.218.000	KPABP DKP				
1	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	Persen	62.15	63.20	19.923.196.150	65.00	19.920.936.800	67.00	10.226.000.000	69.00	11.286.000.000	71.00	12.171.000.000	71.00	73.527.132.950	73.00	13.056.000.000	Dinas SDA				
1	03	26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung)	Unit Ha	26 23.56	2 3.4	752.005.200	3 3.5	1.450.000.000	7 8.4	1.730.000.000	6 5.5	1.630.000.000	6 6.8	1.640.000.000	24 27.6	7.202.005.200	6 7.8	1.660.000.000	Dinas SDA				
1	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	60.00	59.50	5.948.709.100	60.00	7.050.000.000	61.50	7.150.000.000	62.00	4.650.000.000	62.50	3.800.000.000	62.50	28.598.709.100	63.00	3.800.000.000	Dinas Cipta Karya Dinas Kebersihan				
1	03	28	Program Pengendalian Banjir	Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir	Lokasi	27	4	1.176.173.650	5	1.285.172.000	5	1.392.453.000	6	1.611.548.000	6	2.302.752.000	26	7.768.098.650	6	3.459.908.000	Dinas SDA				
1	03	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan	Unit	0	2	5.461.422.575	2	4.000.000.000	2	4.000.000.000	2	4.000.000.000	2	4.000.000.000	10	21.461.422.575	2	4.000.000.000	Dinas Cipta Karya				
1	03	30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Tersedianya infrastruktur perdesaan yang memadai - Terbangunnya jalan perdesaan - Persentase cakupan air bersih - Pasar Desa terbangun	Km Persen Unit	349.19 58.47 1	160.05 59.22 0	95.719.481.662	120.00 59.97 2	72.171.565.372	120.00 60.72 2	22.117.596.641	120.00 61.47 2	75.310.963.322	120.00 62.22 2	78.612.761.490	640.05 62.22 8	343.932.368.487	120.00 62.97 2	82.089.649.563	Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya BPMPPD				
1	03	31	Program Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh				13.023.550										13.023.550			Dinas Cipta Karya					
1	04		Perumahan					1.115.000.000			2.555.000.000			3.109.000.000			8.313.400.000		3.118.240.000		18.210.640.000			3.123.564.000	
1	04	15	Program Pengembangan Perumahan	Tertatanya rumah sehat dan layak huni	Unit	279.590	133	1.115.000.000	100	2.215.000.000	100	2.215.000.000	100	2.215.000.000	100	2.215.000.000	280.123	9.975.000.000	100	2.215.000.000	Dinas Cipta Karya				
1	04	20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Tertatanya dan terkoordinasinya pengelolaan areal pemakaman	Dokumen	0	0	-	2	340.000.000	3	894.000.000	4	6.098.400.000	3	903.240.000	12	8.235.640.000	3	908.564.000	Dinas Kebersihan Dinas Nakersos				
1	05		Penataan Ruang					1.175.000.000			650.000.000			1.250.000.000			775.000.000		800.000.000		4.650.000.000			875.000.000	
1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya dokumen tata ruang yang terpadu serta meningkatnya pemahaman tentang tata ruang	Dokumen Rakor	0 2	1 2	725.000.000	0 2	400.000.000	0 2	1.000.000.000	0 2	500.000.000	0 2	525.000.000	1 10	3.150.000.000	0 2	550.000.000	Bappeda Dinas Cipta Karya				
1	05	17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang	Rakor Dokumen	0 1	0 1	450.000.000	2 1	250.000.000	2 1	250.000.000	2 1	275.000.000	2 1	275.000.000	8 5	1.500.000.000	2 1	325.000.000	Bappeda Dinas Cipta Karya				
1	06		Perencanaan Pembangunan					16.160.323.600			14.585.327.100			14.356.894.310			17.047.673.591		15.036.005.132		77.686.223.733			18.417.843.744	
1	06	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas data penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	7	10	623.880.000	18	1.180.545.000	18	1.425.352.000	18	1.471.995.750	18	1.520.661.188	66	5.982.433.938	14	1.536.580.447	Bappeda Dinas Bina Marga Dinas SDA Dinas Koperasi & UKM Dinas Perindag Dinas Nakersos Dinas Cipta Karya Sekretariat Daerah				
1	06	16	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah	MOU	1	4	100.000.000	4	110.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000	4	130.000.000	20	590.000.000	4	140.000.000					
1	06	20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	80	83	665.000.000	-		-		-		-		665.000.000		-	Sekretariat Daerah					
1	06	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Dokumen	160	165	6.825.343.400	104	4.923.747.100	99	4.427.903.810	164	7.424.927.841	99	5.142.256.444	631	29.484.178.595	165	7.961.341.421	Seluruh SKPD				

1	06	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Jumlah dokumen Perencanaan Ekonomi Daerah yang saling terintegrasi dan berkesinambungan	Dokumen	5	7	1.391.850.200	14	2.466.035.000	13	1.938.638.500	12	1.646.000.000	12	1.713.600.000	58	9.156.123.700	12	1.935.460.000	Bappeda Dinas Pertanian DKP Dinas Perapar Dinas Peternakan
1	06	23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Meningkatnya Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan sosial budaya dan pemerintahan	Dokumen	1	5	1.193.000.000	1	850.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.150.000.000	9	5.393.000.000	1	1.200.000.000	Bappeda
1	06	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan	Dokumen Desa rakor	149 18 6	151 22 4	5.361.250.000	152 11 7	5.055.000.000	152 21 7	5.345.000.000	152 10 7	5.274.750.000	152 10 7	5.379.487.500	754 74 32	26.415.487.500	152 10 7	5.644.461.876	Bappeda Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Dinas SDA
1	07		Perhubungan					3.013.180.000		3.747.750.000		4.081.485.000		3.032.439.000		3.030.153.400		16.905.007.400		2.659.700.629	
1	07	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya rencana pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dokumen	1	1	250.000.000	2	144.200.000	0	-	0	-	0	-	3	394.200.000	0	-	Dinas Perhubungan
1	07	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah terminal dan sub terminal terpelihara	Unit	4	1	524.000.000	1	1.304.800.000	1	1.635.000.000	1	235.000.000	0	150.000.000	4	3.848.800.000	0	150.000.000	Dinas Perhubungan
1	07	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya kesadaran tertib berfalu lintas dalam upaya peningkatan keselamatan penumpang	Kali	2	1	69.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	69.000.000	0	-	Dinas Perhubungan
1	07	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Jenis Rambu Terpasang : - Rambu-rambu - Lampu Lalu Lintas - Marka	Unit Buah m ²	178 4 2352	75 4 550	1.474.380.000	80 4 500	1.385.750.000	80 4 500	1.633.175.000	80 4 500	1.724.864.000	80 4 500	1.905.343.400	395 20 2.550	8.123.512.400	80 4 500	2.082.190.629	Dinas Perhubungan
1	07	20	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kir angkutan umum	Unit Jenis	3 5	2 6	695.800.000	2 6	913.000.000	1 6	813.310.000	1 6	1.072.575.000	1 6	974.810.000	7 30	4.469.495.000	0 6	427.510.000	Dinas Perhubungan
1	08		Lingkungan Hidup					7.528.908.300		9.651.950.000		17.739.728.000		18.047.411.120		13.513.096.165		66.001.093.585		13.428.871.132	
1	08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangan sampah	Persen	27.15	28.57	3.356.724.300	28.57	3.710.000.000	32.14	11.751.600.000	35.71	12.172.300.000	42.86	8.320.396.000	42.86	39.311.020.300	45.00	8.336.000.000	Dinas Kebersihan
1	08	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat cemaran Sungai, Udara dan air tanah Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL	Persen Perusahaan	100 3	100 5	1.981.527.000	100 7	2.580.000.000	100 10	2.008.200.000	100 13	1.480.000.000	100 16	1.530.000.000	100 16	9.229.727.000	100 17	1.385.000.000	Badan LH Badan LH
1	08	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya daerah tang-kapan air dan sumber-sumber air yang direhabilitasi disekitar : - Mata Air - Bendungan - Sempadan sungai	Unit Unit Km	41 12 16	10 2 2	882.592.000	10 2 2	1.177.000.000	10 2 2	1.118.680.000	10 2 2	1.416.227.200	10 10 10	1.214.676.288	50 10 10	5.679.175.488	10 2 2	1.239.063.340	Dinas Hutbun
1	08	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen	0	1	75.000.000	2	600.000.000	2	350.000.000	4	650.000.000	1	100.000.000	10	1.775.000.000	1	100.000.000	Badan LH
1	08	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya data Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa	Dokumen	1	2	202.800.000	2	121.000.000	3	333.100.000	2	146.410.000	2	161.051.000	11	964.361.000	2	177.156.000	Badan LH
1	08	23	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Terjaganya ekosistem pesisir dan laut	Paket	0	1	203.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	203.390.000	-	-	Badan LH	
1	08	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak	Persen Titik	40 25	40 25	826.875.000	40 25	1.463.950.000	40 25	2.178.148.000	40 25	2.182.473.920	40 25	2.186.972.877	40 125	8.838.419.797	40 25	2.191.651.792	Dinas Hutbun Badan LH Dinas Kebersihan
1	09		Pertanahan					100.000.000		660.000.000		670.000.000		680.000.000		680.000.000		6.640.000.000		680.000.000	
1	09	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tertatanya penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Lokasi	-	5	550.000.000	5	550.000.000	5	550.000.000	5	550.000.000	5	550.000.000	25	6.050.000.000	5	550.000.000	Sekretariat Daerah
1	09	17	Program Penyelesaian Konflik Pertanahan	Terselesaikannya Masalah Administrasi Pertanahan di Kabupaten Lebak	Kasus	4	4	100.000.000	4	110.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000	4	130.000.000	20	590.000.000	4	130.000.000	Sekretariat Daerah

1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil				1.982.000.000		17.010.595.500		6.968.855.450		49.455.591.095		7.709.670.405		83.126.712.450		8.554.738.600			
1	10	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	- Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga - Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk - Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran - Ketersediaan database kependudukan	Persen Persen Persen Persen	77.06 78.00 33.00 92.02	78.00 81.50 42.00 93.00	1.982.000.000 80.00 17.010.595.500 82.00 6.968.855.450 84.00 49.455.591.095 86.00 7.709.670.405 86.00 83.126.712.450 88.00 8.554.738.600	80.00 17.010.595.500 82.00 6.968.855.450 84.00 49.455.591.095 86.00 7.709.670.405 86.00 83.126.712.450 88.00 8.554.738.600	82.00 17.010.595.500 84.00 49.455.591.095 86.00 7.709.670.405 86.00 83.126.712.450 88.00 8.554.738.600	84.00 49.455.591.095 86.00 7.709.670.405 86.00 83.126.712.450 88.00 8.554.738.600	86.00 49.455.591.095 86.00 7.709.670.405 86.00 83.126.712.450 88.00 8.554.738.600	Dinas Capil									
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				811.609.500		2.240.400.000		2.371.000.000		2.496.250.000		2.582.205.000		10.501.464.500		2.835.150.000			
1	11	15	Program Kereserian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan terbentuknya kota layak anak	Persen	0	0	-	25	50.000.000	50	150.000.000	75	250.000.000	100	300.000.000	100	750.000.000	100	350.000.000	BPPKB	
1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kasus	20	20	177.703.500	25	550.000.000	30	575.500.000	35	596.550.000	40	628.205.000	150	2.527.958.500	40	639.750.000	BPPKB	
1	11	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terlaksananya upaya peningkatan kualitas hidup perempuan korban KDRT	Kegiatan	1	1	133.906.000	1	218.400.000	1	223.500.000	1	227.700.000	1	232.000.000	5	1.035.506.000	1	423.400.000	BPPKB	
1	11	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya peran organisasi perempuan dalam pembangunan	Organisasi	5	5	500.000.000	5	1.422.000.000	5	1.422.000.000	5	1.422.000.000	5	1.422.000.000	25	6.188.000.000	5	1.422.000.000	BPPKB	
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				3.264.880.800		2.083.443.400		2.156.093.400		2.233.043.400		2.296.813.400		12.034.274.400		2.335.044.900			
1	12	15	Program Keluarga Berencana	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Persen	64.22	65.00	2.654.717.400	65.50	1.223.280.000	66.00	1.279.430.000	65.50	1.338.230.000	67.00	1.382.035.000	67.00	7.877.692.400	67.50	1.398.305.000	BPPKB	
1	12	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	- Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3.5%) - Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen Persen	10.27 12.19	9.57 11.69	115.000.000	8.87 11.19	350.000.000	8.17 10.69	350.000.000	7.47 10.19	350.000.000	6.77 9.69	350.000.000	6.77 9.69	1.515.000.000	6.07 9.19	350.000.000	BPPKB	
1	12	19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Terbinanya Kelompok Keluarga Balita	BKB BKR	369 199	371 201	150.000.000	373 203	165.000.000	375 205	181.500.000	377 207	199.650.000	379 209	219.615.000	379 209	915.765.000	381 301	241.576.500	BPPKB	
1	12	20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Terlaksananya pengembangan pendewasaan usia perkawinan	Kelompok	32	32	200.000.000	32	200.000.000	32	200.000.000	32	200.000.000	32	200.000.000	32	1.000.000.000	32	200.000.000	BPPKB	
1	12	21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Meningkatnya pemahaman remaja mengenai bahaya narkoba dan HIV/AIDS	Siswa	750	300	145.163.400	300	145.163.400	300	145.163.400	300	145.163.400	300	145.163.400	300	725.817.000	300	145.163.400	BPPKB	
1	13		Sosial				1.067.054.000		2.306.100.000		2.482.700.000		2.650.470.000		2.741.517.000		11.247.841.000		2.841.617.700			
1	13	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persen	29.16	32.60	172.000.000	37.00	805.000.000	41.00	865.000.000	46.00	865.000.000	51.00	865.000.000	51.00	3.572.000.000	55.00	865.000.000	Dinas Nakersos	
1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu - Jumlah penerima manfaat kartu sejahtera	Persen Orang	30.10 0	31.80 3.520	695.054.000	33.00 4.800	1.041.100.000	35.00 6.300	1.146.700.000	38.33 8.300	1.262.370.000	41.08 9.800	1.329.107.000	41.08 32.720	5.474.331.000	43.00 10.000	1.402.466.700	Dinas Nakersos	
1	13	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	26.15	29.09	-	32.48	150.000.000	35.35	150.000.000	39.00	180.000.000	42.00	180.000.000	42.00	660.000.000	45.00	180.000.000	Dinas Nakersos	
1	13	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Orang	0	0	-	25	180.000.000	25	240.000.000	25	240.000.000	25	240.000.000	100	900.000.000	25	240.000.000	Dinas Nakersos	
1	13	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Kelompok	5	9	200.000.000	15	310.000.000	15	321.000.000	15	343.100.000	15	367.410.000	69	1.541.510.000	15	394.151.000	Dinas Nakersos	

1	14		Tenaga Kerja			2.287.729.500		4.629.500.000		11.049.100.000		6.543.960.000		7.731.889.500		32.242.179.000		8.065.777.500			
1	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	- Tingkat pengangguran Terbuka - Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis : • Kompetensi • Kewirausahaan	Persen Orang Orang	7.52 50.680 13	7.37 49 58	325.000.000	7.10	16 144	6.80	32 192	6.50	32 224	6.30	32 256	6.30	161 874	6.00	32 256	Dinas Nakersos
1	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	- Cakupan lapangan kerja - Pengurangan angka pengangguran di pedesaan melalui Padat Karya	Persen Desa	0	15.00 345	1.442.729.500	20.83 345	2.955.000.000	23.33 345	2.509.500.000	28.33 345	2.552.950.000	33.33 345	2.600.745.000	33.33 345	12.060.924.500	50.16 345	2.565.397.000	Dinas Nakersos
1	14	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terciptanya Hubungan Kerja yang Harmonis antara Pekerja dan Pemberi Kerja	Perusahaan	50	50	520.000.000	50	707.000.000	50	726.600.000	25	810.710.000	25	876.814.500	200	3.641.124.500	50	963.977.500	Dinas Nakersos
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					1.592.000.000		2.127.700.000		2.198.545.000		2.234.294.000		2.328.766.200		10.481.305.200		2.394.130.000	
1	15	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Meningkatnya jumlah Usaha Kecil Menengah yang berdaya saing	KUMKM	171	191	175.000.000	211	451.750.000	231	470.575.000	251	451.550.000	271	465.135.000	271	2.014.010.000	291	476.520.000	Dinas Koperasi & UKM
1	15	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah : - Usaha mikro - Usaha kecil - Usaha menengah	Unit Unit Unit	48.892 785 9	49.140 805 11	522.000.000	49.388 825 13	411.600.000	49.636 845 15	422.180.000	49.884 865 17	432.764.000	50.132 885 19	468.461.200	50.132 885 19	2.257.005.200	50.380 905 21	480.000.000	Dinas Koperasi & UKM
1	15	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas modal usaha	UMKM	5.321	5.351	325.000.000	5.381	656.250.000	5.411	678.590.000	5.441	700.930.000	5.471	723.270.000	5.471	3.084.040.000	5.501	745.610.000	Dinas Koperasi & UKM
1	15	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	671	691	570.000.000	711	608.100.000	731	627.200.000	751	649.050.000	771	671.900.000	771	3.126.250.000	791	692.000.000	Dinas Koperasi & UKM
1	16		Penanaman Modal Daerah					2.050.135.000													
1	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional	Investor PMA Investor PMDN	5 894	1 2	1.030.000.000	1 3	1.400.000.000	1 3	1.530.000.000	1 3	1.637.500.000	1 3	1.740.000.000	5 14	8.677.500.000	1 3	1.592.500.000	BPMPTT Sekretariat Daerah
1	16	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi	Persen	30	40	1.020.135.000	50	1.475.000.000	60	1.275.000.000	70	1.175.000.000	80	1.230.000.000	80	6.175.135.000	80	1.230.000.000	BPMPTT Sekretariat Daerah
1	16	17	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Terperluhnya informasi potensi sumber daya investasi	Dokumen	0	-	250.000.000	1	250.000.000	-	1	250.000.000	-	2	500.000.000	-	2	500.000.000	250.000.000	BPMPTT
1	17		Kebudayaan					1.182.300.000		1.351.415.000		1.424.375.000		1.501.405.000		1.582.970.000		7.042.465.000		1.662.099.500	
1	17	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya	Persen	0	100	481.300.000	100	505.365.000	100	530.540.000	100	556.895.000	100	584.670.000	100	2.658.770.000	100	613.848.000	Dinas Pendidikan
1	17	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah SDM pengelola cagar budaya	Pengelola	41	41	94.000.000	41	208.700.000	41	224.635.000	41	241.900.000	41	260.650.000	41	1.029.885.000	41	273.682.500	Dinas Pendidikan
1	17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni dan budaya	Event	9	10	607.000.000	10	637.350.000	10	669.200.000	10	702.610.000	10	737.650.000	50	3.353.810.000	10	774.569.000	
1	18		Pemuda dan Olahraga					4.715.000.000		9.575.500.000		5.446.000.000		5.440.000.000		9.576.100.000		34.752.600.000		3.572.460.000	
1	18	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda mendapatkan pembinaan	Pemuda	140	140	710.000.000	140	1.295.500.000	140	1.376.000.000	140	1.430.000.000	140	1.510.600.000	700	6.322.100.000	140	1.605.210.000	Dinas Porapar
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	- Jumlah penyelenggaraan event olahraga - Pembinaan atlet berprestasi	Event Atlet	5 0	2 0	3.405.000.000	2 30	3.380.000.000	2 33	2.670.000.000	2 36	3.610.000.000	2 40	7.665.500.000	10 40	20.730.500.000	2 43	1.567.250.000	Dinas Porapar
1	18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Unit	5	3	600.000.000	4	4.900.000.000	2	1.400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	19	7.700.000.000	5	400.000.000	Dinas Porapar
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					7.949.600.000		15.029.580.000		11.409.103.000		12.669.633.150		14.152.460.000		60.810.376.150		15.496.615.500	
1	19	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penegakan perda	Persen	0	90	2.420.850.000	85	6.880.850.000	90	1.862.850.000	90	2.122.050.000	90	3.083.670.000	90	15.970.270.000	90	3.662.952.000	Kantor Kesbang Satpol PP
1	19	16	Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Kegiatan	0	1	25.000.000	4	300.000.000	8	350.000.000	10	450.000.000	12	500.000.000	12	1.625.000.000	12	550.000.000	Kantor Kesbang
1	19	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Meningkatkan peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) - Terselenggaranya kegiatan keagamaan - Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan	Kegiatan Kegiatan Kecamatan	2 2 28	2 2 28	4.059.300.000	2 2 28	4.865.230.000	2 2 28	5.401.753.000	2 2 28	5.654.833.150	2 2 28	5.914.265.000	10 10 28	25.895.381.150	2 2 28	6.006.191.500	Kantor Kesbang Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
1	19	18	Program Kermitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan	Kegiatan Kecamatan	2 28	2 28	100.000.000	2 28	335.000.000	2 28	368.500.000	2 28	405.350.000	2 28	445.885.000	10 28	1.654.735.000	2 28	487.268.000	Kantor Kesbang
1	19	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah kerjasama dengan organisasi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Ormas/LSM	0	0	-	10	250.000.000	10	275.000.000	15	300.000.000	17	325.000.000	52	1.150.000.000	19	350.000.000	Kantor Kesbang
1	19	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Terjangkitnya kasus Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persen	81.00	82.00	50.000.000	82.50	55.000.000	83.00	60.500.000	83.50	66.550.000	84.00	73.205.000	84.00	305.255.000	84.50	80.525.500	Kantor Kesbang

1	19	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Orang	400	0	350.000.000	200	785.000.000	200	743.500.000	200	795.850.000	200	1.002.435.000	800	3.676.785.000	200	1.063.678.500	Kantor Kesbang
1	19	22		Program Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah relawan bencana Persentase penganggulangan bencana	Relawan Persen	0 100	25 100	944.450.000	56 100	1.558.500.000	225 100	2.347.000.000	345 100	2.875.000.000	690 100	2.808.000.000	690 100	10.532.950.000	690 100	3.296.000.000	BPBD Sekretariat Daerah
1	20			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					19.626.654.400		28.600.729.500		29.172.665.000		29.647.788.250		33.566.888.975		140.491.568.625		34.565.686.273	
1	20	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga DPRD sesuai peran dan fungsinya	Persen	100	100	5.227.209.000	100	5.357.250.000	100	5.650.000.000	100	5.713.200.000	100	5.893.750.000	100	27.841.409.000	100	6.480.000.000	Sekretariat DPRD
1	20	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya dialog & koordinasi antar stakeholder serta terselenggaranya koordinasi dgn Pemerintah Pusat dan daerah otonomi lain	Bulan	12	12	321.000.000	12	613.100.000	12	667.500.000	12	715.000.000	12	810.000.000	60	3.126.600.000	12	850.000.000	Sekretariat Daerah
1	20	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan Akuntabel, Efektif dan Efisien Sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku - Terbinanya aparatur pengelolaan keuangan SKPD yang akuntabel - Tertatanya aset daerah	Dokumen Orang Persen	2 90 90	48 175 97	5.951.687.500	48 130 100	7.940.872.500	48 130 100	8.349.640.000	48 130 100	8.417.990.000	48 130 100	8.838.990.000	240 490 100	39.499.180.000	48 130 100	8.844.990.000	Sekretariat Daerah DPPKD
1	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terbinanya Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa	Desa	340	340	200.000.000	340	295.000.000	340	317.000.000	340	341.200.000	340	367.820.000	340	1.521.020.000	340	422.102.000	BPMPD
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terkendalinya kebijakan Bupati melalui sistem pengawasan dan pengendalian internal yang handal serta penyelesaian pengawasan internal	SKPD Persen	69	72 65	1.700.750.000	156 70	2.843.975.000	184 75	3.324.097.000	212 80	3.729.257.250	412 85	6.515.782.975	412 85	18.113.862.225	412 85	7.066.361.273	Inspektorat Kab.
1	20	21		Program Peningkatan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya kemampuan aparat pemeriksa pengawasan	Orang PNS		21	225.000.000	21	247.500.000	30	272.250.000	35	299.475.000	29	329.422.500	136	1.373.647.500	7	362.364.750	Inspektorat Kab.
1	20	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan	Dokumen		1	60.000.000	1	63.000.000	1	66.000.000	1	69.000.000	1	72.000.000	5	216.025.000	1	79.200.000	Inspektorat Kab.
1	20	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dalam rangka optimalisasi pelayanan publik	Web Sistem Informasi	5 4	3 1	625.000.000	1 1	812.500.000	1 1	1.193.750.000	1 1	1.150.000.000	1 1	1.155.000.000	1 1	4.936.250.000		1.155.000.000	Inspektorat Kab. Sekretariat Daerah
1	20	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tertanganinya pengaduan masyarakat secara profesional sebagai wujud pelaksanaan good governance	Persen	0	100	72.000.000	100	82.500.000	100	90.750.000	100	99.825.000	100	109.807.500	500	445.700.000	100	120.788.250	Inspektorat Kab.
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah	Perda Perbup Raperda	10 10 1	10 10 2	1.135.515.000	10 15 1	1.638.500.000	10 15 1	1.755.000.000	10 15 1	1.865.000.000	10 15 1	1.984.250.000	50 70 6	8.378.265.000	10 15 1	1.775.000.000	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD BPMPT
1	20	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya proses penataan daerah otonomi baru	Desa Kecamatan Kabupaten	345 0 0	345 0 0	500.000.000	370 0 1	1.400.000.000	370 2	225.000.000	395	50.000.000	395	125.000.000	395 2 1	2.300.000.000	395	50.000.000	Sekretariat Daerah BPMPT
1	20	28		Program Pemerintahan Umum Daerah	- Cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum daerah - Cakupan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Persen Persen	100 100	100 100	3.608.492.900	100 100	5.096.913.000	100 100	5.251.678.000	100 100	5.377.841.000	100 100	5.520.066.000	100 100	24.854.990.900	100 100	5.814.880.000	Sekretariat DPRD Kecamatan se-Kab. Lebak
1	20	29		Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Terlaksananya Pemantapan Otonomi Daerah dan Meningkatnya Sistem Administrasi Daerah	Persen	80	83	-	85	2.209.619.000	86	2.010.000.000	88	1.820.000.000	90	1.845.000.000	90	7.884.619.000	93	1.545.000.000	Sekretarit Daerah

2	01	20	Program pemberdayaan penyuluh petani / perkebunan temak	Cakupan Bina Kelompok Tani : - Pemula - Lanjut - Madya - Utama	Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok	2417 0 0 0 0	2.417 1.636 702 79 0	2.473.839.000	2.417 1561 771 85 0	2.944.915.000	2.417 1480 842 93 2	3.386.650.000	2.417 1393 918 103 3	3.885.647.000	2.417 1300 996 116 5	4.478.844.000	2.417 1300 996 116 5	17.169.895.000	2.417 1207 1076 128 6	4.478.844.000	BP4K
2	01	21	Program pencegahan dan pengendalian penyakit ternak	Meningkatnya cakupan pelayanan pengobatan ternak yang sakit	Persen		2	350.000.000	4	727.000.000	6	884.700.000	8	1.143.170.000	10	1.285.437.000	10	4.390.307.000	12	1.377.297.500	Dinas Peternakan
2	01	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi daging	Kg	7.601.775	7.996.386	3.500.310.825	8.204.292	8.021.870.000	8.405.539	7.533.822.100	8.847.772	8.567.807.863	9.316.869	5.784.067.175	9.316.869	33.307.877.963	10.010.044	5.304.058.200	Dinas Peternakan
2	01	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternakan	Lokasi	7	7	50.000.000	7	1.385.000.000	7	1.385.000.000	7	1.040.000.000	7	555.000.000	7	4.415.000.000	7	518.500.000	Dinas Peternakan
2	01	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Meningkatnya produktifitas peternakan	Ekor		72	-	72	644.600.000	72	713.000.000	72	748.000.000	72	777.000.000	360	2.882.600.000	72	820.850.000	Dinas Peternakan
2	02		Kehutanan				1.531.281.000		2.482.135.000		2.805.389.400		2.686.655.856		2.771.331.251		12.276.792.507		2.518.937.586		
2	02	15	Program pemanfaatan potensi sumber Daya Hutan	Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertaahun)	Kg	32.274.60	33.888.33	437.000.000	35.582.75	979.480.000	37.361.88	1.018.659.200	39.229.98	1.059.405.568	41.191.48	1.045.581.671	41.191.48	4.540.126.439	43.251.05	1.087.405.063	Dinas Hutan
2	02	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	650	50	308.000.000	400	1.273.000.000	400	1.522.627.200	400	1.323.532.288	400	1.376.473.580	1.650	5.803.633.068	200	1.431.532.523	Dinas Hutan
2	02	17	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Konservasi Daerah Tangkapan Air : - Mata Air - Bendungan - Sempadan Sungai	Ha Ha Ha		100 40 20	786.281.000	100 40 20	229.655.000	100 40 20	264.103.000	100 40 20	303.718.000	100 40 20	349.276.000		1.933.033.000	100 40 20		Dinas Hutan
2	03		Energi dan Sumberdaya Mineral				5.028.979.400		9.253.399.270		9.914.949.597		10.161.258.900		10.916.977.350		45.275.564.517		11.302.457.350		
2	03	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persen	16,66	16,66	403.500.000	16,66	533.003.270	16,66	936.303.597	16,66	842.433.900	16,66	776.677.350	16,66	3.491.918.117	16,66	626.677.350	Dinas Tamban
2	03	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Meningkatnya cakupan layanan ketenagalistrikan	Persen	70,43	74	4.250.479.400	76	8.187.896.000	78	8.437.896.000	80	8.779.000.000	82	9.240.500.000	82	38.895.771.400	82	9.765.000.000	Dinas Tamban
2	03	18	Program Penelitian dan Pengendalian Geologi dan Air Tanah	Cakupan ketersediaan data geologi dan air tanah	Persen	0	16,66	375.000.000	16,66	532.500.000	16,66	540.750.000	16,66	539.825.000	16,66	899.800.000	16,66	2.887.875.000	16,66	910.780.000	Dinas Tamban
2	04		Pariwisata				645.000.000		3.142.500.000		8.340.000.000		6.641.000.000		682.800.000		19.451.300.000		527.940.000		
2	04	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terselenggaranya promosi pariwisata daerah	Jumlah Wisatawan Event pameran	3.401 4	3.741 4	375.000.000	4.115 5	425.000.000	4.527 5	440.000.000	4.979 5	461.000.000	5.477 5	502.800.000	5.477 24	2.203.800.000	6.025 5	527.940.000	Dinas Porapar
2	04	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah dan jenis obyek wisata	Lokasi	13	14	270.000.000	15	2.717.500.000	16	7.900.000.000	16	6.180.000.000	17	180.000.000	17	17.247.500.000	17	-	Dinas Porapar
2	05		Kelautan dan Perikanan				4.674.166.000		7.188.083.600		8.988.308.000		6.072.915.000		6.405.724.000		32.870.486.600		6.566.426.000		
2	05	15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah cakupan pemberdayaan kelompok ekonomi kelompok pesisir	Kelompok	3	3	-	3	45.000.000	3	195.000.000	3	153.000.000	3	153.000.000	15	546.000.000	3	168.300.000	DKP
2	05	16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Terjaganya Kelestarian Ekosistem Pesisir dan Laut	Ha	0	5	75.000.000	5	500.000.000	6	100.000.000	6	50.000.000	6	100.000.000	28	825.000.000	6	110.000.000	DKP
2	05	20	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi ikan budidaya	Ton	3.535.40	3.540.00	1.196.915.000	3.552.00	1.455.052.600	3.564.00	1.651.380.000	3.576.00	1.815.647.000	3.588.00	1.981.341.000	3.588	7.941.625.600	3.600.00	2.163.604.000	DKP
2	05	21	Program pengembangan sistem perikanan tangkap	Produksi ikan tangkap	Ton	4.735.36	4.946.81	1.517.642.000	5194.04	2.271.125.000	5453.87	2.658.838.000	5726.7	2.284.268.000	6012.93	2.186.383.000	27.334	10.618.256.000		2.113.522.000	DKP
2	05	22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Unit	0	0	-	2	200.000.000	1	50.000.000	0	-	0	-	3	250.000.000	1	65.000.000	DKP
2	05	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Konsumsi ikan per Kapita	Kg/Kapita		15	1.149.755.000	16	1.716.906.000	17	3.178.090.000	18	1.250.000.000	19	1.360.000.000	19	8.654.751.000	20	1.546.000.000	DKP
2	05	25	Program Perencanaan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan	Tersedianya dokumen perencanaan bidang kelautan dan perikanan yang terintegrasi dan berkesinambungan	Dokumen	0	6	734.854.000	2	700.000.000	3	750.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	13	2.484.854.000	0	-	DKP
2	06		Perdagangan				3.939.205.600		10.026.606.000		6.981.606.000		6.126.606.000		6.341.606.000		33.415.629.600		6.341.606.000		
2	06	15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	- Cakupan Penanganan Kasus pelanggaran peredaran Barang - Cakupan sertifikasi makanan halal dan aman	Persen Persen		70 80	750.000.000	70 80	5.875.000.000	80 90	2.775.000.000	80 90	1.750.000.000	90 100	1.900.000.000	90 100	13.050.000.000	90 100	1.900.000.000	Dinas Perindag
2	06	18	Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah	Unit	2	2	3.189.205.600	2	4.151.606.000	1	4.206.606.000	1	4.376.606.000	2	4.441.606.000	8	20.365.629.600	1	4.441.606.000	Dinas Perindag

2	07		Perindustrian				772.000.000		1.600.000.000		1.775.000.000		1.850.000.000		2.050.000.000		8.047.000.000		2.050.000.000		
2	07	16	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Jenis dan jumlah industri menengah : - Jenis industri - Jumlah industri	Jenis Unit	20 24	20 28	400.000.000	900.000.000	20 30	22 33	22 35	24 38	24 38	4.675.000.000	26 41	1.250.000.000	Dinas Perindag			
				Jenis dan jumlah industri kecil : - Jenis industri - Jumlah industri	Jenis Unit	18 15.298	18 15.454			20 15.769	22 16.334	24 16.559	26 16.744	26 16.744		28 16.929					
2	07	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya diversifikasi produk unggulan	IKM	0	2	372.000.000	700.000.000	3	3	3	3	14	3.372.000.000	3	800.000.000	Dinas Perindag			
2	08		Transmigrasi					205.000.000	1.075.500.000		2.698.050.000		982.855.000		900.140.500		5.861.545.500		955.051.000		
2	08	15	Program pengembangan wilayah Transmigrasi	Jumlah transmigrasi Umum	Orang	22	40	205.000.000	225.500.000	40	40	40	40	200	1.251.545.500	40 100	330.051.000	Dinas Nakersos			
2	08	16	Program Transmigrasi lokal	Cakupan penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi lokal	Orang	0	0	-	850.000.000	100	2.450.000.000	100	710.000.000	100	600.000.000	300	4.610.000.000	100	625.000.000	Dinas Nakersos	
								760.249.755.092		767.843.089.215		781.578.253.822		791.175.061.657		787.046.853.332		3.887.893.013.118		763.759.427.595	

Tabel 8.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014-2019
UNTUK DANA PRIORITAS II (PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP-JMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab		
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RP-JMD		2019				
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
x	xx	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	12	53.357.259.720	12	54.960.740.000	12	56.624.900.000	12	58.822.700.000	12	61.151.200.000	60	284.916.799.720	12	63.108.000.000	Seluruh SKPD
x	xx	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara	Unit	0	0	12.655.600.000	0	12.047.080.000	79	15.397.044.000	76	12.454.700.000	0	13.151.300.000	155	65.705.724.000	76	13.564.500.000	Seluruh SKPD
x	xx	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya perlengkapan pendukung peningkatan disiplin aparatur	Stel		800	215.985.000	0	235.620.000	0	247.404.000	0	224.400.000	0	269.280.000	800	923.409.000	825	269.280.000	Seluruh SKPD
x	xx	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Orang	351	321	856.950.000	384	1.024.200.000	411	1.102.410.000	426	1.241.400.000	441	1.351.470.000	1.983	5.576.430.000	447	1.402.500.000	Seluruh SKPD
x	xx	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya administrasi pelaporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	252	252	517.400.000	252	672.600.000	252	874.283.000	252	1.136.600.000	252	1.477.600.000	252	4.678.483.000	252	1.929.800.000	Seluruh SKPD
JUMLAH TOTAL							67.603.194.720		68.940.240.000		74.246.041.000		73.879.800.000		77.400.850.000		361.800.845.720		80.274.080.000		



BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai.

Selain itu, penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan SKPD yang terlebih dahulu sudah disepakati bersama. Penetapan indikator merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang merupakan gambaran keberhasilan SKPD dimasa yang akan datang.

Kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud, sehingga dalam penetapannya harus memperhatikan dan mengacu kepada :

1. Sasaran pembangunan dalam RPJMN Tahun 2010-2014;
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025;
3. Sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
4. Tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs);
5. Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah ditetapkan;
6. Hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama kurun waktu lima tahun; dan
7. Memerhatikan peluang dan tantangan selama lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2019.



Berdasarkan hal tersebut di atas, penetapan indikator makro Pemerintah Kabupaten Lebak selanjutnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Lebak
Tahun 2014-2019

No.	Indikator Makro	Kondisi Tahun 2013	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PDRB (adh. Konstan Thn. 2000) (Rp. Juta)	4.843.499	5.101.168	5.357.199	5.631.007	5.920.999	6.227.059	6.552.170
	PDRB (adh. Berlaku Thn. 2000) (Rp. Juta)	11.335.143	12.448.242	13.690.454	15.062.387	16.577.648	18.248.511	20.095.441
2.	PDRB per Kapita (adh. Konstan Thn. 2000) (Rp. Juta)	3.801.891	3.944.389	4.080.339	4.224.463	4.375.081	4.531.670	4.695.950
	PDRB per Kapita (adh. Berlaku Thn. 2000) (Rp. Juta)	8.897.489	9.625.387	10.427.406	11.300.022	12.249.379	13.280.144	14.402.433
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,12	5,32	5,02	5,11	5,15	5,17	5,22
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	68,68	68,93	69,19	69,44	69,70	69,96	70,22



No.	Indikator Makro	Kondisi Tahun 2013	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.	Prosentase Penduduk Miskin	8,08%	7,57%	7,09%	6,64%	6,22%	6,15%	6,10%
6.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,52%	7,37%	7,10%	6,80%	6,50%	6,30%	6,00%
7.	Penurunan Laju Inflasi (%)	5,30	5,14	5,14	5,30	5,25	5,20	5,13

Sumber : Estimasi BPS Kab. Lebak

Tabel penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Lebak sebagaimana tertuang pada tabel 9.2 berikut.



Tabel 9.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Transisi
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat									
1.	Pendidikan									
1.1	Angka Melek Huruf	Persen	98.10	98.26	98.36	98.46	98.56	98.66	98.66	98.76
1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6.29	6.30	6.34	6.38	6.42	6.46	6.46	6.50
1.3	Angka Partisipasi Kasar :									
	- PAUD	Persen	21.15	22.10	23.05	24.00	24.95	25.90	25.90	27.00
	- SLTP	Persen	98.78	98.93	99.14	99.35	99.56	99.77	99.77	99.98
	- SLTA	Persen	56.05	60.00	60.75	61.50	62.25	63.00	63.00	63.75
1.4	Angka Partisipasi Murni :									
	- SD	Persen	98.73	98.78	98.83	98.88	98.93	98.98	98.98	99.03
	- SLTP	Persen	84.93	85.80	85.85	85.90	85.95	86.00	86.00	86.05
	- SLTA	Persen	45.09	47.11	50.12	53.24	56.16	59.18	59.18	62.2
2.	Kesehatan									
2.1	Angka Kematian Ibu	/ 100.000 KH	157.66	155.00	150.00	145.00	140.00	135.00	135.00	127.00
2.2	Angka Kematian Bayi	/ 1.000 KH	24.64	24.00	23.00	22.00	21.00	20.00	20.00	18.00
2.3	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	63.35	63.44	63.45	63.46	63.47	63.48	63.48	63.50
2.4	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0.65	0.63	0.61	0.59	0.57	0.55	0.55	0.52
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Fokus Layanan Urusan Wajib									
1.	Pendidikan									
1.1	Angka Partisipasi Sekolah :									
	- SLTP	Persen	92.29	92.50	93.00	93.50	94.00	94.50	94.50	95.00
	- SLTA	Persen	45.10	46.25	47.25	48.25	49.25	50.10	50.10	50.25
1.2	Angka Putus Sekolah :									
	- SD	Persen	0.35	0.31	0.28	0.26	0.24	0.22	0.22	0.2
	- SLTP	Persen	0.37	0.30	0.25	0.20	0.15	0.10	0.10	0.08
	- SLTA	Persen	0.60	0.58	0.56	0.54	0.52	0.50	0.50	0.48
1.3	Angka Kelulusan :									
	- SD	Persen	95.63	96.13	96.63	97.13	97.63	98.13	98.13	98.63
	- SLTP	Persen	99.67	99.72	99.77	99.82	99.87	99.92	99.92	99.97
	- SLTA	Persen	98.64	98.67	98.70	98.73	98.76	98.79	98.79	98.82

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Transisi
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	94.42	94.49	94.56	94.63	94.70	94.77	94.77	94.84
1.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	86.45	86.75	87.05	87.35	87.65	87.95	87.95	88.25
1.6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Orang	6.336	6.510	6.830	7.150	7.470	7.790	7.790	8.110
2.	Kesehatan									
2.1	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	81.08	83.75	88.75	91.25	92.50	95.00	95.00	95.00
2.2	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	66.38	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00
2.7	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan Pemberantasan Penyakit Menular :	Persen	61.00	60.67	76.67	80	83.33	86.67	86.67	86.67
2.9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	78.25	80.00	82.50	85.00	90.00	95.00	95.00	95.00
2.11	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Persen	82.00	83.75	88.75	91.25	92.50	95.00	95.00	95.00
2.12	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	67.41	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00
2.13	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita	Persen	12.00	12.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00	60.00
2.15	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.17	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.18	Kepuasan pelayanan RSUD	Persen	70.26	73.00	75.00	78.00	80.00	85.00	85.00	87.00
2.19	Kejadian Infeksi Pasca Operasi	Persen	1.50	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.30	1.25
2.20	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	Persen	65	75	80	85	95	98	98	100
3.	Pekerjaan Umum									
3.1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	Persen	52.99	51.32	57.52	60.27	65.40	66.47	66.47	66.47
3.2	Terbangunnya jalan perdesaan	Km	349.19	160.05	120.00	120.00	120.00	120.00	640.05	120.00
3.3	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	Persen	62.15	63.20	65.00	67.00	69.00	71.00	71.00	73.00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Transisi
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
3.4	Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (Embung)	Unit Ha	26 23.56	2 3.4	3 3.5	7 8.4	6 5.5	6 6.8	24 27.60	6 7.8
3.5	Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengendali banjir	Lokasi	27	4	5	5	6	6	26	6
3.6	Persentase cakupan air bersih	Persen	58.47	59.22	59.97	60.72	61.47	62.22	62.22	62.97
3.7	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	58.30	59.50	60.00	61.50	62.00	62.50	62.50	63.00
3.8	Jumlah fasilitas umum dan sosial terbangun dan tertata di kecamatan	Unit	0	2	2	2	2	2	10	2
3.9	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	Persen	97.10	97.70	98.28	98.85	99.43	100.00	100.00	100.00
4.	Perumahan									
4.1	Tertatanya rumah sehat dan layak huni	Unit	279.590	133	100	100	100	100	280.123	100
5.	Penataan Ruang									
5.1	Proporsi Ruang Terbuka Hijau terhadap luas wilayah Perkotaan Kabupaten Lebak (%)	Persen	40	40	40	40	40	40	40	40
6.	Perencanaan Pembangunan									
6.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	1	0	0	1	0	2	1
6.2	Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5	1
6.3	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	89.73	90.00	90.50	91.00	91.50	92.00	92.00	92.50
7.	Perhubungan									
7.1	Jumlah Jenis Rambu Terpasang :									
	- Rambu-rambu	Unit	178	75	80	80	80	80	395	80
	- Lampu Lalu Lintas	Unit Warning Light	4	4	4	4	4	4	20	4
	- Marka	M ²	2.352	550	500	500	500	500	2550	500
7.2	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan terbangun/terpelihara	Unit	3	1	1	1	0	0	3	0
8.	Lingkungan Hidup									
8.1	Persentase penanganan sampah	Persen	27.15	28.57	28.57	32.14	35.71	42.86	42.86	45.00
8.2	Tingkat cemaran Sungai, Udara dan air tanah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
8.3	Jumlah perusahaan yang memiliki dan mematuhi AMDAL	Perusahaan	3	5	7	10	13	16	16	17

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Transisi
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
8.4	Meningkatnya daerah tangkapan air dan sumber-sumber air yang direhabilitasi disekitar :									
	- Mata Air	Unit	41	10	10	10	10	10	50	10
	- Bendungan	Unit	12	2	2	2	2	2	10	2
	- Sempadan Sungai	Km	16	2	2	2	2	2	10	2
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil									
10.1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	77.06	78.00	80.00	82.00	84.00	86.00	86.00	88.00
10.2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	78.00	81.50	83.00	84.50	86.00	87.50	87.50	88.00
10.3	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Persen	33.00	42.00	44.00	46.00	49.00	52.00	52.00	52.00
10.4	Ketersediaan database kependudukan	Persen	92.02	93.00	93.50	95.00	96.50	98.00	98.00	99.00
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
11.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	60.92	61.96	62.96	63.96	64.96	65.96	65.96	66.96
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera									
12.1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	Persen	10.27	9.57	8.87	8.17	7.47	6.77	6.77	6.07
12.2	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	Persen	64.22	65.00	65.50	66.00	66.50	67.00	67.00	67.50
12.3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	Persen	12.19	11.69	11.19	10.69	10.19	9.69	9.69	9.19
12.4	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	Persen	30.05	41.61	52.02	62.42	73.41	85.55	85.55	97.69
12.5	Jumlah kelompok bina keluarga :									
	- Bina Keluarga Balita (BKB)	Kelompok	369	371	373	375	377	379	379	381
	- Bina Keluarga Remaja (BKR)	Kelompok	199	201	203	205	207	209	209	301
	- Bina Keluarga Lansia (BKL)	Kelompok	249	251	253	255	257	259	259	261
13.	Sosial									
13.1	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	30.10	31.80	33.00	35.00	38.33	41.08	41.08	43.00
13.2	Jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Kelompok	5	9	15	15	15	15	69	15
13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persen	29.16	32.60	37.00	41.00	46.00	51.00	51.00	55.00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Transisi
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
13.4	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	26.15	29.09	32.48	35.35	39.00	42.00	42.00	45.00
13.5	Jumlah penerima manfaat kartu sejahtera	Orang	0	3.520	4.800	6.300	8.300	9.800	32.720	10.000
14.	Ketenagakerjaan									
14.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7.52	7.37	7.10	6.80	6.50	6.30	6.30	6.00
14.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	50.680	49	16	32	32	32	161	32
14.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	13	58	144	192	224	256	874	256
14.5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	250	300	300	300	300	300	1500	300
14.6	Pengurangan angka pengangguran di perdesaan melalui Padat Karya	Desa	0	345	345	345	345	345	345	345
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									
15.1	Jumlah koperasi aktif	Unit	671	691	711	731	751	771	771	791
15.2	Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah									
	- Usaha mikro	Unit	48.892	49.140	49.388	49.636	49.884	50.132	50.132	50.380
	- Usaha kecil	Unit	785	805	825	845	865	885	885	905
	- Usaha menengah	Unit	9	11	13	15	17	19	19	21
16.	Penanaman Modal									
16.1	Jumlah Realisasi Investasi Berskala Nasional	Trilyun	8.57	1	1	1	1	1	5	1
16.2	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional :									
	- PMDN	Perusahaan	894	2	3	3	3	3	14	3
	- PMA	Perusahaan	5	1	1	1	1	1	5	1
16.3	Presentase antara realisasi investasi dan peminat investasi	Persen	30	40	50	60	70	80	80	80
17.	Kebudayaan									
17.1	Jumlah event budaya	Event/Tahun	9	10	10	10	10	10	50	10
17.2	Cakupan pemeliharaan benda cagar budaya	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100
18.	Kepemudaan dan Olahraga									
18.1	Jumlah pemuda mendapatkan pembinaan	Pemuda	N/A	140	140	140	140	140	700	140
18.2	Jumlah penyelenggaraan event olah raga	Event/Tahun	5	2	2	2	2	2	10	2
18.3	Pembinaan atlet berprestasi	Atlet	0	0	30	33	36	40	40	43

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Transisi
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Ormas	0	50	75	100	120	150	495	150
19.2	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Kegiatan	0	1	4	8	10	12	12	12
19.3	Tertanganinya kasus Penyakit Masyarakat (Pekati)	Persen	81.00	82.00	82.50	83.00	83.50	84.00	84.00	84.50
19.4	Meningkatnya peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama)	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	10	2
19.5	Terselenggaranya kegiatan keagamaan	kegiatan	2	2	4	4	5	5	20	5
19.6	Terpeliharanya sarana dan prasarana keagamaan	Unit	428	20	20	20	20	20	100	20
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
20.1	Tingkat penegakan perda	Persen	N/A	90	85	90	90	90	90	90
20.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	N/A	80	82	84	86	88	88	90
20.3	Cakupan penanggulangan korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
20.4	Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan)	Kali	28	20	15	13	12	10	10	10
20.5	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Aplikasi	4	3	1	1	1	1	7	1
20.6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Skala	3	3	3	3	3	3	3	3
20.7	opini audit BPK		WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.8	Tertatanya aset daerah	Persen	90	97	100	100	100	100	100	100
20.9	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pengembangan	Orang	403	1.193	481	958	461	754	3.847	397
20.10	Jumlah aparatur yang terbina	Orang	11.091	11.091	11.395	11.395	11.395	11.395	56.671	11.395
20.11	Rasio Kemandirian Daerah	Persen	N/A	16.69	17.99	20.29	22.59	24.89	24.89	25
20.12	Jumlah prasarana aparatur pemerintah terbangun dan tertata	Unit	24	4	3	3	3	3	40	3
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
22.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Unit	30	15	15	15	15	15	75	15
22.2	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mendapatkan pelatihan	Orang	340	100	135	140	145	150	670	150
26.	Perpustakaan									
26.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Pengunjung	N/A	10.300	11.845	13.622	15.665	18.000	18.000	19.000
26.2	Jumlah perpustakaan milik daerah	Unit	1	0	0	1	0	0	1	0

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Transisi
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
	Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1.	Pertanian									
1.1	Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok									
	- Padi	Ton	539.349.00	550.135.98	561.138.70	572.361.47	583.808.70	595.484.88	595.484.88	607.395.00
	- Palawija	Ton	31.932.00	32.570.64	33.222.05	33.886.49	34.564.22	35.255.51	35.255.51	35.961.00
	- Hortikultura	Ton	166.708.00	170.042.16	173.443.00	176.911.86	180.450.10	184.059.10	184.059.10	187.740.00
1.2	Daerah Rawan pangan	Kecamatan	9	5	4	3	2	1	1	1
1.3	Sentra Kawasan Unggulan	Lokasi	0	0	0	2	3	4	4	5
1.4	Produksi daging	Kg	7.812.487.00	7.996.386	8.204.292	8.405.539	8.847.772	9.316.869	9.316.869	10.010.044
1.5	Cakupan Bina Kelompok Tani		-	2.417	2.417	2.417	2.417	2.417	2.417	2.417
	- Pemula	Kelompok	-	1.636	1.561	1.480	1.393	1.300	1.300	1.207
	- Lanjut	Kelompok	-	702	771	842	918	996	996	1.076
	- Madya	Kelompok	-	79	85	93	103	116	116	128
	- Utama	Kelompok	-	-	-	2	3	5	5	6
2.	Kehutanan									
2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	650	50	400	400	400	400	1650	400
2.1	Meningkatnya produksi hasil tanaman perkebunan (1 % pertahun)	Ton	30.963.50	31.273.14	31.585.87	31.901.73	32.220.74	32.542.95	32.542.95	32.868.38
2.2	Meningkatnya produksi hasil hutan non kayu (5 % Pertahun)	Kg	32.274.60	33.888.33	35.582.75	37.361.88	39.229.98	41.191.48	41.191.48	43.251.05
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral									
3.1	Cakupan elektrifikasi	Persen	70.43	74.00	76.00	78.00	80.00	82.00	82.00	84.00
3.2	Terbangunnya jaringan listrik di perkampungan	Kampung	3.663	36	50	50	50	50	236	80
3.3	Pemasangan PJU	Titik	2.357	110	60	60	85	85	400	85
3.4	Pemeliharaan PJU	Titik	2.287	600	620	640	660	680	3.200	680
4.	Pariwisata									
4.1	Jumlah dan jenis obyek wisata	Lokasi	13	14	15	16	16	17	17	17
4.2	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan	3.401	53.741	54.115	54.527	54.979	55.477	272.839	6.024
5.	Kelautan dan Perikanan									
5.1	Produksi ikan budidaya	Ton	3.535.40	3.540.00	3.552.00	3.564.00	3.576.00	3.588.00	3.588.00	3.600.00
5.2	Produksi ikan tangkap	Ton	4.735.36	4.946.81	5.194.04	5.453.87	5.726.70	6.012.93	6.012.93	6.313.66
5.3	Konsumsi ikan	kg Per kapita	14.41	15.01	15.72	16.45	17.23	18.04	18.04	18.89
6.	Perdagangan									
6.1	Revitalisasi/ Pembangunan Pasar Daerah	Unit	2	2	2	1	1	2	8	1

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Transisi
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
7.	Perindustrian									
7.1	Jenis dan jumlah industri menengah :									
	- Jenis industri	Jenis	20	20	20	22	22	24	24	26
	- Jumlah industri	Unit	24	28	30	33	35	38	38	41
7.2	Jenis dan jumlah industri kecil :									
	- Jenis industri	Jenis	18	18	20	22	24	26	26	28
	- Jumlah industri	Unit	15.298	15.454	15.769	16.334	16.559	16.744	16.744	16.929
8.	Ketransmigrasi									
8.1	Jumlah transmigrasi Umum	Orang	22	40	40	40	40	40	200	40



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun yaitu 2014-2019. Dalam penerapan RPJMD ini perlu pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan, serta dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan arah pembangunan selama 5 (lima) tahun menuju Kabupaten Lebak yang Maju, Berdaya Saing dan Religius pada tahun 2019.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan *stakeholders* harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD beserta implementasi tahunnya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peran dan fungsinya serta memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi RKP setelah RPJMD berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut :

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan kebijakan umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah pada periode berikutnya;
- 2) RPJMD sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan



- masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- 3) RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

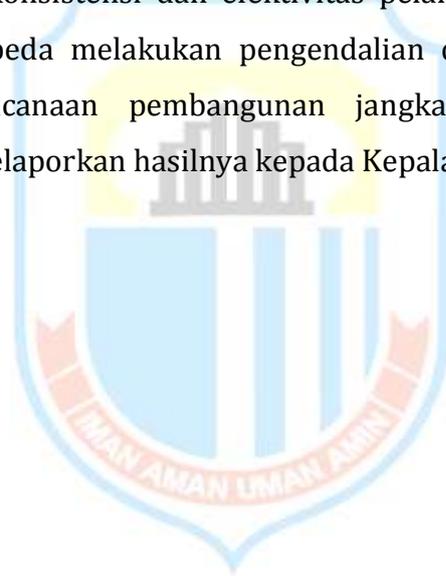
10.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjasi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi, agar tercipta tata kelola pemerintahan baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya;
- 2) Setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019;
- 3) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 untuk setiap tahunnya dituangkan melalui RKPD Kabupaten Lebak yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
- 4) Penyusunan RKPD Kabupaten Lebak dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;



- 5) RKPD Kabupaten Lebak menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dengan pendekatan pencapaian hasil (*outcomes*);
- 6) Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Lebak meruakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- 7) Renja SKPD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan menjadi kontrak kerja Kepala SKPD;
- 8) Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah.





BAB XI

PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lebak, serta terpadu dan terarah dengan pembangunan Provinsi Banten dan pembangunan nasional selama kurun waktu lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 akan menjadi pendorong pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya Saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan pada tahun 2018.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak dapat diwujudkan melalui dukungan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, kerjasama yang kuat dengan Pemerintah Provinsi, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Lebak, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lebak juga ditentukan dengan kemitraan dengan pihak swasta.

BUPATI LEBAK,

cap/ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

DEDE JAELANI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIAN EDWIN, S.H.
NIP. 19580205 198603 1013



